



SINERGI WUJUDKAN PEMBANGUNAN NEGERI BERKELANJUTAN

LAPORAN TAHUNAN 2017



PENJELASAN TEMA

Sinergi Wujudkan Pembangunan Negeri Berkelanjutan

BUMN sebagai motor penggerak pembangunan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan beragam kemajuan di bidang peningkatan ekonomi bangsa, dituntut untuk mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk negeri ini. Sebagai instansi Pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara, Kementerian BUMN selalu mengawal perusahaan BUMN dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita.

Kementerian BUMN terus mengarahkan BUMN untuk menjaga kesinambungan pembangunan dengan berpedoman pada tiga pilar, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. BUMN pun diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai koridor yang berlaku, agar tercipta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kementerian BUMN juga terus berupaya untuk menjadikan BUMN untuk lebih dekat pada masyarakat dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Melalui program “BUMN Hadir Untuk Negeri” diharapkan peran BUMN menjadi lebih memberikan efek manfaat untuk kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, BUMN selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, melalui program pemberdayaan masyarakat, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, berkualitas, mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi.

BUMN pun dituntut untuk saling menyatukan visi dan misi melalui sebuah sinergi dalam rangka memperbaiki ketimpangan serta pemeratakan kesejahteraan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, Kementerian BUMN juga membentuk Holding BUMN agar BUMN memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelaborasi kekayaan alam dan sumber daya manusia, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sinergi ini juga bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang terus berkelanjutan.

Berbekal pengalaman dan jaringan yang luas di seluruh nusantara, BUMN melalui sinergi yang berkesinambungan mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan Indonesia hebat di masa depan dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional di berbagai bidang secara berkelanjutan, merata dan berkeadilan. Dari sini akan tercipta BUMN yang benar-benar hadir untuk negeri ini, dan lebih dekat dengan masyarakat serta lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan.



KESINAMBUNGAN TEMA



'17 SINERGI WUJUDKAN PEMBANGUNAN NEGERI BERKELANJUTAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai motor penggerak pembangunan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan beragam kemajuan di bidang peningkatan ekonomi bangsa. Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Kementerian BUMN terus mengarahkan BUMN untuk menjaga kesinambungan pembangunan dengan berpedoman pada tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. BUMN dituntut untuk saling menyatukan visi dan misi melalui sebuah sinergi dalam rangka memperbaiki ketimpangan serta pemerataan kesejahteraan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia.



'16 AKSELERASI PERAN STRATEGIS, BUMN HADIR UNTUK NEGERI

Merupakan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kementerian BUMN. Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan Kementerian BUMN dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan program dan kegiatan di masa datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.



'15 AKSELERASI PERAN STRATEGIS BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi agen dalam pembangunan nasional, maka Kementerian BUMN memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN. Setiap kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN harus dapat mendukung pengelolaan BUMN, sehingga mampu menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi, sebagai agen pembangunan, BUMN harus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Bangsa Indonesia.



DAFTAR ISI

2	Penjelasan Tema
3	Kesinambungan Tema
4	Daftar Isi
6	Highlight 2017
»	Merajut Konektivitas Negeri
»	Ketahanan Energi Sebagai Pondasi Bangsa
»	Menembus Batas Akses Informasi Untuk Semua



SAMBUTAN MENTERI BUMN

12	Sambutan Menteri BUMN
----	-----------------------



PROFIL KEMENTERIAN BUMN

16	Amanat Konstitusi
17	Riwayat Singkat Kementerian BUMN
»	Sejarah Kementerian BUMN
19	Visi, Misi, Tugas dan Fungsi
»	Nawacita
»	Tugas dan Fungsi
20	Struktur Organisasi
21	Profil Pejabat Kementerian BUMN



KILAS KINERJA 2017

28	Portofolio BUMN
29	Ikhtisar Keuangan Kementerian BUMN
32	Overview Kondisi Makro
»	Sekilas tentang Kondisi Perekonomian Global Tahun 2017
»	Perekonomian Indonesia Tahun 2017
34	Ikhtisar Kinerja BUMN
37	Kontribusi Terhadap APBN
»	Setoran Dividen
»	Setoran Pajak
37	Belanja Modal/CAPEX
38	Kapitalisasi Saham



PENGUATAN TATA KELOLA KEMENTERIAN BUMN

42	Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Kementerian BUMN
44	Reformasi Birokrasi
49	Manajemen Kinerja Organisasi
52	Pengelolaan SDM
54	Peningkatan Akuntabilitas
58	Program Pengelolaan Manajemen Eksekutif BUMN
63	Program Data dan TI
72	Program Layanan Hukum
74	Keterbukaan Informasi
»	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian BUMN
»	Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
»	Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan
76	Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN
76	» Maksud dan Tujuan
76	» Penerapan Kode Etik Insan Kementerian BUMN
78	Pengawasan Internal
»	Tugas Pokok dan Fungsi
»	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
»	Jenis dan Kegiatan Pengawasan Intern
»	Hasil Audit Sepanjang Tahun 2017
»	Hasil Evaluasi Di Tahun 2017
»	Pelaksanaan Pengawasan Intern Di Tahun 2017



DAFTAR ISI



KEBIJAKAN DAN PROGRAM RESTRUKTURISASI

- 86 Holding BUMN
- 90 Program Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN



DUKUNGAN BUMN DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL

- 96 Dukungan BUMN dalam Proyek Strategis Nasional
- 97 Konektivitas Darat
 - » Penambahan Koneksi Jalan Tol Demi Peningkatan Perekonomian
- 110 Konektivitas Laut
 - » Perwujudan Poros Maritim Sebagai Salah Satu Pondasi Perekonomian Bangsa
- 118 Konektivitas Udara
 - » Peningkatan Sarana Dan Fasilitas Transportasi Udara Yang Terintegrasi
- 120 Elektrifikasi
 - » Indonesia Terang Dari Sabang Sampai Merauke
- 126 Jaringan Telekomunikasi
 - » Menembus Batas Akses Informasi Untuk Semua
- 128 Ketahanan Energi
 - » Pemenuhan Kebutuhan Energi Demi Kemandirian Bangsa
- 134 Ketahanan Pangan
 - » Nawacita Terkait Ketahanan Pangan



BUMN HADIR UNTUK NEGERI

- 142 kontribusi nyata kepada masyarakat
- 143 Mudik Bersama BUMN
- 145 Inklusi Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- 159 Pelaksanaan Fungsi PSO
- 162 BBM 1 Harga
- 165 Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan



TANTANGAN KE DEPAN

- 170 Tantangan Ke Depan
 - » Ekonomi Tahun 2018
 - » Tantangan Pembangunan Berkelanjutan
 - » Strategi Kementerian BUMN
 - » BUMN Sebagai Pencipta Nilai



HIGHLIGHT 2017



MERAJUT KONEKTIVITAS NEGERI

Guna mendukung visi Nawacita menjalin konektivitas negeri, BUMN menjadi motor pembangunan infrastruktur di darat, laut, dan udara dari Sabang sampai Merauke.

KONEKTIVITAS DARAT

Konektivitas darat merupakan salah satu pondasi penting dalam rangka menunjang produktivitas, daya saing dan kesejahteraan bangsa. Hal ini selaras dengan visi dan misi Nawacita untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol dan jalur kereta api yang tentunya berdampak terhadap akselerasi roda industri ke berbagai tempat.



Jalur Kereta

PT Kereta Api Indonesia
(Persero)
6 jalur kereta
807,3 km
110 juta penumpang per tahun
(KA bandara NYIA & Medium
speed Jakarta-Surabaya)



Jalan Tol

PT Jasa Marga (Persero) Tbk
17 ruas tol
894,27 km
468.887 kendaraan per hari

KONEKTIVITAS LAUT

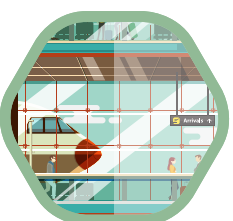
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.



Pelabuhan

- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

12 pelabuhan dan terminal
peti kemas
10,5 juta TEUs kapasitas
angkut per tahun



Bandar Udara

PT Angkasa Pura I (Persero)
9 bandara baru (proyeksi
hingga 2019)
92 juta penumpang per
tahun

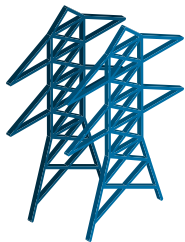


KETAHANAN ENERGI SEBAGAI PONDASI BANGSA

Ketahanan energi merupakan ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga terjangkau. Untuk mewujudkan ketahanan energi, Pemerintah melalui BUMN di bidang energi terus mengembangkan proyek-proyek ketersediaan energi baik di sektor ketenagalistrikan, bahan bakar minyak dan gas maupun energi terbarukan.

INDONESIA TERANG

Pemerintah terus membangun infrastruktur kelistrikan di seluruh pelosok Indonesia. Di wilayah timur, Pemerintah membangun gardu induk hingga Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM). Hasilnya, rasio elektrifikasi nasional terus meningkat.



Program Kenaikan Elektrifikasi

- **15.266** MW (pembangkit listrik baru)
- **255** Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (desa terpencil)
- **3** Unit Marine Vessel Power Plant (MVPP)



Rasio Elektrifikasi

- 2014 = 84,40 %
- 2015 = 88,30 %
- 2016 = 91,20 %
- 2017 = 93,10 %
- 2018 = 95,20 % (proyeksi)
- 2019 = 97,40 % (proyeksi)

PROGRES 35.000 MW

Sejak dicanangkan pada Mei 2015, program 35.000 megawatt (MW) terus memperlihatkan progres yang cukup menjanjikan. Tercatat per 31 Desember, untuk tahapan konstruksi telah mencapai 17.116 MW dari total pembangkit yang akan dibangun. Program 35.000 MW dengan proyek yang tersebar dari Sumatera hingga Papua ini, merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam menopang dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi secara nasional, seperti mendorong munculnya pusat-pusat industri baru.

BBM SATU HARGA

Program BBM Satu Harga merupakan bagian dari kontribusi Pertamina yang mendapatkan mandat dari Pemerintah untuk mendistribusikan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan BBM Satu Harga diharapkan dapat mempercepat gerak perekonomian di wilayah provinsi yang didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi. Program satu harga juga akan dikembangkan untuk produk-produk yang lainnya, seperti semen, beras, gula dan minyak goreng melalui aktivitas sinergi BUMN dengan harapan bisa diwujudkan sebelum akhir tahun 2019.

Target Produk Satu Harga



GULA



MINYAK GORENG



SEMEN



BERAS



Realisasi Program

54 Unit SPBU dengan lokasi strategis



Target hingga 2019

150 Unit SPBU yang tersebar di 148 Kota/ Kabupaten



MENEMBUS BATAS AKSES INFORMASI UNTUK SEMUA

Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senantiasa berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan bangsa terkait pemerataan akses informasi dan komunikasi. Komitmen tersebut diwujudkan dengan terus mengembangkan proyek pembangunan infrastruktur yang terkait dengan jaringan telekomunikasi melalui serat optik.

REALISASI JARINGAN OLEH TELKOM



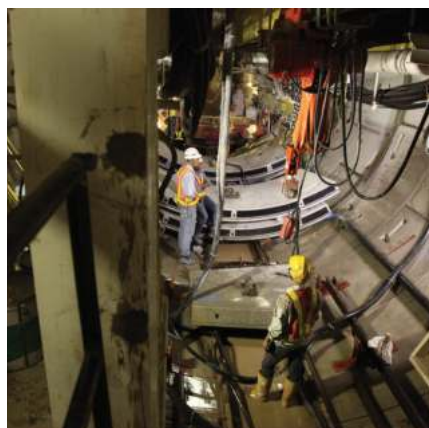
MANFAAT

- Biaya internet lebih terjangkau oleh masyarakat
- Menciptakan peluang bisnis baru bagi UKM di pelosok
- Mempercepat tumbuhnya start up dan e-commerce lokal





HIGHLIGHT 2017







SAMBUTAN MENTERI BUMN



SAMBUTAN MENTERI BUMN



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kementerian BUMN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengoptimalkan peran strategis BUMN sebagai agen pembangunan untuk menunjang program Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dibentuknya Kementerian BUMN menunjukkan upaya Pemerintah agar BUMN dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan dapat menjadi korporasi yang sesungguhnya, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, yang menginginkan BUMN dapat menjadi *Agent of Development* yang besar, lincah, dan kuat.



Total Aset

Rp7.210
Triliun



Laba

Rp186
Triliun



SAMBUTAN MENTERI BUMN

Pada tahun 2017, BUMN-BUMN di bawah koordinasi Kementerian BUMN telah berkembang secara pesat. Total asetnya mencapai Rp7.210 triliun, sementara total laba BUMN pada tahun 2017 sebesar Rp186 triliun. Dapat kami sampaikan pula bahwa BUMN yang merugi pada tahun 2017 jumlahnya menurun, yaitu hanya 14 BUMN. Hal ini merupakan pencapaian positif dan kami bersyukur bahwa segala tantangan usaha yang terjadi sepanjang tahun 2017 dapat dilalui dengan baik. Sekarang ini, BUMN terus berupaya untuk saling bahu membahu bekerja sama dalam sebuah kesatuan untuk membangun negeri.

Pencapaian tersebut salah satunya merupakan upaya dari Kementerian BUMN dalam melaksanakan program sinergi BUMN yang telah berjalan selama 3,5 tahun belakangan ini. Dengan mengusung misi "BUMN Hadir Untuk Negeri", BUMN diharapkan dapat bersama-sama menyatukan visi untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian BUMN juga terus berupaya semaksimal mungkin agar BUMN dapat memberikan pengabdian terbaik bagi Indonesia. Di antaranya melalui program pembangunan infrastruktur untuk negeri, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, sampai dengan pembentukan Holding BUMN untuk menjadikan BUMN semakin kuat dan lincah sehingga mampu bersaing secara global dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Saat ini, BUMN dituntut untuk menjadi satu kesatuan dalam bingkai "One Nation, One Vision, One Family to Excellence" yang berarti BUMN bersama-sama saling bersinergi untuk menjadi unggul dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana harapan Presiden Republik Indonesia agar tugas dan fungsi BUMN tidak hanya diarahkan untuk mendapat keuntungan, tetapi juga dapat berkontribusi dan berperan aktif untuk menghasilkan *multiplier effect* bagi pondasi perubahan pembangunan, katalisator kecepatan membangun, dan memacu agar pembangunan dapat segera diselesaikan, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berbagai pencapaian atas kinerja BUMN di tahun 2017 dan program BUMN dalam memberikan manfaat bagi masyarakat tentunya tidak dapat dicapai dan terlaksana tanpa kontribusi dan partisipasi para pemangku kepentingan. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direksi, Komisaris dan segenap karyawan BUMN yang telah bekerja keras mencapai target-target perusahaan termasuk menuntaskan penugasan Pemerintah.

Kami juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran pejabat dan pegawai Kementerian BUMN yang telah menunjukkan kinerja sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama terus berupaya untuk mewujudkan organisasi modern yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi serta mampu meningkatkan kontribusi BUMN untuk perekonomian bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Melalui laporan ini, kami berharap masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian BUMN sepanjang tahun 2017. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus bekerja sama dan membantu Kementerian BUMN dalam melaksanakan perannya sebagai institusi yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rini M. Soemarno

Menteri Badan Usaha Milik Negara





PROFIL KEMENTERIAN BUMN



AMANAT KONSTITUSI



Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, Negara melakukan penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi melalui regulasi sektoral yang merupakan kewenangan Menteri Teknis dan kepemilikan Negara pada unit-unit usaha milik Negara yang menjadi kewenangan Menteri BUMN.

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya ;
2. Mengejar keuntungan ;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak ;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi ;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.



RIWAYAT SINGKAT KEMENTERIAN BUMN



SEJARAH KEMENTERIAN BUMN

Kementerian BUMN sebagai organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, Kementerian BUMN telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan.

Pembinaan BUMN sebelum tahun 1973 dilakukan secara terpisah oleh masing-masing Departemen Teknisnya. Berbagai aturan mengenai BUMN (atau sebelumnya disebut sebagai Perusahaan Negara) antara lain Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO).



Unit Eselon II

Dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 1973, maka pembinaan terhadap Perusahaan Negara/BUMN dilimpahkan dari Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku pemegang saham dari penyertaan modal Negara dalam Perusahaan Negara/BUMN kepada Menteri bidang teknis yang terkait. Mengingat Departemen Keuangan hanya berperan dalam penatausahaan kepemilikan Negara atas saham Perusahaan Negara/BUMN tersebut, maka sejak 1973 tersebut, unit yang menanggapi Perusahaan Negara/BUMN berada pada unit setingkat Eselon II. Unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara) pada Departemen Keuangan. Selanjutnya, terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Kemudian organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan tahun 1983.

Menjadi Unit Eselon I

Pada tahun 1983 terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan, organisasi pembinaan Perusahaan Negara/BUMN yang awalnya hanya setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Negara. Periode Unit Eselon I ini terjadi dalam kurun waktu 1993-1998, dan tercatat 2 (dua) orang Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, yakni Martiono Hadianto dan Bacelius Ruru.

Menjadi Kementerian

Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, maka sejak tahun 1998, Pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi tersebut terjadi di masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VII, dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Menteri pertama yang bertanggung jawab atas pendayagunaan BUMN tersebut adalah Tanri Abeng (16 Maret 1998 – 20 Oktober 1999). Pada masa ini sempat digagas tentang BUMN *incorporated*, sebuah bangun organisasi BUMN berbentuk *super holding*.

Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), struktur organisasi Kementerian ini sempat digabungkan dengan Badan Penanaman Modal sehingga menjadi Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN dengan Menteri Laksamana Sukardi (26 Oktober 1999 – 26 April 2000). Selanjutnya Presiden Gus Dur mengganti Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN dengan mengangkat Rozy Munir (26 April 2000 – 23 Agustus 2000).

Dari tanggal 23 Agustus 2000 hingga 9 Agustus 2001, keberadaan Kementerian yang membina BUMN dihapus dan dikembalikan lagi menjadi setingkat Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Dirjen Pembinaan BUMN waktu itu dijabat oleh I Nyoman Tjager.

Namun, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia, dalam Kabinet Gotong Royong di bawah pimpinan Presiden Megawati, organisasi pembina BUMN tersebut dikembalikan, dan Laksamana Sukardi kembali menjadi Menteri Negara BUMN tanggal 9 Agustus 2001. Kala itu, kembali dipisahkan antara pembinaan BUMN dengan penanaman modal. Laksamana Sukardi menjadi Menteri hingga tanggal 20 Oktober 2004.

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden di tahun 2004, terjadi pergantian Menteri yang memimpin Kementerian Negara BUMN ini. Dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, Sugiharto dipercaya menjadi Menteri Negara BUMN (21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007), yang kemudian digantikan Sofyan A. Djalil (9 Mei 2007 – 20 Oktober 2009), Mustafa Abubakar (22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011), Dahlan Iskan (19 Oktober 2011 - 20 Oktober 2014). Selanjutnya dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Rini Mariani Soemarno dipercaya sebagai Menteri BUMN sejak 27 Oktober 2014 hingga saat ini.



VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI



“ONE NATION, ONE VISION, ONE FAMILY, TO EXCELLENCE”

Visi dan misi Kementerian BUMN selaras dengan Pemerintah dalam menjadikan Indonesia Hebat. Semua itu tertuang dalam konsep Trisakti yang menjadi basis dalam pembangunan karakter bangsa ke depan sehingga Indonesia mampu berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan

KOMITMEN TERHADAP NAWACITA

Sebagai instansi Pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara, Kementerian BUMN memiliki visi dan misi sejalan dengan visi dan misi Presiden yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi dan misi tersebut dituangkan dalam nawacita yang terdiri dari 9 (sembilan) agenda.

NAWACITA

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

TUGAS DAN FUNGSI

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah serta maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, maka terdapat 2 (dua) kata kunci yang menjadi arahan bagi Kementerian BUMN yaitu:

1. Pembina BUMN yang profesional.
2. Kontribusi BUMN yang optimal kepada ekonomi nasional.

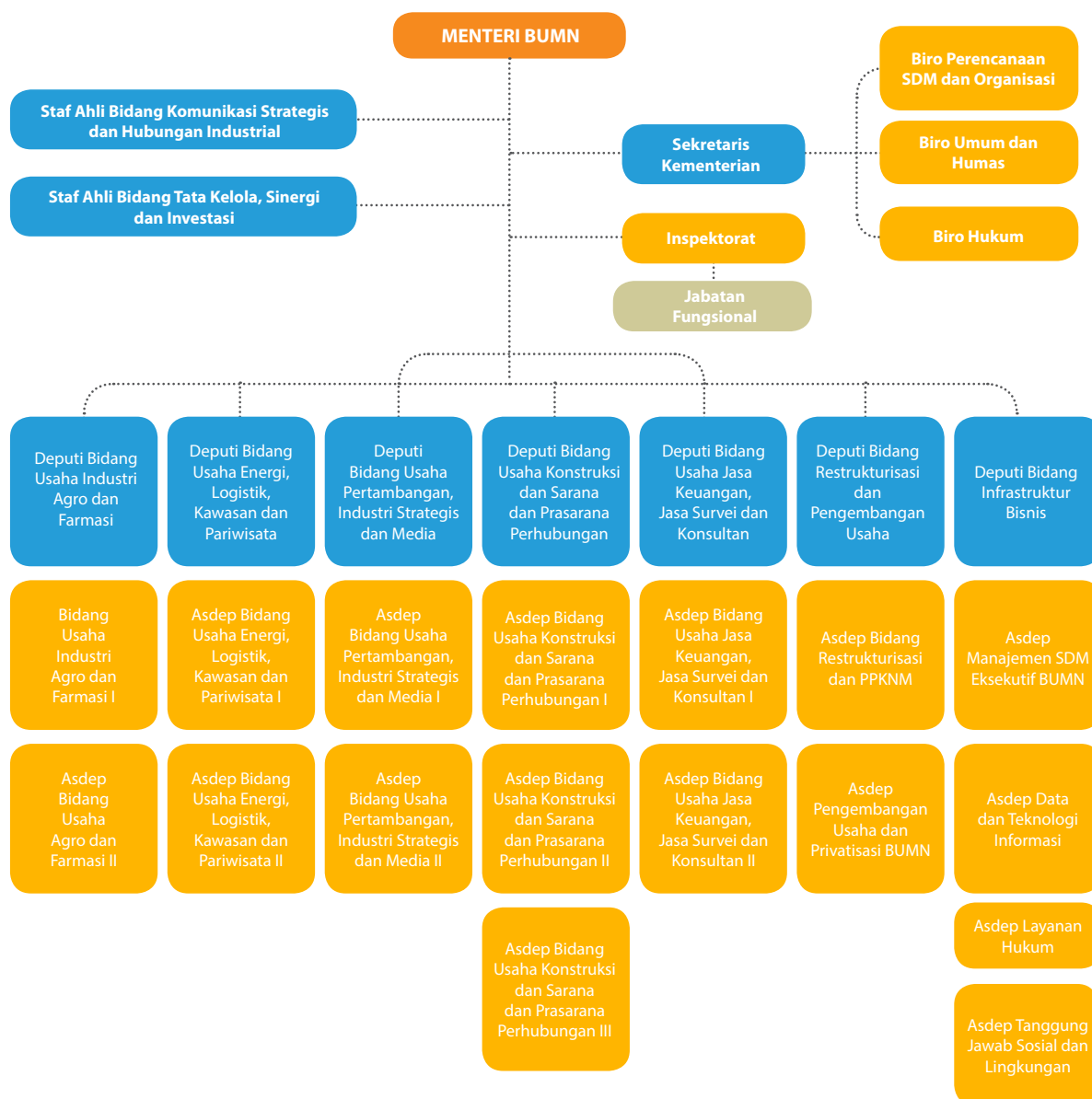




STRUKTUR ORGANISASI

Dengan telah ditetapkan struktur organisasi Kementerian BUMN dalam Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, struktur organisasi Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kementerian BUMN





PROFIL PEJABAT KEMENTERIAN BUMN



RINI MARIANI SOEMARNO

Menteri BUMN

Rini Mariani Soemarno lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958. Beliau diangkat oleh Presiden Joko Widodo dan menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Kerja sejak 26 Oktober 2014 untuk masa bakti 2014-2019. Sarjana Ekonomi lulusan Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat, tahun 1981 ini, termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong, dari tahun 2001 hingga tahun 2004.



PENDIDIKAN

1981 : Sarjana Ekonomi di Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat



KARIER

- Sejak 2014: Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Kerja
- Sejak 2008: Komisaris PT Karyamegah Adijaya (Aora TV Satelit)
- 2001-2005: Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia
- 2001-2004: Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong
- 2000-2001: Presiden Direktur PT Semesta Citra Motorindo
- 1998-2000: Presiden Direktur PT Astra International Tbk
- 1990-1998: Direktur Keuangan PT Astra International Tbk
- 2000: Presiden Komisaris PT Semesta Citra Motorindo
- 2000: Komisaris PT Agrakom
- 1999: Presiden Komisaris PT Astra Agro Lestari
- 1998: Staf Ahli Departemen Keuangan Republik Indonesia
- 1998: Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional
- 1995: Komisaris PT Astra Agro Lestari
- 1995: Komisaris Bursa Efek Jakarta
- 1993: Wakil Presiden Komisaris PT United Tractors
- 1990: Komisaris Bank Universal
- 1989: *General Manager Finance Division* PT Astra International



PENGHARGAAN

Pemimpin Puncak Terpuji 1995 dari Majalah Swa Sembada (1995)



IMAM APRIYANTO PUTRO
Sekretaris Kementerian BUMN

Lahir di Cilacap, 22 Maret 1964. Menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 18 Maret 2013 hingga sekarang. Ia memperoleh gelar *Magister Management* dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII, pada tahun 2000. Sebelumnya, pada 1 Oktober 2010 sampai dengan 6 Maret 2010, ia pernah menjabat sebagai Asdep Riset dan Informasi di Kementerian BUMN. Kemudian pada 7 Maret 2012 sampai dengan 8 Januari 2013 menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi. Lalu pada 9 Januari 2013 sampai dengan 17 Maret 2013 menjabat sebagai Plh. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik. Ia juga memiliki banyak pengalaman di luar jabatan struktural di sejumlah BUMN.



WAHYU KUNCORO
Deputi Bidang Usaha Industri
Agro dan Farmasi

Lahir di Surakarta pada tanggal 31 Oktober 1969. Menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 9 Februari 2016 hingga sekarang. Ia memperoleh gelar Magister Management dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Kepala Subbidang Perencanaan Usaha Produksi Pertanian (2002-2006), Kepala Bidang Usaha Perkebunan II.B (2006-2010), Bidang Usaha Industri Primer IIIa (2010-2012), Kepala Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia (2012-2013), Asdep Bidang Usaha Jasa III (2013-2014), Asdep Usaha Perbankan dan Asuransi (2014-2015), Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis sejak 27 Juli 2015 sampai dengan 8 Februari 2016.



PROFIL PEJABAT KEMENTERIAN BUMN



EDWIN HIDAYAT ABDULLAH

**Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik,
Kawasan dan Pariwisata**

Lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 1971. Menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sejak 27 Juli 2015 hingga sekarang. Lulusan S1 bidang Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995, dan S2 Master of Public Management Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura dan Amerika Serikat ini, juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ia memiliki sederet riwayat pelatihan di antaranya, Chartered Financial Analysis Level I (CFA), Basic LNG Operations (Beijing), Negotiating Leadership (NUS Harvard University), Crisis Management (NUS-Harvard University), Privatization (NUS-Harvard University), dan E-Governance (NUS-Harvard University).



FAJAR HARRY SAMPURNO

**Deputi Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis dan Media**

Lahir di Blitar pada tanggal 18 April 1966. Menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 27 Juli 2015 hingga sekarang. Ia meraih gelar dari Universitas Brawijaya, Master of Business Administration dari Monash University, dan gelar Doctor of Philosophy dari University of Iowa, USA. Ia memiliki banyak pengalaman di sejumlah perusahaan di antaranya sebagai Vice President BPIS (2000-2001), Komisaris PT Dahana (2000-2001), Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha PT Dahana (2002-2011), Direktur Utama PT IKI (2012), dan terakhir menjabat sebagai Direktur Utama PT Dahana sejak tahun 2012 hingga pertengahan 2015.



AHMAD BAMBANG

**Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan
Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Lahir di Kediri, 5 Juli 1962. Menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 3 November 2017 hingga sekarang. Ia menamatkan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan mengambil jurusan Teknik Informatika dan berhasil meraih gelar sarjananya pada 1986. Pada tahun 1999, ia meraih gelar Magister dengan jurusan Manajemen Industri, di Universitas Indonesia (UI). Ia sempat meniti karier di salah satu perusahaan BUMN, yakni PT Pertamina (Persero) sejak tahun 1988 hingga Februari 2017, dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama Pertamina. Sebelum diangkat menjadi Deputi, ia sempat menjabat sebagai Staff Khusus III Menteri BUMN (Bidang Marketing, Branding, Hilirisasi, Digitalisasi dan Restrukturisasi) sejak April 2017 hingga 2 November 2017.



GATOT TRIHARGO

**Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan,
Jasa Survei dan Konsultan**

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 1960. Menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 10 Juni 2015 hingga sekarang. Ia memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1989 dan gelar Master di bidang Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan (MAFIS) dari Cleveland State University, Ohio, Amerika Serikat, pada tahun 1993 dan gelar Doktor di bidang Strategic Management dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2016. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Kepala Bidang Sistem Informasi sejak 14 Februari 2006 sampai dengan 20 Mei 2008, Kepala Bidang Data sejak 21 Mei 2008 sampai dengan 30 September 2010, Asdep Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II sejak 1 Oktober 2010 sampai 17 Maret 2013, Deputi Bidang Usaha Jasa sejak 18 Maret 2013 sampai dengan 4 Mei 2014, dan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain sejak 5 Mei 2014 sampai dengan 9 Juni 2015.



PROFIL PEJABAT KEMENTERIAN BUMN



ALOYSIUS KIIK RO

**Deputi Bidang Restrukturisasi dan
Pengembangan Usaha**

Lahir di Kupang, 29 April 1961. Menjabat sebagai Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 27 Juli 2017 hingga sekarang. Ia meraih gelar MBA Finance dari University of Illinois Urbana Champaign, IL dan Ph.D-Finance dari University of Kentucky Lexington, KY. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Kementerian BUMN (2003-2005), Direktur Bisnis PT Danareksa (Persero) sejak 14 Juli 2005 sampai dengan 31 Maret 2015, dan Direktur Keuangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sejak 1 April 2015 sampai dengan 26 Juli 2015.



HAMBRA

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis

Lahir di Ketapang, Maluku, tanggal 10 Oktober 1968. Menjabat sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 9 Februari 2016 hingga sekarang. Ia memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu Hukum dari Universitas Pattimura, Ambon, dan meraih gelar S2 Magister Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat (2002-2006), Kepala Bagian Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan (2006-2010), Kepala Bagian Perundang-undangan (2010-2012), Kepala Biro Hukum sejak 3 September 2012 sampai dengan 29 Januari 2014, Plt. Inspektur sejak 30 Januari 2014 sampai dengan 5 Mei 2014, Kepala Biro Hukum sejak 6 Mei 2014 sampai dengan 26 Juli 2015, serta Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial sejak 27 Juli 2015 sampai dengan 8 Februari 2016.





KILAS KINERJA 2017



PORTOFOLIO BUMN

Kementerian BUMN sebagai institusi yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN, terus berupaya untuk memberikan arahan pada BUMN agar tidak hanya sekedar meningkatkan keuntungan, tetapi juga diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam menghasilkan *multiplier effect* bagi pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

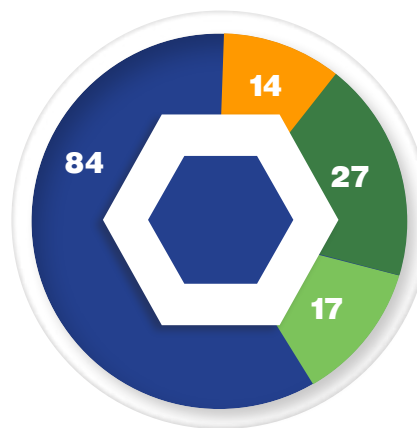
Peran Kementerian BUMN sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum, dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional, regional maupun internasional, serta tercapainya BUMN sebagai *agent of development* yang besar, kuat, dan lincah.

Kementerian BUMN terus berupaya mengerahkan segenap kemampuan dan seluruh sumber daya BUMN untuk menciptakan dan menguatkan kedaulatan untuk mewujudkan penguatan ekonomi nasional, melalui cara pandang “membangun Indonesia” (Indonesia Centris). Sebagai entitas ekonomi yang dimiliki oleh Negara, BUMN sebagaimana telah diamanatkan Presiden Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab besar agar keberadaannya bisa bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. BUMN harus selalu hadir di tengah masyarakat, yang tertuang dalam bentuk pelayanan publik dan realisasi pelaksanaan program-program serta kegiatan prioritas nasional, baik berupa pembangunan secara fisik maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program kemitraan atau bantuan langsung baik tunai maupun non-tunai.

Selain itu, Kementerian BUMN juga terus berupaya agar BUMN mampu menjaga keberlangsungan usaha (*sustainability*) agar dapat menjadi kebanggaan dan mampu menciptakan peningkatan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu, Kementerian BUMN selalu mengarahkan agar BUMN mengedepankan integritas dan profesionalisme serta memegang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga kegiatan usaha yang dijalankan dapat menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan (*value of the firm*) yang pada akhirnya meningkatkan nilai investasi permanen Pemerintah.

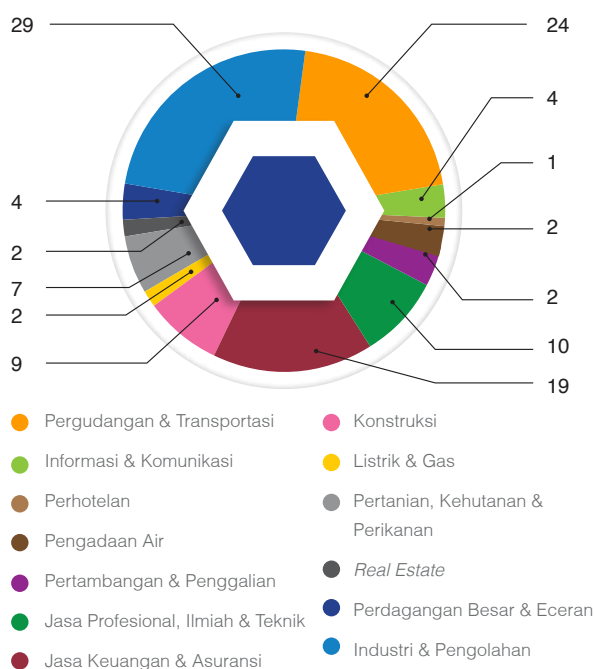
Saat ini, Kementerian BUMN membina 115 BUMN dan 27 perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Jumlah BUMN Berdasarkan Jenis Perusahaan



- Listed/Public SOEs
- Non Listed SOEs
- Special Purpose Entity (Perum)
- Enterprises with Ministry Government Ownership

Jumlah BUMN pada Masing-masing Sektor





IKHTISAR KEUANGAN KEMENTERIAN BUMN



Realisasi Anggaran Kementerian BUMN

Realisasi Anggaran Kementerian BUMN 2016-2017

(dalam Rupiah penuh)	2017			2016		
	Anggaran	Realisasi	Pencapaian (%)	Anggaran	Realisasi	Pencapaian (%)
Pendapatan Negara Dan Hibah						
Penerimaan Negara	1.313.004.000	4.443.248.725	338,40%	1.313.004.000	3.221.841.588	245,38%
Penerimaan Perpajakan	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.313.004.000	4.443.248.725	338,40%	1.313.004.000	3.221.841.588	245,38%
Hibah	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Jumlah Pendapatan dan Hibah	1.313.004.000	4.443.248.725	338,40%	1.313.004.000	3.221.841.588	245,38%
Belanja Negara						
Belanja Pegawai	44.600.612.000	43.581.581.959	97,72%	43.269.962.000	40.033.832.999	92,52%
Belanja Barang	134.984.780.000	126.674.779.294	93,84%	173.078.040.000	119.288.813.417	68,92%
Belanja Modal	19.279.680.000	18.769.764.661	97,36%	33.574.665.000	18.624.019.584	55,47%
Jumlah Belanja	198.865.072.000	189.026.125.914	95,05%	249.922.667.000	177.946.666.000	71,20%

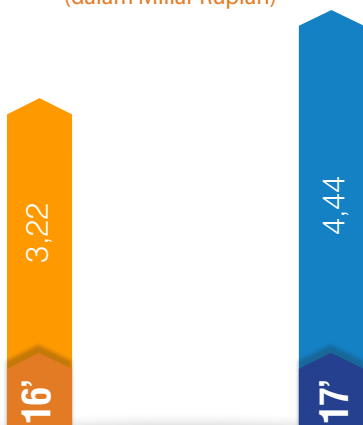
Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.443.248.725 atau mencapai 338,40% dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp1.313.004.000.



Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 37,91% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.221.841.588 karena beberapa *tenant* sudah melakukan pembayaran sekaligus atas tagihan sewa ruangan dengan perjanjian sewa jangka panjang dengan jangka waktu perjanjian antara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun.

Realisasi Pendapatan 2016-2017
(dalam Miliar Rupiah)



Belanja

Realisasi Belanja Negara untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp189.026.125.914 atau mencapai 95,05% dari alokasi anggaran sebesar Rp198.865.072.000.

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp43.581.581.959 dan Rp40.033.832.999 atau terjadi kenaikan sebesar 8,86%. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan tunjangan kinerja pegawai Kementerian BUMN pada periode Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 119 Tahun 2017.

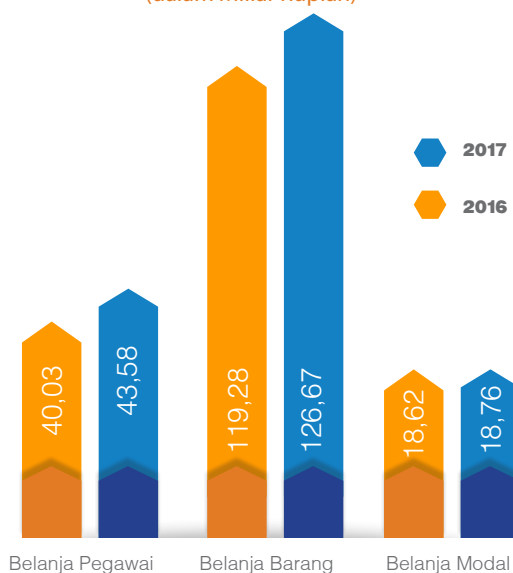
2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp126.674.779.294 dan Rp119.288.813.417. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,19% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan aktivitas kegiatan di lingkup Kementerian BUMN.

3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp18.769.764.661 dan Rp18.624.019.584.

Realisasi Belanja Tahun 2016-2017
(dalam Miliar Rupiah)



Posisi Keuangan Kementerian BUMN

Posisi Keuangan Kementerian BUMN 2016-2017

(dalam Rupiah penuh)	2017 (Rp)	2016 (Rp)	yoy 2016-2017 (%)	
Aset	481.563.443.834	476.611.753.763	1,04%	↑
Liabilitas	3.164.039.883	2.933.661.979	7,85%	↑
Ekuitas	478.399.403.951	476.611.753.763	0,99%	↑

Aset

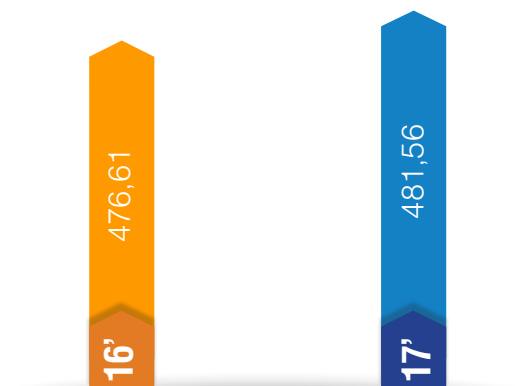
Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp481.563.443.834 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp5.641.029.748, Aset Tetap (neto) sebesar Rp469.348.050.378, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya (neto) masing-masing sebesar Rp33.794.588 dan Rp6.540.569.120.



IKHTISAR KEUANGAN KEMENTERIAN BUMN

Nilai Aset per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,04% jika dibandingkan dengan Nilai Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp476.611.753.763.

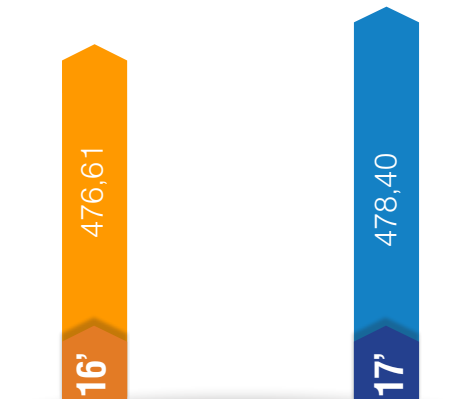
Aset 2016-2017
(dalam Miliar Rupiah)



Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp478.399.403.951. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,99% jika dibandingkan dengan Nilai Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp476.611.753.763.

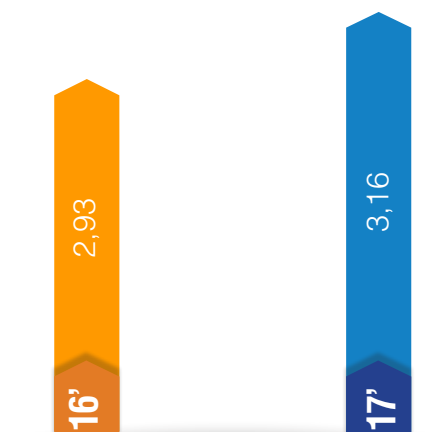
Ekuitas 2016-2017
(dalam Miliar Rupiah)



Liabilitas

Liabilitas atau Nilai Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.164.039.883 yang semuanya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Kewajiban per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 7,85% jika dibandingkan dengan Nilai Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.933.661.979.

Liabilitas 2016-2017
(dalam Miliar Rupiah)





OVERVIEW KONDISI MAKRO



SEKILAS TENTANG KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL TAHUN 2017

Statistik *International Monetary Fund* (IMF) menunjukkan bahwa perekonomian global tumbuh 3,7% pada tahun 2017, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang mengalami peningkatan 3,1%. Kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) yang cenderung membaik memberikan indikasi positif terhadap situasi ekonomi global.

Pengetatan kebijakan moneter dari AS berimbas terhadap situasi perekonomian AS. The Federal Reserve menaikkan tingkat suku bunga *federal funds rate* sebesar 25 poin menjadi 1,25%-1,50% pada Desember 2017. Hal ini dilakukan seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi dan antisipasi kebijakan fiskal ekspansif Presiden Donald Trump. Secara spesifik, *The Federal Reserve* memandang momentum perekonomian Amerika Serikat cenderung moderat di tengah berlanjutnya penyehatan kondisi ketenagakerjaan yang pada akhirnya akan mendorong inflasi menuju target sebesar 2%.



OVERVIEW KONDISI MAKRO

Tingkat pengangguran terbuka di AS terus berkurang dari puncaknya 10% pada Oktober 2009 menjadi 4,1% pada Desember 2017. Angka tersebut sesuai dengan tingkat optimal berdasarkan konsep *Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment* (NAIRU). Hal ini kemudian berdampak terhadap inflasi dan suku bunga kebijakan moneter yang akan cenderung menegat. Sejalan dengan perkembangan tersebut dan pasca stabilisasi harga minyak, inflasi *core* PCE telah bergerak meningkat hingga mencapai 1,5% yoy pada Desember 2017 dari tingkat terendah 0,97% pada Desember 2010.

Di samping itu, faktor harga minyak dunia yang cukup stabil turut berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian global. Sepanjang tahun 2017, harga rata-rata minyak mentah *Brent* adalah USD54/barel, angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berada di angka USD44/barel. Angka di tahun 2017 tersebut merupakan titik tertinggi sejak Desember 2014. Salah satu pemicunya adalah komitmen Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) untuk memperpanjang perjanjian pengurangan pasokan minyak mentah dan adanya gangguan pada sistem pipa *North Sea's Forties*.

PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2017

Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 5,07% yoy, lebih tinggi dari 5,03% di tahun 2016. Pendorong utama kenaikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2017 adalah investasi, net ekspor, dan belanja pemerintah (secara berurutan). Investasi mencatatkan akselerasi 6,2% yoy di 2017 dari 4,5% yoy di tahun 2016, yang didorong oleh komponen bangunan serta mesin dan peralatan. Dari sisi eksternal, net ekspor meningkat 21,2% yoy di 2017 dari 10% di tahun 2016, didukung oleh pemulihan ekonomi global.

Sementara itu, belanja Pemerintah tumbuh 2,14% yoy di tahun 2017 dari -0,14% di 2016. Variabel yang cenderung stagnan adalah konsumsi rumah tangga yang mencatatkan pertumbuhan 4,95% yoy dari 5,01% di 2016. Dari segi industri, sektor konstruksi, perdagangan dan pergudangan, dan pertanian mencatatkan peningkatan, sementara sektor manufaktur tumbuh stagnan.

Pemerintah mencatat penerimaan dan pengeluaran masing-masing sebesar Rp1.655,8 triliun (6,4% yoy) dan Rp 2.001,6 triliun (7,4% yoy) pada tahun 2017. Kinerja penerimaan tercatat lebih baik dibandingkan 2016 yakni 3,6% yoy. Secara spesifik,

penerimaan pajak meningkat sebesar 4,3% yoy (vs 3,6% yoy di tahun 2016) dengan *shortfall* sebesar Rp133 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan *shortfall* di tahun 2016 yang sebesar Rp254 triliun. Dengan mengeluarkan penerimaan *tax amnesty*, penerimaan pajak sebenarnya meningkat sebesar 11,3% di tahun 2017.

Selain itu, penerimaan masih didominasi oleh sumber daya alam, terlihat dari Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas yang tumbuh 39,3% yoy serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam yang meningkat sebesar 71,0% yoy. Dari segi pengeluaran, komponen produktif seperti belanja modal telah menunjukkan peningkatan sebesar 22,9% yoy dari 21,3% yoy di 2016. Secara keseluruhan, defisit fiskal di tahun 2017 adalah Rp345,8 triliun, setara dengan -2,57% PDB. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan 2016 sebesar Rp308,6 triliun atau -2,49% PDB.

Dari sisi inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 3,61% yoy (YE16: 3,02%). Namun perlu diingat bahwa terdapat kenaikan tarif listrik untuk 18,9 juta pelanggan 900 VA sebesar 130,7% (dari Rp586/kWh menjadi Rp1.352/kWh) di tahun 2017 yang berkontribusi hampir 1 persentase poin (ppt) terhadap inflasi tahun 2017. Sehingga apabila dihilangkan efek tersebut, inflasi sebenarnya bisa berada di bawah 3%. Di sisi lain, inflasi makanan sangat stabil dengan hanya memberikan kontribusi sebesar 0,23ppt terhadap inflasi 2017 dibandingkan dengan 1,18 ppt di tahun 2016. Namun, inflasi inti masih menunjukkan tren yang menurun ke 2,95% yoy di akhir tahun 2017, mengindikasikan bahwa permintaan domestik masih cenderung belum kuat.

Kurs rupiah cenderung stabil di akhir tahun 2017, sedikit terdepresiasi 0,7% ke Rp13,588/USD. Pelemahan pada Rupiah sebagian besar disebabkan oleh faktor eksternal seperti adanya kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat di penghujung tahun 2017, serta normalisasi Bank Sentral AS sehingga menyebabkan *outflow* dari dalam negeri. Secara keseluruhan, arus modal asing yang masuk ke Indonesia telah mencapai USD9,1 miliar sampai akhir tahun 2017. Dana tersebut sebagian besar masuk ke instrumen Surat Berharga Negara sebesar USD12,1 miliar, sementara *net outflow* USD3,0 miliar tercatat di pasar saham.

Fluktuasi nilai tukar rupiah didominasi oleh fluktuasi pasar finansial dan arus modal portofolio. Sejumlah pemicunya antara lain pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat yang lebih agresif serta ketidakpastian arah kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump.



IKHTISAR KINERJA BUMN

Kinerja Keuangan BUMN

Ikhtisar Kinerja Keuangan BUMN (2013-2017)
(dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2017	2016	2015	2014	2013	yoy 2016-2017	
						(%)	
Aset	7.210	6.473	5.760	4.578	4.216	11,39%	↑
Liabilitas	4.831	4.216	3.770	3.488	3.252	14,59%	↑
Ekuitas	2.380	2.256	1.991	1.090	963	5,50%	↑
Pendapatan	2.027	1.710	1.699	1.955	1.750	18,54%	↑
Laba Tahun Berjalan	186	176	150	148	117	5,68%	↑
Belanja Modal/CAPEX	320	266	221	226	200	20,30%	↑
Setoran Pajak	211	163	176	178	162	29,45%	↑
Setoran Dividen	43	36	37	40	33	19,44%	↑

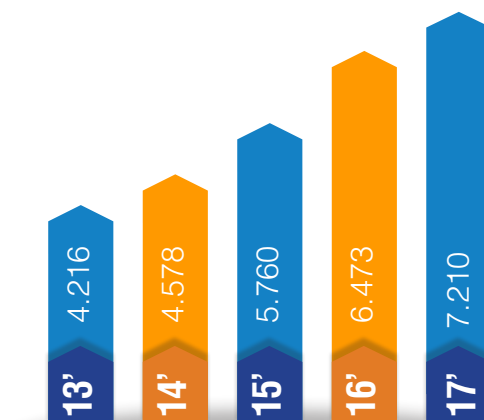
Aset

Total aset dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp7.210 triliun, meningkat 11,39% dari posisi akhir tahun 2016 yang sebesar Rp6.473 triliun. Total aset BUMN dalam kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2017 tercatat meningkat cukup signifikan yakni sebesar 57%.

Kontribusi peningkatan total aset BUMN di tahun 2017, terbesar disumbangkan oleh BUMN dari sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Penyediaan Migas dan Listrik dan sektor Konstruksi. Sementara itu, BUMN penyumbang kenaikan aset terbesar di tahun 2017 adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dari peningkatan aset BUMN dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2017, bisa dikatakan bahwa Kementerian BUMN telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan amanat Pemerintah dalam membina dan mengelola BUMN hingga memiliki nilai yang cukup penting bagi negara dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo, yang berharap BUMN bisa mewujudkan fungsinya sebagai *agent of development* yang besar, kuat, dan lincah.

Aset BUMN 2013-2017
(dalam Triliun Rupiah)



Liabilitas

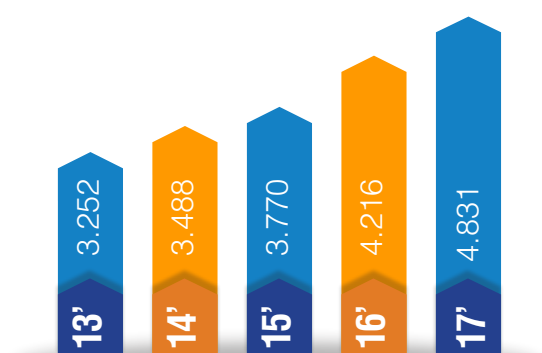
Total liabilitas dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp4.831 triliun, meningkat 14,59% dari posisi akhir tahun 2016 yang sebesar Rp4.216 triliun. Total liabilitas BUMN dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 meningkat sebesar 38%.

Peningkatan liabilitas BUMN di tahun 2017 ini, lebih disebabkan oleh meningkatnya dana pihak ketiga (dana masyarakat) di perbankan. Selain itu terdapat beberapa terobosan pendanaan beberapa proyek infrastruktur dengan menerbitkan obligasi.

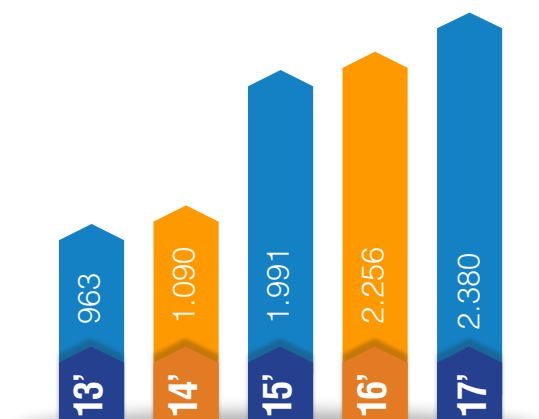


IKHTISAR KINERJA BUMN

Liabilitas BUMN 2013-2017
(dalam Triliun Rupiah)



Ekuitas BUMN 2013-2017
(dalam Triliun Rupiah)



Ekuitas

Nilai total ekuitas dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp2.380 triliun, meningkat 5,50% dari posisi akhir tahun 2016 yang sebesar Rp2.256 triliun. Total ekuitas BUMN dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 juga meningkat cukup signifikan yakni sebesar 119%.

Kontribusi terbesar peningkatan ekuitas di tahun 2017, juga disumbangkan oleh BUMN sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Industri Pengolahan dan sektor Penyediaan Migas dan Listrik. Sementara itu BUMN penyumbang peningkatan terbesar di tahun 2017 adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

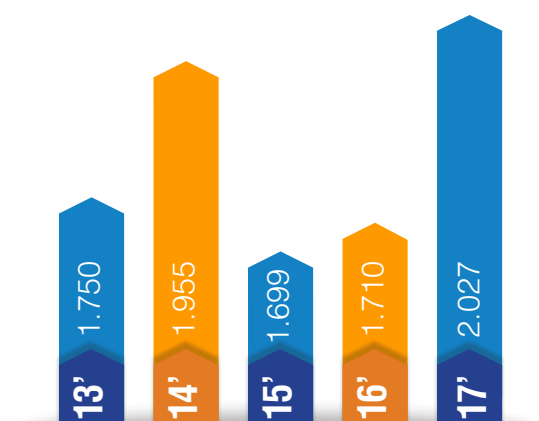
Ekuitas BUMN ini juga dapat menjadi ukuran perkembangan nilai kekayaan Pemerintah yang diinvestasikan dalam bentuk kepemilikan perusahaan (BUMN). Terlebih dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2017, ekuitas BUMN tercatat naik cukup tinggi.

Pendapatan

Jumlah pendapatan dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp2.027 triliun, meningkat 18,54% dari posisi akhir tahun 2016 yang sebesar Rp1.710 triliun. Total pendapatan BUMN dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 tercatat naik sebesar 4%.

Kontribusi terbesar peningkatan pendapatan di tahun 2017, disumbangkan oleh BUMN sektor Energi, Konstruksi, dan Perbankan. Sementara itu BUMN penyumbang peningkatan terbesar adalah PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Jasa Marga (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pendapatan BUMN 2013-2017
(dalam Triliun Rupiah)



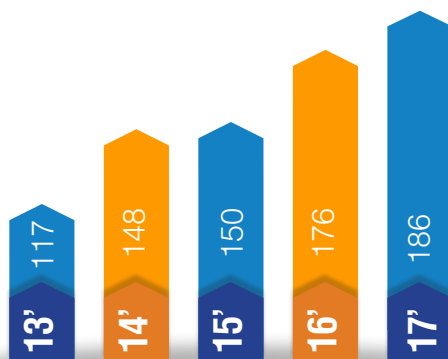


Laba Tahun Berjalan

Total Laba dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp186 triliun, meningkat 5,68% dari posisi akhir tahun 2016 sebesar Rp176 triliun. Total laba BUMN dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 tercatat naik sebesar 26%.

Kontribusi peningkatan laba di tahun 2017, terbesar berasal dari sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Konstruksi, dan sektor Informasi dan Komunikasi. Sedangkan BUMN penyumbang kenaikan laba di tahun 2017, terbesar adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Laba BUMN 2013-2017
(dalam Triliun Rupiah)



BUMN yang Masuk Global Fortune 500

BUMN yang masuk ke dalam daftar tersebut adalah PT Pertamina (Persero), yang berada di peringkat 289 berdasarkan peringkat Global Fortune 500.

Sebelumnya, Kementerian BUMN menargetkan sebanyak 3 (tiga) BUMN yang masuk Global Fortune 500 tahun 2017, namun dikarenakan program pembentukan Holding BUMN Perbankan dan Jasa Keuangan serta Holding BUMN Kepelabuhanan, yang masih dalam proses, menjadikan target ini tidak tercapai. Meski demikian, Kementerian BUMN tetap menjaga konsistensinya dengan mampu memasukan satu nama perusahaan yang mampu terdaftar ke dalam Fortune Globe 500. Upaya yang perlu dilakukan ke depannya ialah mendorong BUMN - BUMN yang telah ditargetkan untuk terus meningkatkan kinerja.





KONTRIBUSI TERHADAP APBN

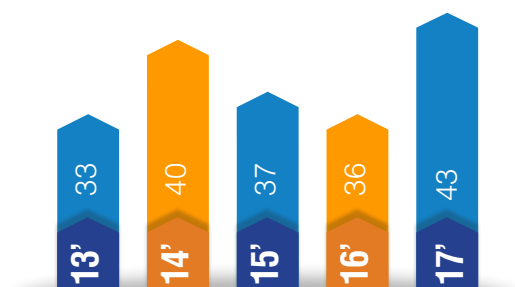


SETORAN DIVIDEN

Pada tahun 2017, jumlah dividen BUMN yang berhasil disetorkan mencapai Rp43 triliun, meningkat 19,44% dari jumlah dividen yang disetorkan BUMN pada tahun 2016 yang mencapai Rp36 triliun.

Sumbangan dividen paling besar untuk tahun 2017 juga berasal dari BUMN sektor Penyediaan Migas & Listrik (Energi), sektor Informasi & Komunikasi dan sektor Jasa Keuangan & Asuransi. Kontributor peningkatan dividen terbesar untuk tahun 2017 adalah dividen yang disetorkan oleh PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Setoran Dividen BUMN 2013-2017
(dalam Triliun Rupiah)

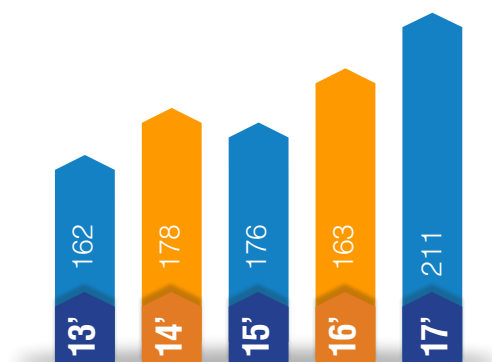


SETORAN PAJAK

Pada tahun 2017, jumlah setoran pajak BUMN mencapai Rp211 triliun, meningkat 29,45% dari pajak yang disetorkan BUMN pada tahun 2016 yang mencapai Rp163 triliun.

Sumbangan pajak terbesar untuk tahun 2017 berasal dari BUMN sektor Penyediaan Migas & Listrik (Energi), yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero) serta sektor Informasi & Komunikasi, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Setoran Pajak BUMN 2013-2017
(dalam Triliun Rupiah)



BELANJA MODAL/CAPEX



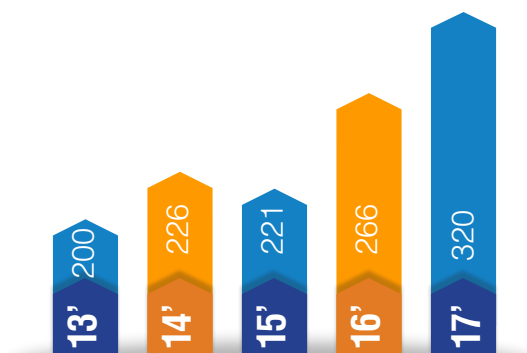
Pada tahun 2017, jumlah belanja modal atau *capital expenditure* (Capex) BUMN mencapai Rp320 triliun, meningkat 9,22% dari pencapaian belanja modal BUMN tahun 2016 yang mencapai Rp266 triliun. Dari jumlah belanja modal di tahun 2017, Capex sektor Infrastruktur tercatat paling tinggi yakni sebesar Rp268 triliun di banding Capex Non – Infrastruktur yang sebesar Rp52 triliun. Sementara total Capex BUMN dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tercatat naik sebesar 57%.

Peningkatan jumlah Capex di tahun 2017 paling besar disumbangkan oleh BUMN sektor Konstruksi, sektor listrik dan sektor Transportasi dan Pergudangan. Sementara itu BUMN penyumbang peningkatan Capex di tahun 2017 terbesar adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Namun, berdasarkan hal tersebut pada tahun 2017 ini target Jumlah Capex BUMN sebesar Rp468 triliun belum tercapai dikarenakan banyaknya proyek BUMN yang mengalami keterlambatan pekerjaan sehingga dialihkan ke tahun 2018.

Upaya yang perlu dilakukan ialah melakukan perencanaan dan pembuatan *timeline* Capex dengan lebih hati-hati sehingga pekerjaan dapat dilakukan tepat waktu.

Belanja Modal/CAPEX BUMN 2013-2017
(dalam Triliun Rupiah)





KAPITALISASI SAHAM

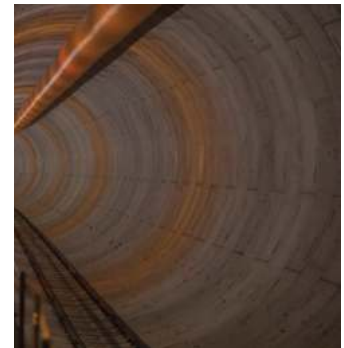
BUMN juga telah berkontribusi besar di bidang pasar modal dengan kontribusi kapitalisasi pasar mencapai 25,99% dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Prestasi ini tentu sangat membanggakan mengingat jumlah BUMN yang mencatatkan sahamnya di BEI hanya sekitar 4% yaitu 17 (tujuh belas) perusahaan dan 12 (dua belas) anak perusahaan BUMN dari total Emiten di BEI yang mencapai 538 perusahaan.

Selain itu, terdapat 4 (empat) emiten BUMN yang masuk dalam 10 (sepuluh) emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.





KAPITALISASI SAHAM







PENGUATAN TATA KELOLA KEMENTERIAN BUMN



TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BUMN



Kementerian BUMN selalu berupaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hal ini bertujuan agar pengelolaan BUMN dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Kedudukan, tugas, fungsi, peran, dan karakteristik menjadikan organisasi Kementerian BUMN sangat dinamis dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik, baik sebagai regulator maupun sebagai pemberi layanan.

Untuk itu, dibutuhkan organisasi dan sistem ketatalaksanaan yang secara cepat mampu mengantisipasi perubahan lingkungan agar dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, profesional, produktif, transformatif, serta sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan penataan organisasi, dan Kementerian BUMN selalu berupaya untuk terus melakukan penyempurnaan kebijakan, proses, dan prosedur yang dijalankan, baik dalam kegiatan pembinaan BUMN maupun dalam kegiatan pengelolaan internal di Kementerian BUMN, sehingga diharapkan tujuan pembinaan BUMN dapat berjalan dengan lebih baik, dengan tetap mengedepankan tata kelola pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu landasan dasar dari berhasil atau tidaknya tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh Kementerian, dapat diukur dari akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Di mana berdasarkan atas Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Alat ukur yang dipergunakan sebagai implementasi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BUMN

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang terdiri laporan kinerja interim (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) telah merumuskan Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa ada 5 (lima) komponen yaitu Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Kinerja.

Kerangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Pada tahun 2017, guna meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui unit-unit kerja telah melakukan pengembangan dan beberapa perbaikan.

- Pengembangan Manajemen Kinerja Organisasi.
Pada dasarnya Manajemen Kinerja Organisasi telah dirumuskan dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri BUMN pada tahun 2016. Pada tahun 2017, telah dilakukan beberapa pengembangan peraturan Manajemen Kinerja Organisasi agar lebih efektif dan efisien. Lebih lanjut, sistem pengelolaan kinerja sudah berbasis IT. Hal ini dapat mempermudah proses perencanaan, pelaporan, dan pengawasan karena dapat mengurangi pengaruh *human error*.
- Perumusan Sistem Kinerja Pegawai Bulanan.
Seiring dengan kenaikan tunjangan kinerja untuk pegawai Kementerian BUMN, telah dilaksanakan perumusan Sistem Kinerja Pegawai (SKP). SKP diharapkan dapat menciptakan pembayaran tunjangan kinerja berbasis kinerja. SKP akan dilaporkan setiap bulannya maksimal pada hari + 5 pada bulan pembayaran tunjangan kinerja.

- Perumusan Tunjangan Kinerja dan 3R (Rapih, Resik, Ringkas).

Pada tahun 2017, Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi (PSDMO) telah merumuskan beberapa peraturan baru yaitu Tunjangan Kinerja dan Peraturan 3R. Perumusan kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pegawai.

- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Pada awal tahun 2017, Biro PSDMO telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan periode tahun 2017, hal ini bermaksud untuk memperjelas program kerja Kementerian BUMN karena disusun dengan menggunakan Garis Waktu.



REFORMASI BIROKRASI



Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan BUMN dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebagaimana halnya dengan kementerian/lembaga lain, Kementerian BUMN juga melakukan reformasi birokrasi di dalam lingkungan kementerian dalam rangka membenahi beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan BUMN, antara lain (i) pengambilan keputusan yang lambat, (ii) SDM yang kurang kompeten, (iii) budaya kerja yang terlalu birokratis, serta (iv) arah kebijakan yang belum konsisten.

Permasalahan tersebut tidak hanya terdapat di Kementerian BUMN, tetapi juga terjadi di sebagian besar BUMN. Permasalahan tersebut bahkan sudah dianggap sebagai “budaya kerja” karena sudah sedemikian mengakar, di antaranya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), SDM yang kurang kompeten, serta daya saing yang rendah. Untuk itu, Kementerian BUMN secara cepat dan terarah melakukan sebuah pembenahan secara menyeluruh melalui reformasi birokrasi.



REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi dalam lingkungan Kementerian BUMN pada dasarnya telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan dilakukannya analisis jabatan di Kementerian BUMN sesuai dengan instruksi Kementerian PAN-RB. Kegiatan analisis jabatan tersebut kemudian dilanjutkan pada tahun 2008 yang kemudian diikuti dengan evaluasi jabatan sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tanggal 10 Juli 2008.

Kegiatan reformasi birokrasi di tahun 2009-2010 selanjutnya dilaksanakan lebih fokus dengan pembentukan Tim Koordinasi Reformasi Birokrasi dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-51/MBU/2009 tanggal 10 Maret 2009. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN-RB dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi dan diikuti terbitnya petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selanjutnya Kementerian BUMN melakukan perencanaan ulang terhadap program reformasi birokrasi yang menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Secara garis besar, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian BUMN dalam rangka reformasi birokrasi mengacu pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi, yaitu (1) manajemen perubahan, (2) penataan peraturan perundang-undangan, (3) penataan dan penguatan organisasi, (4) penataan tata laksana dalam dunia usaha, (5) penataan sistem manajemen SDM aparatur, (6) penguatan pengawasan, (7) penguatan akuntabilitas kinerja, dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN telah disetujui program reformasi birokrasi Kementerian BUMN.

Penerapan dan pencapaian Reformasi Birokrasi

Setiap tahunnya, Tim Koordinasi Reformasi Birokrasi dibentuk oleh Sekretaris Kementerian BUMN atas nama Menteri BUMN sebagai wujud pelaksanaan salah satu area perubahan reformasi birokrasi yaitu manajemen perubahan. Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan program-program reformasi birokrasi yang dijalankan lintas unit atau dapat juga bertindak sebagai inisiator program reformasi birokrasi di Kementerian BUMN.

Tim ini juga berkoordinasi dengan unit organisasi dan reformasi birokrasi dan Inspektorat dalam membantu pelaksanaan *self assessment* penilaian reformasi birokrasi (PMPRB) dan evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN-RB setiap tahunnya. Berdasarkan hasil *self assessment* pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian BUMN yang telah dilaksanakan pada triwulan II tahun 2017, skor reformasi birokrasi Kementerian BUMN untuk tahun 2017 adalah 86,38. Hal ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan skor tahun sebelumnya yaitu 75,10.

Penilaian reformasi birokrasi dibagi ke dalam 2 (dua) komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit memiliki bobot dan total penilaian yaitu sebesar 60%, sedangkan komponen hasil memiliki bobot sebesar 40%. Berikut detail penilaian reformasi birokrasi Kementerian BUMN dari tahun 2015 sampai 2017.

Skor Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN Tahun 2015-2017

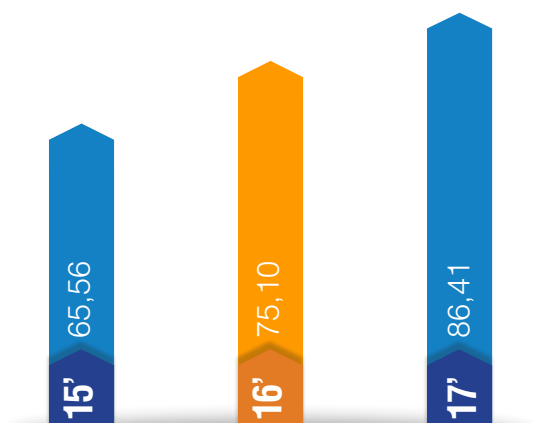
Komponen Pengungkit	Bobot	2015	2016	2017
Manajemen Perubahan	5,00	3,41	3,82	4,57
Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	2,71	3,13	5,00
Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	4,18	6,00
Penataan dan Tata Laksana	5,00	3,60	3,72	4,84
Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	8,97	12,80	14,67
Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,38	3,65	5,32
Penguatan Pengawasan	12,00	8,11	8,24	9,78
Peningkatan Kualitas Layanan Publik	6,00	4,08	4,33	5,63
Total Nilai Pengungkit	60,00	38,10	43,87	55,81



Komponen Hasil	Bobot	2015	2016	2017
Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,11	8,97	9,27
Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,26	5,22	4,74
Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	4,19	6,01	5,86
Opini BPK	3,00	2,50	3,00	2,50
Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,40	8,03	8,23
Total Komponen Hasil	40,00	27,46	31,23	30,60
Total Nilai Reformasi Birokrasi	100,00	65,56	75,10	86,41

*) keterangan bahwa Total Nilai Reformasi Birokrasi = Total Nilai Pengungkit + Total Komponen Hasil

Skor Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN
2015-2017



Nilai skor 86,41 untuk tahun 2017 merupakan hasil *self assessment* yang dilakukan tim asesor reformasi birokrasi Kementerian BUMN. Sebagai tindak lanjut atas *self assessment* tersebut, Sekretaris Kementerian BUMN telah menyampaikan hasil *self assessment* kepada Kementerian PAN-RB untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi dalam rangka menetapkan skor reformasi birokrasi final Kementerian BUMN Tahun 2017. Evaluasi telah dilaksanakan pada tanggal 6 dan 10 Oktober 2017 serta 22 November 2017.

Selama 2016-2017 Kementerian BUMN berusaha memperbaiki implementasi reformasi birokrasi pada setiap tahapan berdasarkan *guidelines* yang digariskan pada *roadmap* reformasi birokrasi, dengan area perubahan signifikan sebagai berikut:

Area Perubahan dalam Implementasi Reformasi Birokrasi

Manajemen Perubahan	Akuntabilitas	Kelembagaan	Tata Laksana
- Formalisasi <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi - Implementasi dan Asesmen Reformasi Birokrasi, Melibatkan Pimpinan dan Perwakilan - Pembentukan <i>Charge Agent</i> Kementerian BUMN - Rencana Penerapan Program 3R	- Penetapan Renstra Kementerian BUMN - Keterlibatan Pimpinan dan <i>Cascading Target</i> s/d Es.2 - Program eLakip - Penerapan Kebijakan MKO	- Kajian Evaluasi Kelembagaan - Pengajuan Reorganisasi Berdasarkan Kajian	- Reviu Pemetaan Proses Bisnis <i>Alignment</i> Prosedur Kerja (SOP) sesuai Permen Organisasi - Penetapan Standar Layanan
Pengawasan	Penataan Regulasi	Human Capital	Pelayanan
<i>Improvement Program</i> SPIP dan Penguatan APIP secara Berkelanjutan	- Penetapan Matriks Regulasi terkait BUMN - TL Sinkronisasi Melalui Revisi PP 44 dan 45 - Kajian Revisi UU 19/2003 - Implementasi dan <i>Updating</i> JDIIH	- Implementasi Sistem Informasi kepegawaian (OA Modul SDM) <i>Open Recruitment</i> JPT Madya/Pratama - Pengembangan SDM Berdasarkan Kebutuhan - Kompetensi - Penegakan Kode Etik dan Disiplin Pegawai - Pengajuan dan Pelaporan Diklat Melalui IT	- Pengajuan Kelengkapan RUPS secara Online (FIS) - Sistem Pelaporan Kinerja BUMN secara Elektronik (FIS dan PKBL) - Implementasi Nota Dinas Elektronik <i>Alignment Master Plan</i> IT terhadap Renstra dan <i>Roadmap</i> BUMN



REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh Kementerian PAN-RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN yang disampaikan bahwa nilai reformasi birokrasi Kementerian BUMN mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2017 yaitu 86,41.

Selain itu, berdasarkan hasil verifikasi tersebut juga didapatkan beberapa area perubahan yang mengalami progres positif yang berasal dari Area Perubahan Pengawasan dan SDM serta Komponen Pengungkit pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian BUMN.

Kualitas Pelayanan

Pelayanan Terhadap BUMN dan Stakeholders

Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan sebagai sarana bagi Pemerintah untuk melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, *core business* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima, baik dalam bentuk pelayanan administratif, pelayanan barang, maupun pelayanan jasa.

Pemberian pelayanan publik tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan asas dan prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Fungsi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah terbagi ke dalam tugas dan fungsi setiap instansi Pemerintah.

Kementerian BUMN merupakan instansi Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan BUMN, sehingga pelayanan yang diharapkan dari Kementerian BUMN berkaitan dengan hal tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian BUMN berbeda dengan instansi lain yang secara langsung melayani kebutuhan masyarakat luas seperti kantor pelayanan pajak atau kantor bea dan cukai. Pelayanan yang diberikan berupa kebijakan, perizinan, maupun regulasi kepada BUMN, meskipun terdapat pula kewajiban menyediakan data dan informasi tentang BUMN maupun Kementerian BUMN kepada masyarakat.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, Kementerian BUMN melakukan pengukuran tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran tingkat pelayanan tersebut dilaksanakan dengan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga dapat diketahui kinerja pelayanan aparatur Pemerintah kepada masyarakat.

Sebagai pedoman dalam penyusunan IKM, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai cara penyusunan IKM serta unsur-unsur dalam penilaian IKM, namun karena jenis pelayanan dan masyarakat atau pemangku kepentingan dari setiap instansi Pemerintah berbeda-beda, pedoman tersebut memberikan fleksibilitas dalam operasionalisasi pengukuran IKM.

Adapun pedoman tersebut merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Perubahan dimaksud adalah terkait penyempurnaan parameter penilaian.

Pada tahun 2017, Kementerian BUMN telah melakukan survei sebagai landasan untuk menilai sejauh mana tingkat kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan oleh Kementerian BUMN baik pelayanan yang diberikan kepada BUMN maupun instansi Pemerintah terkait/*stakeholders*, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan BUMN atas Pelayanan Kementerian BUMN

Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN diukur melalui survei dengan penyebaran kuesioner kepada BUMN. Survei tersebut telah selesai dilaksanakan melalui kerja sama dengan Bagian Riset Kementerian BUMN. Skor yang didapat dari survei tersebut adalah 87% yang menunjukkan persepsi BUMN terhadap pelayanan Kementerian BUMN masuk dalam kategori memuaskan secara *aggregate*. Namun, untuk ke depannya, Kementerian BUMN akan terus meningkatkan mutu layanan sesuai dengan SOP yang berlaku agar indeks kepuasan pelayanan terhadap BUMN dapat terus mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Indeks Kepuasan Instansi Pemerintah Terkait/*Stakeholders* atas Pelayanan Kementerian BUMN

Pengukuran indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/*stakeholders* atas pelayanan Kementerian BUMN dilakukan dengan cara melakukan survei melalui kuesioner. Survei tersebut telah selesai dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT Sucofindo (Persero) sebagai pihak ketiga pelaksana survei. Skor yang didapat dari survei tersebut adalah 86% yang menunjukkan persepsi instansi pemerintah terkait/*stakeholders* terhadap pelayanan Kementerian BUMN masuk dalam kategori memuaskan secara *aggregate* dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Pelayanan Publik

Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian BUMN telah melakukan percepatan alur proses naskah dinas di Lingkungan Kementerian BUMN dalam rangka mewujudkan pelayanan yang tanggap dan responsif, sebagai bagian dari penilaian kinerja Kementerian BUMN. Setiap pemrosesan naskah dinas dilakukan secara terstandar, terutama dari segi ketepatan waktu dan sesuai dengan pedoman tata naskah dinas guna menghasilkan pelayanan prima sebagai bentuk nyata pelayanan kepada pemangku kepentingan Kementerian BUMN.

Percepatan alur proses naskah dinas diharapkan mampu menjadikan budaya kerja di lingkungan Kementerian BUMN menjadi lebih transparan, profesional, dan akuntabel serta menunjang pengambilan keputusan yang lebih cepat bagi pemangku kepentingan Kementerian BUMN.

Selain itu, Kementerian BUMN juga menaruh perhatian yang serius terhadap kebutuhan informasi publik melalui *Desk Information* dan Hubungan Masyarakat, yang bertugas merencanakan optimalisasi publikasi Kementerian BUMN, serta Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertugas dalam penerimaan, pemrosesan, pengkajian, serta pemenuhan kebutuhan informasi publik. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi kepada Kementerian BUMN dan menjadi sebuah kewajiban bagi Kementerian BUMN untuk memenuhi permohonan tersebut selama tidak termasuk informasi yang dikecualikan dan/atau tidak memiliki dampak merugikan menurut uji konsekuensi. Permohonan informasi tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme dan standar yang ditentukan.

Dalam memenuhi pelayanan informasi tersebut, maka ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pejabat ini dibantu oleh sejumlah pejabat fungsional. Keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Kementerian BUMN telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana setiap badan publik memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.

Lingkup badan publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana APBN/APBD dan mencakup pula organisasi non-Pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Bagian Humas dan Protokol dalam pemenuhan permintaan informasi Publik berfungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Jawaban atas permohonan Informasi dan dokumentasi dari masyarakat yang merupakan fungsi dari PPID sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, layanan PPID tersebut diberikan kepada masyarakat secara *online* melalui *website*, *email* maupun mendatangi langsung loket permintaan informasi dan dokumentasi.

Selama tahun 2017, Bagian Humas dan Protokol sebagai fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah menerima 31 permohonan informasi dan 29 dari permohonan informasi tersebut telah dipenuhi dan dikoordinasikan oleh Bagian Humas dan Protokol sedangkan 2 (dua) di antaranya tidak melengkapi persyaratan permohonan informasi sehingga permohonan dianggap selesai.

Selain itu, Bagian Humas dan Protokol juga telah menerima sebanyak 651 laporan keluhan aspirasi masyarakat yang terdapat pada portal LAPOR! dan dari seluruh laporan tersebut di antaranya 49% belum ditindaklanjuti, 1% sedang dalam proses dan 50% telah selesai ditindaklanjuti.



MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI



Manajemen Kinerja Organisasi (MKO) di lingkungan Kementerian BUMN ialah rangkaian kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya (*resources*) yang dimiliki organisasi dalam rangka menciptakan keselarasan kinerja antar unit dan penyempurnaan maupun perbaikan organisasi.



Beberapa hal yang telah menjadi concern untuk penerapan Peraturan Manajemen Kinerja Organisasi adalah penyampaian Dokumen Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2017, penyampaian laporan kinerja atau *Performance Report* dan Review Meeting di setiap triwulan oleh seluruh unit eselon I dan eselon II, dan penunjukkan pejabat-pejabat yang bertindak sebagai PJMKO, PMKO, MMKO I, dan MMKO II. Laporan Kinerja dalam bentuk *Performance Report* disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada Penanggung Jawab Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN dalam hal ini Sekretaris Kementerian BUMN.

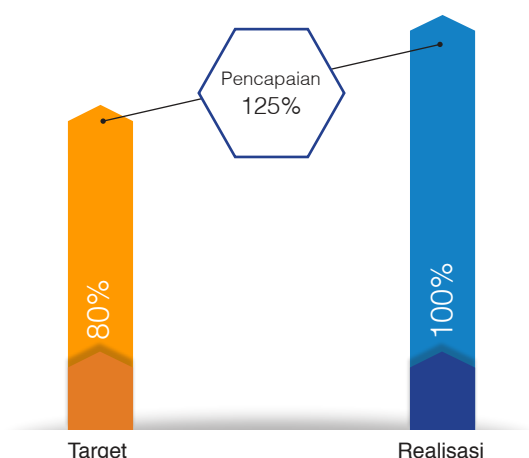


Sejalan dengan Peraturan Menteri tentang Manajemen Kinerja Organisasi yang tertuang dalam SK-217/MBU/10/2017, setiap unit kerja telah menerapkan penyampaian Perjanjian kinerja dengan format Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, beserta target tahunan dan target yang telah di *trajectory* sesuai dengan Permen tersebut. Lebih lanjut, setiap unit-unit eselon I dan eselon II menyampaikan laporan kinerja triwulanan atau disebut *performance report* dan *review meeting*. Hal ini juga sejalan dengan tingkat pelaksanaan Peraturan Manajemen Kinerja Organisasi.

Pada dasarnya Manajemen Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian BUMN telah dirumuskan dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri BUMN pada tahun 2016. Pada tahun 2017, telah dilakukan beberapa pengembangan peraturan Manajemen Kinerja Organisasi agar lebih efektif dan efisien. Lebih lanjut, sistem pengelolaan kinerja sudah berbasis information and technology (IT). Hal ini dapat mempermudah proses perencanaan, pelaporan, dan pengawasan karena dapat mengurangi pengaruh *human error*.

Pada tahun 2017, Kementerian BUMN telah menyempurnakan mekanisme Pelaporan Kinerja dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi. Melalui dukungan teknologi informasi diharapkan *performance report* dapat dilaporkan lebih cepat, pengukuran kinerja dapat dilakukan lebih akurat, dan evaluasi oleh pimpinan dapat dilakukan lebih tepat. Penerapan manajemen kinerja pada tahun 2017, telah mencapai 100% dengan target pada tahun 2017 sebesar 80% sehingga persentase pencapaiannya 125%.

Pencapaian Penerapan Manajemen Kinerja Organisasi 2017



Transformasi organisasi

Transformasi Organisasi Kementerian BUMN dilaksanakan dalam rangka menuju organisasi korporasi yang modern dengan beberapa tahapan diantaranya persiapan, mobilisasi, transformasi, dan eksekusi. Tahap persiapan adalah target pencapaian di tahun 2017.

Target pencapaian transformasi organisasi di tahun 2017 ini adalah tahap persiapan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan *High Level Blueprint* Organisasi
2. Pelaksanaan *One-on-One Interview* kepada seluruh pejabat Eselon I
3. Focus Group Discussion (FGD) teknis dengan unit kerja internal Kementerian BUMN dalam rangka memotret proses bisnis dan sistem kerja Kementerian BUMN saat ini
4. Pelaksanaan *Visioning Workshop*

Berdasarkan pelaksanaan *Visioning Workshop* sebagai bagian dari pengumpulan aspirasi para pimpinan Kementerian BUMN di level Eselon I, yang dilakukan pada tahun 2017, berhasil disimpulkan *purpose*, peran, dan *positioning* Organisasi Pengelola BUMN sebagai berikut:

Purpose.

Perlu mempertegas tujuan kelembagaan Organisasi Pengelola BUMN dengan menjabarkan prinsip-prinsip *Value Adding Ownership* yang dapat memberikan nilai tambah pengelolaan BUMN oleh Organisasi Pengelola BUMN. Prinsip-prinsip tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- Strategi.
Penyusunan strategi dan target yang jelas dan terukur, menentukan pengukuran kinerja sesuai dengan *purpose* BUMN, serta mengembangkan skala bisnis BUMN menuju *global champion*.
- Investasi.
Mendukung dalam pemberian akses pendanaan yang lebih luas dan mendorong investasi yang menghasilkan *multiplier effect*.
- Governance.
Menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga tidak ada intervensi secara langsung kepada BUMN tanpa melewati pemegang saham.
- Identitas.
Membangun reputasi dan komunikasi publik untuk menciptakan citra organisasi yang baik dan berkelanjutan (*sustainable*)



MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI

- Kapabilitas.
Berkomitmen mendukung peningkatan kapabilitas yang dibutuhkan untuk pengelolaan BUMN secara lebih profesional dan pemilihan orang-orang yang tepat untuk mengelola BUMN.
- **Peran**
Peran Kementerian BUMN perlu diselaraskan dengan tujuan BUMN untuk menyeimbangkan antara fungsi kontributor finansial dan agen pembangunan. Dalam rangka memaksimalkan nilai BUMN, Organisasi Pengelola BUMN perlu bertindak sebagai Investor dan Pembina bagi BUMN dengan *purpose contributor* finansial dan agen pembangunan.
- **Positioning**
Agar dapat melaksanakan *purpose* Kementerian BUMN dengan prinsip *Value Adding Ownership*, maka *Positioning* Kementerian BUMN perlu diperkuat secara kelembagaan dengan bentuk Badan. Bentuk Organisasi Pengelola BUMN kedepannya dapat berbentuk Badan Hukum Publik (BHP) atau Badan Usaha (Holding) Milik Negara (BUHMN).
- Penguatan proses bisnis dan kapabilitas
Proses bisnis dan kapabilitas Organisasi Pengelola BUMN kedepannya perlu diperkuat dengan kapabilitas kunci, antara lain Pengembangan Bisnis Portofolio, Sinergi Bisnis Portofolio, *Talent Management*, dan *Fund Raising Portofolio*.
- Pengambilan keputusan
Kewenangan pengambilan keputusan di Organisasi Pengelola BUMN kedepannya berdasarkan tingkat kepentingan perlu dilimpahkan dari Menteri/CEO kepada pejabat dibawah untuk memastikan kelincahan organisasi.
- Pengukuran kinerja
Organisasi Pengelola BUMN ke depan perlu menetapkan ukuran kinerja berdasarkan *value driver* portofolio yang dikelola. Misalnya, perhitungan aspek kinerja atas *multiplier effect* terhadap pembangunan, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta keunggulan nasional.
- Interaksi eksternal
Organisasi Pengelola BUMN kedepannya perlu mengkonsolidasikan akuntabilitas peran strategis yang diperlukan untuk pengelolaan BUMN. Pola hubungan dengan instansi *stakeholder* seperti dengan DPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis perlu diperjelas agar pengelolaan portofolio dapat maksimal.

Prinsip Desain Organisasi Kementerian BUMN

Berdasarkan arahan *purpose*, peran, dan *positioning* dalam *Visioning Workshop*, prinsip desain yang perlu menjadi dasar organisasi Kementerian BUMN ke depan adalah sebagai berikut:

- Pengelompokan portofolio BUMN
 - Pengelompokan portofolio BUMN dapat menggunakan opsi berdasarkan Tema Strategis untuk jangka pendek, sedangkan secara jangka panjang opsi ideal adalah berdasarkan Obyektif Portofolio BUMN.
 - Pembagian portofolio BUMN secara jangka pendek dapat menggunakan opsi Tema Strategis dalam rangka penyelarasan dengan *roadmap* sektoral termasuk konsolidasi holding sektoral yang menjadi fokus Kementerian BUMN saat ini.
 - Pembagian portofolio BUMN secara jangka panjang perlu diarahkan selaras dengan Obyektif/*Purpose* Portofolio BUMN sebagai agen pembangunan atau sebagai kontributor finansial.
- Pembagian Unit Fungsional dan Bisnis
Fungsi Organisasi Pengelola BUMN kedepannya perlu dikelompokkan ke dalam fungsi korporat, portofolio dan layanan pendukung. Fungsi-fungsi tersebut perlu dipetakan pada sepanjang rantai nilai dan disesuaikan dengan peran Organisasi Pengelola BUMN sebagai Investor, Pembina, dan Pengelola.

Sebagai langkah awal implementasi kajian ini, dilakukan kegiatan *piloting* dengan pembentukan Tim Inisiatif Strategis yang bertugas untuk mengawal inisiatif-inisiatif strategis yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

Penyempurnaan mekanisme *governance organization existing* sebagai transisi:

- *Standard Operating Procedure* (SOP)
- Standar Layanan
- Pra-kajian Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengelola BUMN

Evaluasi dan penyempurnaan SOP telah dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-09/MBU/S/2017 tentang Penetapan *Standar Operating Procedure* (SOP) Proses Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.



PENGELOLAAN SDM

Paradigma tentang pengelolaan sumber daya manusia (*Human Capital/HC*) telah berkembang menjadi Manajemen Sumber Daya Manusia (*Human Capital Management/HCM*) yang mengintegrasikan sistem pengelolaan SDM dengan strategi SDM guna meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan SDM dilakukan berintegrasi dengan strategi organisasi dan senantiasa mempertimbangkan pengaruh perkembangan global sebagai pemacunya.

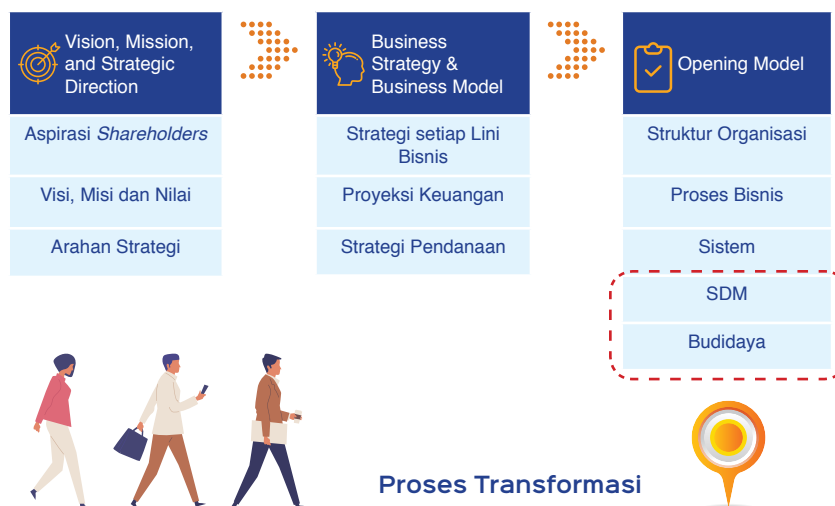
Kementerian BUMN meyakini bahwa pengelolaan SDM yang terkoordinasi dengan baik dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Memiliki SDM yang andal, loyal dan berkompeten merupakan modal utama bagi Kementerian BUMN guna meraih visi, misi dan kinerja yang berkelanjutan. Integrasi antara HCM dengan strategi organisasi dapat dicapai dengan memiliki sistem pengelolaan SDM yang memastikan bahwa Kementerian BUMN memiliki SDM berkualitas, dengan mengembangkan pelatihan yang berfokus pada pembelajaran organisasi dan manajemen.

Oleh karena itu, kompetensi setiap pegawai, termasuk kinerja yang unggul, produktivitas, fleksibilitas, terhadap perubahan organisasi, inovasi dan kemampuan untuk menghasilkan layanan yang baik dari setiap individu, dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan daya saing organisasi. Kunci utama dalam menciptakan SDM yang turut meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja adalah proses rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan talenta serta kompetensi.

Serangkaian proses mulai dari memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia, mengadakan seleksi calon pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Kementerian BUMN, serta memfasilitasi pelatihan kepada pegawai sesuai dengan karakter dan kompetensi masing-masing. Setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan karier sesuai bidangnya, dengan tidak membedakan penerapannya berdasarkan *gender*. Melalui pelatihan dan pengembangan pegawai yang dilakukan, Kementerian BUMN secara berkelanjutan menerapkan dan memantau strategi pengelolaan SDM untuk mendapatkan talenta yang berkualitas dan mendorong seluruh pegawai untuk merespon tantangan dan dinamika bisnis.

HUMAN CAPITAL AND BUSINESS TRANSFORMATION

Dalam melakukan transformasi organisasi, Human Capital merupakan salah satu aspek strategis yang harus menjadi perhatian organisasi





Pengelolaan SDM

Rekrutmen

Berdasarkan analisis beban kerja sesuai peta jabatan yang ada, dapat diketahui bahwa jumlah kebutuhan jabatan di Kementerian BUMN sebanyak 458 jabatan sedangkan jumlah riil pegawai Kementerian BUMN saat ini sebanyak 278 pegawai. Oleh karena itu, terdapat kekurangan sebanyak 180 pegawai terutama untuk level pelaksana atau jabatan Fungsional Umum.

Untuk menutupi kekurangan pegawai Bagian Manajemen SDM telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian BUMN Tahun 2017 sebanyak 25 formasi pada level pelaksana/Jabatan Fungsional Umum
2. Melanjutkan program alih pengetahuan Pegawai BUMN di Kementerian BUMN, dimana program tersebut sangat bermanfaat untuk transfer *knowledge* dan juga membantu tugas pokok dan fungsi Kementerian BUMN. Untuk program alih pengetahuan Gelombang III periode Agustus 2017 – Januari 2018 terdapat 63 Pegawai Alih Pengetahuan dari 35 BUMN
3. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka mengajukan permintaan calon pegawai yang berasal dari alumni Politeknik Keuangan Negara STAN
4. Melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) terutama untuk jabatan/pekerjaan yang bersifat administrasi, dimana pada tahun 2017 jumlah PPNPN yang telah direkrut sebanyak 99 pegawai.

Pengembangan Dan Pelatihan Pegawai

Program pengembangan dan pelatihan untuk pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berada di lingkungan kerja Kementerian BUMN. Pelatihan diberikan untuk pemenuhan kompetensi manajerial, kompetensi teknis, maupun kompetensi umum.

Pengembangan kompetensi manajerial dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal kepemimpinan dan pengelolaan unit organisasi. Program yang telah diikuti oleh para pegawai terkait dengan kemampuan tersebut yaitu:

- Diklat Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN),
- *Reform Leader Academy* yang diselenggarakan oleh LAN,
- *Leadership* program yang disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian BUMN dan telah diikuti oleh seluruh jenjang jabatan antara lain mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi sampai dengan Pelaksana, dan
- *Communication* program dalam hal membangun partnership internal pegawai untuk membentuk tim kerja yang solid maupun membangun komunikasi dengan para *stakeholders*, yang diikuti mulai dari jabatan pimpinan tinggi sampai dengan pelaksana.

Pengembangan kompetensi teknis dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan teknis pelaksanaan tugas masing-masing jabatan yang spesifik. Jabatan yang menjadi fokus untuk memperoleh pengembangan secara *inhouse* adalah jabatan-jabatan utama di Kementerian BUMN. Sedangkan jabatan pendukung, program pengembangannya melalui pengiriman peserta ke *public training*.

Adapun topik pengembangan kompetensi teknis yang dilakukan secara *inhouse training* antara lain: (i) *Business Strategy*, (ii) *Good Corporate Governance*, (iii) *Risk Management*, (iv) *Auditing For Non Auditor*, (v) *Merger dan Akuisisi*, (vi) *Microsoft Excel For Advance*, (vii) *Infographic For Power Point*, (viii) *English Fluency*.

Pengembangan kompetensi teknis untuk kegiatan pendukung diantaranya berkenaan dengan topik: (i) akuntansi pemerintah dan (ii) sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada tahun 2017, seluruh pegawai Kementerian BUMN telah memperoleh akses terhadap program pengembangan dengan minimal jam pelatihan (jamlat) yang harus diikuti oleh setiap pegawai adalah sebanyak 30 jamlat.





PENINGKATAN AKUNTABILITAS



Akuntabilitas Kinerja adalah parameter pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Alat ukur yang dipergunakan sebagai implementasi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang terdiri laporan kinerja interim (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, telah merumuskan Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa ada 5 komponen yaitu Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Kinerja.



PENINGKATAN AKUNTABILITAS

Sebelum diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), instansi pemerintah bekerja berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang memadai. Melalui SAKIP, instansi pemerintah mulai merencanakan hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian serta melaporkan kinerjanya secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas pada publik.

Instansi pemerintah yang akuntabel adalah instansi yang menunjukkan komitmen kuat untuk menghasilkan kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dengan ukuran keberhasilan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan sesuai kerangka waktu. Proses ini akan berhasil apabila didukung komitmen penuh dari pimpinan birokrasi pada seluruh tingkat pemerintahan.

Kerangka Akuntabilitas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) telah merumuskan komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Kinerja.



Tabel Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	1. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) 2. Perencanaan kinerja tahunan (20%), meliputi pemenuhan Rencana Kinerja Tahunan (4%), kualitas Rencana Kinerja Tahunan (10%) dan implementasi Rencana Kinerja Tahunan (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	1. Pemenuhan pengukuran (5%) 2. Kualitas pengukuran (12,5%) 3. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	1. Pemenuhan pelaporan (3%) 2. Kualitas pelaporan (7,5%) 3. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Kinerja	10%	1. Pemenuhan evaluasi (2%) 2. Kualitas evaluasi (2%) 3. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	1. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (5%) 2. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (5%) 3. Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>) (5)
Total		100%	



Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa setiap komponen penilaian SAKIP memiliki bobot yang berbeda-beda, beberapa hal yang telah dilakukan Kementerian BUMN dalam mencapai nilai-nilai komponen tersebut yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (30%)

- Kementerian BUMN telah memiliki Rencana Strategis 2015-2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/MBU/01/2016 tanggal 25 Januari 2016. Setiap unit kerja, baik eselon I maupun eselon II di Kementerian BUMN juga telah memiliki Renstra sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pada Tahun 2017, Kementerian BUMN telah melaksanakan reviu Renstra periode 2015 – 2019 untuk melihat kualitas dan membandingkan dengan kondisi/situasi terkini termasuk melihat beberapa capaian terhadap target yang telah terealisasi.
- Kementerian BUMN dan setiap unit kerja pada tahun 2017 juga telah menyusun Rencana Kerja (Renja)/ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisi: (1) Profil unit kerja; (2) Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; (3) Target dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan; (4) Program Kerja tahun berjalan; dan (5) Anggaran unit kerja tahun berjalan.

2. Pengukuran Kinerja (25%)

- Dalam rangka menjaga akuntabilitas dan keseragaman dalam penilaian kinerja, Menteri BUMN pada tahun 2017 telah menetapkan Keputusan Menteri Nomor SK-217/ MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang antara lain mengatur tentang rumusan/formula pengukuran kinerja organisasi/unit kerja.
- Mekanisme Pengukuran Kinerja organisasi/unit kerja Kementerian BUMN menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang memiliki 4 Perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*. Hasil akhir dari penilaian kinerja tersebut akan menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
- Kementerian BUMN dan setiap unit kerja pada tahun 2017 telah mengimplementasikan rumusan/formula Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud di atas terhadap capaian kinerja tahun 2017.

3. Pelaporan Kinerja (15%)

- Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-217/ MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN juga diatur tentang mekanisme pelaporan kinerja organisasi/unit kerja.
- Berdasarkan ketentuan tersebut unit kerja setiap triwulan diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja dalam bentuk *Performance Report* yang berisi tabulasi/

breakdown target unit kerja per triwulan dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang berkesesuaian.

- Laporan Kinerja dalam bentuk *Performance Report* disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada Penanggung Jawab Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN dalam hal ini Sekretaris Kementerian BUMN.

- Pada tahun 2017 Kementerian BUMN telah menyempurnakan mekanisme Pelaporan Kinerja dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi. Melalui dukungan teknologi informasi diharapkan *Performance Report* dapat dilaporkan lebih cepat, pengukuran kinerja dapat dilakukan lebih akurat, dan evaluasi oleh pimpinan dapat dilakukan lebih tepat.

4. Evaluasi Kinerja (10%)

- Sejalan dengan penyempurnaan pelaporan kinerja, mekanisme evaluasi kinerja juga diperbaiki dengan mengacu pada Keputusan Menteri BUMN SK-217/ MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN.
- Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN tersebut, sebelum penyampaian *Performance Report*, unit kerja perlu melakukan pembahasan secara internal untuk mengevaluasi hasil/capaian dari setiap indikator kinerja dan menyiapkan langkah-langkah perbaikan yang akan diambil ke depannya.
- Hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk risalah *Review Meeting* dan menjadi bagian yang dilaporkan bersama dengan penyampaian *Performance Report*.
- Berdasarkan hasil pembahasan internal, masing-masing unit kerja juga dapat melakukan penilaian dan pembinaan terhadap pegawai/jajaran di bawahnya.
- Dalam level organisasi/Kementerian BUMN, capaian dalam *Performance Report* dan hal-hal yang dibahas dalam *Review Meeting* digunakan untuk evaluasi penyusunan target dalam Perjanjian Kinerja periode berikutnya termasuk evaluasi SDM dan organisasi, baik dari sisi penempatan SDM, kecukupan SDM, kualitas SDM, maupun tugas dan fungsi organisasi.

5. Capaian Kinerja (20%)

- Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian BUMN pada tahun 2017 tercapai sebesar 102,14%.
- Berdasarkan mekanisme pengukuran kinerja sebagaimana Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-217/ MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN, maka capaian NKO sebesar 102,14% termasuk dalam kategori "sangat memuaskan".

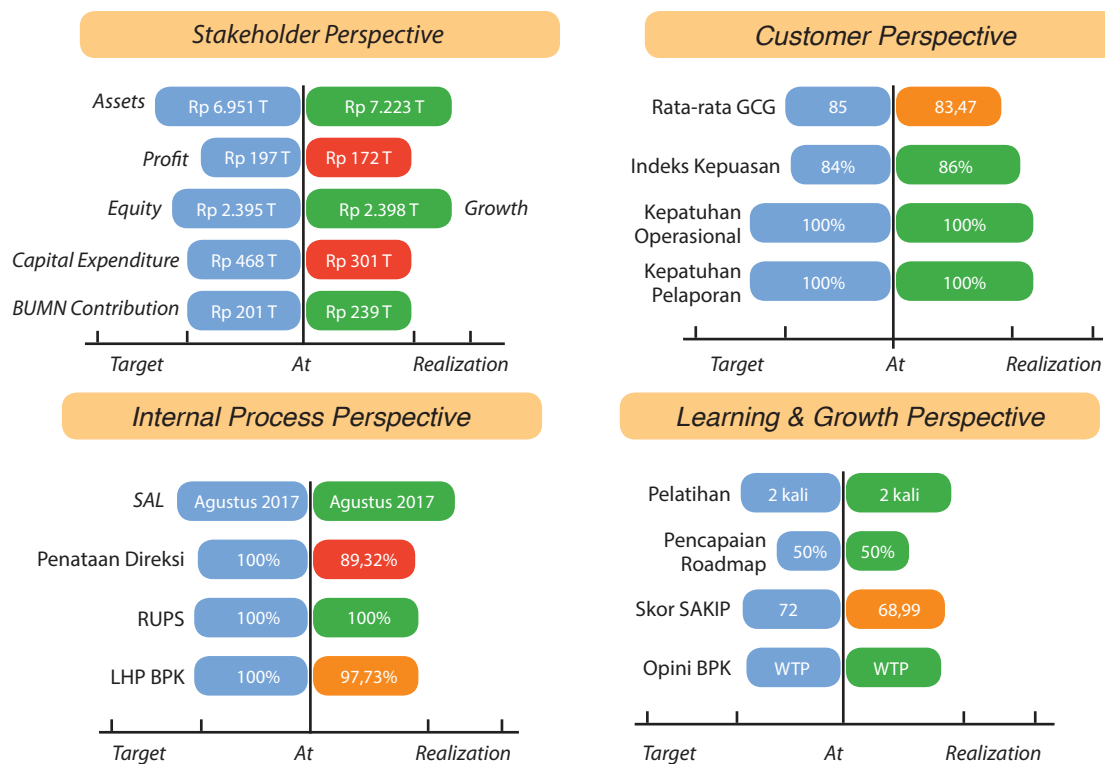


PENINGKATAN AKUNTABILITAS

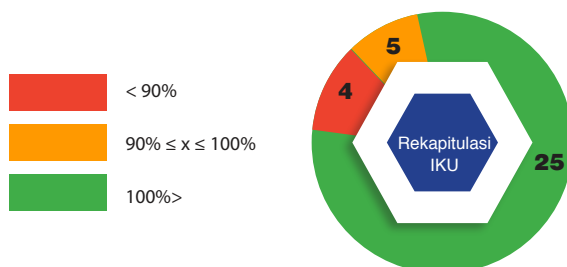
Pengukuran Kinerja Organisasi/Unit Kerja Kementerian BUMN

No	Overall	Achievement	Value
1	Percentage of Aggregate Achievement in Stakeholder Perspective	100,55%	30,17%
2	Percentage of Aggregate Achievement in Customer Perspective	105,19%	31,56%
3	Percentage of Aggregate Achievement in Internal Process Perspective	102,48%	20,50%
4	Percentage of Aggregate Achievement in Learning and Growth Process Perspective	99,55%	19,91%
Dashboard Kinerja		Total	102,14%

Dashboard Kinerja



Kinerja Capaian IKU





PROGRAM PENGELOLAAN MANAJEMEN EKSEKUTIF BUMN

Program pengelolaan Manajemen SDM Eksekutif BUMN merupakan serangkaian proses dalam mempersiapkan, mempertahankan, dan mengembangkan pimpinan BUMN untuk memastikan keberlangsungan BUMN dalam jangka panjang. Program ini juga bertujuan agar pimpinan BUMN dapat berkinerja unggul pada masa kini maupun di masa yang akan datang sejalan dengan visi, misi, serta sistem nilai BUMN. Program ini sendiri memiliki beberapa tahapan, di antaranya:

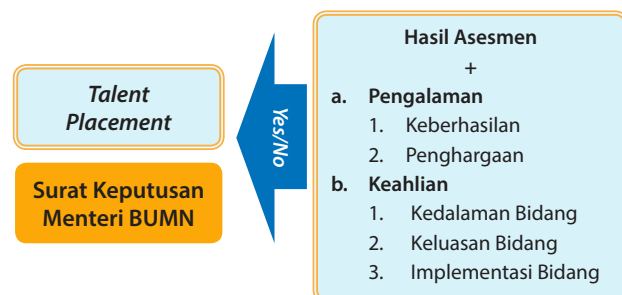
Fungsi Eksisting

1. **Planning**
 - a. Pemetaan Kebutuhan Eksekutif BUMN baik untuk Direksi Maupun Komisaris/Pengawas.
 - b. Sesuai Permen untuk Direksi telah diatur harus disusun dalam jangka waktu 1 tahun berjalan, namun belum diatur untuk Komisaris/Dewan Pengawas.
2. **Screening**
Permen telah mengatur persyaratan, sumber Bakal Calon dan mekanisme penyampaian data Bakal Calon.
3. **Develop**
Permen belum mengatur mekanisme *development* yang diperlukan untuk menyiapkan Bakal Calon.
4. **Asses & Deploy**
 - a. Permen telah mengatur mekanisme penilaian dan parameter UKK , termasuk Kriteria UKK yang dilakukan oleh Tim Kementerian maupun oleh Lembaga Profesional.
 - b. Permen telah mengatur mekanisme pengangkatan Direksi dan Komisaris/Dewan pengawas.
5. **Reward & Punishment**
Permen telah mengatur mekanisme dan parameter remuneration baik gaji, tunjangan, fasilitas, tantiem termasuk LTI.
Permen juga telah mengatur mekanisme pemberhentian Direksi & Komisaris/Dewan Pengawas.



Uji Kelayakan & Kepatan Bakal Calon Direksi BUMN

Mekanisme penjarangan, seleksi, nominasi, dan penempatan Calon Direksi BUMN, mengacu pada ketentuan PER-03/MBU/02/2015





PROGRAM PENGELOLAAN MANAJEMEN EKSEKUTIF BUMN

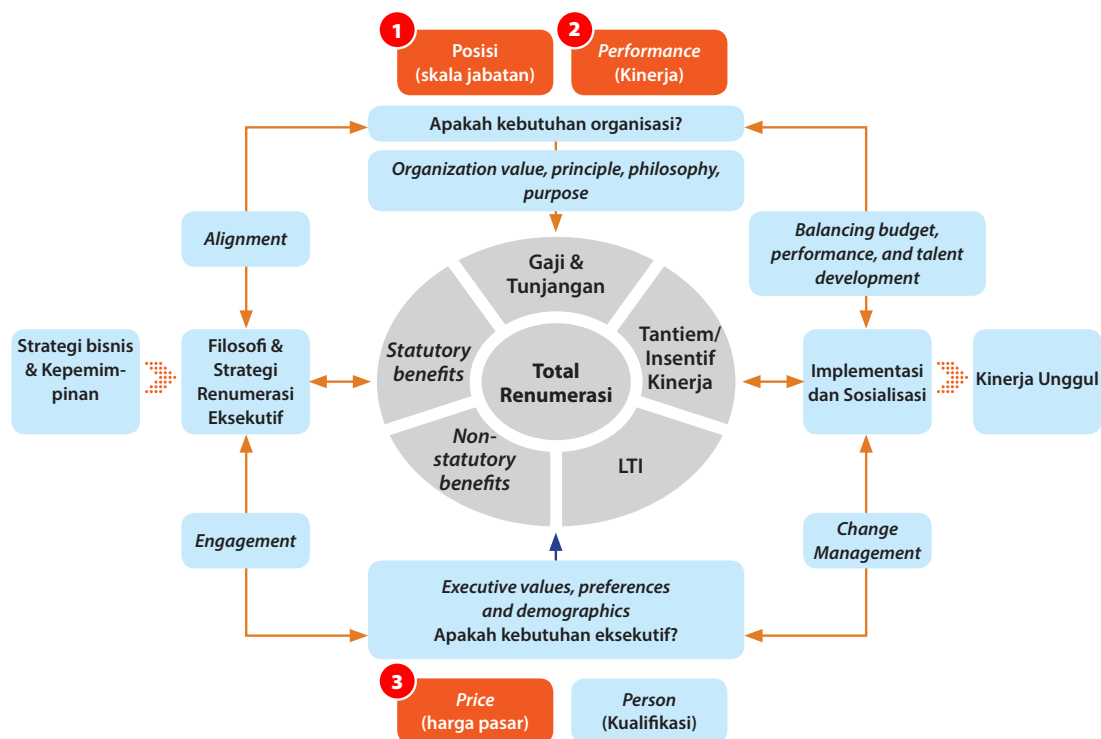
Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas BUMN

Mekanisme penjarangan, penilaian, dan penempatan Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, mengacu pada ketentuan PER-02/MBU/02/2015



Sistem Remunerasi Eksekutif BUMN

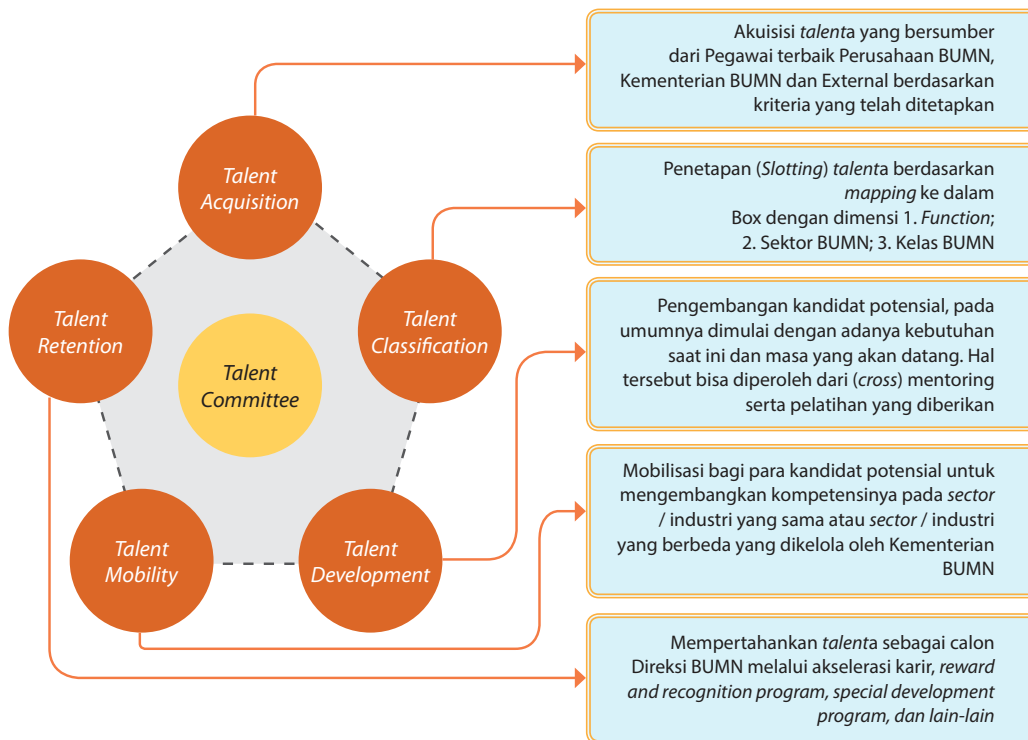
Upaya ini untuk mendorong munculnya *best leaders* dari internal BUMN dan agar BUMN memiliki daya tarik serta memotivasi profesional handal untuk ikut berkiprah memajukan BUMN.





Integrated Talent Management System BUMN

Sistem ini merupakan proses yang terintegrasi dalam mempersiapkan, mengembangkan, dan meretensi *human capital* BUMN agar berkinerja unggul sejalan dengan visi, misi, dan nilai BUMN



Integrasi Parameter Kinerja BUMN

Ini merupakan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penilaian kinerja BUMN melalui pengintegrasian parameter kinerja BUMN eksisting (Tingkat Kesehatan, GCG, dan KPKU)





PROGRAM PENGELOLAAN MANAJEMEN EKSEKUTIF BUMN

Capaian Strategis Tahun 2017 Manajemen SDM Eksekutif BUMN

Mutasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN

Dalam rangka menghasilkan Pengurus BUMN yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, diperlukan pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang sistematis, objektif, dan akuntabel. Selain pemenuhan persyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN, Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN juga wajib memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan lainnya. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 dan PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015.

Untuk mendukung agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, Kementerian BUMN melibatkan lembaga profesional yang memenuhi kualifikasi *assessment center* tertentu dalam melakukan tes asesmen bagi Bakal Calon Direksi BUMN.

Selama tahun 2017 telah dilakukan pergantian Direksi yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2017 sebanyak 92 orang, atau mencapai 89,32% dari jumlah Direksi yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2017 sebanyak 103 orang. Selama tahun 2017 telah dilakukan pergantian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2017 sebanyak 52 orang, atau mencapai 78,79% dari jumlah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2017 sebanyak 66 orang.

Di samping itu, agar pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Bakal Calon Direksi BUMN dapat memenuhi tuntutan proses dan pengambilan keputusan yang semakin cepat, tepat, dan berbasis teknologi informasi, maka pada tahun 2017 juga mulai dibangun Aplikasi Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi BUMN/"UKK Apps".

Perbaikan Sistem Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN

Sebagai upaya untuk mendorong munculnya *best leaders* dari internal BUMN dan agar BUMN memiliki daya tarik serta memotivasi profesional handal untuk ikut berkiprah memajukan BUMN, maka perlu dilakukan *re-design* sistem remunerasi eksekutif BUMN yakni dengan berbasiskan pada kinerja (*performance based*) dan selaras dengan data pasar (*market based*). Melalui Tim Internal Kementerian BUMN yang didukung lembaga profesional selaku konsultan independen, pada tahun 2017 telah disusun kajian sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Filosofi yang melandasi *re-design* sistem remunerasi eksekutif BUMN tersebut meliputi:

1. Mengacu pada data pasar baik nasional maupun regional,
2. Menjaga keadilan internal,
3. Mendorong pertumbuhan bisnis,
4. Mendorong BUMN untuk menjadi *benchmark* di industrinya,
5. Mendorong usaha penciptaan nilai,
6. Menghargai tanggung jawab dan pencapaian dalam mendukung program Pemerintah, serta
7. Menjaga kepatutan dengan hasil dan kemampuan keuangan perusahaan.

Hasil kajian tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-121/MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pedoman Perhitungan Gaji dan Honorarium, Tantiem/ Insentif Kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Pembangunan Integrated Talent Management System (ITMS) BUMN

Seiring dengan semakin kompleksnya dunia profesional dan semakin berharganya *human capital* terbaik, BUMN akan dihadapkan pada persaingan dalam mencari dan mempertahankan *best talent*. Dibutuhkan proses yang terintegrasi dalam mempersiapkan, mengembangkan, dan meretensi *human capital* BUMN agar berkinerja unggul sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai BUMN, yang selanjutnya disebut dengan "ITMS BUMN".



Maksud dan Tujuan ITMS:

1. Memastikan ketersediaan dan kesiapan *talent* untuk *sustainable growth* BUMN (*Sustainable Talent Pipeline*);
2. Menjaga tata kelola proses pemilihan calon Direksi BUMN (*Good Governance*);
3. Menjadikan BUMN sebagai salah satu sumber talenta unggulan nasional (*Best Talent Provider*);
4. Pengelolaan fungsi-fungsi *talent management* BUMN dengan sistematika dan mekanisme yang lebih baik (*Proper Talent Management*);
5. Meningkatkan daya tarik BUMN dalam mempertahankan dan/atau mengembangkan talenta terbaik yang ada di BUMN (*Attract and Retain Talent*).

Beberapa *achievement* terkait ITMS yang terealisasi pada tahun 2017 di antaranya: penyelenggaraan *Executive Leadership Program* (ELP)-1 yang merupakan program pengembangan bagi Direksi eksisting BUMN, penyusunan konsep kurikulum program pengembangan bagi Direksi BUMN yang baru (ELP-2) dan calon Direksi BUMN (ELP-3), penyusunan *Framework* ITMS BUMN, serta pembangunan Aplikasi ITMS BUMN.

Pengintegrasian Parameter Kinerja BUMN

Saat ini, penilaian Kinerja BUMN diukur dengan menggunakan berbagai parameter, baik yang bersifat umum maupun spesifik per sektor usaha BUMN. Di antara parameter yang bersifat umum untuk seluruh BUMN tersebut adalah Tingkat Kesehatan, *Good Corporate Governance* (GCG), dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penilaian kinerja BUMN tersebut, maka pada tahun 2017 telah dimulai program Pengintegrasian Parameter Kinerja BUMN.

Selamat tahun 2017, telah dilakukan kajian/studi, *benchmarking*, dan uji coba pengintegrasian Tingkat Kesehatan, GCG, dan KPKU, yang menghasilkan konsep "Penilaian Tingkat Kesehatan yang Terintegrasi", yaitu gambaran kondisi kesehatan suatu BUMN yang diukur dan dinilai berdasarkan kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kinerja tata kelola serta kinerja tanggapan perusahaan terhadap dinamika lingkungan usahanya, dibandingkan dengan standar. Standar dimaksud, merupakan nilai minimum yang mencerminkan terciptanya nilai tambah perusahaan secara keseluruhan (*aggregat*) selama tiga tahun terakhir.





PROGRAM DATA DAN TI



Dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN untuk menghadapi persaingan dunia usaha yang kompetitif di era global seperti ini, sangat diperlukan dukungan sistem dan mekanisme pengambilan keputusan dan kebijakan secara cepat dan tepat oleh pejabat Kementerian BUMN. Untuk menunjang kegiatan tersebut, Kementerian BUMN membutuhkan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung kelancaran penyelesaian pekerjaan sehari-hari, baik di lingkungan Kementerian BUMN atau dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan BUMN.



Kementerian BUMN melalui Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis telah melakukan pengelolaan data dan teknologi informasi melalui beberapa program, di antaranya membangun dan menerapkan sistem aplikasi *Integrated Talent Management System* (ITMS), Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas), dan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SiNadine).



Integrated Talent Management System (ITMS)

Dalam upaya mendukung *roadmap* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan produktivitas. Tantangan dalam pengelolaan SDM adalah adanya *gap* antara *supply* dan *demand* untuk *talent* BUMN, yaitu sebagai berikut:

Tantangan kebutuhan *talent* BUMN

1. Jumlah BUMN dan Eksekutif BUMN yang cukup banyak
2. Masa jabatan Eksekutif BUMN yang terbatas
3. Spesifikasi *talent* yang khusus/spesifik dengan variasi kompleksitas pengelolaan BUMN

Tantangan ketersediaan *talent* BUMN

1. Jumlah *talent* terbatas
2. Tingkat persaingan untuk mendapatkan *talent* semakin meningkat termasuk dari sisi *reward* yang ditawarkan
3. Globalisasi menyebabkan mobilitas *talent* lebih fleksibel

SUPPLY



Jumlah *talent* terbatas



Persaingan untuk
mendapatkan *talent*
semakin meningkat

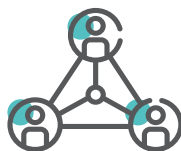


Mobilitas *talent* lebih
fleksibel

DEMAND



Kebutuhan Eksekutif
meningkat



Variasi dan
Kompleksitas sektor
industri



Masa jabatan
eksekutif BUMN yang
terbatas

Untuk itu Kementerian BUMN telah menerapkan *Integrated Talent Management System* (ITMS) yang merupakan suatu proses untuk mempersiapkan, mengembangkan, dan meretensi *talent* untuk mengisi posisi strategis di BUMN agar dapat berkinerja unggul pada masa kini maupun di masa yang akan datang sejalan dengan visi, misi, serta sistem nilai BUMN.



Sustainable Talent Pipeline

Memastikan ketersediaan dan kesiapan *talent*
untuk *sustainable growth* BUMN



Attract & Retain Talent

Meningkatkan daya tarik BUMN dalam mempertahankan dan/atau mengembangkan *talent* terbaik yang ada di BUMN



Best Talent Provider

Menjadikan BUMN sebagai salah satu sumber *talent* unggulan Nasional



Proper Talent Management

Pengelolaan fungsi-fungsi *talent* management dengan sistematika dan mekanisme yang lebih baik



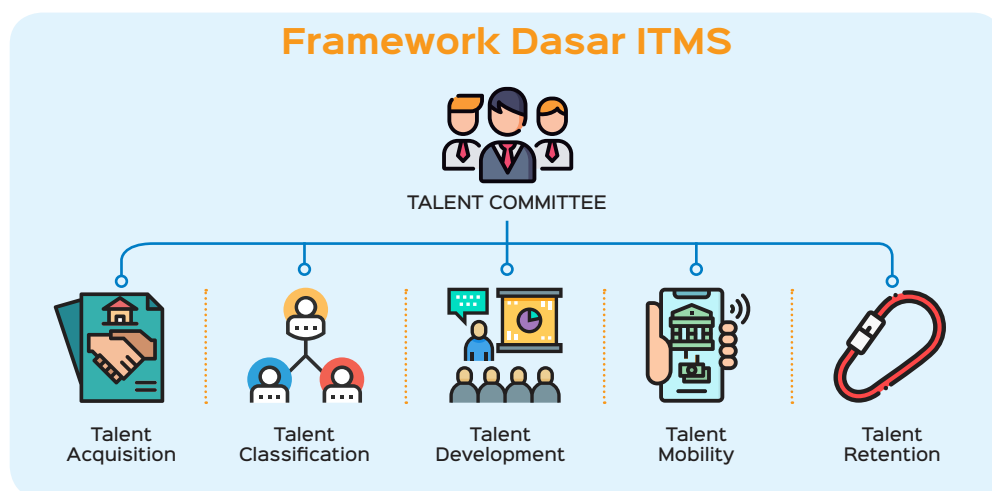
Good Governance

Menjaga tata kelola proses pemelihan calon direksi BUMN



PROGRAM DATA DAN TI

Dalam pengimplementasian ITMS, *framework* dasar yang digunakan meliputi *Talent Acquisition*, *Talent Classification*, *Talent Development*, *Talent Mobility* dan *Talent Retention* dimana dalam setiap tahap tersebut dilaksanakan oleh *Talent Committee* sebagaimana gambar berikut:



Untuk dapat mengimplementasikan masing-masing tahapan dalam ITMS tersebut di atas, maka *Talent Committee* memiliki peranan yang sangat penting. Adapun *Talent Committee* mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Berperan aktif dalam proses *Talent Acquisition* untuk Kandidat Direksi;
2. Menetapkan *Talent Classification* Calon Kandidat Direksi;
3. Menyusun program dan pelaksanaan *Talent Development*
4. Menyusun pelaksanaan *Talent Mobility* berdasarkan keputusan Menteri BUMN;
5. Menyusun Sistem Retensi.

4. *Talent Development*

Merupakan proses mobilisasi bagi para kandidat potensial untuk mengembangkan kompetensinya pada sektor/ industri yang sama atau sektor/industri yang berbeda yang dikelola oleh Kementerian BUMN.

5. *Talent Retention*

Merupakan usaha dalam mempertahankan *talenta* sebagai calon Direksi BUMN misalkan akselerasi karir, *reward and recognition program*, *special development program* dan lain-lain.

Selanjutnya, penjelasan mengenai masing-masing tahapan dalam ITMS adalah sebagai berikut:

1. *Talent Acquisition*
Merupakan tahapan akuisisi *talent* yang bersumber dari Pegawai terbaik Perusahaan BUMN, Kementerian BUMN dan *External* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
2. *Talent Classification*
Merupakan proses menetapkan (*slotting*) *talent* berdasarkan *mapping* asesmen ke dalam Box dengan dimensi: 1. *Function*; 2. Sektor BUMN; 3. Kelas BUMN.
3. *Talent Mobility*
Merupakan proses pengembangan kandidat potensial, pada umumnya dimulai dengan adanya kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Hal tersebut bisa diperoleh dari (*cross*) *mentoring* serta pelatihan yang diberikan.

Standarisasi Talent Management di Perusahaan

Pengelolaan *talent* di perusahaan sangat penting dan mendesak untuk dilakukan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam proses perencanaan suksesi kepemimpinan. Oleh karena itu, perlu untuk mendesain dan membangun sistem yang terintegrasi dalam mengelola *talent executive* BUMN. Untuk mendukung pengimplementasian *Integrated Talent Management System* (ITMS) yang dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN, maka salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah melalui standarisasi proses *Talent Management* di masing-masing perusahaan BUMN.



Di setiap BUMN mungkin memiliki standar dan pendekatan yang berbeda-beda terkait pengelolaan *talent*. Namun, dalam hal ini Kementerian BUMN menetapkan standarisasi *Talent Management* melalui aplikasi ITMS yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk BUMN-BUMN lain. Sehingga ITMS menjadi sistem yang terintegrasi dalam mengelola *talent executive* BUMN secara keseluruhan.

Talent Committee

Dalam proses standarisasi *Talent Management* di masing-masing perusahaan BUMN, akan dilakukan oleh *Talent Committee* berdasarkan *guiding principle Talent Management* yang ditetapkan.

1. Peran Talent Committee

Adapun peran dari *Talent Committee* tersebut adalah memastikan tersedianya *talent pipe line* dengan:

- Berperan aktif dalam proses *talent acquisition*
- Menetapkan *talent classification*
- Mendorong pelaksanaan *talent development*
- Mempercepat *talent mobility*
- Meretensi *Top Talent*

Dalam panduan ini, peran *talent committee* hanya akan difokuskan pada pemilihan *talent (talent acquisition)* dan *talent classification* khususnya untuk posisi pejabat eksekutif BOD – 1 atau setingkat.

2. Peserta Talent Committee

Dalam pelaksanaan *Talent committee* tersebut, peserta terdiri atas:

Penanggung Jawab	: Direktur Utama
Ketua Komite	: Direktur yang men-supervisi fungsi <i>Human Capital</i>
Anggota	: <i>Board of Director (BOD)</i> fungsi lainnya
Sekretaris	: <i>General Manager (BOD-1)</i> pada fungsi <i>Human Capital</i> .

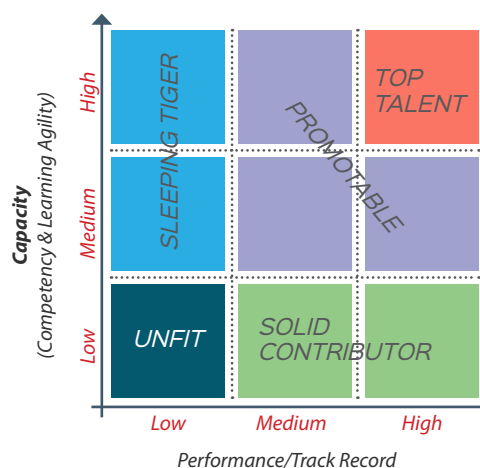
Standarisasi Talent Management

Dalam melakukan standarisasi *Talent Management*, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya adalah *General Principle*, Definisi, dan Mekanisme *Talent Management*. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. General Principle

Pendekatan yang digunakan dalam ITMS untuk melakukan standarisasi *Talent Management* adalah pendekatan kinerja dan kapasitas dengan pemetaan menjadi 5 (lima) klasifikasi (*Top Talent*, *Promotable*, *Solid Contributor*, *Sleeping Tiger*, dan *Unfit*)

Talent Management ITMS



2. Definisi Masing-Masing Klasifikasi

Berdasarkan 5 (lima) klasifikasi yang dilakukan dalam *Talent Management*, penjelasan dari masing-masing klasifikasi adalah sebagai berikut:

a. Top Talent

Merupakan *Top Talent (Future Leader)* yang memiliki kompetensi tinggi/unggul dan mampu mengoptimalkannya ke dalam pekerjaan sehari-hari. Pegawai dalam klasifikasi ini merupakan kandidat utama yang akan diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi agar dapat mengembangkan kapasitasnya.

b. Promotable

Merupakan pegawai yang memiliki kinerja dan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga mampu memenuhi target yang diberikan, namun masih terdapat area untuk pengembangan agar unggul dalam kinerja dan kompetensi. Pegawai dalam klasifikasi ini merupakan kandidat yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi.

c. Solid Contributor

Merupakan pegawai yang mampu menunjukkan kinerja sesuai atau melebihi target yang ditetapkan secara konsisten, namun kompetensi masih perlu ditingkatkan. Pegawai dalam klasifikasi ini pola pengembangannya lebih diarahkan ke jenis pekerjaan yang serupa dengan pekerjaan ini.

d. Sleeping Tiger

Merupakan pegawai yang memiliki kompetensi yang memenuhi dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, namun belum mampu mengoptimalkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Pegawai dalam klasifikasi ini pola pengembangannya lebih diarahkan ke posisi lainnya yang lebih sesuai (Contoh: *Job and Location Fit*)



PROGRAM DATA DAN TI

e. *Unfit*

Merupakan pegawai yang belum mampu memenuhi standar kompetensi dan kinerja yang ditetapkan sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pegawai dalam klasifikasi ini perlu diperhatikan khusus terkait dengan kontribusinya di organisasi

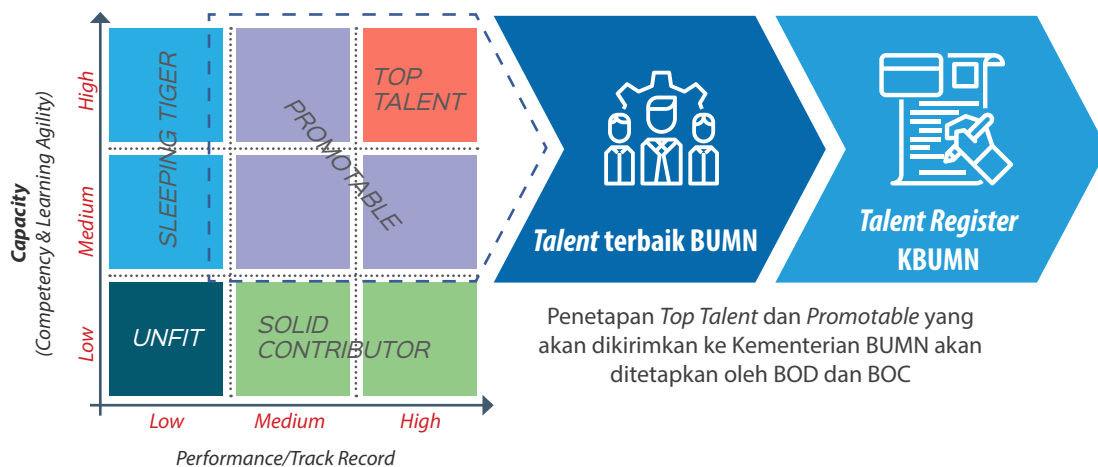
Penyampaian Data Talent

Data/dokumen terkait *talent* yang harus disampaikan adalah :

1. *Curriculum Vitae* (format standar dari Kementerian BUMN)
2. Hasil Asesmen
3. Data Kesehatan
4. Data *Performance*
5. Data Total Annual Nett Income (TANI).
6. Data *Track Record*
7. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
8. Label Personal

Semua data harus dipenuhi karena sebagai dasar *approval* untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu *Talent Source*. Apabila terdapat *talent* di perusahaan masing-masing yang dinilai sebagai *top performer* (*top talent & Promotable*) namun belum memiliki hasil asesmen yang sesuai dengan ketentuan Kementerian BUMN atau hasil asesmen sudah tidak berlaku, maka data *talent* tetap dikirimkan terlebih dahulu ke Kementerian BUMN dan secara paralel dilakukan asesmen kepada pegawai tersebut. Sepanjang *talent* tersebut belum memiliki hasil asesmen yang standar, maka data *talent* dimaksud akan tetap berada di tahap *Talent Register*.

TALENT DARI BUMN



Penyampaian Hasil Talent Classification

1. Setelah *Talent Committee* menetapkan *talent classification*, maka selanjutnya unit fungsi *human capital* mempersiapkan *guiding principle* metode pengembangan pegawai sesuai dengan *talent classification*nya masing-masing. *Guiding principle* tersebut disampaikan ke Direksi yang menjadi atasan langsung masing-masing *talent*.
2. Selanjutnya atasan langsung dari *talent* tersebut menyampaikan *feedback* yang terkait dengan *talent development* dan juga pengembangan karir.



KOMITMEN BERSAMA ITMS



100% BOD dan > 20% BOD-1

Jumlah *talent* perusahaan masuk menjadi *talent* di ITMS sesuai jumlah target



Penerapan *Talent Management*

Seluruh perusahaan wajib menerapkan *talent management*



Peningkatan *Human Capital* BUMN

Kebijakan dan investasi terkait *Human Capital* masuk ke dalam RKAP dan RJPP serta di-evaluasi periodik



Sinergi *Human Capital* Antar BUMN

BUMN yang telah memiliki sistem HC yang baik *sharing* dan berbagi pada BUMN lain



Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas)

Kementerian BUMN membangun *Knowledge Management System* (KMS) yang terdiri dari tiga bagian penting, yaitu *electronic sharing* (*e-sharing*), *electronic learning* (*e-learning*), dan *electronic repository* (*e-repository*).

Aplikasi Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas) merupakan media implementasi KMS untuk *e-sharing*, yaitu pembelajaran sosial melalui berbagi ide/gagasan serta bekerja secara kolaboratif (*social learning and collaboration*). SiBagas mampu memfasilitasi; (1) penyampaian, pertukaran, pengayaan, dan penyebaran informasi, ide, gagasan, pemikiran dan pengetahuan di lingkungan Kementerian BUMN; (2) Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Melalui aplikasi ini, insan Kementerian BUMN dituntut untuk memasuki aktivitas berbagi pengetahuan melalui www.sibagas.bumn.go.id (SiBagas), sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Untuk mengaktifkan SiBagas di *Mobile Device*, terlebih dahulu harus *men-download* aplikasi SAP JAM di Google Play (Android) atau App Store (IOS).

Dengan penggunaan yang optimal atas aplikasi ini, diharapkan akan tercapai peningkatan efektivitas dan produktivitas seluruh komponen di Kementerian BUMN. Akhirnya, cita-cita menjadikan Kementerian BUMN sebagai *learning organization* dapat diwujudkan.

Dalam rangka mendorong proses transformasi Kementerian BUMN menjadi sebuah organisasi pembelajar (*learning organization*) perlu diciptakan atmosfer yang kondusif untuk dapat mengembangkan kapasitas diri melalui proses mendapatkan, menyimpan, menyebarluaskan, menerapkan, dan mengevaluasi/ menyempurnakan pengetahuan yang ada baik yang sudah tertulis ataupun yang masih dalam diri masing-masing individu pegawai.

Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya yang terencana, sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* organisasi dalam bentuk manajemen pengetahuan. Guna mendorong implementasi manajemen pengetahuan saat ini, Kementerian BUMN telah membangun Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas) yang dapat memfasilitasi penumbuhan, penyebaran, penyimpanan informasi, gagasan, dan pengetahuan.

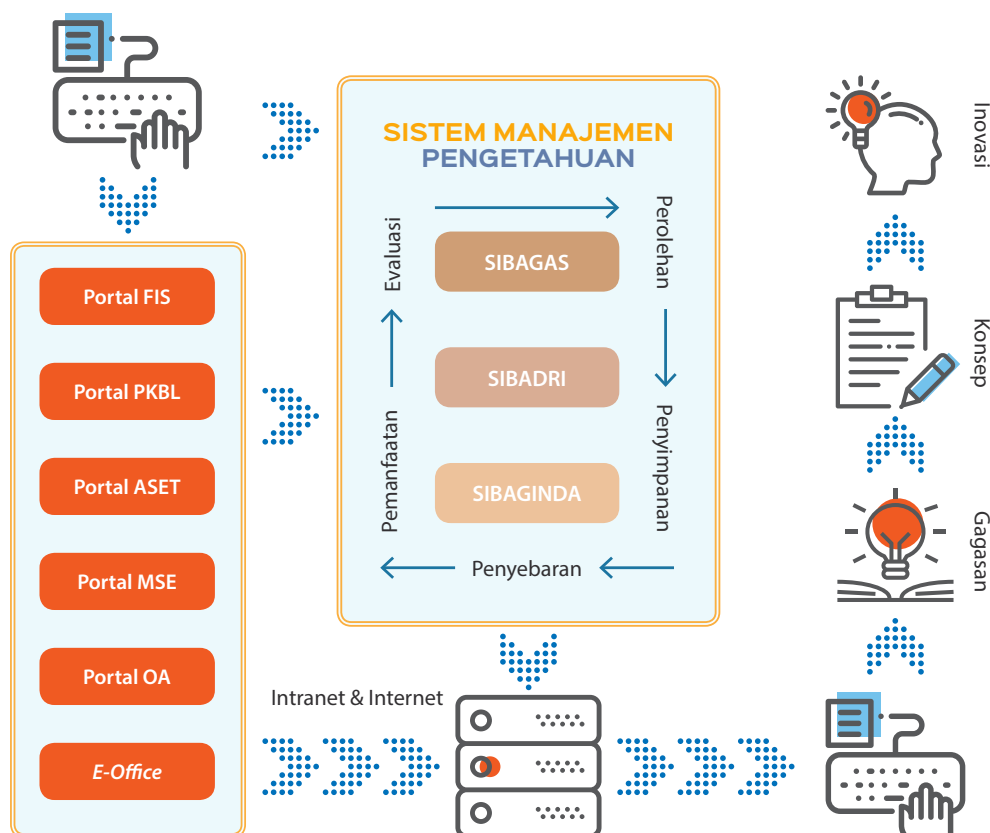
Pada prinsipnya, aplikasi manajemen pengetahuan sekurangnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan tiga komponen dasar yaitu teknologi komunikasi, teknologi kolaborasi, dan teknologi *storage & retrieval*. Sistem *knowledge management* memiliki manfaat yang sangat berguna, diantaranya:

1. Pengetahuan adalah asset paling berharga dan sumber *competitive advantage*;
2. Tingkat kadaluarsa pengetahuan sangat cepat, sekitar 500 hari, bahkan di beberapa sektor bisa lebih cepat lagi;
3. "*Reinventing the Wheel*"; tidak tahu apa yang sudah diketahui; tidak tahu di mana mengakses pengetahuan, (*costly and inefficient activity*);



PROGRAM DATA DAN TI

4. Berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) adalah kekuatan: pengetahuan membangun kepercayaan dan kepercayaan membangun pengetahuan;
5. Alur pengetahuan: ide - konsep - inovasi



Setiap insan Kementerian BUMN yang menggunakan fasilitas Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas) ini, harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, sebagaimana berikut ini:

1. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi, ide, gagasan, dan pemikiran secara obyektif, rasional, dan beradab.
2. Berperilaku positif dan berpikiran terbuka.
3. Peka terhadap keberagaman latar belakang, karakter dan minat pengguna lain.
4. Menghormati ide dan pemikiran orang lain dan menjaga orisinalitas karya.
5. Menggunakan bahasa jelas, santun, dan mudah dipahami.
6. Tidak menggunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kepentingan kedinasan.
7. Tidak menyebarkan rahasia negara dan rahasia jabatan.
8. Tidak melakukan penghinaan, intimidasi, *bullying*, ujaran kebencian atas dasar SARA dan keterbatasan.
9. Tidak menyebarkan konten pornografi dan pornoaksi atau hal-hal lain yang bertentangan dengan norma kesopanan.

10. Tidak menggunakan aplikasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Aparatur Kementerian BUMN.

11. Pelanggaran kode etik menimbulkan konsekuensi teguran, penghapusan konten, penghapusan akun dan penegakan ketentuan dan peraturan organisasi.

Pada aplikasi ini, juga diterapkan sistem poin yang ditujukan untuk mendorong penggunaan SiBagas di lingkungan Kementerian BUMN. Setiap aktivitas pada Sibagas akan dinilai dalam poin-poin yang dapat dikumpulkan, dan dalam satu periode waktu tertentu dapat ditukar dengan *merchandise*.



Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINADINE)

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi atau *e-government* dalam proses pemerintahan telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan *e-government* merupakan upaya Pemerintah untuk mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Tata Naskah Dinas Elektronik yang merupakan salah satu bentuk implementasi *e-government* tersebut, diyakini akan mempercepat proses dalam penanganan surat dan komunikasi kerja, karena prosedur standar yang biasanya dilakukan secara manual dialihkan pada sistem komputerisasi. Dengan Tata Naskah Dinas Elektronik, kinerja dalam hal koordinasi dan penanganan surat juga akan meningkat karena sistem aplikasi memungkinkan semua aktivitas berlangsung secara *real time* yang dibantu dengan teknologi informasi.

Selain itu, penerapan *e-government* dan Tata Naskah Dinas Elektronik juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pembuatan petunjuk pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN. Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik, tercapainya efektivitas dan efisiensi serta kelancaran proses penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Adapun sasaran dari Tata Naskah Dinas Elektronik, adalah:

1. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN;
2. Terwujudnya keterpaduan Tata Naskah Dinas Elektronik pada seluruh unit di lingkungan Kementerian BUMN;
3. Lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam Tata Naskah Dinas;
4. Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam Tata Naskah Dinas; dan
5. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Tata Naskah Dinas.

Sementara manfaat dari Tata Naskah Dinas Elektronik, adalah:

1. Terwujudnya percepatan *e-government*
Pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik akan memberikan manfaat berupa penghematan sumber daya, seperti tenaga, kertas, waktu, dan biaya karena mengurangi jumlah Naskah Dinas yang harus dicetak. Efektivitas dan efisiensi pekerjaan dapat dicapai dengan tersampainya informasi secara langsung atas Naskah Dinas atau informasi lainnya yang memanfaatkan teknologi informasi, tanpa bergantung pada keberadaan kurir.
3. Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi
Pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik akan mendorong terjadinya reformasi birokrasi aparatur negara.
4. Mempercepat komunikasi dan proses koordinasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.
5. Kemudahan pengelolaan dokumen Naskah Dinas dan penggunaannya



PROGRAM DATA DAN TI

Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik akan memberikan keamanan dalam penyimpanan dokumen, kemudahan dalam menangani dokumen, dan keakuratan dalam pelacakan status dokumen.

Aplikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik (SiNadine) merupakan proses korespondensi dilakukan secara *online*/elektronik sehingga proses tata persuratan di lingkungan Kementerian BUMN lebih efisien dan dilakukan dengan lebih cepat. Kementerian BUMN telah mengimplementasikan aplikasi SiNadine selama tahun 2017.

Aplikasi ini dibangun dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktifitas kerja serta tertib administrasi di lingkungan Kementerian BUMN untuk menerapkan sistem tata naskah elektronik dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan komputer dan aplikasi *web based* guna memproses naskah dinas dan mempermudah arus informasi/lalu lintas naskah dinas di lingkungan Kementerian BUMN.

Cakupan Sistem aplikasi ini antara lain:

1. Komunikasi Eksternal
Komunikasi Eksternal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dalam hal ini dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar dengan instansi di luar Kementerian BUMN.
2. Komunikasi Internal
Naskah Dinas Internal merupakan Naskah Dinas Korespondensi meliputi Nota Dinas, Memorandum dan Surat Undangan. Aplikasi SiNadine akan memberikan fasilitas untuk pembuatan konsep Naskah Dinas keluar berdasarkan *template* pedoman TND Kementerian BUMN sampai dengan pengabsahan Naskah Dinas secara elektronik. Aplikasi SiNadine akan melakukan pengelolaan Naskah Dinas, pengagendaan dan penomoran Naskah Dinas keluar serta pendistribusian secara langsung, sehingga semua data tersimpan dalam Database. Untuk berkas Naskah Dinas keluar yang berbentuk dokumen fisik dilakukan *scanning* dan diunggah pada Aplikasi SiNadine menjadi *file Digital*.

3. Disposisi
Disposisi merupakan perintah atasan terhadap bawahan dalam menindaklanjuti surat masuk. Aplikasi SiNadine memberikan mekanisme pembuatan dan metode koordinasi antara pembuat dan penerima dalam menyelesaikan satu alur disposisi
4. Pembuatan Naskah Dinas dengan Template
Pembuatan Naskah Dinas dengan menggunakan *template* akan memberikan kemudahan dan keseragaman, dalam hal ini aplikasi SiNadine. Proses melengkapi *template* dengan data yang diperlukan dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi penyunting teks (*text editor*) yang disediakan di situs (*web*), tanpa harus membuka aplikasi lain.
5. Penomoran Naskah Dinas
Penomoran seluruh Naskah Dinas Kementerian BUMN diagendakan melalui aplikasi SiNadine.
6. Pengagendaan Pengiriman/Ekspedisi Naskah Dinas Korespondensi Ekstern.
7. Fasilitas Arsip Elektronik
Penyimpanan seluruh Naskah Dinas dalam bentuk *Soft Copy* untuk memudahkan pencarian. Untuk kepentingan arsip, berkas Naskah Dinas Internal dicetak dan ditandatangani pejabat.
8. Fasilitas Pencetakan
Aplikasi SiNadine menyediakan fasilitas pencetakan data sesuai kebutuhan (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan).



PROGRAM LAYANAN HUKUM

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Asdep Layanan Hukum BUMN merupakan unit kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.

Tugas pokok Asisten Deputi (Asdep) Layanan Hukum BUMN adalah untuk melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan hukum terkait kegiatan pembinaan dan/atau aksi korporasi BUMN dan/atau Perseroan Terbatas.

Fungsi Asisten Deputi Layanan Hukum BUMN antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan koordinasi pemberian dukungan aspek hukum terkait aksi korporasi yang meliputi pelaksanaan privatisasi, restrukturisasi, penyertaan modal, pendayagunaan aset dan sinergi, penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap, penghapusan piutang, pelaksanaan PSO BUMN, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris serta aksi korporasi lainnya;

2. Penyiapan koordinasi penyusunan pendapat hukum (legal opinion) dan/atau keterangan ahli terkait pembinaan dan/atau aksi korporasi BUMN;
3. Penyiapan koordinasi penyusunan penyempurnaan dan Perubahan AD BUMN;
4. Pemberian konsultasi kepada Kementerian BUMN dan BUMN terkait dengan pembinaan dan/atau aksi korporasi BUMN.

Struktur organisasi Asdep Layanan Hukum BUMN terdiri dari dua bidang, yakni Bidang Layanan Hukum BUMN I dan Bidang Layanan Hukum BUMN II.

Maksud dan tujuan dari penyusunan *annual report* Asdep Layanan Hukum BUMN Tahun 2017 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Asdep Layanan Hukum BUMN Tahun 2017.

Pencapaian target kinerja atas IKU Asdep Layanan Hukum BUMN Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Perubahan Anggaran Dasar BUMN	Perubahan Anggaran Dasar BUMN	dokumen	120	107	89,16 %
2	Dukungan aspek hukum terkait aksi korporasi	Usulan kebijakan permasalahan aset BUMN	paket	1	1	100 %
		Keputusan Menteri BUMN tentang Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN	dokumen	120	180	150 %
		Pelaksanaan privatisasi dan/atau restrukturisasi	dokumen	1	1	100 %
		Pelaksanaan pendayagunaan aset dan sinergi	paket	1	1	100 %
		Pelaksanaan penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap	paket	1	1	100 %
3	Pengkajian dan perumusan aspek legal terkait pembinaan dan/atau aksi korporasi BUMN	Penyiapan koordinasi penyusunan pendapat hukum (Legal Opinion)	rekomendasi kebijakan	12	12	100 %
4	Pemberian konsultasi terkait pembinaan dan/atau aksi korporasi BUMN	Pemberian konsultasi kepada Kementerian BUMN dan BUMN terkait dengan pembinaan dan/atau aksi korporasi BUMN	rekomendasi kebijakan	24	28	116,66 %
5	Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel	Pemanfaatan anggaran	%	95 %	83 %	87 %



PROGRAM LAYANAN HUKUM

Rencana kinerja atas IKU Asdep Layanan Hukum BUMN Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penyempurnaan dan Perubahan Anggaran Dasar BUMN	Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah tentang BUMN Perum	RPP	2
		Tersusunnya Perubahan Anggaran Dasar BUMN Persero	dokumen	20
2	Pembinaan Aset BUMN	Tersusunnya Kebijakan Permasalahan Aset BUMN	kebijakan	1
		Terlaksana dukungan hukum proses pendayagunaan aset tetap dan sinergi BUMN	Dukungan hukum	12
		Terlaksana dukungan hukum proses penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap BUMN	Dukungan hukum	40
3	Peningkatan Pemahaman terkait Aksi Korporasi BUMN	Tersusunnya pendapat hukum (legal opinion)	Legal opinion	20
		Terlaksananya pemberian nasehat hukum kepada Pejabat Kementerian BUMN dan BUMN terkait dengan pembinaan dan/atau aksi korporasi BUMN	Nasehat hukum	60
4	Pelaksanaan dukungan Aspek Hukum Lainnya	Terlaksananya dukungan hukum proses privatisasi dan/atau restrukturisasi	Dukungan Hukum	4
		Tersusunnya Surat Keputusan Menteri BUMN terkait Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN	Surat Keputusan	120
5	Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel	Pemanfaatan anggaran	%	95





KETERBUKAAN INFORMASI

Keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN, yang di dalamnya mencakup ruang lingkup kewenangan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berada di Bagian Humas dan Protokol, serta mekanisme penjawaban permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait.

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BUMN

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian BUMN berada di Bagian Humas dan Protokol yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kementerian BUMN menerima dengan terbuka setiap permohonan dari masyarakat atau seluruh pemangku kepentingan secara langsung, tidak langsung. PPID Kementerian BUMN juga melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui surat elektronik yang ditujukan melalui alamat: ppid@bumn.go.id serta melalui portal publik dengan pengisian formulir permohonan informasi publik.



**Kementerian Badan
Usaha Milik Negara**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Gambir, Kota Jakarta Pusat 10110



021 - 29935678



021-29935740

Setiap permohonan informasi, kemudian akan diproses, yang secara umum membutuhkan waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing pelayanan, terhitung sejak diterima/mendapat disposisi hingga pengesahan jawaban oleh PPID setelah berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Bagian Humas dan Protokol sebagai pelaksana pelayanan informasi publik, saat ini terdiri atas seorang Kepala Bagian, tiga orang Kepala Subbagian, tiga orang Pelaksana PNS, dan enam orang Pelaksana Non-PNS. Saat ini, pelayanan permohonan informasi publik dilakukan oleh satu orang pelaksana non-PNS.

Selama tahun 2017, PPID Kementerian BUMN menerima 31 (tiga puluh satu) permohonan informasi publik, 6 (enam) di antaranya tidak dapat diproses/ditolak dengan alasan tidak melengkapi persyaratan permohonan sesuai dengan ketentuan. Adapun untuk tahun 2017, PPID Kementerian BUMN tidak menemukan adanya kasus sengketa informasi publik.

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Eksternal

Sesuai implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN, khususnya mengenai lingkup kewenangan PPID Kementerian BUMN, dianggap masih dapat disanggahkan dalam sengketa informasi mengingat Komisi Informasi Pusat berpedoman pada makna yang berbeda dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi, "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik".



KETERBUKAAN INFORMASI

Hal ini bertentangan dengan semangat Kementerian BUMN untuk tidak ikut campur dalam pengurusan dan/atau bisnis perusahaan yang telah menjadi kewenangan Direksi BUMN sesuai pasal 91 UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 karena terdapat permohonan informasi publik merupakan permohonan informasi atas bisnis yang dijalankan BUMN.

Kementerian BUMN berpendapat permohonan informasi tersebut selayaknya ditujukan langsung kepada BUMN yang mana pemenuhannya mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian pemahaman antara Komisi Informasi Pusat sebagai badan yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah dalam memutus sengketa apabila terdapat pengajuan keberatan informasi publik dengan Kementerian BUMN sebagai Badan Publik.

• Internal

Adapun kendala internal yang dihadapi Kementerian BUMN dalam pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

- a. Proses penetapan daftar Informasi publik dan daftar informasi dikecualikan yang masih berjalan sehingga menyulitkan dalam pemenuhan permohonan informasi publik. Dalam pemenuhannya, Bagian Humas dan Protokol berkoordinasi dengan unit kerja terkait yang menguasai informasi yang diminta.
- b. Penyediaan ruangan permohonan informasi yang belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia yang khusus menangani pelayanan informasi publik juga dapat menghambat proses pelayanan informasi publik khususnya dalam hal mentertibkan administrasi permohonan informasi publik.
- c. Pembentukan tim kerja PPID Kementerian BUMN yang kurang berjalan dengan efektif, menyebabkan proses pelayanan informasi kurang maksimal. Ke depan, tim PPID akan bekerja lebih efektif, khususnya dalam proses penyusunan pertimbangan dalam rangka pemenuhan permohonan informasi publik.

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

Kementerian BUMN terus berupaya untuk meningkatkan *value* di setiap lini, salah satunya adalah yang terkait dengan pelayanan informasi publik. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana
Penyediaan ruangan permohonan informasi serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi lainnya guna memaksimalkan proses pelayanan informasi agar dapat dilakukan secara prima.
2. Sumber Daya Manusia
Penambahan sumber daya manusia (SDM) yang khusus menangani pelayanan informasi publik minimal sebanyak 2 (dua) orang agar dapat memaksimalkan proses pemenuhan permohonan informasi publik.
3. Klasifikasi Informasi
Proses klasifikasi daftar informasi Kementerian BUMN ditargetkan akan selesai tahun 2018. Daftar informasi yang telah diklasifikasikan akan ditetapkan melalui Keputusan PPID Kementerian BUMN sehingga diharapkan proses pelayanan informasi dapat berjalan efektif.
4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Kualitas permohonan informasi publik harus diikuti oleh pelayanan publik dalam permohonan informasi sehingga PPID Kementerian BUMN perlu meningkatkan kualitas pelayanan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis maupun pelatihan yang dilakukan dengan pihak Komisi Informasi Pusat melibatkan unit kerja Eselon II Kementerian BUMN selaku pemegang informasi sehingga terdapat pemahaman yang sama dalam kewajiban pemenuhan permohonan informasi.
5. Pembentukan Tim PPID
Proses pembentukan tim PPID Kementerian BUMN harus dilakukan penyesuaian dengan pembaruan anggota tim setiap tahunnya. Selain itu, pentingnya membangun kesadaran terhadap pemenuhan hak atas informasi setiap orang juga perlu dilakukan. Hal ini penting mengingat dinamika jenis permohonan informasi yang diterima selalu beragam sehingga memerlukan pembaruan tim PPID.



KODE ETIK APARATUR KEMENTERIAN BUMN

Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat pada Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Kementerian maupun dalam pergaulan sehari-hari. Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN sendiri, di susun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2012 tentang Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN.

MAKSUD DAN TUJUAN

Kode Etik dimaksudkan untuk:

1. Mewujudkan aparatur Kementerian BUMN yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas,
2. Peningkatan disiplin dan mengamalkan etika aparatur di lingkungan Kementerian BUMN

Kode Etik bertujuan untuk :

1. Meningkatkan disiplin pegawai;
2. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
3. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Kementerian;
4. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan menjaga iklim kerja yang kondusif; dan
5. Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional.

PENERAPAN KODE ETIK INSAN KEMENTERIAN BUMN

Di tahun 2017, Kementerian BUMN telah menekankan pada setiap pegawai di lingkungan Kementerian BUMN untuk patuh pada kode etik yang berlaku, sesuai dengan nilai-nilai dasar Etika Aparatur Kementerian BUMN, yakni sebagai berikut:

1. Integritas

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen dan kepatuhan pada peraturan yang ada serta mempertimbangkan benturan kepentingan.

- a. Bersikap, berperilaku, dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan.
- b. Konsisten dalam bersikap dan bertindak.
- c. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi Kementerian.
- d. Disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas.
- e. Komitmen terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab.

f. Melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

g. Menghindari benturan kepentingan yang menyebabkan suatu tindakan tidak objektif.

2. Profesionalisme

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang mendalam, pengalaman yang sesuai dan keterampilan yang memadai.

- a. Setiap aktivitas pelaksanaan tugas harus menggunakan alasan dan pertimbangan yang benar dalam rangka menerapkan kemandirian dan obyektivitasnya;
- b. Berorientasi terhadap hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas;
- c. Bekerja sesuai dengan standar kinerja.

3. Produktivitas

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berbasis pada prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi baik dari sisi waktu, biaya dan sumberdaya lainnya.

- a. Mampu bekerja keras.
- b. Mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif.
- c. Memberikan kontribusi signifikan bagi target yang telah ditetapkan.

4. Inisiatif

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan dengan berlandaskan pada semangat proaktif, kepeloporan dan perbaikan berkelanjutan.

- a. Mampu menyampaikan ide-ide baru dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian.
- b. Mempelopori tindakan untuk mencapai tujuan Kementerian dalam batas kewenangannya
- c. Mengambil tindakan positif sesuai dengan batas kewenangannya melebihi apa yang diminta untuk mencapai tujuan.
- d. Bersikap proaktif tanpa diminta atau tanpa menunggu pihak lain.
- e. Mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
- f. Bertekad kuat untuk melakukan tugas dengan perbaikan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kementerian BUMN juga memastikan pada seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN untuk patuh dan mentaati setiap kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan, sebagai bentuk penerapan kode etik aparatur Kementerian BUMN, yakni sebagai berikut:

Kewajiban yang harus dilaksanakan terkait penerapan kode etik aparatur Kementerian BUMN adalah:



Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN

1. Menghormati kebebasan dan perbedaan agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
2. Bekerja sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh Kementerian.
 - a. Menjaga nama baik serta bertindak untuk kepentingan negara, pemerintah, Kementerian, dan tidak untuk kepentingan pribadi dan golongan.
 - b. Menggunakan statusnya sebagai aparatur Kementerian untuk hal-hal yang seharusnya dilakukan.
 - c. Melaporkan aktivitas yang bertentangan dengan hukum, prosedur serta kode etik kepada pejabat yang berwenang.
 - d. Berlaku jujur dan obyektif dalam melakukan tindakan, proses analisis, penyampaian usulan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan serta kebijakan yang dilakukan.
 - e. Mengoptimalkan sumber daya Kementerian dalam perwujudan BUMN ke arah visi Kementerian.
3. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki oleh Kementerian.
4. Memberikan pelayanan kepada pihak lain dan atau sesama aparatur dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya.
5. Menaati ketentuan jam kerja, peraturan administratif dan perintah kedinasan dengan penuh tanggungjawab.
6. Melaporkan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Kementerian.
8. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan. - - - - - →

Larangan terkait penerapan kode etik aparatur Kementerian BUMN adalah:

1. Bersikap diskriminatif dalam bertugas.
2. Menjadi pengurus dan anggota partai politik.
3. Ikut serta atau diikutsertakan sebagai pelaksana atau peserta atau menghadiri kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden dan atau pemilihan kepala daerah dan atau anggota legislatif.
4. Menyalahgunakan kewenangan jabatan:
 - a. Menyalahgunakan kedudukan dan statusnya sebagai aparatur Kementerian untuk hal-hal yang tidak patut dilakukan.
 - b. Sengaja secara perseorangan dan atau bekerja sama dalam aktivitas yang melanggar ketentuan peraturan serta prosedur dan kebijakan Kementerian yang berlaku.
5. Menyalahgunakan data dan atau informasi Kementerian.
6. Menghilangkan aset negara, dokumen milik negara/ Kementerian, dan barang bukti.
7. Menyalahgunakan aset dan dokumen milik negara/ Kementerian.
8. Menggunakan fasilitas Kementerian untuk selain kepentingan Kementerian.
9. Menerima dan memberi suap.
10. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Kementerian.
11. Membeli saham perdana BUMN dalam program *Initial Public Offering* (IPO).
12. Melakukan bisnis apapun juga dengan BUMN.





PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN, dilaksanakan Inspektorat Kementerian BUMN, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-10/MBU/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Inspektorat Kementerian BUMN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.

- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- g. Memastikan kecukupan pengendalian internal Kementerian BUMN;
- h. Pelaksanaan monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN;
- i. Koordinasi pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri BUMN.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Auditor Internal yang Profesional dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang Berkualitas di Lingkungan Kementerian BUMN.

Misi

1. Menghasilkan pengawasan intern yang mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan Keuangan Negara di lingkungan Kementerian BUMN.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas serta pengendalian intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian BUMN.
3. Melaksanakan proses pengawasan intern yang sesuai dengan Standar Profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
4. Melaksanakan pengawasan integritas di lingkungan Kementerian BUMN.

Tujuan

Tujuan Inspektorat adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas Keuangan Negara di lingkungan Kementerian BUMN.
2. Mendukung peningkatan integritas organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.
3. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas kinerja unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.
4. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Kementerian BUMN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan atas capaian kinerja setiap unit kerja yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri BUMN;



PENGAWASAN INTERNAL

Sasaran Strategis

Peta Strategi Renstra Inspektorat 2015-2019



JENIS DAN KEGIATAN PENGAWASAN INTERN

Audit

Audit adalah proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang terdiri dari aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas (3E). Audit kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban. Audit kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Audit dengan tujuan tertentu antara lain meliputi audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas penyelenggaraan SPIP.

Evaluasi

Kegiatan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Kegiatan evaluasi paling sedikit terdiri dari evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta evaluasi atas Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Evaluasi kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian dilakukan berdasarkan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang diterapkan khusus di lingkungan Kementerian dengan mangacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang (Kementerian PAN-RB).

Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan evaluasi terpisah untuk menilai mutu kinerja sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi terpisah dilakukan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang sesuai ketentuan perundang-undangan.



Pelaksanaan evaluasi terpisah harus mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi, metodologi, dan sumber daya. Dalam melakukan evaluasi, apabila diperlukan, evaluator dapat menggunakan metode atau alat lain yang sesuai seperti perbandingan (*benchmarking*), kuesioner, bagan arus, dan teknik kuantitatif. Inspektorat dapat meminta bantuan dari instansi pemerintah yang berkompeten untuk melakukan evaluasi terpisah.

Monitoring/Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan paling sedikit terdiri dari pemantauan berkelanjutan atas sistem pengendalian intern dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Yang dimaksud dengan pemantauan berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus-menerus dan menyatu dalam kegiatan Instansi Pemerintah. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang ditetapkan.

Reviu

Kegiatan reviu merupakan proses penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan oleh auditor yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Inspektorat wajib melaksanakan pekerjaan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian. Pelaksanaan reviu harus berpedoman pada Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Kementerian Keuangan).

Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya mencakup penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada BUMN, pemantauan LHKPN dan LHKASN, dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta penugasan lainnya berdasarkan penugasan Menteri BUMN/Sekretaris Kementerian BUMN.

Kegiatan Penunjang Pengawasan

Kegiatan penunjang pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan untuk menunjang terselenggaranya pengawasan intern yang tepat waktu, bermutu dan tepat guna. Kegiatan penunjang ini mencakup pengembangan kapabilitas Inspektorat dan profesionalisme SDM Inspektorat, Penyusunan rencana kerja berupa PKPT dan Peta Risiko Unit Kerja Kementerian BUMN, penyusunan RKA/Tapkin, penyusunan SOP/pedoman pengawasan, dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Inspektorat.

Pemaparan Hasil Pengawasan Intern

Seluruh hasil pengawasan intern akan didiskusikan dengan unit kerja yang diaudit untuk mendapatkan tanggapan atas hasil pengawasan tersebut. Tanggapan diharapkan dalam bentuk komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan. Untuk mendapatkan gambaran yang obyektif mengenai hasil pengawasan, seluruh atribut temuan pengawasan akan dipaparkan dan didiskusikan dengan unit kerja yang di audit.

HASIL AUDIT SEPANJANG TAHUN 2017

Sampai dengan tahun 2017 sudah dilaksanakan beberapa audit dengan tujuan tertentu dilaksanakan terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan audit adalah menilai aspek ekonomi, aspek efisiensi, efektivitas program/kegiatan, dan/atau aspek kepatuhan terhadap rencana, standar, dan ketentuan perundang-undangan, serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas internal di lingkungan Kementerian BUMN.



PENGAWASAN INTERNAL

Audit Kinerja

Pada tahun 2017, telah dilaksanakan audit kinerja atas laporan Tingkat Kesehatan BUMN. Dalam audit kinerja tersebut, Inspektorat membandingkan penilaian laporan Tingkat Kesehatan BUMN yang dijadikan sampel dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. *Output* dari audit tersebut adalah sebagai berikut:

1. LHA-05/INSPT.MBU/12/2017 hal Laporan Hasil Audit Kinerja atas Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Tahun 2016 pada Kedeputan Bidang Usaha Agro Industri dan Farmasi;
2. LHA-06/INSPT.MBU/12/2017 hal Laporan Hasil Audit Kinerja atas Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Tahun 2016 pada Kedeputan Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata;
3. LHA-07/INSPT.MBU/12/2017 hal Laporan Hasil Audit Kinerja atas Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Tahun 2016 pada Kedeputan Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media;
4. LHA-08/INSPT.MBU/12/2017 hal Laporan Hasil Audit Kinerja atas Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Tahun 2016 pada Kedeputan Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan;
5. LHA-09/INSPT.MBU/12/2017 hal Laporan Hasil Audit Kinerja atas Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Tahun 2016 pada Kedeputan Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan.

Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan audit dengan tujuan tertentu dengan output sebagai berikut:

1. *Probit Audit* atas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultan Kajian Proses Bisnis dan Organisasi Kementerian BUMN Tahun 2017.
2. *Probit Audit* atas Kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung Kantor pada Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2017.
3. Audit dengan tujuan tertentu atas penghapusan/pelelangan BMN tahun 2017 pada Kementerian BUMN.
4. *Probit Audit* atas Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Informasi Keuangan BUMN.
5. Audit dengan tujuan tertentu atas sewa kendaraan bermotor untuk eselon I dan eselon II tahun 2017.
6. Audit dengan tujuan tertentu atas pembayaran tunjangan kinerja tahun 2017 pada Kementerian BUMN.

HASIL EVALUASI DI TAHUN 2017

Inspektorat telah melakukan beberapa evaluasi selama tahun 2017. Hasil evaluasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. **Evaluasi Penggunaan Dana PMN di BUMN**
Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Perusahaan Penerima PMN telah menetapkan tujuan dan manfaat dana PMN bagi pemerintah dan perusahaan dalam kajian bersama penambahan PMN. Kajian bersama telah mengatur secara umum rencana penggunaan dana PMN baik jumlah ataupun waktu penggunaan beserta manfaat yang akan diperoleh Perusahaan Penerima PMN dan pemerintah. Perubahan penggunaan dana PMN dimungkinkan selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
2. **Evaluasi Benturan Kepentingan**
Kementerian BUMN telah mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindari adanya potensi benturan kepentingan, baik melalui himbauan, penandatanganan Pakta Integritas, maupun penetapan aturan. Selain itu, pada umumnya pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian BUMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang masih perlu mendapatkan perhatian.
3. **Evaluasi Inisiatif Anti Korupsi**
Kinerja sasaran strategis terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih diukur dengan Nilai Inisiatif Anti Korupsi. Kegiatan penilaian inisiatif antikorupsi merupakan penilaian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Capaian Nilai Inisiatif Anti Korupsi Kementerian BUMN tahun 2017 adalah sebesar 76,3 (dari skala 1-100). Skor tersebut berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 76. Hal tersebut menjadi parameter bahwa pembangunan Zona Integritas pada unit-unit Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN telah dilaksanakan secara efektif. Keberhasilan mencapai target selaras dengan program reformasi birokrasi yang semakin meningkat kualitasnya di lingkungan Kementerian BUMN.



4. Evaluasi Unit Pengendali Gratifikasi

Inspektorat selaku Unit Pengendali Gratifikasi yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN dalam rangka penegakan Per-05/MBU/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian BUMN dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: 14/S.MBU/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi merekomendasikan hal-hal diantaranya :

- Kementerian BUMN perlu menegaskan kembali kepada seluruh BUMN, anak perusahaan BUMN serta pihak ketiga lainnya tentang larangan pemberian gratifikasi kepada pejabat dan pegawai Kementerian BUMN dari BUMN-BUMN terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian BUMN.
- Menciptakan lingkungan pengendalian yang bersih (Mendukung GCG dan GG).

Pada tanggal 17 November 2017 telah dilakukan *sharing knowledge* dengan KPK terkait Unit Pengendalian Gratifikasi. Dari hasil pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan menjadi kesimpulan di dalam rapat yaitu :

- Untuk penyegaran dan *up dating* praktik yang baik dan perkembangan pengaturan gratifikasi, agar melakukan sosialisasi internal oleh Kementerian BUMN dengan melibatkan KPK. Sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh ASN di lingkungan Kementerian BUMN.
- Terkait saran KPK mengenai materi PER-No.05/MBU/2014 agar dilakukan telaahan untuk menyesuaikan dengan masukan dari KPK, khususnya terkait materi gratifikasi yang dikategorikan sebagai suap dan dimasukkannya *negative list* sebagai pembeda kategori suap dalam Permen gratifikasi.
- Mendukung dan membantu penyelenggaraan koordinasi antara KPK dengan Kedeputan Infrastruktur Bisnis cq Keasdepan Manajemen SDM Eksekutif terkait peran Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN.

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN DI TAHUN 2017

Selama tahun 2017, Inspektorat merencanakan kegiatan pengawasan intern melalui penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko. Pemantauan terhadap pelaksanaan PKPT melalui rapat internal berkala yang dilaksanakan mingguan, menjaga secara ketat kesesuaian pelaksanaan tugas dengan PKPT yang sudah ditetapkan.

Pengelolaan penugasan dalam rangka merealisasikan PKPT melalui pembentukan 3 (tiga) Tim Audit, mendukung soliditas kerja tim, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penugasan.

Secara umum, tugas dan fungsi Inspektorat Kementerian BUMN telah dilaksanakan sesuai dengan 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2017. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja, sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja yang terealisasi di atas 100% atau melampaui target yang ditetapkan, sementara 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai 97,73%. Capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2017 terinci, sebagai berikut:

- Keberhasilan kinerja sasaran strategis, terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif ditunjukkan dengan capaian tindak lanjut rekomendasi sebesar 97,73%, pelaksanaan PKPT sebesar 104%, dan tindak lanjut evaluasi pimpinan 100%.
- Keberhasilan kinerja sasaran strategis, terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih ditunjukkan dengan capaian nilai inisiatif anti korupsi sebesar 76,23 atau 100,3% dari target.
- Keberhasilan sasaran strategis, perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif didukung kinerja penyampaian PK dan RAB beserta KAK yang 100% sesuai dengan target;
- Keberhasilan sasaran strategis, terwujudnya SDM kompeten dan profesional didukung dengan target jam latihan pegawai yang terlampaui sebesar 219,55%.
- Keberhasilan sasaran strategis, terwujudnya organisasi pengelola korporasi yang modern yang ditunjukkan dengan keberhasilan mencapai target penyampaian Laporan Kinerja sesuai batas waktu (100%), Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kementerian BUMN (100%), dan Level Maturitas SPIP Kementerian BUMN (100%).

Keberhasilan mencapai target sasaran strategis didukung dengan pemantauan secara ketat yang dilakukan secara berkala (mingguan) serta adanya bantuan tenaga magang dari BUMN sebanyak 2 (dua) orang pada semester I/2017, dan 2 (dua) orang pada semester II/2017. Pada pemantauan mingguan, fokus pembahasan adalah evaluasi atas pencapaian IKU dan penyelesaian terhadap hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKPT.



PENGAWASAN INTERNAL

Walaupun hasil kinerja yang didapat semakin baik, namun masih terdapat beberapa upaya perbaikan (*area of improvement*) yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Melakukan peningkatan kompetensi SDM tenaga auditor maupun administratif agar dapat cepat tanggap terhadap pelaksanaan PKPT maupun kegiatan pengawasan non-PKPT ;
2. Melakukan penyempurnaan tata kelola Inspektorat melalui peningkatan kapabilitas APIP dan menerapkan standar mutu dokumen (ISO 9001:2015);
3. Melakukan peningkatan kualitas kegiatan Inspektorat dalam mendukung Reformasi Birokrasi, khususnya penguatan pengawasan yang terfokus pada peningkatan pemantauan SPIP Kementerian BUMN, penanganan WBS dan pengaduan masyarakat, pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, pemantauan benturan kepentingan, dan mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan berjenjang dari kinerja individu dan organisasi yang didukung oleh aplikasi manajemen kinerja organisasi.







KEBIJAKAN DAN PROGRAM RESTRUKTURISASI



HOLDING BUMN

Pada tahun 2017 Kementerian BUMN menyusun *Roadmap* BUMN yang terdiri dari 15 tema, dalam *roadmap* tersebut secara garis besar terdiri atas rencana pelaksanaan proyek-proyek BUMN, serta rencana restrukturisasi/*regrouping* BUMN ke dalam 6 (enam) *Holding* BUMN, yaitu *Holding* Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan, *Holding* Sektor Pertambangan, *Holding* Sektor Migas, *Holding* Sektor Perumahan, *Holding* Sektor Konstruksi dan Jalan Tol serta *Holding* Sektor Pangan.



Perbankan dan Jasa Keuangan

1. PT Danareksa – *Leader*
2. PT Bank Mandiri Tbk
3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
4. PT Bank Negara Indonesia Tbk
5. PT Bank Tabungan Negara Tbk
6. PT Pegadaian
7. PT Permodalan Nasional Madani



Pertambangan

8. PT Indonesia Asahan Aluminium – *Leader*
9. PT Bukit Asam Tbk
10. PT Aneka Tambang Tbk
11. PT Timah Tbk



Konstruksi Jalan Tol

12. PT Hutama Karya – *Leader*
13. PT Jasa Marga Tbk
14. PT Wijaya Karya Tbk
15. PT Waskita Karya Tbk
16. PT Indra Karya
17. PT Yodya Karya



Minyak dan Gas

18. PT Pertamina – *Leader*
19. PT Perusahaan Gas Negara Tbk



Pangan

20. Perum Bulog – *Leader*
21. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
22. PT Bhandha Ghara Reksa
23. PT Sang Hyang Seri
24. PT Perikanan Nusantara
25. PT Pertani
26. PT Berdikari
27. Perum Perikanan Indonesia



Konstruksi Perumahan

28. Perum Perumnas – *Leader*
29. PT Pembangunan Perumahan Tbk
30. PT Adhi Karya Tbk
31. PT Amarta Karya
32. PT Indah Karya
33. PT Virama Karya
34. PT Bina Karya

Rencana restrukturisasi/*regrouping* BUMN ini, pada dasarnya harus memperhatikan ketentuan pasar modal, serta mempertimbangkan reaksi dari pasar yang sangat sensitif terhadap rencana perubahan organisasi perusahaan. Tantangan lain yang dihadapi adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *regrouping*, baik dari sisi jumlah BUMN maupun dari pemangku kepentingan lain yang terlibat, menyebabkan banyak kepentingan yang harus diselaraskan dengan tujuan dasar pembentukan *regrouping*, yaitu untuk menjadikan BUMN lebih besar, kuat, dan lincah.

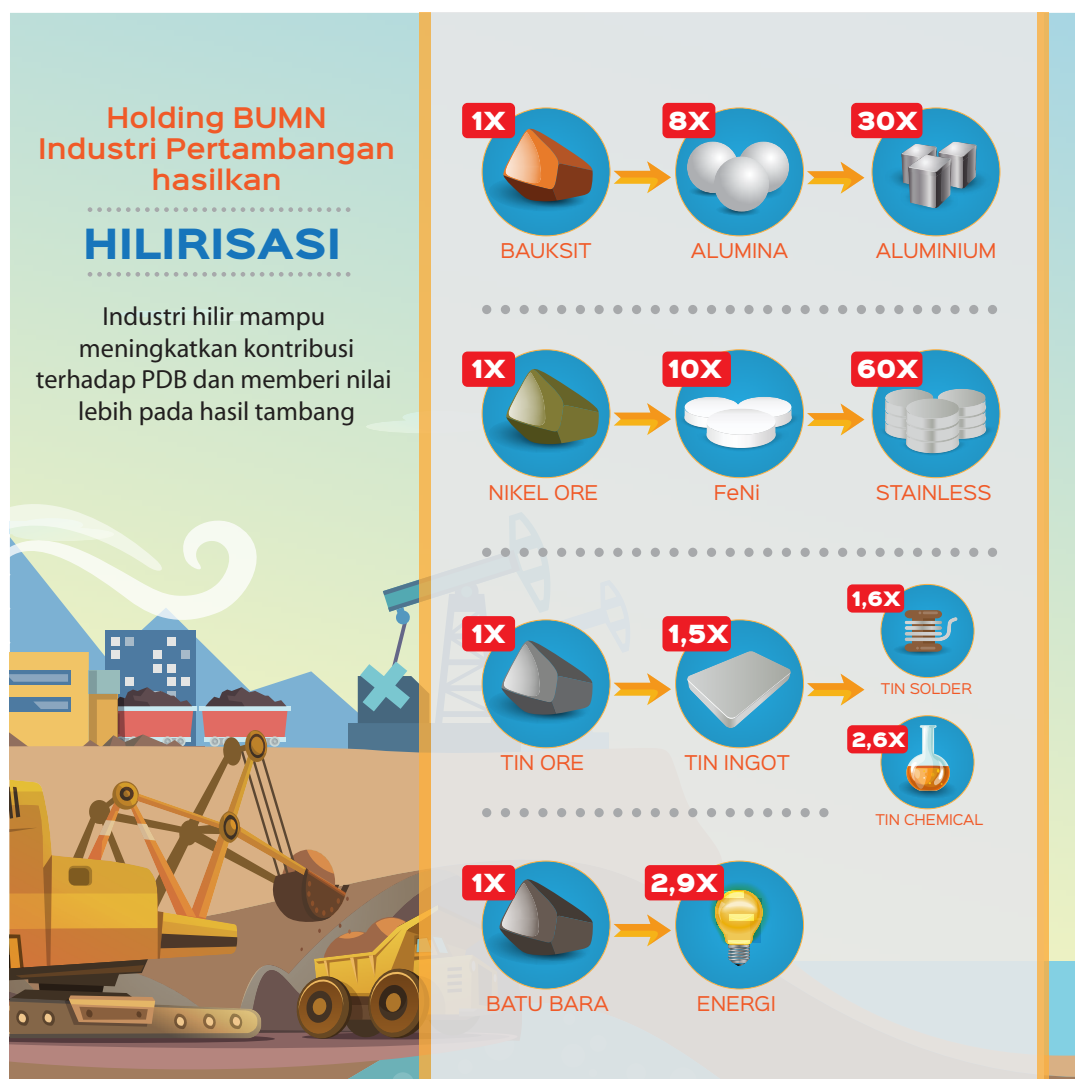
Di tahun 2017, Kementerian BUMN melalui Kedeputan Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha telah berhasil merealisasikan *Holding* Industri Pertambangan dan *Holding* Migas. Sebelumnya, telah terbentuk *Holding* Semen, *Holding* Perkebunan (PTPN), *Holding* Perhutani, dan *Holding* Pupuk.



HOLDING BUMN

Holding BUMN Industri Pertambangan

Pembentukan *holding* BUMN Industri Pertambangan diharapkan akan menjadikan BUMN Industri Pertambangan menjadi “besar, kuat dan lincah” dalam kegiatan penambangan dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam sebagai wujud pelaksanaan pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pembentukan *holding* BUMN Industri Pertambangan juga akan meningkatkan *bargaining power*, sinergi antar BUMN yang lebih baik, dan kontrol yang lebih baik dari Pemerintah.



Holding BUMN Industri Pertambangan terdiri dari 5 perusahaan yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk dan PT Freeport Indonesia. *Holding* BUMN Industri Pertambangan akan memiliki diversifikasi hasil tambang utama seperti Nikel, Bauksit, emas, tembaga, timah dan batubara.



Manfaat pembentukan *Holding* BUMN Industri Pertambangan antara lain:

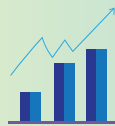
1. Peningkatan *business scale*, dimana setelah restrukturisasi, kapitalisasi pasar *holding* BUMN Industri Pertambangan menjadi yang ke 5 terbesar di Asia Pasifik (tidak termasuk Republik Rakyat Tiongkok), kapitalisasi pasar perusahaan tambang terbesar di Indonesia, dan menjadi perusahaan tambang terbesar di Asia Tenggara berdasarkan kapitalisasi pasar;
2. Diversifikasi produk dan bisnis, dimana dengan terbentuknya *holding* BUMN Industri Pertambangan maka *holding* akan relatif menghadapi siklus harga komoditas sehingga stabilitas kinerja dapat lebih terjaga.
3. Peningkatan posisi keuangan serta perbaikan solvabilitas dan likuiditas, dimana *holding* BUMN Industri Pertambangan akan memiliki *interest coverage ratio* sebesar 8,76X lebih baik dari pada rata-rata industri dan likuiditas menjadi lebih baik, melebihi rata-rata industri;
4. Terciptanya efisiensi biaya dengan adanya sinergi antara anggota *holding*, pembentukan *Holding* BUMN Industri Pertambangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Alumunium.

MANFAAT EKONOMI SOSIAL HOLDING BUMN INDUSTRI PERTAMBANGAN

HOLDING BUMN INDUSTRI PERTAMBANGAN



Menciptakan
efisiensi
biaya



Meningkatkan
Kemampuan
Finansial



Menciptakan
Business Scale
tingkat regional
dan Internasional



Diverifikasi
Produk

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



Berkontribusi
pada
ekonomi
Indonesia



Optimalisasi
Pengelolaan
SDA



Dividen, pajak,
dan royalti
untuk negara
meningkat

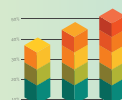


Pengendalian
efektif dengan
Span of Control

MASYARAKAT



Menciptakan
Lapangan
Kerja



Pendapatan
Daerah
Meningkat



Efisiensi harga
Produk
hasil tambang



Menciptakan
Industri Kecil
Baru



Holding BUMN Minyak dan Gas

Konsolidasi PGN ke Pertamina sejalan dengan pengelolaan bisnis gas pada beberapa negara-negara produsen gas. Pembentukan *Holding* BUMN sektor Migas yang melibatkan PGN dan Pertamina bertujuan agar penyediaan sumber energi berupa gas dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan lebih baik. Keunggulan Pertamina yang mempunyai kontinuitas suplai gas yang berasal dari domestik maupun impor ditambah jaringan distribusi gas PGN yang luas, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu Pemerintah terutama untuk merealisasikan integrasi pengelolaan gas dalam rangka peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik. Integrasi antara perusahaan yang mempunyai lini bisnis di sektor gas diharapkan dapat mendorong beberapa kunci pertumbuhan bisnis gas di Indonesia, yaitu kelangsungan penyaluran produksi gas hulu nasional, optimalisasi struktur *pricing* gas serta pengembangan infrastruktur industri gas yang terkoordinasi dengan model pengelolaan gas alam yang terintegrasi dan terkonsolidasi.

Pembentukan *Holding* Migas memberikan dampak positif bagi kedua perusahaan yaitu terciptanya nilai tambah dari sinergi operasional, sinergi capex, dan peningkatan kapasitas investasi. Sinergi operasional tercermin pada meningkatnya laba usaha dan laba bersih *Holding* Migas yang diproyeksikan mencapai USD11,7 miliar dan USD5,9 miliar pada tahun 2021. Sinergi capex diperoleh melalui berkurangnya tumpang tindih rencana investasi kedua perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, *Holding* Migas akan meningkatkan kapasitas investasi hingga mencapai USD15,5 miliar (Nilai Kini) selama 14 tahun ke depan. Total penambahan aset yang dapat diperoleh Pertamina melalui sinergi paska pembentukan *holding* diproyeksikan mencapai ±USD25,3 miliar atau setara dengan Rp329 triliun.

Manfaat Pembentukan *Holding* Migas, antara lain:

1. Peningkatan efisiensi investasi

Saat ini terjadi tumpang tindih infrastruktur yang dibangun oleh Pertamina dan PGN. Setelah dibentuknya *holding*, *holding* Migas mendelegasikan kepada *sub holding* gas sebagai representasi dalam pengelolaan gas bumi untuk melakukan kajian atas seluruh infrastruktur yang saat ini dimiliki secara menyeluruh dan juga rencana pengembangan ke depan terutama untuk menghindari pembangunan infrastruktur yang tumpang tindih atau tidak dibutuhkan yang akan disetujui oleh *holding*. Diperkirakan akan terjadi efisiensi investasi sebesar ±USD900 juta dengan adanya pembenahan dari tumpang tindih infrastruktur.

2. Peningkatan kapasitas *leveraging* dan perbaikan finansial
Dengan kemampuan untuk *blending* harga dan efisiensi biaya, *holding* Migas akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki struktur keuangan perusahaan.
Dengan diinbrengkannya saham Negara atas PGN ke Pertamina akan meningkatkan aset *Holding* Migas secara konsolidasi akan memberikan penambahan kapasitas kumulatif investasi ±USD32 miliar antara 2017-2030.
3. Kebijakan dalam penentuan harga
Holding Migas akan memiliki fleksibilitas untuk menentukan harga yang sesuai dengan tipe konsumen dimana supplier gas juga akan tetap mendapatkan pengembalian yang wajar. Untuk konsumen, akan dilakukan penentuan harga berdasarkan pendekatan regional dengan memastikan bahwa harga domestik masih lebih murah daripada harga impor. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk menjaga kesinambungan penyediaan gas dan juga untuk memberikan subsidi silang harga antara harga retail dan harga untuk industri.
4. Optimalisasi aliran gas secara nasional
Holding Migas dapat melakukan optimalisasi pengembangan distribusi gas dengan menggunakan rencana jaringan gas nasional akan terdiri dari kombinasi antara distribusi melalui pipa dan juga pengapalan. Hal ini akan memastikan suplai domestik antar wilayah.
5. Penurunan biaya produksi dan distribusi.
Sinergi dalam *Holding* Migas akan memberikan dampak positif terhadap harga jual gas nasional. Hal ini dikarenakan *Holding* Migas dapat menekan biaya penjualan melalui optimalisasi infrastruktur produksi dan jaringan distribusi gas yang sudah dimiliki oleh Pertamina dan PGN, sehingga tidak memerlukan biaya investasi untuk infrastruktur yang lebih besar.

Kementerian BUMN melalui Kedeputan Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata juga menginisiasi program *Holding* BUMN Rumah Sakit, yang merupakan wujud jika BUMN memiliki kemampuan untuk bersaing di industri kesehatan, dan mampu bekerja secara efektif dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Hal ini merupakan *roadmap* yang sudah sejak lama diharapkan untuk dapat menjadi kekuatan jejaring bagi RS milik BUMN dalam pelaksanaan *procurement* dan juga penguatan sumber daya manusia melalui *transfer of knowledge* dan *upskilling* tenaga medis dan non medis melalui *continuous medical improvement* dengan mekanisme *sharing* dan *benchmark*.



PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI BUMN

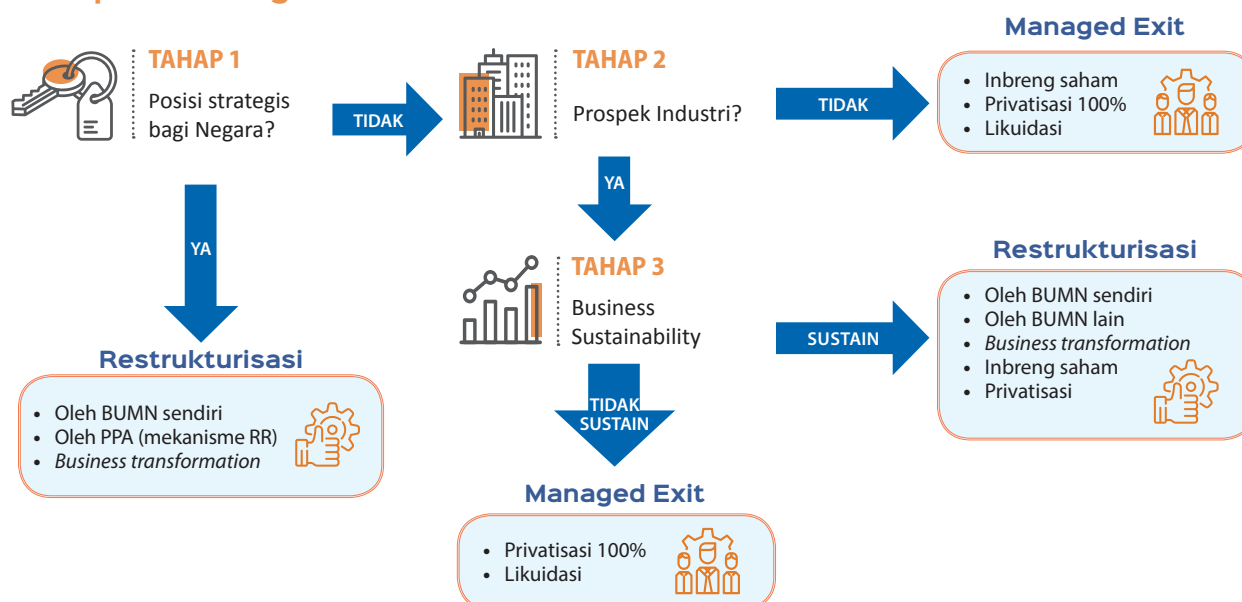
Secara praktis peran BUMN adalah sebagai stabilisator, dinamisator, sekaligus inovator dalam perekonomian nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa BUMN merupakan salah satu instrumen utama negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat banyak BUMN yang kinerjanya kurang baik, maka BUMN perlu diberdayakan secara optimal.

Solusi akan peningkatan kualitas BUMN adalah berkaitan dengan proses restrukturisasi yang dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki

kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

Selain itu, BUMN juga menjalankan program privatisasi yang merupakan penjualan saham ke masyarakat dan mengakibatkan berkurangnya persentase kepemilikan Pemerintah Republik Indonesia. Program privatisasi ini bertujuan agar nilai BUMN tersebut akan meningkat sesuai dengan tujuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak memberikan kerugian bagi Pemerintah. Sebaliknya nilai investasi Pemerintah di BUMN justru bertambah seiring dengan kemajuan BUMN setelah diberikan dana dan bantuan dari investor strategis.

Tahapan Penanganan BUMN dalam Restrukturisasi



Restrukturisasi BUMN

Kementerian BUMN melalui Kedeputan Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha telah melaksanakan Program Restrukturisasi BUMN dengan perkembangan pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. Penyelesaian Restrukturisasi PT Djakarta Lloyd (Persero)
 - a. Mengikuti *Tax Amnesty* dengan membayar Rp110 miliar dan menghapus kewajiban pajak sebesar Rp152 miliar.
 - b. *Performance* keuangan sudah baik, laba bersih meningkat dari Rp30 miliar (2016) menjadi Rp60 miliar (2017P), sehingga mulai mendapatkan kontrak-kontrak besar, antara lain: PLN minimal sebesar 2,5 juta ton per tahun.
 - c. *Clean Balance Sheet* melalui PMN *Non Tunai* sebesar Rp1 triliun.
2. Penyelesaian Restrukturisasi PT Primissima (Persero)
 - a. Mengikuti *Tax Amnesty* dengan membayar Rp5,6 miliar dan menghapus kewajiban pajak sebesar Rp17,6 miliar.
 - b. *Performance* keuangan sudah baik, laba bersih meningkat dari rugi bersih Rp9,08 miliar (2015) menjadi Rp2,4 miliar (2017P).
 - c. Melakukan sinergi dengan BUMN dalam rangka peningkatan pendapatan melalui penyediaan baju seragam dan batik karyawan.
- d. Perampingan Organisasi (Efisien).
- e. Secara umum, kondisi BUMN telah dinyatakan "Sehat" sehingga tugas pembinaannya dikembalikan kepada Kedeputan Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan.



PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI BUMN

- d. Melakukan sinergi dengan BUMN dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal kerja melalui pendanaan pengadaan benang.
 - e. Secara umum, kondisi BUMN telah dinyatakan “Sehat” sehingga tugas pembinaannya dikembalikan kepada Kedeputan Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media.
3. Penyelesaian Restrukturisasi PT Nindya Karya (Persero)
 - a. *Performance* keuangan sudah baik, laba bersih meningkat dari Rp68,62 miliar (2015) menjadi Rp208,8 miliar (2017P).
 - b. Ekuitas perusahaan mengalami peningkatan dari sebesar Rp608,67 miliar (2015) menjadi sebesar Rp950,92 miliar (2017P) sehingga lebih kompetitif dalam mengikuti tender.
 - c. Perusahaan sudah mampu untuk memperoleh pendanaan dari eksternal melalui penerbitan MTN sebesar Rp300 miliar untuk modal kerja.
 - d. Melakukan pengembangan usaha melalui optimalisasi aset untuk dibangun hotel.
 - e. Secara umum, kondisi BUMN telah dinyatakan “Sehat” sehingga tugas pembinaannya dikembalikan kepada Kedeputan Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
 4. Penyelesaian Restrukturisasi PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
 - a. Mengikuti *Tax Amnesty* dengan membayar Rp10,7 miliar dan menghapus kewajiban pajak sebesar Rp33,7 miliar.
 - b. Penyelesaian seluruh kewajiban termasuk kewajiban karyawan, hutang dividen dan hutang pajak.
 - c. Perampingan Organisasi (Efisien). Proses *rightsizing* karyawan melalui *lay-off* 577 orang telah diselesaikan dengan dukungan dari PT PPA.
 - d. Melakukan banyak program sinergi dengan BUMN-BUMN, antara lain memperoleh order penyediaan seragam kantor.
 - e. *Performance* keuangan sudah baik (laba bersih meningkat dari Rp53,1 miliar (2016) menjadi Rp107,7 miliar (2017P))
 - f. Sudah mulai melakukan kegiatan bisnis kembali dan telah memiliki modal kerja untuk memulai kembali kegiatan operasional
 - g. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan: transformasi kegiatan usaha PT ISN, optimalisasi aset-aset yang dimiliki, mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha hilir sektor TPT, dan mengembangkan kegiatan usaha melalui sinergi BUMN.
 - h. Secara umum, kondisi BUMN dinyatakan Cukup “Sehat” sehingga ditargetkan dalam waktu dekat, tugas pembinaannya dapat dikembalikan kepada Kedeputan Teknis.
5. Restrukturisasi PT Survai Udara Panas (Persero) / PT Panas
 - a. Dengan pelaksanaan program *Stop Bleeding*, kerugian PT Panas menurun dari semula Rp27,8 miliar (tahun 2015) menjadi Rp3,5 miliar (tahun 2017P).
 - b. Proses *rightsizing* karyawan telah dilakukan melalui *lay-off* 71 orang (91% dari total karyawan).
 - c. Telah dilaksanakan restrukturisasi operasional dan manajemen dengan skema *bad bank good bank* dimana PT Panas sebagai *bad bank* dan anak usaha pemetaan yang sehat sebagai *good bank*. PT PPA telah membantu pendirian anak usaha pemetaan tersebut melalui PT PPAK, yaitu PT Pratama Persada Airborne (PT Airborne). PT Airborne mencatat laba Rp6,1 miliar di tahun 2017 dan telah melengkapi peralatan berupa kamera lidar senilai Rp23 miliar dengan dukungan pendanaan dari PT PPA. Sejak Januari 2018, PT Airborne telah dikonsolidasikan ke PT Panas sehingga secara konsolidasian PT Panas diharapkan sudah dapat mencatat keuntungan.
 - d. Telah dilaksanakan restrukturisasi utang PT Panas ke PT PPA group.
 - e. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan: restrukturisasi struktur permodalan melalui *Debt to Equity Swap* agar ekuitas PT Panas menjadi positif, *monitoring* dan optimalisasi alat produksi serta operasional PT Panas bersama PT Airbone dalam meraih pasar pemetaan.
 6. Restrukturisasi PT Kertas Kraft Aceh (Persero) / PT KKA
 - a. Dengan pelaksanaan program *Stop Bleeding*, kerugian PT KKA menurun dari semula Rp113 miliar (tahun 2015) menjadi Rp66 miliar (tahun 2017P).
 - b. Proses *rightsizing* karyawan melalui *lay-off* 934 orang telah diselesaikan dengan dukungan pendanaan dari PT PPA.
 - c. Optimalisasi fasilitas pembangkit listrik untuk memperoleh pendapatan untuk menutupi biaya operasional melalui skema sinergi dengan PT PLN, PT PJBS dan PT PPA.
 - d. Melakukan kajian skema operasi dan bisnis sebagai upaya untuk mengoperasikan kembali pabrik kertas kraft baik melalui pencarian investor maupun sinergi BUMN, termasuk *assesment* terhadap Floresta.



- e. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan:
 - i. Pendirian JV pengelolaan hutan antara PT KKA, PT Inhutani IV, PT PPA dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). Tujuan pembentukan JV pengelolaan hutan adalah sebagai pemasok utama kebutuhan bahan baku pinus untuk Pabrik Kertas PT KKA secara penuh dan berkesinambungan.
 - ii. Pendirian JV Pabrik Kertas melalui sinergi BUMN dengan prasyarat kondisi *off-taker* produk minimum 30% dari PT Semen Indonesia Group (PT SMI) serta setoran modal sebesar Rp215 miliar dari sinergi BUMN dengan rincian PT SMI Rp160 miliar, PT PPA Rp30 miliar dan Perhutani Rp25 miliar. Dalam hal tidak ada setoran modal dari sinergi BUMN, dan pabrik kertas kraft tetap akan dioperasikan perlu ada tambahan modal Negara minimum sebesar Rp800 miliar (baik melalui PMN langsung atau PMN melalui PT PPA).
 - iii. Restrukturisasi keuangan antara lain dengan melakukan *rescheduling* hutang perbankan dan melakukan *debt to equity swap* hutang PT PPA.
 - iv. Berdasarkan proyeksi keuangan pasca restrukturisasi, Perusahaan dapat mencapai omzet penjualan Rp1,2 triliun dengan profitabilitas antara 7% - 15% dan IRR $\pm 18\%$. Dalam hal tidak tersedia pendanaan, maka dapat dipertimbangkan *exit strategy* dengan dampak risiko yang paling minim.
7. Restrukturisasi PT Industri Gelas (Persero) / PT Iglas
 - a. Dengan pelaksanaan program *Stop Bleeding*, kerugian PT Iglas menurun dari semula Rp174 miliar (tahun 2015) menjadi Rp52 miliar (tahun 2017P). *Stop* operasi menghentikan beban biaya operasional sebesar Rp5 miliar per bulan.
 - b. Proses *rightsizing* karyawan melalui *lay-off* 571 orang telah diselesaikan dengan membayar H2N dan kewajiban pensiun serta biaya pemeliharaan dan pengamanan aset dengan sumber pendanaan dari talangan PT PPA sebesar Rp50 miliar.
 - c. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan:
 - i. Penanganan PT Iglas selanjutnya adalah melalui program pencarian investor atau mitra strategis.
 - ii. Restrukturisasi utang melalui PKPU apabila telah diperoleh investor atau mitra strategis.
 - iii. Perlu dilakukan transformasi bisnis PT Iglas untuk memanfaatkan aset yang dimiliki, bila tidak ada investor atau mitra strategis yang berminat untuk produksi botol.
Dalam hal proses pencarian mitra strategis tidak terlaksana, maka dapat dipertimbangkan *exit strategy* dengan dampak risiko yang paling minim.
8. Restrukturisasi PT Kertas Leces (Persero) / PT KL
 - a. Dengan pelaksanaan program *Stop Bleeding*, kerugian PT KL menurun dari semula Rp67 miliar (tahun 2014) menjadi Rp21 miliar (tahun 2017P).
 - b. PT KL telah berhenti beroperasi sejak tahun 2015 dikarenakan ketidaktersediaan pasok bahan baku serta tidak memiliki bisnis yang terintegrasi. Alat produksi mesin *pulp* dan kertas sudah berumur tua mengakibatkan operasional tidak efisien.
 - c. Ekuitas PT KL tahun 2017 negatif Rp700 miliar karena akumulasi kerugian. Dimana nilai hutang berdasarkan Putusan Homologasi atas tuntutan pailit pada tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp1,3 triliun, sedangkan nilai aset hanya sebesar Rp635 miliar. PT KL tidak mampu membayar kewajiban Perjanjian Perdamaian yang sudah jatuh tempo sebesar Rp228,5 miliar dari total kewajiban sebesar Rp1,3 triliun.
 - d. Rencana Penanganan yang sedang/akan dilaksanakan:
 - i. Pencarian investor dengan memanfaatkan aset dan alat produksi.
 - ii. Penjualan aset pabrik kepada PT INKA belum ada kesepakatan.
 - iii. Menawarkan kepada BUMN konstruksi dan BUMN kawasan sebagai *land bank* atau fasilitas produksi.
 - iv. Melakukan re-negosiasi hutang atas Putusan Homologasi.
Apabila mitra strategis dan penjualan aset tidak terealisasi, maka dapat dipertimbangkan *exit strategy* dengan dampak risiko yang paling minim.
9. Restrukturisasi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) / PT MNA
 - a. Dengan pelaksanaan program *Stop Bleeding*, kerugian PT MNA menurun dari semula Rp2,48 triliun (tahun 2015) menjadi Rp704 miliar (tahun 2017P).
 - b. PT MNA telah berhenti operasi sejak Februari 2014/ *Air Operator Certificate* (AOC) 121 telah dicabut. Seluruh fasilitas produksi (pesawat terbang) berusia ≥ 30 tahun dan dalam kondisi rusak (*Beyond Economic Repair*). PT MNA terus menerus mengalami kerugian



PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI BUMN

yang mengakibatkan ekuitas negatif Rp8,64 triliun tahun 2016. Seluruh aset perusahaan telah dijaminkan kepada kreditur.

- c. Proses *rightsizing* karyawan melalui *lay-off* 1.482 orang (97%) telah diselesaikan dengan dukungan pendanaan dari PT PPA.
- d. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan:
 - i. Penjajakan Investor:
 - Terdapat 1 calon investor yang berminat.
 - Operasionalisasi kembali PT MNA membutuhkan dana yang besar yang direncanakan diperoleh dari investor (sebagai Pemegang Saham PT MNA, yang akan mendilusi kepemilikan saham Pemerintah di PT MNA)
 - ii. Restrukturisasi Hutang. Berdasarkan proposal yang disampaikan calon investor bahwa:
 - Seluruh hutang (kecuali Pajak dan pinjaman R/R) akan di-*swap* menjadi *equity* setara 12%.
 - Pajak akan dicicil > 40 tahun.
 - Pinjaman R/R akan diselesaikan secara komersial basis.
 - Investor secara bertahap selama 10 tahun akan memasukkan 230 pesawat (100-seater jet dan 20-seater propeller) dengan nilai setara *equity*.
 - Berdasarkan simulasi pada tahun ke-15, nilai saham 12% akan setara dengan nilai hutang hasil konversi.

Dalam hal investor tidak diperoleh, maka dapat dipertimbangkan *exit strategy* dengan dampak risiko yang paling minim.

- e. Tantangan yang dihadapi:
 - i. Jenis Pesawat Sukhoi/Rusia yang di-*banned* oleh pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa.
 - ii. Jadwal kedatangan pesawat belum pasti karena masih dalam tahap pengembangan.

Privatisasi BUMN

Tujuan pelaksanaan privatisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilihan saham Persero. Kementerian BUMN melalui Kedeputan Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang privatisasi yang selanjutnya usulan tersebut diteruskan oleh Menteri BUMN kepada Komite Privatisasi untuk memperoleh arahan dari Menteri Keuangan untuk mendapatkan rekomendasi.

Terkait program privatisasi BUMN di 2017, Hasil Privatisasi 4 BUMN, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi BUMN untuk ditetapkan.

Hal ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2009 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi Lainnya.





DUKUNGAN BUMN DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL



DUKUNGAN BUMN DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL



Agenda pokok Pemerintah dalam rumusan Nawacita memiliki tiga ciri utama, yakni Negara Hadir, Membangun dari Pinggiran, dan Revolusi Mental. Nawacita adalah konsep besar untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Untuk mewujudkan sembilan cita/harapan/keinginan dimaksud, diperlukan kerja nyata, dimulai dari pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya akselerasi di berbagai bidang.

Nawacita telah dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Penjabaran lebih detail atas RPJMN berupa program dan proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Dalam RPJMN 2015-2019, sudah terangkum arah kebijakan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Dalam implementasinya, Pemerintah telah menetapkan proyek-proyek yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN), yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUMN memiliki peran strategis sebagai agen pembangunan untuk menunjang program Pemerintah. Selama ini BUMN telah berperan besar dalam pembangunan di Indonesia. BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN, sejauh ini telah dapat mendukung pengelolaan BUMN sehingga memiliki kemampuan untuk mendorong laju perekonomian nasional dan cita-cita Pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan keadilan di seluruh Indonesia. Peran BUMN selaku agen pembangunan, selalu berperan aktif dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia, dalam melakukan upaya pembangunan di segala sektor yang memiliki urgensi tinggi untuk memberikan efek manfaat bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi peningkatan perekonomian daerah dan masyarakatnya yang selama ini belum tersentuh pembangunan.



KONEKTIVITAS DARAT



PENAMBAHAN KONEKSI JALAN TOL DEMI PENINGKATAN PEREKONOMIAN

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata, tentu saja harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai agar laju perekonomian di daerah dapat tumbuh dan berkembang untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Salah satu upaya Pemerintah adalah dengan membangun konektivitas darat dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing di daerah, melalui proyek pembangunan infrastruktur berupa jalan tol yang merupakan satu di antara proyek prioritas Pemerintah. Pembangunan infrastruktur jalan tol ini, diharapkan akan mendatangkan efek manfaat yang berkesinambungan.



Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditentukan oleh sejumlah faktor. Di antaranya yang paling penting adalah konektivitas antar daerah dan konektivitas suatu wilayah. Kebutuhan logistik masyarakat di wilayah-wilayah Indonesia akan semakin terpenuhi, sehingga berefek pada penekanan perbedaan harga produk pada masing-masing wilayah. Pada akhirnya, efek dari konektivitas yang terjaga ini akan menstimulus pertumbuhan ekonomi. Konektivitas menciptakan kelancaran dan kemudahan perhubungan dan perdagangan nasional.



JARINGAN JALAN TOL LINTAS JAWA



Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa ini terdiri dari 9 ruas utama yang diprioritaskan pembangunannya. Sembilan ruas tersebut meliputi:

1. Cikampek-Palimanan 116,75 kilometer
2. Pejagan-Pemalang 57,5 kilometer
3. Pemalang-Batang 39,2 kilometer
4. Batang-Semarang 75 kilometer
5. Semarang-Solo 72,64 kilometer
6. Solo-Ngawi 90,1 kilometer
7. Ngawi-Kertosono 87,02 kilometer
8. Mojokerto-Jombang-Kertosono 40,5 kilometer
9. Mojokerto-Surabaya 36,27 kilometer

Jalan tol Trans Jawa memiliki panjang total sekitar 1.200 kilometer. Proyek pembangunan Jalan Tol Trans Jawa bertujuan untuk menghubungkan kota-kota di pulau jawa dari Jakarta-Surabaya atau dari Merak-Probolinggo. Jalan tol ini diharapkan dapat meratakan penyebaran pembangunan pemukiman dan kawasan industri selain di Jakarta. Selain itu, adanya jalan Tol Trans Jawa dapat menekan biaya logistik barang sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi di Pulau Jawa.

Progres 2017



JALAN TOL



17 Ruas Tol
894,27 kilometer
468.887 kendaraan perhari

PROYEK JALAN TOL YANG TERMASUK DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Jalan Tol Medan-Binjai

Jalan Tol Medan-Binjai adalah jalan tol sepanjang 17 kilometer yang akan menghubungkan dua kota di Sumatera Utara, yakni Medan dan Binjai. Ground breaking jalan tol ini dilaksanakan Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2015. Jalan tol Medan-Binjai akan membagi beban kendaraan dengan Jalan Medan-Binjai yang merupakan salah satu ruas terpadat dalam Jalan Raya Lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh.



KONEKTIVITAS DARAT

Jalan tol ini merupakan bagian dari mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.048 kilometer yang menghubungkan Bakauheni hingga Aceh dan termasuk dalam 8 proyek prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Ruas tol Medan-Binjai terbagi ke dalam 3 seksi; Seksi I Tanjung Mulia-Helvetia, Seksi II Helvetia-Semayang, Seksi III Semayang-Binjai. Kebutuhan biaya investasi untuk membangun ruas ini mencapai Rp1,69 triliun, biaya konstruksi mencapai Rp1,2 triliun dan biaya pembebasan lahan sekitar Rp495 miliar.

PT Utama Karya (Persero) selaku BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan penyedia jalan tol, menargetkan pada tahun 2018 jalan tol Medan-Binjai bisa beroperasi seluruhnya. Jalan tol Medan-Binjai akan membagi beban kendaraan dengan Jalan Medan-Binjai yang merupakan salah satu ruas terpadat Jalan Raya Lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh.

Dua seksi I dan II, sudah beroperasi pada Oktober 2017 lalu, yang menyambungkan Tol Helvetia dan Binjai. Jadwal laik fungsi Tol Medan-Binjai sendiri telah rampung pada tanggal 15 September yang lalu, sedangkan sertifikat laik operasi telah terbit seminggu setelahnya. Tol Medan-Binjai ini diharapkan dapat rampung seluruhnya pada 2018.

Jalan Tol Palembang-Indralaya

Jalan Tol Palembang-Indralaya merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang akan menghubungkan koridor-koridor ekonomi di Sumatera Selatan. Tol Palembang-Indralaya atau disingkat Tol Palindra merupakan jalan tol yang dibangun di Palembang, Sumatera Selatan. Tol ini mempunyai panjang seluas 22 kilometer yang dibagi dalam 3 seksi: Seksi I, Palembang-Pemulutan sepanjang 7,10 kilometer, Seksi II Pemulutan-KTM Rambutan sepanjang 5,70 kilometer, serta Seksi III dari KTM Rambutan-Indralaya (9,3 kilometer).

Proyek tol ini digarap oleh PT Utama Karya (Persero), yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp3,4 triliun. Dana tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Pembangunan jalan tol ini membutuhkan lahan seluas 302 hektare. Presiden Joko Widodo membuka jalan dengan melakukan peletakan batu pertama jalan Tol Palembang-Indralaya (Palindra) di Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 30 April 2015. Pada Oktober 2017, Presiden Joko Widodo telah meresmikan ruas jalan seksi I Palembang-Pemulutan.

Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar

Jalan Tol Bakauheni-Bandar Lampung-Terbanggi Besar (Jalan Tol Bakter) adalah jalan tol sepanjang 140,938 kilometer yang rutenya dimulai dari Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) hingga Terbanggi Besar (Lampung Tengah). Pembangunan ruas tol ini dilakukan oleh konsorsium BUMN, yakni PT Utama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk melalui skema penugasan.

Jalan tol ini merupakan jaringan dari Jalan Trans-Sumatera. Peresmian pembangunan jalan tol ini dilakukan pada 30 April 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan dibagi dalam 4 Seksi: Seksi 1 yang dikerjakan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Seksi 2 pekerjaan konstruksinya oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Seksi 3 ditangani PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Seksi 4 dikerjakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Progres proyek sampai dengan September 2017 untuk pembebasan lahan telah mencapai 91,80%, sedangkan konstruksi sudah mencapai 49,03%. Operasi keseluruhan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar direncanakan pada Kuartal IV 2019.

Jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar dengan nilai investasi Rp16,795 triliun ini, merupakan bagian dari rangkaian jalan tol Trans Sumatera 2.048 kilometer yang menghubungkan Bakauheni hingga Aceh.

Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung

Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung ini merupakan yang terpanjang di luar Pulau Jawa dan kedua di Sumatera setelah Sumatera Utara. Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung atau disingkat dengan Tol Kapaltung adalah megaprojek infrastruktur jalan tol sepanjang 111,69 kilometer dari Kayuagung hingga Betung (Banyuasin), dengan nilai investasi sekitar Rp14,4 triliun. Adapun rincian jalan tol Kapal Betung ini meliputi, Kayu Agung-Jakabaring sekitar 33,50 kilometer (seksi), Jakabaring-Musilandas sekitar 33,90 kilometer (seksi II) dan Musilandas-Betung sekitar 44,29 kilometer (seksi III).

Progres pembangunan jalan tol yang digarap oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini, tercatat hingga September 2017 untuk konstruksi mencapai 20% sedangkan untuk pembebasan lahan mencapai 86%.



Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang

Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang dengan panjang 189 kilometer ini, merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang direncanakan akan membentang dari utara Pulau Sumatera sampai selatan menyambungkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai provinsi Lampung. Ruas ini terbagi kedalam tiga seksi yakni: (1) Seksi I: Terbanggi Besar – Mengala; (2) Seksi II: Menggala – Sp. Pematang; (3) Seksi III: Sp. Pematang – Kayu Agung. Ruas ini merupakan gabungan ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang (100 kilometer) dan Pematang Panggang – Kayu Agung (85 kilometer).

Dengan adanya pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian Lampung sebagai Serambi Sumatera. Jalan tol ini diperkirakan menelan biaya sebesar Rp11,865 triliun, di mana hingga September 2017, progres fisik sudah mencapai 25,60%.

Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung

Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung dengan nilai investasi Rp10,085 triliun ini, merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang direncanakan akan membentang dari utara Pulau Sumatera sampai selatan menyambungkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai provinsi Lampung. Ruas ini terletak di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan dengan panjang total 185 kilometer dan terbagi kedalam tiga seksi yakni: (1) Seksi I: Terbanggi Besar – Mengala; (2) Seksi II: Menggala – Sp. Pematang; (3) Seksi III: Sp. Pematang – Kayu Agung.

Ruas ini merupakan gabungan ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang (100 kilometer) dan Pematang Panggang – Kayu Agung (85 kilometer). Tol yang tengah dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, untuk progres fisik per September 2017 tercatat mencapai 18,73%.

Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Ruas Tol Pekanbaru-Dumai merupakan proyek Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 135 kilometer yang membelah 5 wilayah di Provinsi Riau, antara lain Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai. Jalan Tol Pekanbaru-Dumai merupakan 1 dari 3 jalan tol terpanjang di rangkaian Jalan Tol Trans Sumatera.

Jalan tol Pekanbaru-Dumai dibagi dalam 6 bagian (seksi), yakni Seksi I Pekanbaru-Minas, Seksi II Minas-Kandis Selatan, Seksi III Kandis Selatan-Kandis Utara, Seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan, Seksi V Duri Selatan-Duri Utara, dan Seksi VI Duri Utara-Dumai. Ruas terpendek adalah seksi I sejauh 9,2 kilometer, sementara seksi lainnya di atas 20 kilometer.

Pembangunan jalan tol yang dimulai pada bulan Desember 2016 ini, diperkirakan membutuhkan investasi mencapai Rp16,211 triliun. PT Hutama Karya (Persero), selaku BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan penyedia jalan tol, akan menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk menalangi biaya pembangunan Tol Trans Sumatra ini. Progres konstruksi, hingga Desember tercatat mencapai 6,6009% dan ditargetkan dapat beroperasi pada Desember 2019.

Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi

Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera dan masuk agenda pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan jalan tol yang memiliki panjang 61,7 kilometer tersebut dibagi menjadi 7 seksi. Seksi I dan II Ruas Medan-Perbarakan-Kualanamu sepanjang 17,8 kilometer dibangun oleh Pemerintah. Sisanya, Ruas Parbarakan-Tebing Tinggi sepanjang 44 kilometer dibangun oleh PT Jasa Marga Kualanamu Tol. Total investasi yang dibutuhkan untuk membangun ruas tol ini adalah Rp 4,072 triliun dengan biaya tanah Rp441 miliar dan biaya konstruksi sebesar Rp1,759 triliun.

Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi dalam rancangannya terkoneksi dengan Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). Jalan tol juga akan menghubungkan Kota Medan dengan Bandara Kualanamu. Selain itu juga akan menghubungkan kota Medan dengan kawasan industri Kuala Tanjung dan kawasan pariwisata Danau Toba. Peletakan batu pertama tanda dimulainya konstruksi dilaksanakan pada 23 September 2014. Hingga September 2017, progres konstruksi pembangunan sudah mencapai 89,70% sedangkan untuk pembebasan lahan mencapai 90,72%.

Jalan Tol Jakarta – Cikampek II (Elevated)

Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated atau disebut Tol Jakampek Elevated adalah sebuah jalan tol layang yang dibangun sepanjang 36,40 kilometer. Tol Jakampek Elevated guna mengurangi kemacetan panjang yang berada di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek ini dimulai dari Gerbang Tol Pondok Gede Timur hingga Gerbang Tol Karawang Barat sepanjang 39 kilometer di kilometer 9 sampai 48.



KONEKTIVITAS DARAT

Pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II (elevated) terdiri dari 9 seksi yaitu seksi Cikunir-Bekasi Barat sepanjang 2,99 kilometer, seksi Bekasi Barat-Bekasi Timur sepanjang 3,63 kilometer, seksi Bekasi Timur-Tambun 4,34 kilometer, seksi Tambun-Cibitung 3,30 kilometer, seksi Cibitung-Cikarang Utama 4,46 kilometer, seksi Cikarang Utama-Cikarang Barat 2,72 kilometer, seksi Cikarang Barat-Cibatu 3,16 kilometer, seksi Cibatu-Cikarang Timur 2,45 kilometer dan seksi Cikarang Timur-Karawang Barat 9,79 kilometer.

Hak pengusahaan dan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) dipegang oleh PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 80% dan PT Ranggi Sugiron Perkasa sebesar 20%. Jalan tol dengan investasi sebesar Rp16,23 triliun ini, telah mencapai progres konstruksi per September 2017 adalah sebesar 12,55%, sementara itu progres pembebasan lahan telah mencapai 100%.

Jalan Tol Cinere-Serpong

Jalan Tol Serpong-Cinere adalah salah satu jalan tol yang merupakan bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 2 yang rencananya akan menyambung dengan Jalan Tol Kunciran-Serpong di bagian barat dan Jalan Tol Cinere-Jagorawi di bagian timur. Jalan tol yang menghubungkan Tangerang Selatan dengan Kota Depok ini melintasi beberapa kawasan, seperti Jombang, Ciputat, Pamulang, Pondok Cabe dan Cinere. Jalan Tol Serpong-Cinere akan dikelola oleh PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Jalan tol ini terbagi dalam dua seksi. Seksi 1 sepanjang 6,67 kilometer dari kawasan Serpong hingga Pamulang, sedangkan Seksi 2 sepanjang 3,64 kilometer dari kawasan Pamulang hingga Cinere. Progres pembebasan lahan per September 2017 adalah mencapai 53,32%. Proyek dengan nilai investasi Rp2,22 triliun ini, pada Oktober 2017, pembangunan jalan tol sudah memasuki tahap pembongkaran lahan yang sudah dibebaskan di beberapa kawasan, seperti di kawasan Cilalung, Jombang.

Jalan Tol Kunciran-Serpong

Jalan Tol Kunciran-Serpong sepanjang 11,2 kilometer merupakan bagian dari jaringan JORR 2 yang akan menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta hingga Cibitung. Jaringan jalan tol ini berfungsi memecah lalu lintas yang menumpuk di dalam kota Jakarta, maupun di JORR. Jalan Tol Kunciran-Serpong juga akan terhubung dengan Jalan Tol Jakarta-Tangerang, Jalan Tol Cengkareng-Batucaeper-Kunciran, Jalan Tol Jakarta-Serpong, serta Jalan Tol Serpong-Cinere.

Jalan tol ini akan dioperasikan oleh anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yakni PT Marga Trans Nusantara diperkirakan akan menelan investasi sekitar Rp2,62 triliun. Hingga September 2017, progres konstruksi telah mencapai 10,83% sedangkan pembebasan lahan telah mencapai 89,18%.

Jalan Tol Kunciran-Cengkareng

Jalan Tol Kunciran-Cengkareng atau tol Kunciran-Bandara sepanjang 14,19 kilometer ini menjadi sangat vital karena akan menjadi akses tol alternatif (selain tol yang sudah ada) ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan ditargetkan beroperasi pada 2019.

Pekerjaan konstruksi dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang memenangi tender pengadaan jasa pemborongan pekerjaan pembangunan jalan tol tersebut. Tender dilakukan oleh PT Marga Kunciran Cengkareng, anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang menjadi operator tol ini.

Proyek tol senilai Rp5,01 triliun ini akan dibangun dengan empat seksi. Keempat seksi itu yakni seksi 1 Kunciran-IC Sultan Ageng Tirtayasa sepanjang 2,04 kilometer, seksi 2 IC Sultan Ageng Tirtayasa-on/off ramp Benteng Betawi sepanjang 3,50 kilometer, seksi 3 on/off ramp Benteng Betawi-IC Husein Sastranegara 6,50 kilometer, dan seksi 4 IC Husein Sastranegara-Benda Junction sepanjang 2,15 kilometer. Progres Konstruksi, hingga September 2017 mencapai 3,57% sedangkan untuk pembebasan lahan sudah mencapai 30,57%.

Jalan Tol Kunciran-Cengkareng masuk dalam jaringan jalan lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2. Jalan tol ini juga akan terkoneksi dengan ruas tol Cinere-Serpong dan Serpong-Kunciran yang juga dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Cinere Serpong Jaya dan PT Marga Trans Nusantara.

Jalan Tol Depok – Antasari

Jalan Tol Antasari-Depok atau Depok-Antasari atau Desari adalah jalan tol penghubung Jakarta dengan Depok. Jalan tol yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini, melintasi Kota Jakarta Selatan dan Kota Depok. Tol dengan nilai investasi Rp4,2 triliun ini, diprediksi akan mengurangi kepadatan di Jalan Tol Jagorawi. Tahun 2017 akan diteruskan menuju Bogor, tepatnya di Jalan Tol Lingkar Luar Bogor dan Jalan Tol Dramarga-Bocimi.



Tol Depok-Antasari terbagi menjadi 3 seksi. Seksi I Antasari-Brigif membentang 5,80 kilometer, Seksi II Brigif-Sawangan 6,30 kilometer, dan Seksi III Sawangan-Bojonggede 9,50 kilometer. Hingga September 2017, progres konstruksi mencapai 67,10% sedangkan untuk progres pembebasan lahan mencapai 38,24%.

Jalan Tol Cimanggis – Cibitung

Jalan Tol Cimanggis – Cibitung merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) II yang digarap oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Jalan tol ini ditujukan untuk mengurangi beban kendaraan pada jalur yang melalui pusat kota Jakarta. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung memiliki total panjang 26,3 kilometer dan dibagi menjadi dua seksi, seksi I dengan ruas Cimanggis-Transyogi sepanjang 3,5 kilometer dan Transyogi-Cibitung sepanjang 22,8 kilometer.

Upaya pembangunan tol dengan nilai investasi Rp4,52 triliun ini, diprediksikan mampu mengurangi kemacetan di JORR 1, ruas Cikampek dan Jagorawi. Hingga September 2017, progres konstruksi baru mencapai 8,9% sedangkan untuk pembebasan lahan mencapai 29%.

Jalan Tol Cibitung – Cilincing

Jalan Tol Cibitung – Cilincing dibangun dengan investasi mencapai Rp4,22 triliun meliputi empat seksi, yakni Seksi 1 Cibitung-Telagaasih sepanjang 2,96 kilometer, Seksi 2 Telagaasih-Tembelang (9,41 kilometer), Seksi 3 (Tembelang-Mekarjaya) (13,09 kilometer), serta Seksi 4 (Mekarjaya-Cilincing) sepanjang 8,56 kilometer. Jalan tol ini sebelumnya dimiliki oleh investor asal Malaysia melalui PT MTD CTP Expressway dengan porsi kepemilikan 55%. Selanjutnya, pada April 2017, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengumumkan pembelian saham jalan tol Cibitung-Cilincing dari Malaysia.

Jalan Tol Cibitung-Cilincing diharapkan dapat mengurangi beban angkutan barang dan kendaraan di ruas jalan tol Jakarta – Cikampek yang melintasi kawasan Cawang. Proyek konstruksi sudah dilakukan di simpang susun Cibitung dan menuju utara arah Telagaasih. Progres pembebasan lahan tercatat per September 2017 sudah mencapai 36,24%.

Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu

Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Becakayu adalah jalan tol berkonstruksi layang yang dibangun di atas sungai Kalimalang di kota Jakarta Timur dan Bekasi untuk mengurangi kemacetan di sekitar Kalimalang. Jalan tol ini dimulai pembangunannya pada tahun 1996 oleh PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, namun terhenti dua tahun kemudian, akibat krisis moneter yang melanda.

Tol Becakayu memiliki total panjang 21,04 kilometer terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi I (Kasablanka-Jaka Sampurna) dan Seksi II (Jaka Sampurna-Duren Jaya). Panjang Seksi I adalah 11 kilometer, dan Seksi II 10,04 kilometer. Ruas tol Becakayu ini menelan biaya investasi Rp7,2 triliun, biaya konstruksi Rp4,785 triliun, biaya pembebasan tanah Rp449 miliar, dan masa konsesi 45 tahun (sejak SPMK). Investor dan pengelola Tol Becakayu adalah PT Waskita Toll Road, anak usaha dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang memegang 60% saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga. Sejak dilanjutkan pembangunannya pada bulan Januari 2015, akhirnya tol ini telah rampung dan diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo, pada Jumat, 3 November 2017.

Jalan Tol Serang – Panimbang

Jalan Tol Serang - Panimbang merupakan jalan tol yang menghubungkan Serang dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, Banten. Jalan Tol yang digarap PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ini, akan tersambung dengan Jalan Tol Jakarta-Merak. Jalan Tol Serang - Panimbang memiliki panjang 83,6 kilometer dengan luas total 785 hektare.

Jalan tol dengan nilai investasi Rp5,3 triliun ini, melewati Kota Serang, Kabupaten Serang, Lebak dan Pandeglang dengan melewati 14 kecamatan dan 48 desa/kelurahan. Jalan Tol Serang - Panimbang digunakan untuk mendukung akses jalan menuju Taman Nasional Ujung Kulon serta Tanjung Lesung.

Selain itu, jalan tol yang mulai dilakukan proses pengerjaan konstruksi pada Desember 2017 ini, diharapkan dapat mendukung akses pengiriman logistik/barang dari kawasan industri di Pandeglang, Banten hingga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Merak, Banten. Rencananya, Jalan Tol Serang - Panimbang beroperasi pada tahun 2019 mendatang.



KONEKTIVITAS DARAT

Jalan Tol Bogor Outer Ring Road

Jalan Tol Lingkar Luar Bogor atau Bogor Outer Ring Road adalah nama rangkaian jalan tol sepanjang 11 kilometer yang melingkari kota Bogor, menghubungkan Sentul Selatan hingga Dramaga. Jalan Tol Lingkar Luar Bogor rencananya dibangun sebagai jalan tol berlajur 2x2 dan secara bertahap akan berlajur 2x3 dengan disain kecepatan maksimum 80 kilometer per jam.

Jalan Tol ini, diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di Kota Bogor dan sekitarnya serta memudahkan akses masyarakat Bogor untuk sampai ke Jakarta, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tol Jakarta-Cikampek dan Bandung.

Jalan tol dengan biaya investasi Rp2,05 triliun ini, hingga September 2017 telah mencapai progres Konstruksi untuk Seksi II B, yakni Kd. Badak – Simpang Yasmin mencapai 56,25% sedangkan progres pembebasan lahan telah mencapai 97,00% untuk seksi II B tersebut.

Jalan Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi

Jalan tol Ciawi-Sukabumi memiliki panjang total 54 kilometer, terdiri atas empat seksi. Seksi I Ciawi-Cigombong, seksi II Cigombong- Cibadak, seksi III Cibadak-Sukabumi Barat sepanjang 14 kilometer, serta seksi IV Sukabumi Barat-Sukabumi Timur sepanjang 13 kilometer. Proyek pembangunan tol Bocimi yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan nilai investasi Rp8,7 triliun ini, sudah dimulai untuk seksi satunya.

Proyek Tol Bocimi sebenarnya telah dimulai sejak 1997 tetapi mangkrak dan pada akhir 2015 pengerjaan tol dimulai kembali setelah tiga kali peresmian, yakni April dan Desember 2011, terakhir Februari 2015. Secara keseluruhan, Tol Bocimi sepanjang 54 kilometer menghubungkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Per September 2017, progres konstruksi untuk seksi I sudah mencapai 46% dengan progres pembebasan lahan mencapai 98%.

Jalan Tol Soreang – Pasirkoja

Jalan Tol Soreang – Pasirkoja dengan panjang 10,57 kilometer ini, menghubungkan Kabupaten Bandung di kawasan Soreang dengan Kota Bandung serta menjadi bagian dari upaya mengurangi beban lalu lintas di jalur yang sudah ada.

Proyek jalan tol dengan nilai investasi Rp1,5 triliun ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dalam rangka mengurangi kemacetan dan meperlancar aktivitas masyarakat pengguna jalan di Kabupaten dan Kota Bandung. Pada Senin, 4 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah meresmikan pengoperasian tol yang digarap PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, ini.

Jalan Tol Kanci – Pejagan

Jalan Tol Kanci-Pejagan sepanjang 35 kilometer adalah jalan tol yang menghubungkan Kanci yang berada di Cirebon hingga Pejagan di Brebes. jalan tol ini melintasi Kota dan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. Sejak PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengambil alih sebagian besar kepemilikan jalan tol sepanjang 35 kilometer tersebut, proses perbaikan pun terus dilakukan. Jalan tol dengan nilai investasi Rp3 triliun ini telah selesai diperbaiki dan sudah bisa dilalui dengan sempurna.

Jalan Tol Kanci-Pejagan dimiliki dan dikelola oleh PT Semesta Marga Raya, semula merupakan anak usaha Bakrie Toll Road. Lalu pada November 2012, PT MNC Infrastruktur Utama mengakuisisi Bakrie Toll Road, dan secara otomatis seluruh jalan tol yang dikelola Bakrie Toll Road termasuk PT Semesta Marga Raya.

Pada September 2015, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengambil alih sebagian besar kepemilikan saham PT Semesta Marga Raya. Proses akuisisi berbarengan dengan akuisisi dua Badan Usaha yang mengelola dua jalan tol lainnya, yakni PT Pemalang Batang Toll Road pengelola jalan Tol Pemalang-Batang, serta PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol, pengelola jalan Tol Pasuruan-Probolinggo.

Dalam perusahaan gabungan tersebut, PT Waskita Karya (Persero) Tbk menguasai 61,5% saham dan MNC Infrastruktur menguasai 38,5%. Menjelang akhir 2015, PT Waskita Karya (Persero) Tbk menambah porsi kepemilikannya di PT Waskita MNC Trans Jawa Toll Road, sehingga porsi yang dikuasai PT Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi 99,99%.

Jalan Tol Pejagan – Pemalang

Jalan Tol Pejagan-Pemalang adalah tol yang terbentang sepanjang 57,5 kilometer yang menghubungkan daerah Pejagan, Brebes dengan Pemalang, Jawa Tengah. Jalan Tol ini adalah kelanjutan dari Jalan Tol Kanci-Pejagan yang menghubungkan Pejagan, Brebes dengan Kabupaten Brebes. Pengusahaan Jalan Tol Pejagan – Pemalang dilaksanakan oleh PT Pejagan Pemalang Tol Road dengan nilai investasi Rp6,84 triliun dan biaya konstruksi Rp3,39 triliun.



Jalan Tol Pejagan – Pemalang memiliki 4 seksi, yaitu Seksi 1 (Pejagan – Brebes Barat) dengan panjang 14,2 Kilometer yang telah beroperasi pada bulan Juni 2016, Seksi 2 (Brebes Barat – Brebes Timur) sepanjang 6 Kilometer beroperasi pada bulan Juni 2016, Seksi 3 (Brebes Timur – Tegal Timur) panjang 10,4 Kilometer dan Seksi 4 (Tegal Timur – Pemalang) yang memiliki panjang 26,9 Kilometer. Hingga Desember 2017, perkembangan (progres) pengerjaan sudah mencapai 85% di ruas seksi III dan 75% di ruas seksi IV.

Jalan Tol Pemalang – Batang

Jalan Tol Pemalang–Batang atau disingkat Jalan Tol Pematang, adalah jalan tol yang terbentang sepanjang 39,2 kilometer yang menghubungkan daerah Pemalang dengan Batang, Jawa Tengah. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek Jalan Tol Pemalang-Batang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk mulai tahun 2016. Pembangunan jalan tol Pemalang-Batang, Jawa Tengah, sepanjang 39,2 kilometer hingga November 2017 progresnya sudah mencapai 50%. Diharapkan, pembangunan jalan tol yang menghubungkan Tol Trans Jawa hingga Surabaya ini bisa selesai akhir tahun 2018 mendatang. Pembangunan jalan tol Pemalang-Batang yang menghabiskan investasi sekitar Rp6 triliun tersebut diharapkan dapat rampung dan beroperasi pada akhir tahun 2018.

Jalan Tol Semarang – Batang

Jalan Tol Batang–Semarang adalah jalan tol yang terbentang sepanjang 75 kilometer yang menghubungkan daerah Batang dengan Semarang, Jawa Tengah. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

Proyek tol ini dimulai pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Juni 2016. Pembangunan jalan tol ini terbagi menjadi 5 seksi: Seksi I, awal proyek - Batang Timur (3,2 kilometer); Seksi II, Batang Timur - Weleri (36,35 kilometer); Seksi III, Weleri - Kendal (11,05 kilometer); Seksi IV, Kendal - Kaliwungu (13,5 kilometer); dan Seksi V, Kaliwungu - Krpyak (10,9 kilometer).

Tol Batang-Semarang merupakan bagian dari tol Trans Jawa yang ditargetkan beroperasi pada akhir 2018. Sebelumnya ruas tol ini saat mudik lebaran 2017 sudah difungsikan secara darurat hingga Gringsing Kabupaten Kendal. Hak konsesi tol dengan nilai investasi sekitar Rp 11 triliun ini, dipegang oleh PT Jasamarga Semarang-Batang yang dimiliki sahamnya oleh PT Jasamarga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road.

Hingga awal November 2017, untuk progres konstruksi masing-masing seksi yakni Seksi I Batang-Tulis (3,2 Kilometer) sebesar 86,7%, seksi II Tulis-Weleri (36,35 kilometer) sebesar 46,52%, seksi III Weleri-Kendal (10,75 kilometer) sebesar 56,37% dan seksi IV Kendal-Kaliwungu (13,5 kilometer) progres fisiknya sudah 57,62%, sementara untuk seksi V, progres konstruksi sudah mencapai 66,2%.

Jalan Tol Semarang – Solo (Bawen – Salatiga)

Jalan tol dengan nilai investasi sebesar Rp7,3 triliun ini diharapkan mampu memperlancar arus perekonomian di daerah sekitar tol. Selain itu juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang terdapat pada jalan non tol. Pengoperasian ruas tol ini resmi di buka oleh Presiden Joko Widodo pada akhir September 2017.

Jalan Tol Semarang – Solo dikelola oleh PT Trans Marga Jateng, yang merupakan konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Astra Infra, dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah. Pengoperasian seksi III: Ruas Bawen – Salatiga melengkapi pengoperasian seksi I: Ruas Semarang – Ungaran sepanjang 10,85 Kilometer pada bulan November 2011 dan seksi II: Ungaran – Bawen sepanjang 11,99 Kilometer pada bulan April 2014.

Jalan Tol Solo – Ngawi

Jalan Tol Solo – Ngawi merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan kota – kota lain di bagian tengah dan timur Jawa. Jalur ini nantinya akan menjadi jalur utama distribusi penumpang, barang, dan jasa. Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Jawa yang melewati Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sragen (Provinsi Jawa Tengah) dan Ngawi (Provinsi Jawa Timur).

Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi memiliki total panjang 98,22 kilometer yang diusahakan oleh PT Solo Ngawi Jaya, anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan masa pengembalian investasi selama 35 tahun sejak penerbitan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Agar layak secara finansial, sebagian ruas tol dibangun dengan biaya APBN. Ruas tersebut adalah Ruas Colomadu-Karanganyar 20,9 kilometer.

Sejak pencahangan pembangunan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 April 2015, di Ngawi, Jawa Timur, progres keseluruhan tol Solo-Ngawi hingga awal November 2017 tercatat 89,12%. Total investasi pembangunan ruas tol ini sebesar Rp 5,14 triliun.



KONEKTIVITAS DARAT

Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan roda perekonomian yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur. Tol tersebut juga memiliki tingkat kelayakan marginal sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial.

Jalan Tol Ngawi – Kertosono

Jalan Tol Ngawi–Kertosono adalah jalan tol sepanjang 87,02 kilometer yang di mulai dari Kabupaten Ngawi sampai Kertosono, Nganjuk. Jalan tol ini melewati Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun. Konstruksinya baru dikerjakan pertengahan 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2017. Seperti Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi, Jalan Tol Ngawi-Kertosono juga dilaksanakan oleh PT Ngawi Kertosono Jaya, anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dengan masa konsesi 35 tahun. Agar laik secara finansial, sebagian ruas tol dibangun dengan biaya APBN. Ruas tersebut adalah pada Ruas Ngawi-Kertosono (Seksi Saradan-Kertosono) sepanjang 37,5 kilometer.

Sejak dilakukan pencaangan pembangunan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 April 2015, di Ngawi, Jawa Timur, progres konstruksi jalan tol terhitung per September 2017 mencapai 90,45%, sementara untuk pembebasan lahan mencapai 99,88%.

Pembangunan Tol Surabaya-Mojokerto

Jalan Tol Surabaya Mojokerto (Sumo) merupakan bagian dari proyek Tol Trans Jawa sepanjang 36,27 kilometer. Jalan bebas hambatan ini akan mendukung target Pemerintah untuk menyambung seluruh ruas tol dari Merak sampai Surabaya pada 2018.

Tol tersebut dibangun dalam 5 seksi: Seksi IA Waru-Sepanjang, Seksi IB Sepanjang-Western Ring Road (WRR), Seksi II WRR-Driyorejo, Seksi III yaitu Driyorejo-Krian, dan Seksi IV Krian-Mojokerto. Adapun traffic Tol Sumo yang sudah beroperasi, per hari mencapai 2.000-3.000 kendaraan.

Pemegang proyek jalan tol dengan nilai investasi sekitar Rp3,79 triliun ini adalah PT Marga Nujayasumo Agung dengan konsesi selama 42 tahun. Biaya pembebasan lahan dan konstruksinya berturut-turut adalah Rp557 miliar dan Rp1,83 triliun. Per September 2017, perkembangan konstruksi sudah mencapai 97,46% sedangkan untuk pembebasan lahan sudah 100%.

Jalan Tol Gempol – Pasuruan

Jalan Tol Gempol-Pasuruan adalah sebuah jalan tol sepanjang 34,2 kilometer yang menghubungkan daerah Gempol dengan Kota Pasuruan. Jalan tol dengan nilai investasi Rp4,03 triliun, merupakan bagian dari jalan tol yang menghubungkan antar kota utama di Jawa Timur yaitu Surabaya-Banyuwangi.

Tol Gempol-Pasuruan seksi I (Gempol-Rembang) baru di uji coba untuk segmen Gempol-Bangil pada tanggal 3 Agustus 2017. Sementara hingga Desember 2017, proyek jalan tol Gempol-Pasuruan (Gempas) seksi II yang menghubungkan Kecamatan Rombang, Kabupaten Pasuruan hingga Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan itu, terealisasi 63%.

Jika proyek ini selesai, maka tol seksi I dan II akan tersambung. Yakni dari Gempol, Kabupaten Pasuruan ke Gadingrejo, Kota Pasuruan. Selanjutnya, proyek itu akan disambungkan dengan tol Gempas seksi III, yang saat ini sudah mengawali. Yakni, Gadingrejo, Kota Pasuruan hingga Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.

Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo

Pembangunan tol Pasuruan – Probolinggo sepanjang 31,3 kilometer ini, terbagi menjadi tiga seksi. Seksi I dari Grati – Nguling sepanjang 8 kilometer, seksi II dari Nguling – Sumberasih sepanjang 6 kilometer dan seksi III dari Sumberasih – Leces sepanjang 16 kilometer. Tol Pasuruan – Probolinggo (Paspro) merupakan bagian dari tol Trans Jawa yang dicanangkan Pemerintah dan melewati tiga daerah sekaligus. Meliputi Kabupaten Pasuruan dengan panjang 8 kilometer, Kabupaten Probolinggo dengan panjang 22,075 kilometer, dan Kota Probolinggo dengan panjang 1,225 kilometer.

Perkembangan pembangunan tol hingga November 2017, untuk seksi satu sepanjang 7,1 kilometer dari Grati-Nguling, dengan pengerjaan telah mencapai 49%. Sedangkan seksi dua sepanjang 6,9 kilometer dari Nguling-Wonoasih mencapai 40%, dan seksi tiga sepanjang 17,3 kilometer dari Wonoasih-Leces, mencapai 60%. Sehingga total pengerjaan mencapai 47,63%. Nilai investasi tol yang dikelola oleh PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol ini, adalah sekitar Rp3,8 triliun.

Jalan Tol Pandaan - Malang

Jalan Tol Pandaan-Malang adalah sebuah jalan tol sepanjang 37,62 kilometer yang menghubungkan daerah Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan Malang, Jawa Timur. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol yang menghubungkan dua kota terbesar di Jawa Timur yaitu Surabaya dan Malang. Pada bulan Maret 2017, pembebasan lahan baru 67%. Jalan tol ini ditargetkan selesai pada tahun 2018.



Jalan Tol Pandaan-Malang dimiliki oleh PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) di mana perusahaan tersebut didirikan oleh 3 perusahaan BUMN, yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 60%, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar 30% dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar 5%.

Dengan berfungsinya Jalan Tol Pandaan-Malang, maka jarak tempuh antara Pandaan, Pasuruan sampai dengan Kota Malang nantinya akan menghemat waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dibandingkan melalui jalan nasional yang tersedia saat ini. Rencana jalan tol ini merupakan kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol-Pandaan yang sudah dioperasikan untuk menghubungkan kota Surabaya-Malang.

Sampai dengan awal Desember 2017, pembangunan fisik jalan tol sudah mencapai 35,34% sementara terkait pembebasan lahan hingga telah mencapai 78,58%.

Jalan Tol Legundi – Bunder

Jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) sepanjang 38,29 kilometer melintas dari Krian hingga Manyar di Gresik untuk mempermudah akses jalan untuk mobilisasi manusia atau pun barang yang melewati rute tersebut, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan.

Jalan tol dengan nilai investasi Rp12,20 triliun ini, bertujuan untuk membelah dan mengurai kemacetan jalan tol dalam kota. Di mana pengguna tol dari Kertosono, Solo dan Jakarta tidak lagi memakai jalan tol dalam kota. Hingga September 2017, progres konstruksi sudah mencapai 31,24% sedangkan untuk pembebasan lahan mencapai 77,34%.

Jalan Tol Balikpapan – Samarinda

Jalan Tol Balikpapan - Samarinda direncanakan menghubungkan Kota Balikpapan - Kota Samarinda. Selama ini kedua kota tersebut dihubungkan hanya dengan satu poros jalan. Sebagai kota yang tergolong terbesar di Provinsi Kalimantan Timur dan banyak melayani aktivitas dan kegiatan lintas provinsi. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan waktu tempuh antar kota yang lebih singkat serta harus sesuai standar jalan yang ada.

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menjadi salah satu ruas yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo. Saat ini pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda memiliki panjang 99,35 kilometer.

Pembangunan tol dengan nilai investasi Rp9,97 triliun ini dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yaitu PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda (JMBS) dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Pembangunan dibagi menjadi 5 seksi yakni Seksi I ruas Kilometer 13 Balikpapan-Samboja (21,9 Kilometer), Seksi II ruas Samboja-Muara Jawa (30,9 Kilometer), Seksi III ruas Muara Jawa-Palaran (17,3 Kilometer), Seksi IV ruas Palaran-Jembatan Mahkota II (17,5 Kilometer) dan Seksi V ruas Kilometer 13 Balikpapan-Sepinggah (10,9 Kilometer). Per September 2017, pembebasan lahan mencapai 97,09%. Adapun penyelesaian konstruksi telah mencapai 34,56%.

Jalan Tol Manado – Bitung

Jalan Tol Manado - Bitung merupakan jalan tol yang menghubungkan kota Manado hingga kota Bitung yang berada di provinsi Sulawesi Utara. Jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sulawesi. Jalan Tol Manado - Bitung direncanakan memiliki panjang 39,90 kilometer dan perkiraan selesai pada bulan Maret 2019 mendatang. Jalan tol Manado - Bitung seksi I (sepanjang 14,9 Kilometer) dibiayai oleh dana APBN dan dana pinjaman dari pemerintah Cina, dan seksi II (sepanjang 25 Kilometer) dibiayai oleh investor PT Jasamarga Manado Bitung.

Jalan Tol Manado-Bitung dibagi menjadi empat seksi, yang meliputi Seksi IA Manado-Sukur (7 kilometer), Seksi IB Sukur-Airmadidi (7 kilometer), Seksi IIA Airmadidi-Danowudu (11,50 kilometer), dan Seksi IIB Danowudu-Bitung (13,50 kilometer).

Hingga pertengahan bulan Desember 2017, progres konstruksi Seksi IIA dan IIB yang dikelola oleh PT Jasamarga Manado Bitung (PT JMB) selaku anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk sudah mencapai 39,4% untuk Seksi IIA, hal ini menunjukkan progres positif melebihi target rencana sebesar 37,5%. Sedangkan untuk Seksi IIB konstruksi akan segera dimulai bulan Januari 2018 untuk lahan yang sudah bebas.

Sedangkan untuk progres pembebasan lahan Seksi IIA telah mencapai 93%, dan Seksi IIB mencapai 47%. Untuk mengejar target, PT JMB melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat pembebasan lahan, salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional maupun PPK lahan.



KONEKTIVITAS DARAT

TRANSPORTASI MASSAL NAN MODERN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditentukan oleh sejumlah faktor, yang diantaranya adalah konektivitas antar daerah. Konektivitas pasti terkait dengan transportasi yang mampu menjangkau daerah di penjuru Indonesia dengan moda transportasi yang sudah pasti dapat menumbuhkan perekonomian yang baik.

Kebutuhan logistik masyarakat di wilayah-wilayah Indonesia akan semakin terpenuhi, sehingga berefek pada penekanan perbedaan harga produk pada masing-masing wilayah. Pada akhirnya, efek dari konektivitas yang terjaga ini akan menstimulus pertumbuhan ekonomi. Konektivitas transportasi adalah hal yang dewasa ini mempengaruhi kehidupan dan aktivitas manusia. Ada banyak pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam penyelenggaraan konektivitas transportasi. Sektor-sektor ekonomi ada yang terkait langsung dan tidak langsung dengan konektivitas transportasi. Perekonomian Indonesia juga tergantung dari adanya konektivitas transportasi.

Rendahnya tingkat konektivitas transportasi dan sistem logistik dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, dan hal tersebut menyulitkan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Karena itu, untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan, Pemerintah menyusun rencana konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated and globally connected*).

Skema percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan dalam kerangka penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan wilayah dan pemerataan pembangunan nasional. Upaya Pemerintah dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, murah, dan modern, harus di dukung oleh semua pihak.

Presiden Joko Widodo mengatakan, konektivitas yang makin tersambung akibat pembangunan infrastruktur bukan hanya akan membuat ekonomi kita lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga akan mempersatukan kita sebagai bangsa. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi *massal modern*, seperti *High Speed Train* dan LRT diharapkan dapat membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal.

Untuk itu, Kementerian BUMN terus berupaya untuk merealisasikan sejumlah proyek transportasi yang aman, murah, dan *modern*. Di antaranya adalah Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung serta Light Rail Transit (LRT) di Jakarta dan Sumatera Selatan.

High Speed Train (Jakarta - Bandung)

Pembangunan jalur kereta cepat antara Jakarta –Bandung sepanjang 142,3 kilometer ini akan di mulai dari Halim, lalu menuju Karawang, kemudian Walini, dan ke Tegal Luar. Kota-kota tersebut merupakan sebagai *transit oriented development* (TOD) dengan panjang rel sekitar 142,3 kilometer. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif. Di mana perekonomian masyarakat yang dilalui jalur kereta cepat akan terangkat.

Bahkan, bagi pemerintah Jawa Barat, terbangunnya proyek transportasi masal ini akan memunculkan titik-titik ekonomi baru. Selain berdampak pada perekonomian masyarakat, proyek ini juga akan mengangkat sektor pariwisata. Proyek kereta cepat juga padat karya, karena membutuhkan tenaga kerja yang banyak.

Proyek tersebut memiliki nilai investasi sebesar Rp81 triliun, di mana pelaksana proyek ini adalah PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC), yang merupakan anak usaha patungan antara BUMN Indonesia dan BUMN China. Kerjasama ini dilakukan melalui anak usaha BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co. Ltd. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sendiri adalah perusahaan patungan konsorsium BUMN Indonesia terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).

KA Akses Bandara Adi Soemarmo

Harapan masyarakat Solo untuk memiliki angkutan publik yang terintegrasi akan segera terwujud. Pembangunan Kereta Bandara sepanjang 13,5 kilometer ini akan menghubungkan mulai dari Stasiun Solo Balapan di kota Solo hingga Bandara Adi Soemarmo, yang terletak di kabupaten Boyolali. Dengan menggunakan kereta bandara ini, nantinya jarak tempuh dari kota Solo (Stasiun Solo Balapan) ke Bandara Adi Sumarmo hanya sekitar 15 menit saja.

Masyarakat dari Yogyakarta juga bisa merasakan manfaat kereta bandara dengan investasi total Rp925 miliar ini. Masyarakat dari Yogyakarta yang akan menuju Bandara Adi Soemarmo, hanya ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam 11 menit. Dengan rute, Stasiun Yogyakarta - St. Maguwo - St. Solo Balapan - Bandara Adi Soemarmo sejauh 72,7 kilometer .

Kehadiran kereta bandara ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan integrasi antar moda angkutan publik dan memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat, dan menciptakan sarana transportasi yang selamat, aman, nyaman dan tepat waktu.



Pembangunan jalur kereta bandara terdiri dari dua segmen, yaitu: Segmen 1, mulai dari Stasiun Solo Balapan hingga Stasiun Solo Balapan Baru sepanjang 3,5 kilometer yang merupakan jalur KA eksisting (Solo - Gundih). Sementara, segmen 2, dimulai dari Stasiun Solo Balapan Baru (pada Kilometer . 104+400) hingga Bandara Adi Soemarmo sepanjang 10 kilometer yang akan dibangun jalur KA baru. Hingga akhir 2017, proyek Kereta Bandara (KA) Bandara Adi Soemarmo Solo telah sampai pada pengadaan pekerjaan pembangunan Ruang Tunggu Penumpang KA Bandara di Stasiun Solo Balapan, serta pengadaan 4 trainset Kereta Api.

Light Rail Transit (LRT) Jabodebek

Proyek *light rail transit* Jabodebek atau disingkat LRT Jabodebek adalah sebuah sistem angkutan cepat dengan kereta api ringan yang dibangun di Jakarta, dan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota disekitarnya seperti Bekasi dan Bogor.

Proyek LRT Jabodebek adalah proyek transportasi berbasis rel dengan detail kompleks dan skala yang sangat besar. LRT Jabodebek dibangun untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang masuk Jakarta dari kota-kota satelit disekitarnya. Diharapkan dengan dibangunnya moda transportasi LRT Jabodebek bisa meminimalisir kemacetan di tol Jakarta – Cikampek (Japek) dan Jagorawi.

Proyek yang digarap oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk ini, dibangun dalam dua tahap, saat ini proyek LRT Jabodebek yang sedang berjalan adalah tahap 1 yang diperkirakan akan rampung tahun 2019 mendatang. Adapun LRT Jabodebek tahap I terdiri dari 3 lintas layanan yaitu Lintas layanan 1 Cawang-Cibubur, Lintas Layanan 2 Cawang-Kuningan-Dukuh Atas, Lintas Layanan 3 Cawang – Bekasi Timur.

Adapun progres pembangunan untuk lintas layanan Cawang - Cibubur terealisasi 60,3% dan Cawang - Dukuh Atas terealisasi 23,6% sementara Cawang - Bekasi Timur terealisasi 45,8% adapun Depo LRT terealisasi 0,3% dengan total realisasi tahap 1 adalah sebesar 39,0%

Lintasan LRT Jabodebek ini akan memiliki 7 koridor, antara lain: Koridor 1 Kebayoran-Kelapa Gading, Koridor 2 Pulomas-Tanah Abang, Koridor 3 Joglo-Tanah Abang, Koridor 4 Puri Indah-Tanah Abang, Koridor 5 Pesing-Kelapagading, Koridor 6 Ancol-Kemayoran, Koridor 7 Bandara Soetta-Kemayoran.

Selain manfaat transportasi, LRT rupanya juga memiliki sejumlah manfaat untuk pembangunan The Greater Jakarta. Di bidang pemukiman, LRT menstimulus munculnya kawasan hunian yang mengusung konsep *transit oriented development* (TOD). Yaitu pemukiman yang dikembangkan dengan mengacu pada jejaring atau sistem transportasi sebagai solusi.

Dengan berkembangnya pemukiman di sepanjang jalur LRT, maka diharapkan kepadatan di Jakarta dapat terurai. Di mana kota-kota satelit yang dilintasi LRT pun, akan mampu mengimbangi kebutuhan pertumbuhan Jakarta. Termasuk menjadi solusi pada masalah-masalah kota seperti mengurangi kemacetan karena penggunaan kendaraan pribadi.

Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan

Proyek *light rail transit* (LRT) Sumatera Selatan adalah sebuah sistem angkutan cepat dengan model Lintas Rel Terpadu yang dibangun di Palembang, yang menghubungkan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Kompleks Olahraga Jakabaring. Pembangunan LRT ini difungsikan sebagai sarana transportasi penunjang warga Palembang dan sekitarnya. Pembangunan alat transportasi tersebut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

LRT di Sumatera Selatan memiliki trase sepanjang 23,5 kilometer yang membelah Kota Palembang dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang sampai dengan Kabupaten Banyuasin. Pembangunan LRT di Sumatera Selatan menggunakan anggaran dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagai pelaksana pembangunannya. Total investasi sekitar Rp12,6 triliun.

Diharapkan keberadaan jalur transportasi ini dapat mengurangi kemacetan di kota Palembang. Pembangunan LRT di Sumatera Selatan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun proses untuk pengadaan 4 *trainset* Kereta Api (KA), adalah 2 *trainset* sudah terealisasi di Palembang, 2 *trainset* dalam perjalanan pengiriman dari Tanjung Priok ke Palembang, dan 4 *trainset* proses uji/tes statis dan dijadwalkan pengiriman dari INKA Madiun tanggal 20 Juni 2018.



JARINGAN JALAN TOL LINTAS SUMATERA



Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 304 kilometer akan menghubungkan Pulau Sumatera dari Aceh hingga Bakauheni. Tahap 1 terdiri atas 8 ruas, terbagi menjadi empat ruas awal: (1) Medan-Binjai, (2) Palembang-Indralaya, (3) Pekanbaru-Dumai, (4) Bakauheni-Terbanggi Besar; dan empat ruas tambahan: (5) Terbanggi Besar- Pematang Panggang, (6) Pematang Panggang-Kayu Agung, (7) Palembang – Tanjung Api-Api dan (8) Kisaran–Tebing Tinggi. Diharapkan proyek jalan tol ini dapat meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya logistik dan mendorong pertumbuhan industri di Pulau Sumatera.



KONEKTIVITAS LAUT



PERWUJUDAN POROS MARITIM SEBAGAI SALAH SATU PONDASI PEREKONOMIAN BANGSA



PELABUHAN

IPC
PT. Pelabuhan Tanjung Priok



12 pelabuhan dan terminal peti kemas

10,5 Juta TEUs kapasitas angkut per tahun

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo memaparkan lima pilar utama yang akan menjadikan Indonesia mewujudkan cita-citanya sebagai poros maritim dunia.

Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat adalah diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Terakhir, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini penting demi menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim.



Dengan pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas diharapkan Indonesia dapat menikmati *demand* pelabuhan yang selama ini dinikmati oleh Singapura dan Malaysia. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menciptakan perkembangan perekonomian secara nasional.

Tahapan pembangunan pelabuhan skala Internasional terus berjalan. Mengingat pelabuhan merupakan urat nadi perekonomian nasional, isu pembangunan atau pengembangan pelabuhan perlu terus digencarkan dan didukung.

Pemerintah berharap, melalui pembangunan proyek strategis nasional akan tercipta pembangunan dan peningkatan ekonomi yang merata. Di mana Jakarta dan kota-kota besar lainnya tidak lagi menjadi desentralisasi perekonomian, namun pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bangsa juga bisa dinikmati oleh masyarakat di pedesaan. Diharapkan, melalui proyek strategis nasional ini, harga-harga kebutuhan pokok di desa-desa tidak jauh berbeda dengan harga di kota.

Pembangunan Terminal Peti Kemas Belawan Fase II

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I, tengah melakukan pembangunan perpanjangan terminal peti kemas Pelabuhan Belawan untuk fase II sepanjang 350 meter. Hal ini dilakukan untuk terus meningkatkan pelayanan danantisipasi pertumbuhan bisnis di masa depan. Di mana hingga September 2017, progres pembangunannya telah mencapai 30%.

Selama ini, arus bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Belawan hanya berkisar satu juta Teus per tahun. Namun jika fase II itu selesai, direncanakan total produksinya bisa mencapai 2,1 juta teus per tahun. Dengan keberadaan terminal fase II tersebut, kapal-kapal berukuran besar yang melayari perairan internasional juga dapat berlabuh di Pelabuhan Belawan.

Dengan perluasan dermaga peti kemas itu, maka kapasitas pelabuhan peti kemas Belawan menjadi dua kali lipat dan jangkauannya juga akan semakin luas karena kegiatan ekspor barang bisa langsung ke India, Dubai, Jepang, dan China. Pelindo I bekerja sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) dalam menggenjot pembangunan terminal peti kemas Belawan fase II dengan nilai investasi Rp3,19 triliun.

Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung

Pengembangan pelabuhan di Kuala Tanjung menjadi pelabuhan hub internasional sebagai pintu masuk ke wilayah barat Indonesia. Dengan hub internasional diharapkan Indonesia dapat menikmati demand pelabuhan yang selama ini dinikmati oleh Singapura dan Malaysia. Berdasarkan dari Rencana Pelabuhan Kuala Tanjung tahun 2012, pembangunan pelabuhan dengan nilai investasi Rp4,029 triliun ini, akan mengakomodir kargo untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Pelabuhan Belawan.

Dengan adanya Pelabuhan Kuala Tanjung maka pelabuhan ini akan menjadi hub internasional di kawasan barat Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Bitung. Berbagai sarana dan prasarana infrastruktur telah disiapkan untuk mendukung fungsi pelabuhan ini. Selain menjadikan hub internasional di kawasan barat Indonesia diharapkan nantinya Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai pelabuhan transshipment dan pelabuhan untuk mendukung Kuala Tanjung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pelabuhan Kuala Tanjung nantinya akan memiliki kapasitas hingga mencapai 20 juta TEUs yang dikembangkan secara bertahap hingga tahun 2023. Tahap I merupakan Pengembangan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung disiapkan dengan memiliki kapasitas 500 ribu TEUs yang dikelola oleh PT Prima Multi Terminal yang merupakan anak usaha gabungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari: PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pembangunan Perumahan, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan komposisi penyertaan saham Pelindo 1 sebesar 55%, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 25%, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 20%.

Hingga November 2017, proyek pembangunan Terminal Multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung kini sudah mencapai 94% untuk sisi laut dan 74,5% untuk sisi darat. Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan akan menjadi pelabuhan terbesar dan merupakan pintu masuk Pulau Sumatera. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung tahap II yaitu Pengembangan Kawasan Industri 3000 Ha (2016-2018), tahap III Pengembangan Dedicated/Hub Port (2017-2019), dan Tahap IV pengembangan kawasan industri terintegrasi (2021-2023).



Pembangunan Konstruksi (*Design & Build*) Dermaga Eksekutif Merak – Bakauheni

Pelabuhan Merak dan Bakauheni akan segera memiliki Dermaga Eksekutif yang menelan nilai investasi sebesar Rp447 miliar. Pembangunan dermaga eksekutif tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Dermaga 6 Pelabuhan Merak, Sabtu 27 Mei 2017. Proyek tersebut dibangun atas *Joint Venture* PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Patra Jasa yang akan dilengkapi kawasan terpadu dengan fasilitas hotel, taman, tempat ibadah, komersial area, dan *lounge* yang dapat diakses dalam satu area.

Melalui sinergi tersebut, Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak dan Bakauheni diharapkan dapat memberikan akses terbaik untuk masyarakat dan wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang akan melakukan perjalanan melalui kedua dermaga tersebut.

Proyek Dermaga Eksekutif ini dibangun di dua lokasi berseberangan, di atas lahan seluas 41.803 meter persegi untuk Pelabuhan Merak (Dermaga 6), dan 48.446 meter persegi untuk Pelabuhan Bakauheni (Dermaga 7). Kehadiran Pelabuhan Merak dan Bakauheni ini diharapkan akan menjadi jawaban atas panjangnya antrean kendaraan dan penumpang yang akan menyeberang.

Pengembangan dermaga 6 di Merak dan dermaga 7 di Bakauheni menjadi prasarana eksekutif, merupakan bagian dari perencanaan dan penataan pelabuhan Merak sebagai destinasi. Ke depannya, Pelabuhan Merak tidak hanya menjadi simpul transportasi tetapi akan dikembangkan menjadi simpul ekonomi melalui pengembangan properti dan *life style* untuk menarik minat pelanggan non-penyeberangan.

Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru

Pembangunan Pelabuhan Kalibaru adalah pelabuhan yang terletak di Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Pelabuhan ini direncanakan untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka mendukung distribusi logistik nasional. Terminal peti kemas dengan nilai investasi Rp14,5 triliun ini, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok. Realisasi per November 2017 (TW IV) untuk pembangunan secara fisik sudah mencapai 70,39%.

Sejak resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 September 2016, Terminal Peti Kemas 1 Pelabuhan Kalibaru siap menampung kapal kontainer berukuran besar yang berkapasitas hingga 18.000 TEUs, pelabuhan yang kini bernama lain New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) itu menyamai kapasitas Port of Singapore. Pelabuhan yang dikelola atas kerja sama antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Mitsui, Port Singapore Authority, dan Nippon Yusen Kaisha tersebut bahkan mengungguli pelabuhan paling maju di Indonesia saat ini, Tanjung Priok.

Pelabuhan ini memiliki lapangan terminal seluas 32 hektare, dengan kapasitas 1,5 juta TEUs per tahun. Total panjang dermaga 450 meter dan akan bertambah menjadi 850 meter. Sementara kedalamannya mencapai -14 meter LWS dan akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter LWS.

Besarnya kapal pengangkut kontainer yang bisa bersandar di New Priok akan mengurangi biaya logistik. Pengurangan itu diharapkan dapat menurunkan harga barang sampai ke tangan konsumen. Sebelumnya, kapal asing berukuran besar terpaksa harus mampir ke Singapura atau Malaysia untuk menuju Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya *double handling* dan berdampak pada pembengkakan biaya logistik.

Pelabuhan New Priok ini akan beroperasi secara komersial dengan dukungan kesiapan operasional terminal peti kemas. Kesiapan tersebut dari sisi infrastruktur, suprastruktur, sistem informasi di sisi dermaga, lapangan dan *gate*, serta sinkronisasi proses pelayanan antara terminal dengan instansi-instansi Pemerintah. Instansi yang terlibat antara lain Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina, serta para pelaku usaha logistik dan pemilik barang.

Pelabuhan yang diproyeksi akan menjadi bandar laut terbesar di Asia Tenggara itu dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk migas. Adapun tahap dua meliputi empat terminal peti kemas. Dari seluruh terminal yang akan dibangun, saat ini baru Terminal Peti Kemas 1 yang siap dioperasikan.



Pembangunan Inland Waterways/ Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL)

Pembangunan Inland Waterways/CBL bertujuan untuk mengoptimalkan potensi jalur kanal sungai sebagai alternatif transportasi logistik. Optimalisasi ini akan menghubungkan area *off the road* Pelabuhan Tanjung Priok dengan area *hinterland*. Pembangunan Inland Waterways/CBL dengan nilai investasi Rp3,42 triliun ini, sangat dibutuhkan. Selain untuk efisiensi, juga untuk mengurangi beban jalan raya. Karena saat ini kawasan Tanjung Priok sudah sangat padat sehingga perlu ada alternatif proses pengangkutan.

Secara keseluruhan, Inland Waterways/CBL dirancang bisa menampung arus peti kemas hingga 3 juta TEUs per tahun. Bila proyek ini selesai, bisa mengurangi adanya penumpukan kendaraan dan kontainer di Tanjung Priok. Selain itu para pelaku bisnis bisa memanfaatkan berbagai pilihan moda transportasi yang ada di Tanjung Priok, mulai dari kereta api, jalan raya dan juga sistem pengangkutan sungai.

Pembangunan Inland Waterways dan Terminal Cikarang Bekasi Laut dimaksudkan untuk memberikan moda transportasi alternatif yang lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan, yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan kawasan industri di Timur Jakarta. Hingga akhir Desember 2017, proyek ini masih dalam persiapan. Rencananya, pembangunan akan dilakukan pada awal tahun 2018.

Pekerjaan Konstruksi (*Design & Build*) Pembangunan Kawasan Pelabuhan Labuan Bajo

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membangun proyek strategis perdananya melalui pembangunan kawasan komersial di Labuan Bajo, yang terdiri dari Pelabuhan Marina, peningkatan fasilitas dermaga penyeberangan, hotel, serta area komersial dengan total investasi sekitar Rp320 miliar. Proyek pembangunan kawasan komersial Labuan Bajo merupakan proyek sinergi BUMN antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Patra Jasa.

Kawasan komersial ini akan dikelola oleh perusahaan patungan ketiga pihak tersebut, di mana PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menjadi pemegang saham mayoritas 51 % karena pengembangan proyek berada di atas lahan milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Patra Jasa sebesar 25 %, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar 24 %.

Labuan Bajo, Ibukota Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu destinasi pariwisata berbasis bahari yang lengkap, dan serius untuk dikembangkan. Soal potensi alam, Labuan Bajo memang punya segalanya, mulai dari eksotisnya Pulau komodo, satu-satunya binatang purba yang masih tersisa di muka bumi, panorama Pulau Padar yang sangat indah, hingga sensasi *tracking ala Jurassic* di Pulau Rinca.

Pembangunan Pelabuhan Kijing

Pengembangan Pelabuhan Kijing adalah pelabuhan yang terletak di provinsi Kalimantan Barat, di kabupaten/kota Mempawah. Pelabuhan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 32 hektare dengan nilai investasi Rp5,05 triliun. Lokasi Pelabuhan Pontianak yang strategis menjadikan pertumbuhan arus barang di pelabuhan ini sangat tinggi. Dengan keterbatasan Pelabuhan Pontianak saat ini yang sudah sangat padat, sehingga sulit untuk mengakomodir kapal-kapal besar. Untuk itu, diperlukan pembangunan pelabuhan baru yang berada di sisi laut sehingga tetap dapat mengakomodir permintaan pasar serta dapat memberikan dampak terhadap peningkatan investor dalam mengembangkan industri perkebunan dan pertambangan.

Pelabuhan Kijing diproyeksikan akan menampung kapasitas hampir 1 juta TEUs peti kemas, 8 juta ton CPO, dan 15 juta ton curah kering. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II melakukan pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat mulai Desember 2017, di mana pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan internasional pertama di Kalimantan.

Di Pelabuhan Kijing nantinya akan dibangun terminal peti kemas, terminal curah cair & curah kering, terminal multi purpose, dan fasilitas darat terminal.

Pembangunan dan Pengembangan Kendari New Port

Kendari New Port atau disingkat KNP merupakan rencana pelabuhan baru di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang masuk dalam salah satu rangkaian rencana pembangunan dan pengembangan 9 (sembilan) pelabuhan yang dikelola PT Pelindo IV (Persero). Pelabuhan ini disiapkan dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur kepelabuhanan yang optimal, yang antara lain untuk menambah kapasitas pelayanan pelabuhan, mempercepat konektivitas antarwilayah, serta memangkas biaya logistik dalam kerangka konsep tol laut.



Sesuai perencanaan, KNP ditargetkan sudah mulai beroperasi pada 2019 mendatang dengan kapasitas sebesar 300.000 TEUs dengan luas mencapai 10 hektare. Alokasi anggaran sebesar Rp935 miliar, dengan rincian Rp635 miliar dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan kas internal Rp300 miliar.

Pembangunan KNP tersebut seiring dengan estimasi pertumbuhan arus peti kemas yang masuk Kendari. Dengan demikian, kapasitas pelabuhan diproyeksi bakal mencapai titik jenuh pada beberapa tahun ke depan. Saat ini, kapasitas pelabuhan eksisting di Kendari hanya berkisar 100.000 TEUs dengan luas 2,3 hektare.

Progres Kendari New Port Paket 1, untuk pembangunan dermaga 300 x 35 meter persegi, hingga akhir Desember 2017 sudah mencapai 80,92%. Sementara untuk Kendari New Port Paket 2 pembangunan CY 5 hektare sudah mencapai 6,89% sedangkan Kendari New Port Paket 3 pembangunan fasilitas Pelabuhan, *Power Plant* dan ME, masih dalam persiapan.

Pengembangan Pelabuhan Tarakan

Pelabuhan Malundung di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, merupakan salah satu pelabuhan yang akan dijadikan proyek tol laut. Pelabuhan ini akan dihubungkan dengan beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. PT Pelindo IV (Persero), mengalokasikan belanja modal yang bersumber dari dana penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp123,5 miliar untuk membangun lapangan penumpukan peti kemas di Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara. Perseroan juga akan menggelontorkan investasi dari kas internal sebesar Rp203,80 miliar untuk pengembangan Pelabuhan Tarakan secara komprehensif. Hingga akhir Desember 2017, progres pengembangan untuk reklamasi 2,14 hektare sudah mencapai 100%, sementara pembangunan CY 5 hektare sudah mencapai 55%, atau secara total pengembangan pelabuhan ini sudah mencapai 80,01%.

Adapun pengerjaan juga meliputi reklamasi lahan di sekitar pelabuhan dan memindahkan terminal penumpang serta menambah panjang dermaga 150 meter dari yang eksisting saat ini 381 meter. Khusus untuk lapangan penumpukan peti kemas yang akan dibangun nantinya akan memiliki daya tampung kurang lebih 146.000 TEUs per tahun.

Sejauh ini, lapangan penumpukan yang ada di Pelabuhan Tarakan hanya berkapasitas 46.000 TEUs per tahun, dengan rata-rata trafik per tahun yaitu 37.000 TEUs. Saat ini luas lapangan petikemas di Pelabuhan Tarakan hanya 1,2 hektare, sedangkan lahan yang akan direklamasi seluas 5,3 hektare.

Sementara itu, rencana pemindahan lokasi terminal penumpang di Pelabuhan Tarakan akan berada di bagian depan kawasan pelabuhan, yang mana terminal penumpang eksisting agak menjorok ke belakang. Terkait fasilitas yang akan dibangun di terminal penumpang yang baru nanti tergantung kebutuhan. Hanya saja yang pasti, daya tampung ruang tunggu penumpang akan lebih besar dari kapasitas di terminal penumpang yang ada sekarang.

Pembangunan Makassar New Port

Pembangunan Makassar New Port (MNP) bertujuan untuk memindahkan sebagian kegiatan yang ada di Pelabuhan Makassar saat ini, sehingga efektivitas bongkar muat barang dapat lebih meningkat. Keberadaan MNP akan ikut menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan secara luas dan Indonesia secara umum.

Selain itu, MNP juga merupakan program nasional poros maritim yang lebih dikenal dengan Tol Laut. Pembangunan MNP itu sejalan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Infrastruktur.

Sejak pelaksanaan *Ground Breaking* Makassar New Port tanggal 22 Mei 2015 oleh Presiden Joko Widodo, pembangunan Makassar New Port hingga Desember tahun 2017 telah mencapai 55,96% dan ditargetkan rampung pada tahun 2018. Total alokasi anggarannya mencapai Rp1,5 triliun, yang berasal dari APBN.

Untuk mendukung pelabuhan tersebut, Pemerintah juga membangun akses jalan di sisi laut. Pembebasan lahan telah dilaksanakan secara simultan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. Material pembangunan terus didatangkan ke lokasi via darat dan selanjutnya melalui akses laut, sehingga tidak akan merusak jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. PT Pelindo IV (Persero) menunjuk mitranya sesama BUMN, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, sebagai kontraktor pelaksana proyek. Sedangkan konsultan pengawas ditunjuk PT Yodya Karya.

Secara fisik, MNP diwujudkan dalam beberapa tahap. Tahap IA meliputi pembangunan jalan, dermaga sepanjang 320 meter, dengan kedalaman -14 m LWS, lapangan kontainer (*container yard*) seluas 16 hektare, dilengkapi peralatan berupa 3 Unit CC, 9 unit RTG, *head truck* dan *chassis*, *power plan* dan pendukung dari sisi IT. Kapasitas terpasang untuk pelabuhan ini akan mencapai 500.000 TEUs. Secara keseluruhan, total kapasitas Pelabuhan Makassar akan mencapai 4,2 juta TEUs, dengan panjang dermaga 2.850 meter dan lapangan penumpukan 171 ha.



Seperti program Tol Laut yang lain yang mengedepankan konektivitas, pelabuhan MNP ini juga akan terkoneksi dengan jalur rel kereta api Makassar - Pare-pare dan Kawasan Industri Makassar (Kima) proyek MNP. Sinergi antara BUMN dan Pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kota, telah berjalan dengan sangat baik untuk mewujudkan Makassar New Port yang ditargetkan selesai sesuai jadwal.

Pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III melakukan perbaikan struktur dermaga lokal dan nusantara di Pelabuhan Tenau Kupang dengan nilai investasi Rp194,24 miliar. Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu dari 23 pelabuhan *feeder* di Indonesia guna pengembangan program tol laut yang diusung oleh Presiden Joko Widodo, guna menjadikan Indonesia poros maritim dunia dan mampu untuk menggerakkan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan NTT salah satunya.

Pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang ini ditujukan agar dapat disinggahi kapal-kapal berukuran besar. Dengan adanya pengembangan pelabuhan Tenau Kupang ini membuktikan keseriusan Pemerintah untuk menjadikan laut Indonesia poros maritim. Pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang dalam rangka peningkatan kekuatan struktur dermaga ini, telah selesai dilakukan pada pertengahan 2017.

Pengembangan Pelabuhan Ternate

Proyek *Replacement* Dermaga Pelabuhan Ahmad Yani Ternate yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sudah dimulai sejak Agustus tahun 2016 dan selesai pada 28 Desember 2017. Pengerjaan proyek dermaga ini dilakukan oleh kontraktor PT Utama Karya (Persero) dengan anggaran yang berasal dari PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp89,26 miliar.

Renovasi terhadap dermaga yang pertama kali dibangun tahun 1965 tersebut dilakukan untuk memperkuat konstruksi dermaga dan memperluas area bongkar muat barang. Awalnya, lebar dermaga hanya sekitar 15 meter dengan panjang 148 meter. Kemudian ditambahkan lebarnya menjadi 25 meter, sehingga sekarang luasnya menjadi sekitar 3.500 meter persegi.

Setelah direnovasi, saat ini Dermaga Ternate mampu menopang kurang lebih 2 (dua) Container Crane pada saat yang bersamaan serta memungkinkan kapal-kapal yang lebih besar untuk bersandar. Dampaknya, kegiatan bongkar muat logistik menjadi lebih cepat dan lancar sehingga semakin meningkatkan geliat perekonomian di Indonesia Timur.

Pengembangan Pelabuhan Bitung

Pelabuhan ini dipilih sebagai Pelabuhan Hub Internasional di Kawasan Timur Indonesia dengan pertimbangan bahwa pertumbuhan di wilayah Timur Indonesia memiliki potensi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia. Dinamika logistik di wilayah timur Indonesia diharapkan bertumbuh secara eksponensial.

Pelabuhan ini akan mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang dinyatakan sebagai salah satu prioritas Pemerintah. Di samping itu, keberadaan Pelabuhan Hub Internasional Bitung juga akan mendukung kegiatan industri kawasan timur Indonesia meliputi Ambon dan Ternate (pertanian, industri dan pertambangan) serta Samarinda, Balikpapan, Tarakan dan Nunukan (batu bara, minyak bumi dan kayu lapis).

Pemerintah menyiapkan Bitung, Sulawesi Utara, menjadi sentra perdagangan Asia-Pasifik dan simpul kegiatan ekspor di wilayah tersebut, sekaligus menjadi pelabuhan singgah untuk komoditas di wilayah timur Indonesia. Pelabuhan Bitung dapat menjadi pintu gerbang utama di wilayah timur Indonesia di masa depan. Pelabuhan Bitung telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Hub Internasional melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Proyek ini digarap oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV. Sesuai rencana, proyek pembangunan telah dimulai pertengahan tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada September 2018. Secara total, untuk pembangunan fisik hingga akhir Desember 2017 sudah mencapai 54,81%.

Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp506,50 miliar, dengan skema pembiayaan Rp365 miliar menggunakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Rp141,50 miliar dari kas internal Perseroan.

Selain merehabilitasi Pelabuhan Bitung, pihak Pelindo IV sebagai BUMN pengelola pelabuhan akan menambah dermaga dengan panjang 250 meter dan mereklamasi *seaway* seluas 5 hektare. Ke depan, akan ada peningkatan kapasitas lapangan penumpukan dari yang saat ini sebanyak 300.000 TEUs per tahun, menjadi kurang lebih 700.000 TEUs per tahun. Jika digabung dengan lapangan penumpukan yang ada di Pelabuhan Bitung konvensional yang memiliki luas sekitar 7,5 hektare, maka total daya tampung yang tersedia bisa mencapai antara 1,2 juta hingga 1,5 juta TEUs per tahun.



Pembangunan Pelabuhan Sorong - Seget

Pembangunan Pelabuhan Sorong - Seget merupakan pengembangan konektivitas jaringan transportasi untuk kawasan Indonesia bagian timur, antara lain dengan pembangunan pelabuhan petikemas yang efisien untuk memfasilitasi sistem logistik yang murah. Dengan terbatasnya kapasitas pelayanan dan lahan pengembangan di Pelabuhan Sorong maka PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berinisiatif untuk mengembangkan pelabuhan baru yang berfungsi sebagai regional hub Indonesia bagian timur sekaligus sebagai *West Pacific Hub*. Pelabuhan ini sendiri berlokasi di Distrik Seget Provinsi Papua Barat, dengan nilai investasi Rp3,42 triliun.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan Pelabuhan Seget harus segera dimulai dan dipercepat. Pelindo II sebagai pengelola Pelabuhan Seget, sedang melakukan pembebasan lahan dan mempersiapkan penunjang pembangunan lainnya. Pelabuhan yang diperkirakan seluas 7.500 hektare ini memiliki kapasitas untuk menampung peti kemas yang cukup besar, yakni hingga 1 juta TEUs. Pelabuhan ini akan mengintegrasikan Pelabuhan Kota Sorong, Pelabuhan Arar dan Seget di Kabupaten Sorong. Pembahasan final tentang *master plan* pembangunan pelabuhan induk secara terintegrasi di wilayah Sorong itu dilakukan pada 24 Oktober 2015.

Pelabuhan Seget diarahkan untuk menjadi pelabuhan internasional yang akan menjadi poros transportasi laut di kawasan Pasifik untuk jalur Australia, Jepang, Fiji serta Asia Tenggara. Secara keseluruhan, pembangunan pelabuhan terintegrasi di wilayah Sorong itu ditargetkan selesai pada 2019 mendatang.

Pengembangan Pelabuhan Ambon

Pelabuhan Ambon diharapkan bisa menjadi pelabuhan *direct call* di kawasan Maluku. Dasar kebijakan tersebut didukung oleh kepentingan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan biaya pengiriman yang lebih murah. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV, selaku pengelola pelabuhan tersebut, menilai bahwa *direct call* merupakan cara menekan efisiensi biaya dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain dalam menciptakan produk-produk dari kawasan timur Indonesia agar memiliki daya saing yang kuat di pasar mancanegara.

Untuk mengoptimalkan peran Pelabuhan Ambon, Pelindo IV mengembangkan pelabuhan ini dengan melakukan reklamasi pantai dan penguatan dermaga. Pelabuhan Ambon menjadi salah satu dari sembilan proyek melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) di kawasan pelabuhan kelolaan Pelindo IV.

Dalam kegiatan pengembangan pelabuhan ini, dilakukan reklamasi 6000 meter persegi dan *restrengthening* 200 meter dengan nilai investasi melalui PMN sebesar Rp50,49 miliar. Hingga Desember 2017, progres fisik dari keduanya telah mencapai 59,48%. Sementara untuk pengadaan 3 unit RTG di Pelabuhan Ambon dengan nilai investasi melalui PMN sebesar Rp34,72 miliar, progresnya telah mencapai 100%.

Pengembangan Pelabuhan Sorong

Pelabuhan Sorong mempunyai prospek yang cukup bagus. Lokasinya di ujung Papua dengan daerah belakang atau *hinterland* yang luas. Aneka produk pertanian dan perkebunan serta pertambangan asal Papua bisa diekspor melalui Pelabuhan Sorong.

Sorong bukan hanya dibangun pelabuhan internasional. Daerah ini juga akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sorong ke depan akan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Semua produk pertanian dan pertambangan asal Papua bisa diolah di industri dalam negeri khususnya KEK Sorong. Hasilnya baru diekspor melalui Pelabuhan Sorong yang akan akan dibangun lebih besar.

Pengembangan Pelabuhan Sorong, Papua Barat, diserahkan pada perusahaan induknya, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Pelabuhan itu sudah komersial dan selama ini dikelola BUMN yaitu Pelindo IV dengan kantor pusat di Makassar Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan pengembangan yang dilakukan Pelindo IV pelabuhan ini, dilakukan pembangunan Dermaga 250x30 meter persegi dan reklamasi 5 hektare dengan nilai investasi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp269,66 miliar. Hingga akhir Desember 2017, progres pengembangan pelabuhan tersebut telah mencapai 58,74%.

Pengembangan Pelabuhan Manokwari

Perluasan kawasan pelabuhan Manokwari bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat. Perluasan dermaga ini bertujuan untuk memperlancar pelayaran dan aktivitas bongkar muat petikemas yang dikelola oleh otoritas pelabuhan. Dana yang diperuntukan untuk perluasan pembangunan dan penyelesaian dermaga tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp42,10 miliar.

Dalam kegiatan pengembangan pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV, ini, dilakukan perluasan dermaga peti kemas sebesar 70x30 meter, di mana hingga Desember 2017, progresnya telah mencapai 68,24%.



Konektivitas Laut

Pengembangan Pelabuhan Merauke

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV Cabang Merauke telah mulai mengembangkan Pelabuhan Merauke dan akan difungsikan mendukung program Tol Laut Pemerintah. Pengembangan yang dimaksud adalah pembangunan dermaga berukuran 75x30 meter dan proyek pemasangan *Fix Crane* di Pelabuhan Merauke. Anggaran proyek bersumber dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp124,5 miliar. Progres per Desember 2017, untuk pembangunan dermaga berukuran 75x30 meter persegi telah mencapai 95,41%. Sementara proyek pemasangan pondasi *fix crane* telah 100%.

Jika dermaga pelabuhan Merauke ini ditambah menjadi 75 meter, maka total panjang dermaga adalah 333 meter. Karenanya, dermaga ini dipastikan mampu menampung 3-4 kapal berukuran 70 meter dengan bobot 4.000-6.000 gross ton. Pengembangan tahap 1 ini dikonsentrasikan di sisi kiri pelabuhan, guna menambah mobilisasi armada.

Pelabuhan Jayapura merupakan salah satu pelabuhan kelolaan Pelindo IV yang masuk dalam perencanaan revitalisasi sembilan pelabuhan yang ditargetkan rampung 2018 dan beroperasi secara penuh pada tahun selanjutnya. Sesuai rencana, Pelindo IV menyiapkan anggaran Rp200 miliar.

Hingga akhir Desember 2017, untuk pengembangan dermaga 150 x10 meter persegi dan *replacement* 150 x 30 meter persegi telah mencapai 70,17%. Adapun pelabuhan ini juga telah dilengkapi dengan 2 unit RTG dengan harga US\$2.327.300.

Pada awal April 2016 yang lalu, rangkaian pengembangan Pelabuhan Jayapura juga telah dimulai melalui pembukaan jalur pelayaran langsung (*direct call*) ke negara tujuan ekspor China dengan memberangkatkan 40 kontainer komoditi kayu olahan. Pengembangan infrastruktur maupun suprastruktur di Pelabuhan Jayapura akan dilakukan secara simultan agar ke depannya mampu memangkas ongkos logistik di wilayah timur khususnya Papua.

Pengembangan Pelabuhan Jayapura

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV telah mulai mengembangkan Pelabuhan Jayapura dan akan difungsikan mendukung program Tol Laut pemerintah. Pengembangan Pelabuhan Jayapura juga untuk mempercepat perubahan status Pelabuhan Jayapura menjadi pelabuhan ekspor agar komoditi yang ada di Papua bisa langsung dikirim ke luar negeri tanpa harus transit di pelabuhan lain.





KONEKTIVITAS UDARA



PENINGKATAN SARANA DAN FASILITAS TRANSPORTASI UDARA YANG TERINTEGRASI



BANDAR UDARA

Angkasa Pura | AIRPORTS

9 bandara baru (proyeksi hingga 2019)
92 Juta juta penumpang per tahun

Jaringan koneksi udara sangat penting keberadaannya, mengingat persinggungan fisik antara Indonesia dengan dunia internasional dilakukan melalui bandara. Untuk mendukungnya, kesiapan bandar udara dan transportasi pendukung yang menyokongnya sangat penting. Karena itulah, Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) giat mengembangkan proyek infrastruktur transportasi tersebut. Pemerintah terus memulai pembangunan bandara-bandara baru di daerah pinggiran dan terpencil. Hal ini terkait dengan Nawacita ke-7 yakni merealisasikan kemandirian ekonomi lewat pengembangan daerah yang memiliki potensi ekonomi. Kehadiran bandar udara diyakini menjadi salah satu pemicu peningkatan ekonomi suatu daerah.

Kehadiran simpul transportasi yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap, tentunya juga meningkatkan pergerakan barang dan manusia. Seiring dengan itu, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan semakin meningkat.

Pengembangan Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo

Bandara Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) diproyeksikan sebagai pendukung Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Operator 13 bandara di Indonesia Timur, PT Angkasa Pura I (Persero), menargetkan pembangunan Bandara Kulon Progo Yogyakarta akan menelan biaya investasi sekitar Rp9,3 triliun. Progres pembangunan Bandara Kulon Progo per Desember 2017 telah mencapai 83,33%, di mana progres fisik pembangunan bandara baru ini sudah mencapai 42,78%.

Bandara tersebut nantinya akan memiliki daya tampung sebanyak 15 juta penumpang/tahun dengan landas pacu sepanjang 3.600 meter. Angkasa Pura I memperkirakan pergerakan pesawat di Bandara Kulon Progo mencapai 300 penerbangan/hari. Selain itu, Bandara Kulon Progo juga bakal menampung sebanyak 28 pesawat berbadan lebar atau *widebody* jenis B777. Bandara Kulon



Konektivitas Udara

Progo ini bakal menjadi bagian dari rencana Angkasa Pura I dalam mengembangkan *Airport City*.

Pembangunan Bandara Kulon Progo ditargetkan rampung pada Oktober 2019. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah membidik 5 negara ASEAN yaitu Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand dan Laos, untuk membuka pasar wisatawan baru lewat bandara internasional di Kabupaten Kulon Progo tersebut.

Proyek Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang

Proyek Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero), untuk menampung tingkat pertumbuhan trafik penumpang yang telah mencapai 4,2 juta penumpang pada tahun 2016, sedangkan kapasitas bandara hanya untuk menampung trafik penumpang sebanyak 1 juta penumpang. Selain itu, dilakukan juga pengembangan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan layanan.

Melalui pengembangan bandara ini diharapkan dapat menciptakan bandara berstandar internasional dengan kapasitas penumpang di tahap *ultimate* mencapai 5,7 juta penumpang, melayani kargo 25.576 ton per tahun, dan melayani pergerakan pesawat sebanyak 53.270 pergerakan. Selain itu, nantinya bandara ini juga dapat melayani penerbangan domestik, internasional dengan jenis pesawat terbesar tipe B767-400.

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah juga konsentrasi terhadap pengembangan bandar udara strategis untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah. Salah satunya adalah Bandar Udara Ahmad Yani dengan luas terminal 58.000 meter persegi, kapasitas 6 juta penumpang/tahun. Bandara Ahmad Yani Semarang kini dalam proses pembangunan setelah 10 tahun nasibnya terkatung-katung. Pada 2018, Bandara Ahmad Yani akan menjadi bandara di atas air (*floating*) pertama di Indonesia.

Pengembangan bandara Ahmad Yani dengan nilai investasi Rp2,185 triliun ini, nantinya akan dapat meningkatkan kapasitas penumpang hingga 7 (tujuh) juta penumpang per tahun, dari sebelumnya hanya 800 ribu. Peningkatan kapasitas ini ditunjang dengan perluasan terminal dari semula 6.108 meter persegi menjadi 55.000 meter persegi. Kapasitas apron pesawat meningkat dari semula enam *parking* menjadi 13 *parking* pesawat berbadan lebar.

Bandara ini sangat artistik dengan konsep *eco airport* dan *go green*. Lampu jalan menggunakan energi solar *cell*, pengolahan airnya *reverse osmosis* dan *me-recycle* air tambak untuk operasional. Progres Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang per Desember 2017 telah mencapai 85,71%, di mana progres fisik pengembangan bandara ini sudah mencapai 34,66%.

Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin

Proyek revitalisasi Bandar Udara Syamsudin Noor dilakukan untuk menampung tingkat pertumbuhan trafik penumpang yang telah mencapai 3,6 juta penumpang pada tahun 2016, sedangkan kapasitas bandara hanya untuk menampung trafik penumpang sebanyak 1,3 juta penumpang. Selain itu, dilakukan juga pengembangan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan layanan.

Nantinya, Bandar Udara Syamsudin Noor diharapkan mampu menjadi bandara berstandar internasional dengan kapasitas penumpang di tahap *ultimate* mencapai 10 juta penumpang, melayani kargo 82.000 ton per tahun, dan melayani pergerakan pesawat sebanyak 79.775 pergerakan. Proyek revitalisasi bandara dengan nilai investasi Rp2,309 triliun ini, ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2019.

Setelah memulai pembangunan bandara-bandara baru di daerah pinggiran dan terpencil, Pemerintah mulai fokus pada pengembangan dan pembangunan bandara yang lebih besar. Rencana ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah. Revitalisasi bandar udara bertujuan untuk meningkatkan akses ke daerah sehingga akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan. Hal ini terkait dengan Nawacita ketujuh yang direpresentasikan dengan sentuhan pada bandara-bandara yang bisa memacu ekonomi secara global, dan secara pemanfaatannya bisa dipakai secara merata.

Adapun proyek revitalisasi bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero), terus dikebut untuk meningkatkan kapasitas bandara agar lebih lengkap dari segi fasilitas dan pelayanan serta memiliki daya tampung yang lebih besar untuk menampung tingkat pertumbuhan trafik penumpang. Integrasi sarana penunjang antara pembangunan infrastruktur jalan dengan revitalisasi bandara menjadi satu kesatuan yang saling menunjang antara satu dan yang lainnya, guna mendorong peningkatan ekonomi suatu daerah dan juga meningkatkan industri pariwisata setempat.

Progres revitalisasi Bandar Udara Syamsudin Noor per Desember 2017 telah mencapai 80,00%, di mana progres fisik revitalisasi bandara ini sudah mencapai 17,63%.



ELEKTRIFIKASI



INDONESIA TERANG DARI SABANG SAMPAI MERAUKE

Pemerintah terus membangun infrastruktur kelistrikan di seluruh pelosok. Di wilayah timur, membangun gardu induk hingga Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM). Hasilnya, rasio elektrifikasi nasional terus meningkat.

PROGRAM KENAikan ELEKTRIFIKASI



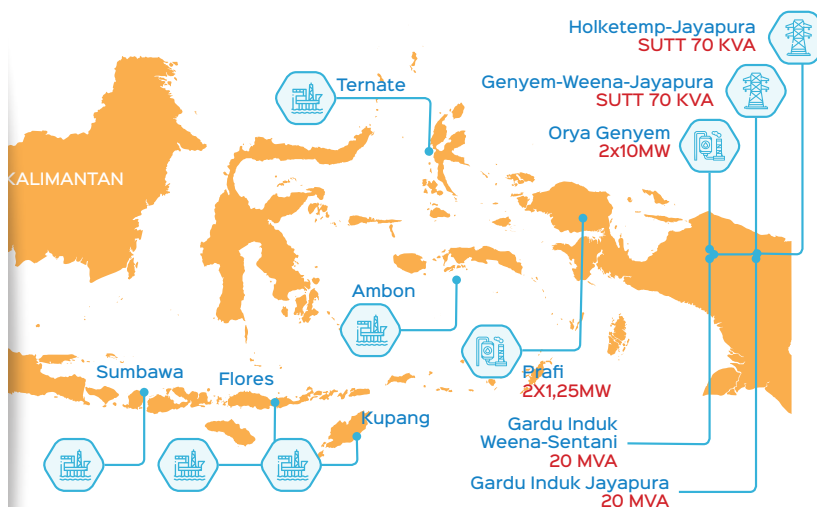
15.266 MW
Pembangkit Listrik Baru



255 PLTD
Desa terpencil



3 unit
MVP



PLTM: Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro



PLTA: Pembangkit Listrik Tenaga Air



SUTT: Saluran Udara Tegangan Tinggi



Dual Fuel: Bahan Bakar Gas & BBM



PLTD: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel



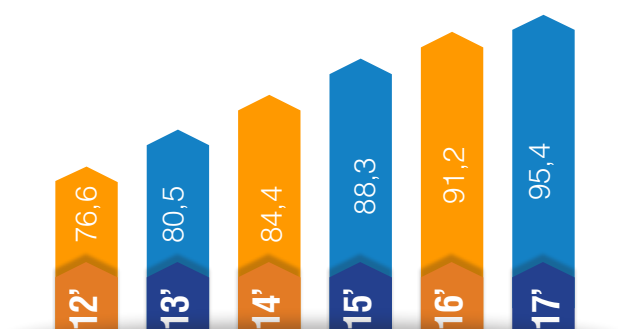
MVP: Marine Vessel Power Plant



Pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, terus berkomitmen untuk menerangi Nusantara, termasuk desa-desa yang berada di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Saat ini, Pemerintah tengah gencar membangun daerah 3T karena pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sana. Hal ini yang menjadi semangat PLN untuk menjangkau pembangunan kelistrikan di daerah 3T tersebut demi mendorong perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik.

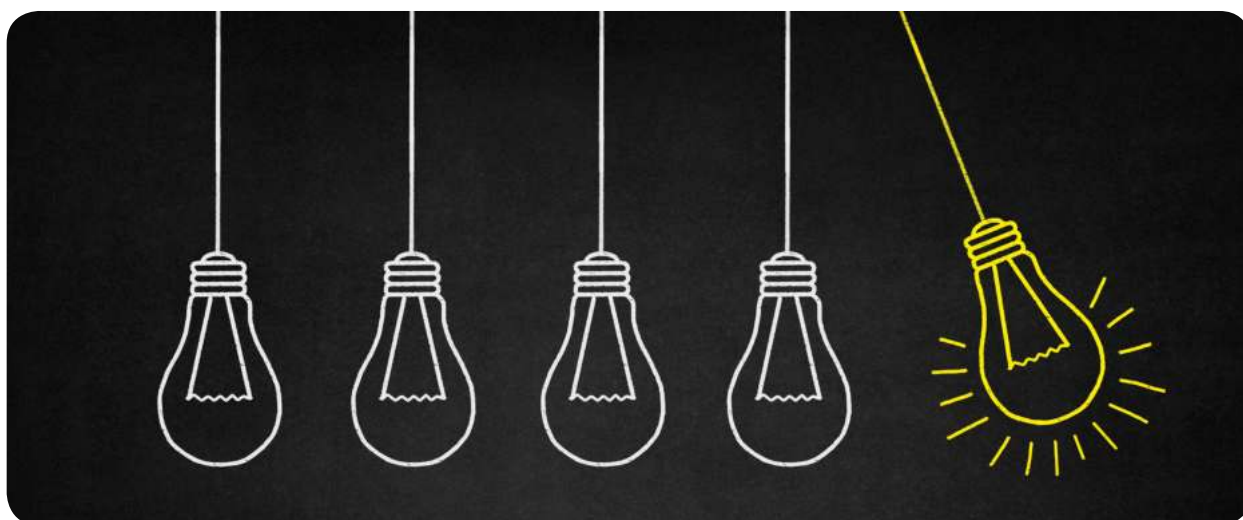
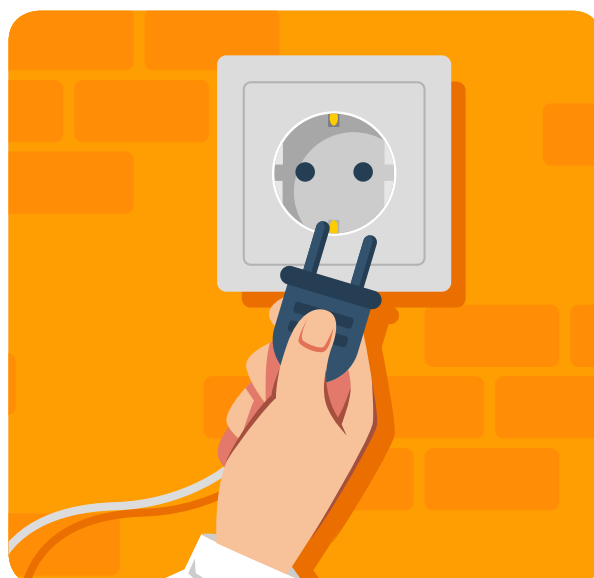
Tahun 2017 menjadi tantangan PLN untuk melistriki desa-desa di seluruh Indonesia di mana desa-desa tersebut memiliki akses yang sulit serta biaya yang tidak murah. Walaupun demikian, PLN selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Kementerian ESDM terus berupaya melistriki seluruh desa-desa di Indonesia, termasuk di dalamnya daerah 3T. Hal tersebut terlihat dari rasio elektrifikasi yang meningkat dari 91,2% di tahun 2016 menjadi 95,4% di tahun 2017, tren ini pun terus meningkat setiap tahunnya.

Rasio Elektrifikasi (2012-2017)



Dengan segala bentuk upaya yang telah dilakukan, PLN berhasil menghilangkan pemadaman listrik secara bergilir yang terjadi tahun 2015, melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkesinambungan. Saat ini, terdapat cadangan daya listrik yang memadai pada sistem besar.

Tidak hanya sistem besar saja, PLN terus meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau akses listrik, yaitu daerah 3T. Hal ini diperlukan untuk tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.





Peningkatan Pasokan Listrik hingga Daerah 3T Tahun 2017



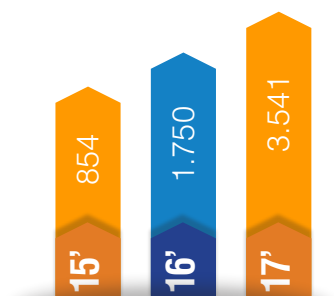
*Pertumbuhan permintaan yang signifikan meskipun daya terus ditingkatkan



ELEKTRIFIKASI

Melalui segala bentuk program yang telah dilakukan PLN dalam rangka melistriki desa, sampai dengan Desember 2017, desa teraliri listrik meningkat menjadi 75.682 desa. Hal ini membuktikan bahwa PLN sebagai salah satu agen pembangunan, telah berupaya untuk memenuhi komitmennya dalam menerangi nusantara untuk kesejahteraan masyarakat.

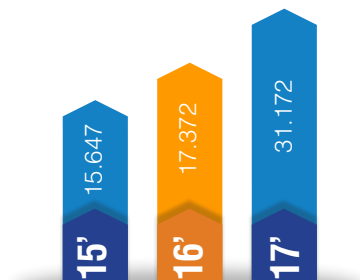
Jumlah Tambahan Desa Berlistrik Tahun 2015-2017



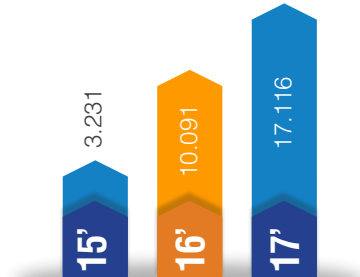
Selain menerangi daerah-daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal, saat ini PLN bekerja menerangi Nusantara melalui berbagai program strategis, di antaranya Program 35.000 MW, 7.000 MW dan juga pengembangan energi baru terbarukan. Per Desember 2017, tercatat 31.172 MW dari program 35.000 MW telah ditandatangani. Program 35.000 MW ini meliputi pembangunan pembangkit sebesar 35.861 MW, transmisi 46.811 kilometer, dan Gardu Induk 109.199 MVA. Per Desember 2017, progres konstruksi pembangkit telah mencapai 17.116 MW dari total pembangkit yang akan dibangun.

Progres Pembangunan Pembangkit

PPA/ Kontrak (MW)



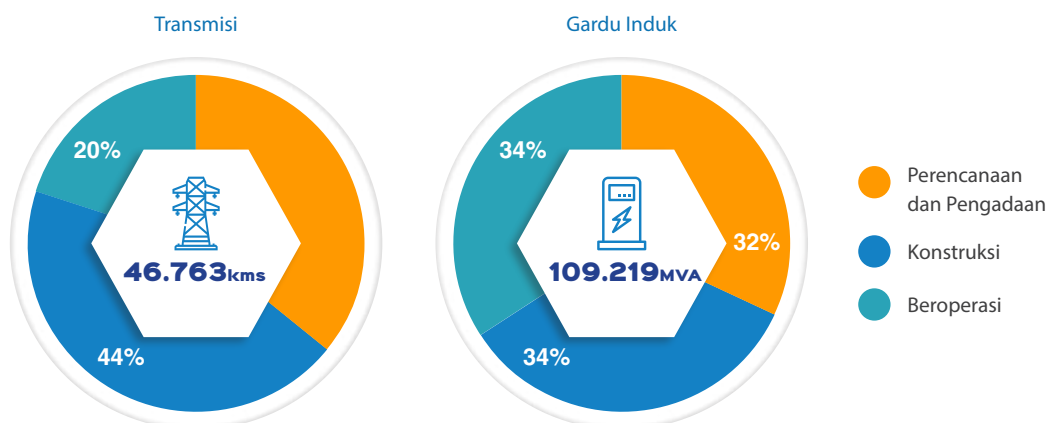
Konstruksi (MW)



SLO/COD/Komisioning (MW)
(sudah beroperasi)



Pembangunan Transmisi & Gardu Induk

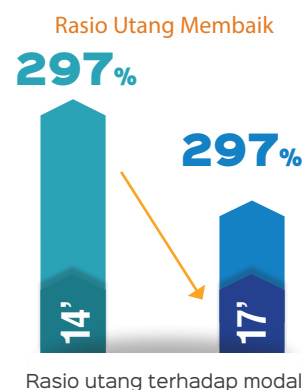
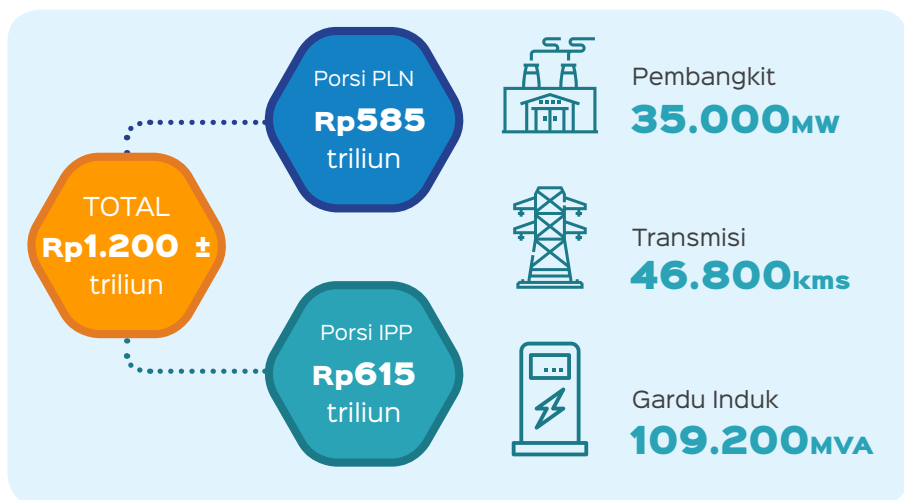




Program 35.000 MW adalah proyek Pemerintah untuk membangun pembangkit listrik mencapai 35.000 MW hingga 2019. Program 35.000 MW ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal ini tentu akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, yang sebelumnya kekurangan suplai listrik. Pemerintah membuat program 35.000 MW untuk memperluas ketersediaan listrik di seluruh Indonesia.

Saat ini, PLN membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan program 35.000 MW. Untuk itu, PLN terus meningkatkan kemampuan pendanaan, salah satunya melalui program revaluasi aset sehingga nilai rasio utang terhadap modal membaik.

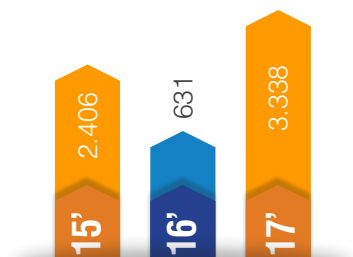
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Listrik 35.000 MW



Sementara itu, Program 7.000 MW yang meliputi pembangunan pembangkit sebesar 7.831 MW yang berasal dari Program *Fast Track Program* (FTP) 1, Program FTP-2, dan Program Reguler, per Desember 2017, untuk progres COD pembangkit telah mencapai 6.424 MW dari total pembangkit yang akan dibangun.

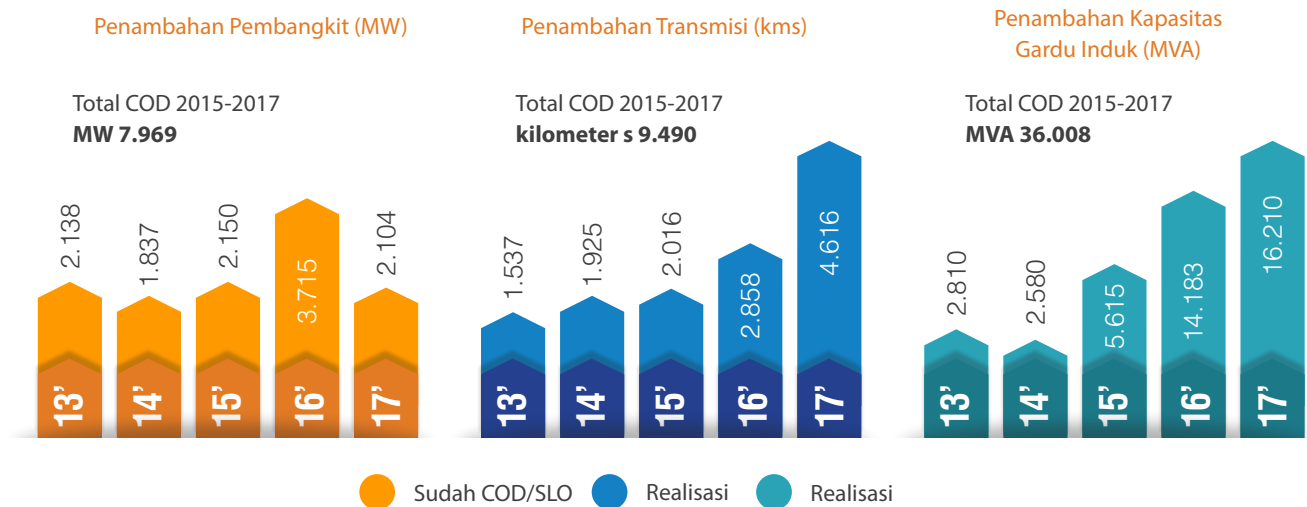
PLN juga terus bekerja dalam meningkatkan kapasitas pembangkit, panjang transmisi dan kapasitas gardu induk untuk memberikan pelayanan yang prima serta kehandalan sistem. Sejak awal tahun 2015 hingga Desember 2017, PLN berhasil meningkatkan jumlah pembangkit yang beroperasi sebesar 7.969 MW, penambahan transmisi sepanjang 9.490 kilometer s dan peningkatan kapasitas gardu induk sebesar 36.008 MVA.

SLO/COD/ Komisioning (MW) (Operasi)





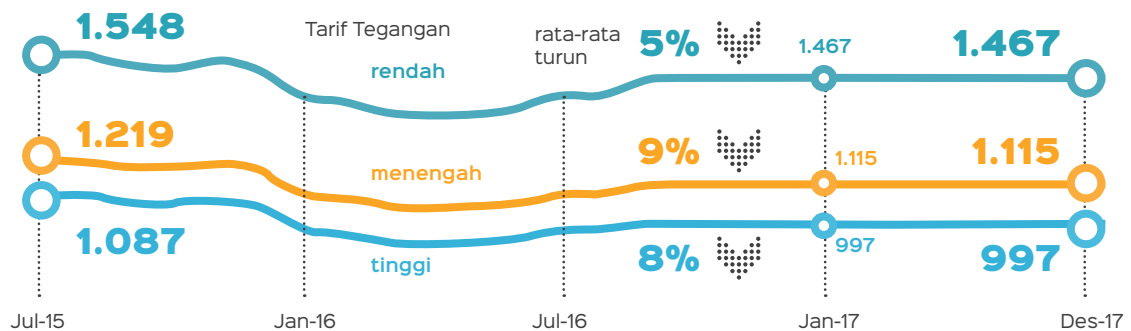
ELEKTRIFIKASI



Selain menjalankan komitmennya dalam menerangi nusantara, PLN juga berhasil mengendalikan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) di tengah perubahan asumsi makro, serta kenaikan harga gas dan batubara meskipun sejak bulan Juni 2017 terjadi kenaikan BPP karena kenaikan harga energi primer yang masih berlanjut.

Namun demikian, melalui usaha efisiensi yang terus berlanjut tersebut, tarif listrik tidak ada kenaikan sejak 2015 sehingga tidak menambah beban pelanggan serta menjaga agar industri dan bisnis tetap kompetitif.

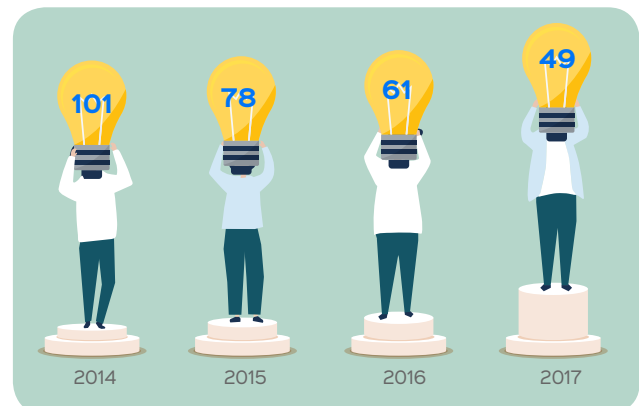
Tidak Ada Kenaikan Tarif Sejak 2015



Sementara itu, selain menjalankan perannya sebagai agen pembangunan, PLN juga berhasil memberikan kontribusi fiskal kepada Negara selama tiga tahun terakhir (2015-2017), yakni sebesar Rp239,5 triliun yang terdiri dari peningkatan pajak dan dividen sebesar Rp96 triliun dan penghematan subsidi sebesar Rp143,5 triliun.

Berbagai upaya peningkatan pelayanan pun telah dilakukan oleh PLN untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam mendapatkan listrik. Hal ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat 49 pada tahun 2017 dalam *Getting Electricity* sebagaimana hasil survei terkait *Ease of Doing Business* (EODB) atau kemudahan berusaha yang dilakukan oleh World Bank.

Peringkat Kemudahan Mendapatkan Listrik terus Membaik



(Survei EODB oleh World Bank)

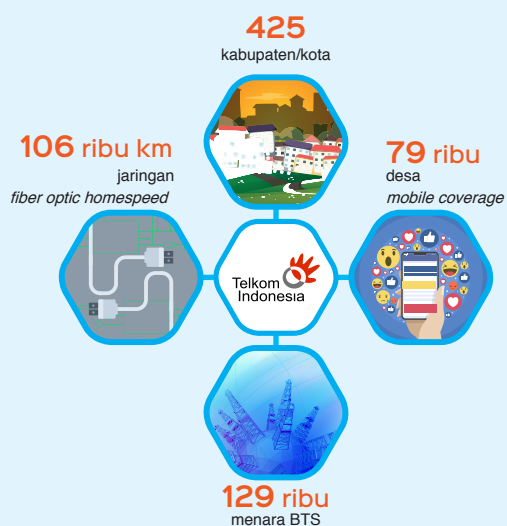


JARINGAN TELEKOMUNIKASI

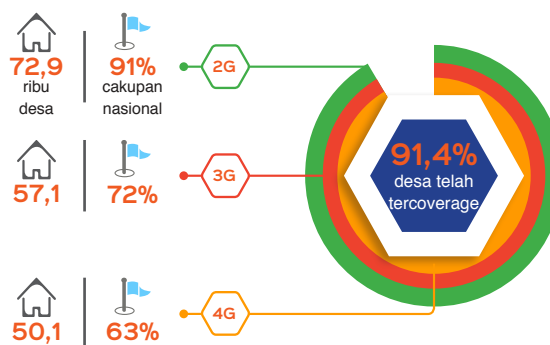


MENEMBUS BATAS AKSES INFORMASI UNTUK SEMUA

REALISASI JARINGAN OLEH TELKOM



TOTAL COVERAGE DESA (2017)



MANFAAT





JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga pelosok juga termasuk dalam program Pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Masyarakat Indonesia yang tersebar di negara dengan luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi akan semakin mudah terhubung melalui jaringan telekomunikasi. Saat ini Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mengembangkan proyek pembangunan infrastruktur, yang antara lain terkait dengan jaringan telekomunikasi melalui serat optik. Proyek ini merupakan wujud dari komitmen "BUMN Hadir untuk Negeri".

Pemerintah, diwakili oleh BUMN, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya, melalui fasilitas komunikasi. Dengan jaringan komunikasi yang tersebar dari Barat hingga Timur, membuat masyarakat Indonesia semakin terhubung. Pemanfaatan waktu, baik untuk kegiatan sosial maupun bisnis, akan makin efisien. Dengan demikian, pemanfaatan biaya juga menjadi lebih rendah yang pada akhirnya diharapkan dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia Digital Network

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, terus berupaya mendukung pembangunan dan digitalisasi bangsa melalui penyediaan infrastruktur dan konektivitas yang merata di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T).

Pembangunan infrastruktur dan layanan digital diwujudkan dalam bentuk program Indonesia Digital Network (IDN) yang terdiri dari id-Access (Indonesia Digital Access), id-Ring (Indonesia Digital Ring), dan id-Convergence (Indonesia Digital Convergence). id-Access merupakan akses *broadband* ke pelanggan berbasis *fiber optic* untuk *fixed-broadband* dan teknologi 3G/4G untuk *mobile broadband*. id-Ring merupakan *broadband highway* berbasis *fiber optic*, sebagai jaringan *backbone* yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. id-Convergence merupakan fasilitas layanan IT platform terintegrasi yang terdiri dari data center dan berbagai platform layanan digital.

Perluasan Infrastruktur Telekomunikasi

Sampai tahun 2017, Telkom telah merealisasikan program id-Access berupa pembangunan 160.705 BTS, yang 68,7% diantaranya adalah BTS 3G dan 4G, dengan jangkauan BTS 3G dan 4G mencakup masing-masing sebesar 85% dan 80% dari populasi Indonesia. Untuk mendukung transmisi data yang berkualitas tinggi, telah dilakukan program fiberisasi

backhaul BTS sebesar 58%. Perseroan juga telah menggelar *fixed broadband access* sebesar 18,6 juta *fiber homes-passed* dan 352.642 *access points* Wi-Fi sampai dengan akhir tahun 2017, yang dimanfaatkan untuk melayani seluruh segmen pelanggan termasuk fiberisasi *backhaul* BTS.

Penambahan BTS selama tahun 2017 tercatat sebanyak 31.672 BTS di mana keseluruhannya merupakan BTS 3G dan 4G. Hingga akhir 2017 tercatat total BTS Telkomsel mencapai 160.705 unit dimana sekitar 70 persennya adalah BTS 3G/4G. Layanan 4G Telkomsel telah dapat dirasakan di 490 kota di seluruh Indonesia.

Untuk program id-Ring, Telkom telah membangun kabel *backbone fiber optic* bawah laut dan terestrial serta satelit dalam rangka pemerataan akses telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Sampai akhir 2017, jaringan *backbone fiber optic* telah menjangkau 445 kabupaten/kota.

Untuk program id-Convergence, Perseroan telah membangun dan mengembangkan berbagai platform digital untuk mendukung *digital services & solution*, antara lain IT & *cloud services*, *managed security services*, *digital financial technology* (fintech), *e-commerce*, *big data analytic*, *Internet of Things* (IoT), dan ekosistem pendukungnya.

Jaringan Kabel Bawah Laut

Guna meningkatkan akses digital bagi masyarakat Indonesia, Telkom telah membangun *Fiber Optic Backbone Network* sepanjang 152,52 kilometer yang menjangkau tidak kurang dari 445 Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia.

Dari sisi infrastruktur, untuk melengkapi sistem jaringan kabel bawah laut SEA-ME-WE5 dan SEA-US, Telkom juga sedang membangun Indonesia Global Gateway (IGG) dari Dumai ke Manado yang akan menghubungkan SEA-ME-WE5 dan SEA-US, dan diharapkan untuk dapat beroperasi pada kuartal ketiga tahun 2018 ini. Saat ini Telkom juga dalam proses membangun Satelit Telkom-4 yang progresnya telah mencapai 75% dan diharapkan dapat meluncur pada kuartal ketiga tahun 2018.

Adapun pembangunan sistem kabel laut SEA-ME-WE5 dan SEA-US serta IGG yang dalam progres untuk menghubungkan keduanya akan memperkuat jaringan Telkom serta akan menjadikan Telkom sebagai global digital hub.



KETAHANAN ENERGI



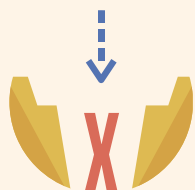
PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI DEMI KEMANDIRIAN BANGSA

TARGET



Pembangunan kilang baru
dengan kapasitas **300** ribu
barel per hari

TARGET



Membantu mengurangi *gap*
atau jurang permintaan



BAREL/HARI 1,2-1,0

Selisih permintaan dan penawaran BBM diperkirakan akan terus meningkat sekitar 1,2 – 1,9 juta barel per hari pada tahun 2025 jika tidak ada penambahan kapasitas produksi.



KETAHANAN ENERGI

KOMITMEN PENGEMBANGAN PROYEK



New Grass Root Refinery (NGRR) Bontang



Kapasitas **300 ribu barel minyak per hari** apabila sudah berjalan produksi



Produk yang dihasilkan berupa **gasoline 92, 95, 98, LPG, dan juga aviation turbine fuel**



(NGRR) Tuban

- Meningkatkan kapasitas kilang minyak sebesar **300 MB/D**
- Meningkatkan produksi BBM Solar **~100 MB/D** dan Gasoline **~80 MB/D**
- Meningkatkan kualitas produk BBM sesuai **Euro V**
- Meningkatkan produksi Petrokimia setara dengan kapasitas **1000 KTA Olefin kompleks**.



RDMP RU V Balikpapan

- Meningkatkan kapasitas kilang dari **260 MBSD** menjadi **360 MBSD**
- Lahan area pembangunan infrastruktur kilang seluas **75 hektare**
- Membangun *construction jetty* dengan ukuran 30 kali 100 meter, kapasitas **6.500 DWT**
- Membangun prasarana jalan dan gedung serta peralatan *marine*.



RDMP Cilacap

- Meningkatkan kapasitas kilang dari **348 MBSD** ke **400 MBSD**
- Mengubah persyaratan produk dan kualitas untuk memenuhi standar lingkungan diesel dan bahan bakar bensin (**EURO V**).



RDMP Dumai

- Meningkatkan kapasitas kilang dari **140 MBSD** menjadi **300 MBSD**
- Meningkatkan produksi BBM Solar dari **~100 MBSD** menjadi **~180 MBSD** dan Gasoline dari **~20 MBSD** menjadi **~90 MBSD**
- Meningkatkan kualitas produk dari **EURO II ke V**
- Meningkatkan margin Kilang RU II Dumai.



RDMP Plaju

- Meningkatkan fleksibilitas pengolahan *sour crude* serta menurunkan ketergantungan pada impor Gasoline dan Diesel
- Peningkatan spesifikasi produk dari < **EURO II menuju EURO V.**
- Pemenuhan *demand domestic* (area Sumbagsel dan sekitarnya) dalam hal kebutuhan produk LPG, Gasoline, Diesel dan Polypropylene
- Memaksimalkan pemanfaatan aset lahan Pertamina di Plaju untuk pengembangan/ekspansi kilang.



RDMP Balongan

- Memaksimalkan kapasitas RFCC (unit penghasil produk Gasoline)
- Meningkatkan fleksibilitas pengolahan *sour crude*



Lapangan Unitisasi Gas Jambaran Tiung Biru

- Meningkatkan produksi gas nasional Indonesia.
- Memproduksi *raw gas* rata rata **315 MMSCfD**
- *Sales gas* **172 MMSCFD**
- Kondensat **2700 BOPD.**



Tanki Penyimpanan BBM-Indonesia Timur

- Pembangunan dan pengoperasian tanki penyimpanan BBM beserta infrastruktur pendukungnya.
- Meningkatkan cadangan BBM.
- Meningkatkan *Coverage days* TBBM khususnya di wilayah Indonesia Timur.



Tanki Penyimpanan LPG – Indonesia Timur

- Bagian dari persiapan program konversi minyak tanah ke LPG di Indonesia Timur.
- Mengurangi beban biaya transportasi yang tinggi ke wilayah Indonesia Timur



Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

- Kota jangkauan: Bandar Lampung, Kemayoran, Musi Banyuasin dan Mojokerto
- Target sambungan : **28.778 sambungan rumah tangga**
- Secara nasional, ditargetkan pada tahun 2019 total tersambung sebanyak **total 1.14 juta** sambungan rumah tangga
- Tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada 2025 **sebesar 85%.**

Ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Tahun 2017 merupakan tahun yang dicanangkan untuk melakukan pemerataan. Dari sekian banyak sektor, sektor energi merupakan salah satu yang menjadi perhatian serius Pemerintah. Upaya pemerataan di sektor energi merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



KETAHANAN ENERGI

Tak bisa dipungkiri, permintaan BBM nasional lebih tinggi dari suplai domestik yang tersedia, dan permintaan akan terus meningkat terutama untuk sektor transportasi. Pemenuhan kekurangan BBM tersebut dilakukan melalui impor yang tentunya sangat akan mempengaruhi neraca perdagangan nasional. Indonesia belum melakukan pembangunan kilang minyak selama 21 tahun lalu, dimana pembangunan kilang minyak terakhir dilakukan pada Tahun 1994 di Balongan dengan kapasitas saat ini 125 ribu barel per hari.

Beberapa hal yang menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan ini adalah, pertama, pembangunan dan pengembangan kilang harus dilakukan dengan menggunakan teknologi yang terbaru, kedua, memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, dan ketiga, tentu saja mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

Kebutuhan LPG Indonesia pun meningkat rata-rata 10% pertahun. Tahun 2011 mayoritas masih dapat disuplai dari domestik, saat ini sekitar 70% ketergantungan Indonesia kepada impor LPG. Setiap hari, jumlah rumah tangga terus bertambah. Permintaan LPG pun diperkirakan akan terus meningkat. Untuk itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan pipa gas ini yang dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional, guna mengurangi impor dan memaksimalkan potensi besar yang melimpah di dalam negeri.

Pembangunan (NGRR) Bontang

Proyek ini sudah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional melalui Perpres No.58/2017 dan Daftar Proyek Prioritas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 12/2015, serta Kepmen ESDM No. 7935K/10/MEM/2016 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Bontang Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan pembangunan proyek ini adalah untuk menambah kapasitas pengolahan sebesar 300 MBPD serta untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri terutama Indonesia Bagian Timur dan menembus pasar BBM internasional dengan spesifikasi Euro V.

Dengan dilakukannya pembangunan *New Grass Root Refinery* (NGRR) Bontang, diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar jenis bensin minimal 60 ribu barel per hari dan jenis solar minimal 124 ribu barel per hari. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan penyediaan bahan bakar di Indonesia dan menurunkan ketergantungan pada impor.

PT Pertamina (Persero) menargetkan untuk memulai pembangunan konstruksi kilang minyak baru (*New Grass Root Refinery/NGRR*) di Bontang, Kalimantan Timur, pada tahun 2019

dan akan selesai pada tahun 2023. Pertamina sendiri sudah memiliki investasi awal untuk NGRR Bontang berupa infrastruktur yang sangat vital dan lahan yang sudah ada pada area proyek.

Rencananya, NGRR di Bontang itu akan menghasilkan 300 ribu barel minyak per hari apabila sudah berjalan produksi. Sedangkan jenis produk yang dihasilkan berupa *gasoline* 92, 95, 98, LPG, dan juga *aviation turbine fuel*.

Pembangunan (NGRR) Tuban

Proyek ini sudah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional Perpres No.58/2017 dan daftar Proyek Prioritas Permenko Ekon No 12/2015, serta Kepmen ESDM No. 807K/12/MEM/2016 Tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pembangunan NGRR Tuban ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan bahan bakar minyak di Indonesia, menurunkan ketergantungan pada impor, mengembangkan kemampuan pemasaran & pengembangan Petrokimia.

Melalui pembangunan NGRR Tuban ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kilang minyak sebesar 300 MB/D, serta pembangunan kilang petrokimia dan fasilitas penunjang serta sarana pendukung. Selain itu, proyek pembangunan ini juga diharapkan dapat meningkatkan produksi BBM Solar ~ 100 MB/D dan Gasoline ~80 MB/D, meningkatkan kualitas produk BBM sesuai Euro V, dan meningkatkan produksi Petrokimia setara dengan kapasitas 1000 KTA *Olefin kompleks*.

Proyek RDMP RU V Balikpapan

Proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) RU V Balikpapan tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Keputusan Menteri ESDM No. 1001 K/12/MEM Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Pertamina dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kilang dari 260 MBSD menjadi 360 MBSD sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

Pembangunan proyek ini terdiri atas dua tahap, dengan nilai investasi untuk tahap pertama sebesar 4-6 milyar dollar AS, sedangkan untuk tahap kedua sebesar 1-2 milyar dollar AS. Per November 2017, proyek ini telah masuk pada tahapan penyiapan lahan area pembangunan proyek dan



pembangunan *construction jetty*. Tahapan ini bertujuan untuk penyiapan lahan area pembangunan infrastruktur kilang seluas 75 hektare, membangun *construction jetty* dengan ukuran 30 kali 100 meter, kapasitas 6.500 DWT untuk keperluan bongkar muat peralatan kilang, serta membangun prasarana jalan dan gedung serta peralatan marine.

Pembangunan RDMP Cilacap

Proyek ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Keputusan Menteri ESDM No.1000 K/12/MEM Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Pertamina dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Kilang dari 348 MBSD ke 400 MBSD, serta mengubah sumber dan kualitas minyak mentah ke minyak mentah sulfur lebih berat dan tinggi, dan mengubah persyaratan produk dan kualitas untuk memenuhi standar lingkungan diesel dan bahan bakar bensin (EURO V).

Proyek pembangunan dengan nilai investasi 6-8 miliar dollar AS ini, per November 2017 telah menyelesaikan *Joint Study* bersama Saudi Aramco dan proses penyelesaian skema bisnis dengan Saudi Aramco sebagai calon partner *Joint Venture*.

Pembangunan RDMP Dumai

Proyek sudah masuk ke dalam Daftar Proyek Strategis Nasional Perpres No.58/2017 dan Daftar Proyek Prioritas Permenko Ekon No 12/2015 untuk meningkatkan penyediaan minyak mentah dan bahan bakar di Indonesia dan menurunkan ketergantungan pada impor.

Pembangunan proyek ini bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Kilang dari 140 MBSD menjadi 300 MBSD, serta mengubah sumber dan kualitas minyak mentah ke minyak mentah sulfur lebih berat dan tinggi, dan mengubah persyaratan produk dan kualitas untuk memenuhi standar lingkungan diesel dan bahan bakar bensin (EURO V). Proyek pembangunan dengan nilai investasi 4-5 juta dollar AS ini, hingga September 2017 masih dilakukan kajian konfigurasi kilang.

Pembangunan RDMP Dumai yang dilakukan oleh Pertamina ini, ditargetkan dapat meningkatkan fleksibilitas Kilang untuk dapat mengolah Minyak Mentah dengan tingkat kandungan sulfur dari 0.1% menjadi 1.3%. Proyek ini juga ditargetkan dapat meningkatkan produksi BBM Solar dari ~100 MBSD menjadi ~180 MBSD dan Gasoline dari ~20 MBSD menjadi ~90

MBSD dan meningkatkan kualitas produk dari EURO II ke V, serta meningkatkan margin Kilang RU II Dumai.

Pembangunan RDMP Plaju

Proyek ini dibangun dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ekonomi dari kilang serta meningkatkan penyediaan minyak mentah dan bahan bakar di Indonesia, juga untuk menurunkan ketergantungan pada impor. Pembangunan proyek ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pengolahan *sour crude* serta menurunkan ketergantungan pada impor Gasoline dan Diesel, juga peningkatan spesifikasi produk kurang dari EURO II menuju EURO V.

Melalui proyek pembangunan RDMP Plaju ini, Pertamina menargetkan dapat memenuhi demand domestic (area Sumatera bagian Selatan dan sekitarnya) dalam hal kebutuhan produk LPG, Gasoline, Diesel dan Polypropylene, serta memaksimalkan pemanfaatan aset lahan Pertamina di Plaju untuk pengembangan/ekspansi kilang.

Proyek pembangunan yang rencananya akan bersumber dari korporat Pertamina atau *Join Venture* ini, hingga September 2017 masih dilakukan kajian konfigurasi kilang.

Pembangunan RDMP Balongan

Proyek ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Keharusan beradaptasi dengan proyeksi turunya ketersediaan minyak mentah dalam negeri yang rendah sulfur dan harus digantikan dengan minyak mentah impor yang tinggi sulfur. Pembangunan proyek ini bertujuan untuk memaksimalkan kapasitas RFCC (unit penghasil produk Gasoline) tanpa ketergantungan kepada pasokan *Intermedia Long Residue* Impor. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pengolahan *sour crude* serta menurunkan ketergantungan pada impor Gasoline dan Diesel, juga peningkatan spesifikasi produk kurang dari EURO II menuju EURO V.

Proyek pembangunan yang rencananya akan bersumber dari korporat Pertamina atau *Join Venture* ini, hingga September 2017 masih dilakukan revisi studi awal (*Bankable Feasibility Study*) dengan redefinisi *Crude*.



KETAHANAN ENERGI

Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran Tiung Biru

Proyek pengembangan lapangan gas ini sudah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional Perpres No.58/2017, untuk meningkatkan penyediaan bahan bakar di Indonesia serta menurunkan ketergantungan pada impor. Pembangunan proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produksi gas nasional Indonesia, melalui pengembangan lapangan ini merupakan integrasi proyek dengan Pipa Gresik Semarang yang diharapkan bisa menumbuhkan potensi-potensi industri di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Melalui pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran Tiung Biru, Pertamina menargetkan dapat memproduksi Raw Gas rata-rata 315 MMSCFD, Sales Gas 172 MMSCFD, dan Kondensat 2700 BOPD. Proyek pembangunan dengan nilai investasi 1,547 miliar dollar AS ini, sudah dilakukan ground breaking pada September 2017, dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2021.

Pembangunan Tanki Penyimpanan BBM-Indonesia Timur

Proyek pembangunan dan pengoperasian tanki penyimpanan BBM di Indonesia Timur ini, sebagai bagian pemenuhan penugasan pemerintah dalam keputusan Menteri ESDM No.2157 K/10/MEM/2017 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Tangki Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas.

Pembangunan proyek ini sebagai pemenuhan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian tanki penyimpanan BBM beserta infrastruktur pendukungnya, dan meningkatkan cadangan bahan bakar minyak dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional, juga untuk meningkatkan *Coverage Days* TBBM khususnya di Wilayah Indonesia Timur.

Proyek pembangunan dengan nilai investasi 28,09 juta dollar AS ini, sudah dilakukan proses pembukaan penawaran pada tanggal 25 Oktober 2017, dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2019.

Pembangunan Tanki Penyimpanan LPG – Indonesia Timur

Proyek Pembangunan Terminal LPG Pressurized di Indonesia Timur (Ex.APBN) ini, sebagai bagian dari pemenuhan penugasan pemerintah dalam keputusan Menteri ESDM No.2157 K/10/MEM/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Tanki Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas.

Pembangunan proyek ini sebagai bagian dari persiapan program konversi minyak tanah ke LPG di Indonesia Timur. Mengurangi beban biaya transportasi yang tinggi ke wilayah Indonesia Timur sehingga menyebabkan harga jual LPG yang tinggi. Berdasarkan analisa risiko apabila rencana pembangunan tidak terlaksana maka akan berdampak pada terbatasnya ketersediaan suplai LPG di wilayah Indonesia bagian Timur yang berdampak pada menurunnya citra Pertamina di masyarakat.

Proyek pembangunan dengan nilai investasi 85,33 juta dollar AS ini, hingga September 2017 masih dalam proses tender, proyek ini sendiri ditargetkan akan selesai pada tahun 2019.

Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

Pembangunan Jaringan pipa Gas Bumi untuk pelanggan sektor Rumah Tangga ini dilakukan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) di Bandar Lampung, Kemayoran, Musi Banyuasin dan Mojokerto sebanyak 28.778 Sambungan Rumah Tangga, sebagai bahan bakar alternative pengganti LPG 3 kg, yang mana 60% LPG Indonesia disediakan dari impor.

Pembangunan jaringan ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi atas LPG Impor untuk sektor rumah tangga. Melalui pembangunan jaringan ini, secara Nasional, ditargetkan pada tahun 2019 total tersambung sebanyak total 1.14 Juta sambungan rumah tangga dan tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada 2025 sebesar 85%.

Proyek pembangunan jaringan ini, menelan biaya investasi sebesar Rp303 miliar, dengan progres pembangunan hingga September 2017 sebesar 53%.



KETAHANAN PANGAN



NAWACITA TERKAIT KETAHANAN PANGAN

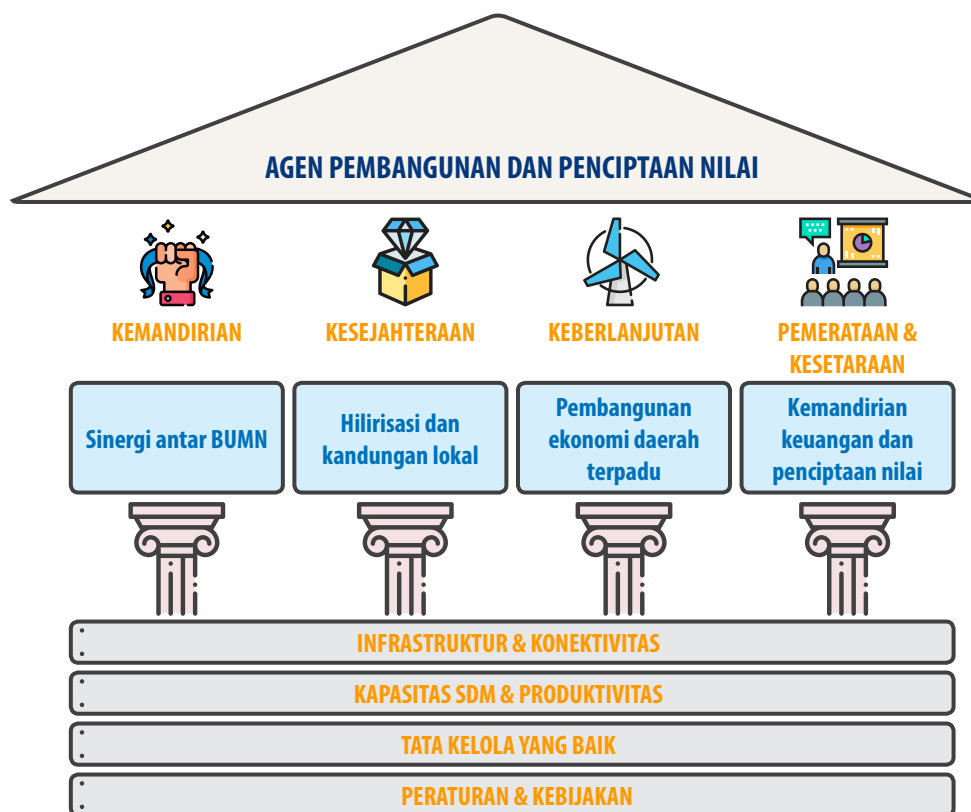


Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, Pemerintah telah merumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut dengan Nawacita. Sasaran NawaCita tersebut juga menitik beratkan pada aspek terkait, di mana terdapat 3 agenda prioritas yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan rencana Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Program Pemerintah dalam menghadapi tantangan atas ketahanan pangan nasional dirumuskan dalam program Nawacita antara lain, (1) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, (2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional serta, (3) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.



KETAHANAN PANGAN

Framework Roadmap BUMN



1. Sinergi Antar BUMN

- Kolaborasi atau konsolidasi atas fungsi-fungsi yang serupa antar BUMN dalam bidang ketahanan pangan untuk menciptakan suatu rantai nilai yang berkesinambungan dan terintegrasi
- Kerja sama BUMN untuk mengoptimalkan hasil dan mengurangi redundansi bisnis

2. Hilirisasi dan Kandungan Lokal

- BUMN meningkatkan fokus untuk berperan serta dalam pengembangan produk-produk hilir yang berada di dalam rantai nilai yang sama
- BUMN meningkatkan peran serta dalam pengembangan produk input yang diperlukan BUMN secara domestik

3. Pembangunan ekonomi daerah terpadu

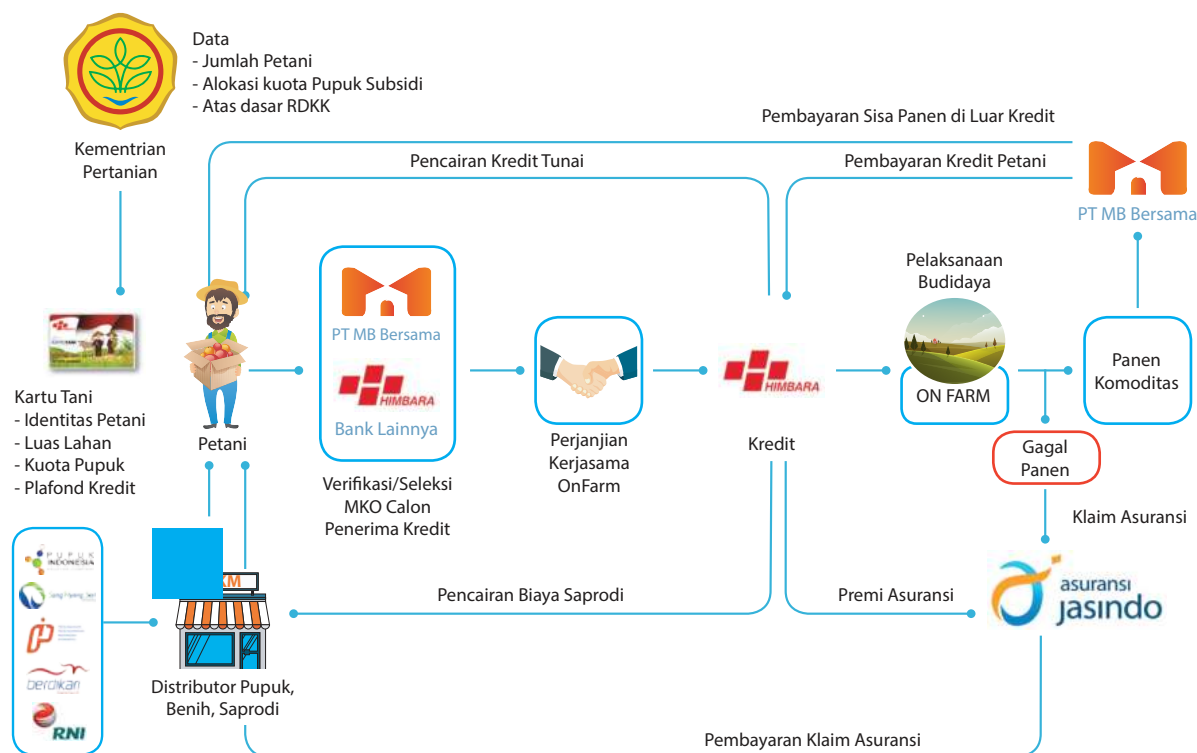
Kerjasama antar BUMN secara efektif untuk menggerakkan pengembangan ekonomi di kawasan terpilih melalui pelaksanaan proyek-proyek yang berpotensi menciptakan dampak dan turut menyumbang PDB lokal (melalui penciptaan lapangan kerja, ketersediaan infrastruktur/konektivitas)

4. Kemandirian keuangan dan penciptaan nilai

BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu menciptakan manfaat finansial, di luar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri

Program Strategis

Program Nawacita menjadi dasar pengembangan BUMN yang dituangkan ke dalam 4 Pilar Strategis yakni Kemandirian, Kesejahteraan, Keberlanjutan, serta Pemerataan dan Kesetaraan. Empat pilar pengembangan BUMN di bidang pangan diwujudkan melalui program strategis Kewirausahaan Pertanian, sebagaimana yang terlampir pada bagan berikut:



Pada tahun 2017 dibuat *pilot project* Kewirausahaan Pertanian pada 9 Kabupaten di Wilayah Jawa Barat. Program tersebut dilakukan dengan sinergi BUMN yang diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan akses permodalan yang mudah dan murah melalui HIMBARA.
2. Memberikan jaminan pelaksanaan usaha tani melalui fasilitas asuransi pertanian.
3. Memberikan akses sarana produksi pertanian yang murah, mudah, dan berkualitas melalui mekanisme Kartu Tani baik dalam penyediaan pupuk, benih, dan saprota lainnya.
4. Menjadi off taker hasil panen petani, sekaligus menginisiasi hilirisasi produk pertanian dengan basis kearifan loka yang lebih variatif dan berdaya saing tinggi.
5. membuat rantai distribusi produk pangan lebih efisien dan efektif, memberikan nilai lebih kepada petani dan masyarakat.
6. Menumbuhkan sifat kemandirian usaha tani pada para petani dengan konsep pemberdayaan ekonomi daerah.
7. Inisiasi sistem informasi pertanian terpadu.

Di tahun 2018 diharapkan model Kewirausahaan Pertanian yang dikembangkan di Jawa Barat dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, akan dibuat program-

program inisiatif untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi distribusi pangan di Indonesia melalui pengembangan sistem informasi distribusi pangan di BUMN.

Penugasan Pemerintah

Kementerian BUMN senantiasa mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan khususnya melalui program penugasan khusus Pemerintah melalui beberapa BUMN.

1. Perum BULOG
 - a. Menjaga Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

HPP merupakan harga yang harus dibayar Pemerintah apabila Pemerintah akan membeli gabah/beras sesuai kualitas yang ditetapkan pada jumlah tertentu. Dengan penekanan pada kuantitas seperti ini maka dalam HPP terkandung makna bahwa tidak ada lagi Harga Dasar yang mewajibkan Pemerintah untuk mengamankannya jika gabah/beras di pasar lebih rendah dari tingkat HPP. Pembelian gabah/beras oleh Perum BULOG sebagai bentuk pengamanan HPP setiap tahun rata-rata 6-7% dari total produksi beras nasional.



KETAHANAN PANGAN

Sebagian besar pembelian dalam bentuk penggilingan padi untuk berinvestasi pada *dryer* atau penggilingan padi modern. Petani sendiri pada umumnya menjual gabah, sehingga jaminan HPP dapat bersentuhan langsung dengan kesejahteraan petani. Dengan pertimbangan di atas, maka prioritas pembelian adalah Gabah (GKP dan GKG). Namun pada kondisi tertentu, Perum BULOG juga melakukan pembelian beras di daerah-daerah yang infrastrukturnya masih terbatas. Proses pengadaan dilakukan oleh Perum BULOG baik melalui pengadaan langsung Gerakan SERGAP (Serap Gabah Petani) maupun melalui mitra kerja di seluruh Indonesia pada kualitas gabah/beras sesuai Inpres No.5/2015 tentang Kebijakan Perberasan.

- b. Penyaluran Beras untuk Keluarga Sejahtera (RASTRA)
Program Beras RASTRA merupakan program perlindungan sosial yang ditujukan kepada kelompok sasaran yang umumnya berisiko tinggi terhadap kerawanan pangan. RASTRA dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Program RASTRA disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia dan pada 2017 terdapat 14.212.742 KPM. Total penyaluran yang telah dilakukan adalah sebesar 2.542.405 ton.

Untuk tahun 2018, Pemerintah berencana menghapuskan program RASTRA dan berganti menjadi BPNT (Bantuan Pemerintah Non Tunai) yaitu bantuan diberikan dalam bentuk uang elektronik melalui kartu yang dapat ditukarkan menjadi barang-barang kebutuhan pokok di agen-agen penyalur BPNT. Perum BULOG diharapkan dapat menjadi penyuplai produk-produk pangan pada agen BPNT di tahun 2018. Selain itu, Rumah Pangan Kita (RPK) milik Perum BULOG diharapkan dapat berpartisipasi sebagai agen penyalur BPNT.

- c. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
CBP diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan dalam situasi darurat seperti bencana alam dan bencana yang dibuat oleh manusia (man-made disaster) seperti konflik sosial, serta stabilisasi harga melalui operasi pasar. Hampir semua negara di Asia melaksanakan kebijakan seperti ini walau dengan pola yang sedikit berbeda. Di Thailand, Malaysia dan Singapura, kebijakan ini dikelola oleh swasta/BUMN, sedangkan di China, Jepang, dan Brunei dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah.

CBP bisa dikatakan sebagai stok penyangga (*buffer stock*), yang jika berkurang akibat disalurkan maka harus segera diisi kembali sehingga selalu tersedia dalam jumlah tertentu. Perum BULOG telah diamanatkan oleh Pemerintah untuk menyimpan 350.000 ton beras sebagai CBP sejak tahun 2005. Jumlah ini terus bergerak sesuai dengan kebutuhan penyaluran dan kemampuan anggaran Pemerintah. Jumlah itu pada dasarnya terlalu kecil dengan melihat Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dengan infrastruktur terbatas.

Sebagai gambaran, CBP di China mencapai 34 juta ton, Thailand 2 juta ton, Vietnam 1 juta ton, Jepang 1 juta ton, Korea Selatan 1,1 juta ton dan Filipina 750ribu ton. Di tahun 2018 Perum BULOG diharapkan dapat mengelola CBP dengan kuantitas yang lebih tinggi serta tetap menjaga kualitas CBP tersebut.

2. PT Pupuk Indonesia (Persero)
Dalam mendukung program Nasional Pemerintah untuk mencapai Ketahanan Pangan, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai Holding BUMN Pupuk mendukung tercapainya program tersebut. Wujud dukungan antara lain dalam penyediaan pupuk bersubsidi bagi Petani sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu). Pupuk bersubsidi meliputi pupuk urea dan non urea (NPK, ZA, SP-36, dan pupuk organik).



Realisasi penjualan pupuk bersubsidi tahun 2017

No	Jenis Pupuk	Penyaluran (Ton)
1	Urea	4.106.886
2	SP-36	851.744
3	ZA	961.304
4	NPK	2.689.888
5	Organik	688.134
Total		9.297.956

Pada tahun 2018, PT Pupuk Indonesia (Persero) diharapkan dapat menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan target pemerintah dengan HPP yang lebih efisien dan kualitas yang lebih baik.

3. PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri

Penggunaan benih bermutu dan varietas unggul merupakan salah satu pendorong tercapainya ketahanan pangan karena dapat memberikan hasil panen dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Namun demikian, penggunaan benih bermutu dan unggul oleh petani di Indonesia masih rendah intensitasnya karena harganya cukup tinggi. Untuk mendorong penggunaan benih bermutu dan unggul dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mencapai ketahanan pangan, Pemerintah memberikan kebijakan subsidi benih yang penyalurannya melalui PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri.

Pada tahun 2017, PT Pertani dan Sang Hyang Seri menyalurkan benih bersubsidi sebagai berikut:

No	BUMN	Jenis Benih	Realisasi Penjualan	
			Qty (Ton)	Nilai (Rp Juta)
1	PT Pertani (Persero)	Padi Inbrida	44.203	4.100.000
2		Padi Hibrida	549	35.048
3		Kedelai	661	9.385
4	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Padi Inbrida	36.478	311.267
5		Padi Hibrida	451	28.775
6		Kedelai	214	3.031
Total			82.556	4.487.506

Di tengah rencana penghapusan subsidi benih pada tahun 2018, Kementerian BUMN mendorong PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri untuk tetap dapat memproduksi benih bermutu dan varietas unggul dengan kualitas yang baik dan melakukan pemasaran di pasar benih umum (non subsidi) untuk tetap menjaga going concern perusahaan serta mendukung ketahanan pangan nasional.



KETAHANAN PANGAN







BUMN HADIR UNTUK NEGERI



KONTRIBUSI NYATA KEPADA MASYARAKAT



Kementerian BUMN telah melaksanakan program “BUMN Hadir untuk Negeri” secara berkesinambungan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Upaya ini sebagai komitmen Kementerian BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan dan memupuk rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia pada seluruh masyarakat di seluruh pelosok Negeri. Kementerian BUMN dan BUMN kembali mewujudkan “BUMN Hadir untuk Negeri” hingga saat ini.

Dengan adanya “BUMN Hadir untuk Negeri”, diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia sehingga ke depannya Indonesia mampu tegak berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keragaman tersebut sebagai perwujudan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di mana pada hakekatnya, melalui program BUMN Hadir untuk Negeri, Kementerian BUMN mendorong setiap perusahaan BUMN agar menjadi semakin dekat dengan masyarakat.

BUMN Hadir untuk Negeri bertujuan untuk menciptakan kondisi dan mendorong agar BUMN di Indonesia dapat memberikan sumbangan yang terbaik bagi negeri dan rakyat Indonesia. Program BUMN Hadir untuk Negeri dilakukan pelaksanaannya oleh seluruh BUMN yang memiliki wilayah kerja di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan program ini hampir mencakup segala bidang, baik bidang sosial kemasyarakatan, lingkungan, hingga bidang pendidikan.

Selain itu, melalui program BUMN Hadir untuk Negeri semakin menunjukkan bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat secara langsung melalui kehadiran BUMN di provinsi-provinsi. Kehadiran BUMN di seluruh provinsi di Indonesia diharapkan dapat menjadi pendorong pengembangan ekonomi di daerah khususnya wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).



MUDIK BERSAMA BUMN



Mudik Bersama BUMN merupakan salah satu kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri yang dilakukan Kementerian BUMN dan BUMN dalam memfasilitasi masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Program ini di gagas Kementerian BUMN dengan menyediakan fasilitas kendaraan seperti Bus, Kereta Api, Kapal Laut dan Pesawat Udara yang disediakan secara gratis bagi masyarakat yang dapat mengantarkan hingga ke kampung halaman mereka masing-masing.



Pada tahun 2017, Kementerian BUMN mengusung tema “Mudik Bareng Guyub Rukun”. Tema ini lahir karena merupakan refleksi kepedulian, kebersamaan, kerukunan, serta berangkat dari akar budaya Indonesia. Tujuan program mudik gratis ini sendiri adalah untuk menekan kepadatan, serta membantu masyarakat untuk kegiatan mudik yang lebih aman.



Mudik Bareng Guyub Rukun ini terlaksana dengan melibatkan 28 BUMN, di mana secara keseluruhan, BUMN telah memberangkatkan 118.20 pemudik ke-84 kota tujuan. Jumlah ini pun kembali memecahkan rekor MURI. Mereka yang mengikuti kegiatan mudik bareng guyub rukun ini berasal dari masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan BUMN. Kemudian juga *customer* atau nasabah perusahaan seperti di lingkungan perbankan. Selain itu, program ini juga dinikmati tenaga alih daya di perusahaan seperti cleaning servis dan satpam, juga karyawan BUMN serta masyarakat umum.

Program mudik Bersama BUMN ini, juga merupakan sinergi antar BUMN yang dilakukan bukan hanya sekadar menyediakan sarana transportasi bagi para pemudik, namun seluruh perusahaan BUMN terkait juga saling bekerjasama dalam menyiapkan prasarana guna kelancaran program ini.



Di tahun 2017, kesiapan infrastruktur jalan yang banyak dikerjakan oleh BUMN Karya, tercatat lebih baik dari tahun sebelumnya dikarenakan jalan yang menjadi jalur mudik lebaran baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lainnya dalam kondisi yang optimal. Disamping itu ada tambahan ruas jalan tol fungsional sepanjang 402 km yakni sepanjang 110 Km dari Brebes Timur hingga Gringsing/Weleri, 227 Km dari Semarang hingga Surabaya dan 65 Km jalan tol di Sumatera.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) juga telah membentuk Posko Satuan Tugas (Satgas) untuk pemantauan ketersediaan BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2017. Pertamina juga memonitor stok BBM dan Avtur di seluruh Terminal BBM dan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), khususnya di sepanjang jalur mudik utama, yaitu jalur Pantura, Jawa Tengah, dan Selatan Jawa, di Banyuwangi untuk penyeberangan menuju Bali, dan Merak menuju Sumatera.

Adapun untuk mengantisipasi menumpuknya kendaraan di pintu masuk atau keluar tol saat arus mudik dan balik Lebaran 2017, PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah menyiapkan jalan tol fungsional atau jalan hampir selesai pengerjaannya. Jasa Marga telah menyiapkan tujuh ruas jalan tol yang diberlakukan secara fungsional, yakni di jalur Trans Jawa dan Trans Sumatera. Jadi totalnya Jasa Marga mengoperasikan secara fungsional 218 Km jalan tol.

Bentuk sinergi BUMN dalam rangka menyukseskan program mudik ini, menjadi salah satu bentuk komitmen BUMN dalam memberikan layanan pada masyarakat luas, guna menjadikan mudik tahun 2017 berjalan dengan selamat, aman dan nyaman, sehat, guyub dan rukun.



INKLUSI KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT



Sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019), Pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan peran BUMN sebagai agen pembangunan perekonomian melalui program inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi masyarakat.



Sampai dengan 2017, terdapat beberapa program BUMN Hadir Untuk Negeri yang sudah dilaksanakan oleh BUMN, pada bidang inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya, program pembiayaan ekonomi mikro, mekaar, rumah kreatif BUMN, rumah pangan kita, kartu tani, balkondes, perhutanan sosial, dan padat karya tunai.



KUR

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran Pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh Pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perternakan dan perkebunan.

Peran Pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana.

Selain itu Pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.

Di bidang peningkatan ekonomi kerakyatan, BUMN menjalankan program Inklusi Keuangan, melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM. Selama ini, bank-bank BUMN sangat aktif terlibat dalam penyaluran kredit-kredit kecil tersebut, dengan dukungan asuransi BUMN yaitu PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo khususnya dalam penjaminan KUR.

Dari sisi penjaminan, Perum Jamkrindo telah menjamin program KUR senilai Rp50,47 triliun atau 100,95% dari target 2017. Sedangkan PT Askrindo (Persero) telah menjamin program KUR senilai Rp44,07 triliun atau 88,14% dari target 2017.

Kebijakan pendanaan melalui penyaluran KUR tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi untuk para pengusaha ekonomi lemah dan UMKM pada kredit bank/non-bank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan Pemerintah.

Pada tahun 2017 jumlah KUR yang telah tersalur mencapai sebesar Rp102 triliun dengan jumlah nasabah sebanyak 4 juta UMKM. Adapun target penyaluran KUR pada tahun 2018 sebesar Rp120 triliun atau naik 18% dibandingkan dengan penyaluran tahun 2017.

MEKAAR

Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan program pembinaan khusus untuk ibu-ibu prasejahtera produktif *non-bankable*. Program Mekaar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pelaku usaha mikro. Kementerian BUMN menugasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, untuk membantu Pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan kaum perempuan pra sejahtera.

BUMN hadir untuk terus memberikan dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mekaar PNM merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah bagi masyarakat kecil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, program Mekaar PNM sudah berada di hampir pelosok Nusantara dengan melibatkan ibu-ibu dari keluarga prasejahtera.

MEKAAR

Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha super mikro melalui pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan metode kelompok

Dengan modal dari Mekaar, perempuan pra-sejahtera dapat memanfaatkan keterampilan dan waktunya untuk menjalankan usaha super mikro.

Hasil usaha akan meningkatkan pendapatan, pendidikan anak dan kesehatan, tabungan, aset dan kesejahteraan keluarga

Terbukti, perempuan dalam keluarga bisa mengatasi pengangguran dan kemiskinan jika diberi kesempatan dan dukungan modal untuk berusaha (entrepreneur).

Mekaar memberikan peminjaman modal serta penanaman nilai penting bagi setiap nasabah untuk jujur dalam melakukan usahanya, disiplin dalam kehadiran disetiap pertemuan dengan kelompok dan juga mengangsur pinjaman serta kerja keras untuk terus mengembangkan usahanya.



INKLUSI KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

Nasabah yang tergabung tak hanya nasabah yang sudah memiliki usaha, namun bagi nasabah yang ingin memulai usahanya kembali setelah mengalami kegagalan juga akan dibantu. Mekaar juga akan membantu untuk memberikan pinjaman modal bagi nasabah yang ingin membuka usaha. Tentu saja bantuan yang diberikan tidak hanya pinjaman modal saja tetapi juga pendampingan, sehingga nasabah yang tergabung dalam Mekaar merupakan nasabah yang berkomitmen untuk terus meningkatkan dan menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha.

Mekaar memberikan layanan bagi wanita pra sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembangkan usaha mereka. Hingga 2017, telah tercatat total nasabah yang mengikuti program mekaar sebanyak 2.297.924 nasabah dengan penyaluran dana mencapai sebesar Rp5.058.995 juta dan disalurkan oleh 1.252 kantor cabang penyaluran di 24 Provinsi di Indonesia.

Jumlah Kantor Layanan	1.252 kantor cabang
Akumulasi Jumlah Nasabah	2.297.924 nasabah
Akumulasi Pembiayaan	Rp5.058.995 juta
Jangkauan Provinsi	24

ULaMM

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), menjadi gerai layanan di bawah satu atap atau *"One Stop Shopping"* bagi para pengusaha mikro dan kecil (UMK), yang dilengkapi dengan berbagai dukungan teknis bagi peminjam. Tujuannya adalah membantu usaha mikro dan kecil agar terus berkembang sekaligus mempercepat kemajuan usahanya. Dukungan tersebut meliputi pemberian konsultasi, pelatihan, pendampingan maupun pengelolaan keuangan dan akses pasar.

ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil yang disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya. ULaMM merupakan model atau terobosan baru bagi PNM karena penyaluran pembiayaannya dilakukan secara langsung baik kepada perorangan atau pinjaman untuk Badan Usaha (PT, CV, Firma, dan lain-lain).

ULaMM

Unit Layanan Modal Mikro, dan pemberdayaan UMK dengan Pembiayaan dan Program Pengembangan Kapasitas Usaha

Sasarannya adalah meningkatkan kapasitas dan permodalan usaha UMK

Manfaat yang diharapkan adalah penyertaan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan peningkatan daya saing usaha sektor UMK

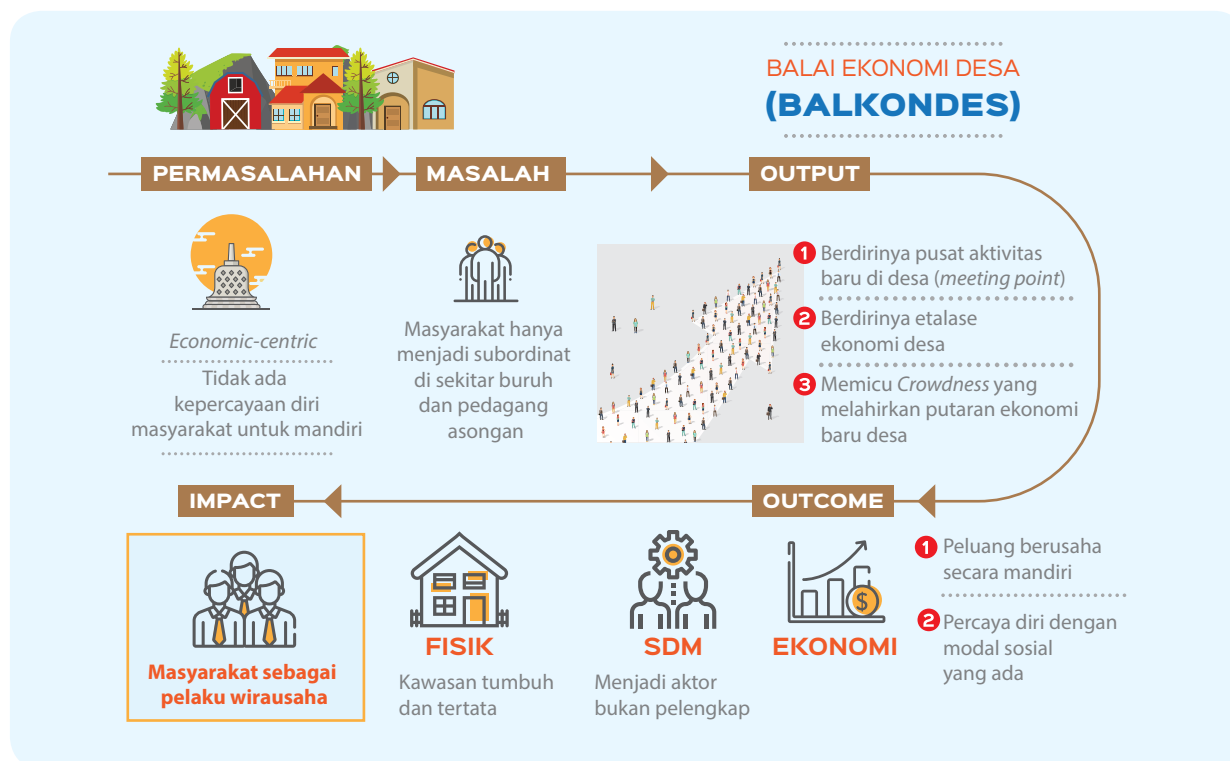
Melalui pendekatan kluster sektor usaha dalam membiayai UMK, sasaran ULaMM mencakup antara lain kluster makanan tradisional, perajin tas, sepatu dan aksesoris, perajin logam hingga kluster peternak unggas. Dengan asumsi setiap usaha peminjam merekrut tiga orang, maka ULaMM ditargetkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 1,2 juta orang dan penerima manfaat sebanyak lima juta orang.

Hingga 2017, telah tercatat total nasabah yang mengikuti program ULaMM sebanyak 271.283 nasabah dengan penyaluran dana mencapai sebesar Rp18.402.722 juta dan disalurkan oleh 631 kantor layanan di 29 Provinsi di Indonesia.

Jumlah Kantor Layanan	631 kantor Layanan
Akumulasi Jumlah Nasabah	271.283 nasabah
Akumulasi Pembiayaan	Rp18.402.722 juta
Jangkauan Provinsi	29

BALKONDES

Balkondes (Balai Ekonomi Desa) merupakan sebuah program bentukan BUMN yang akan dimanfaatkan sebagai sebuah etalase bagi perekonomian daerah. Balkondes akan memberikan ruang bagi pemerintah desa maupun masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa.



BUMN mendirikan Balkondes sebagai sebuah bentuk dukungan untuk menggenjot kunjungan wisatawan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Melalui Balkondes, masyarakat, khususnya desa, akan dipersiapkan untuk menyambut serta memberikan pelayanan maksimal bagi para wisatawan yang datang ke daerahnya. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada perbaikan ekonomi masyarakat sekitar.

INDUSTRI DESA DAYA TARIK WISATA





INKLUSI KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

Balkondes merupakan salah satu program buatan BUMN selain kemitraan dan CSR yang berguna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Untuk mendukung program ini, BUMN juga membekali masing-masing Balkondes dengan BUMN sponsor.

Bentuk sinergi lain yang dibangun BUMN antara lain adalah dalam rangka mendukung program Pemerintah mewujudkan 10 Destinasi Wisata Unggulan dengan target untuk menggaet 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019. Selain itu, BUMN juga bersinergi melalui Program "BUMN Hadir untuk Negeri" untuk membangun Balkondes dan sejumlah rumah

tinggal wisata (*homestay*) yang telah dijalankan di 20 desa di sekitar Candi Borobudur.

Hingga 2017, telah tersedia sebanyak 189 kamar *homestay*. Pembangunan Balkondes dilakukan di daerah-daerah wisata, seperti di Desa Pingge dan Panglikuran Bali serta desa-desa lainnya. BUMN juga bersinergi untuk melakukan pembinaan melalui penyediaan sarana dan pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar, serta pemberian pendidikan *softskill* kepariwisataan dan keterampilan pengelolaan usaha turisme bagi masyarakat di sekitar *homestay*.





Program ini didirikan sebagai bentuk dukungan BUMN untuk menggenjot kunjungan wisatawan ke Indonesia sebagaimana yang diprogramkan oleh Pemerintah. Melalui Balkondes ini, masyarakat disiapkan untuk menyambut wisatawan yang berkunjung ke daerahnya. Melalui program ini diharapkan dapat memberi dampak positif pada perbaikan tingkat ekonomi masyarakat.

SKEMA AKTIVASI EKONOMI MASYARAKAT DESA



Program ini dilaksanakan oleh 16 BUMN, antara lain PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Patra Jasa (anak usaha Pertamina), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

RUMAH KREATIF BUMN

Jumlah pelaku UKM di Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 50 juta, di mana sebagian besar merupakan para pelaku usaha mikro, yang menunjukkan bahwa potensi UKM menjadi cukup besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran negeri.

BUMN sebagai *agent of development* telah mengembangkan beberapa insiatif untuk meningkatkan kualitas UKM, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan program Wirausaha Muda Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan program Kampoeng BNI Nusantara, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan program Teras BRI dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dengan 2 juta UKM teregister melalui program Kampung UKM Digital di seluruh Indonesia.

Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Kementerian BUMN bersama perusahaan milik negara membangun Rumah Kreatif BUMN (RKB) sebagai rumah bersama untuk berkumpul, belajar dan membina para pelaku UKM menjadi UKM Indonesia yang berkualitas. Rumah Kreatif BUMN akan mendampingi dan mendorong para pelaku UKM dalam menjawab tantangan utama pengembangan usaha UKM dalam hal Peningkatan kompetensi, Peningkatan Akses Pemasaran dan Kemudahan akses Permodalan.



INKLUSI KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

Pendampingan di dalam Rumah Kreatif BUMN dilakukan melalui proses kegiatan yang diawali dengan registrasi dan analisa data UKM secara *offline* maupun secara *online* melalui *website* smartbisnis.co.id. Selanjutnya pelaku UKM akan mengisi data *profiling* terkait kompetensi UKM dan data produk UKM. Melalui *platform* data analitik, pelaku UKM dapat melakukan analisa dan seleksi data UKM terkait kompetensi dan kategori UKM tersebut.

Melalui program RKB, UMKM di dorong untuk merubah pola bisnis dari konvensional menjadi *modern (go modern)*, dan selanjutnya menuju era digital (*go digital*), dan terus menuju penjualan secara *online (go online)* yang pada akhirnya akan menuju global (*go global*).

Rumah Kreatif BUMN sendiri merupakan wadah bagi langkah kolaborasi BUMN dalam membentuk *Digital Economy Ecosystem* melalui pembinaan bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM itu sendiri. Dalam program ini, pelaku UKM mendapatkan pelatihan sesuai dengan modul yang dibutuhkan, antara lain Bisnis dan Keuangan, Permodalan, Segmentasi dan Target Pasar, Proses Produksi dan Pemasaran serta *Total Quality Management*.

Hingga tahun 2017, RKB yang sudah didirikan di 201 Kabupaten/Kota dimotori oleh 7 (tujuh) BUMN yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan

Listrik Negara (Persero) dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Pada akhir tahun 2017, telah terdaftar 481.157 UMKM dengan 206 RKB yang sudah dibangun dan 10.660 UMKM yang *listed* di BLANJA.COM.

BLANJA



10.660

UMKM Listing
Blanja.com



11.041

Jumlah Transaksi



3.244.117.781

GMV

RUMAH PANGAN KITA

Dalam program pangan, BUMN harus berperan lebih nyata dan optimal agar ketersediaan dan harga komoditas lebih terjamin di masyarakat. Perum BULOG telah memperluas implementasi "Rumah Pangan Kita" (RPK) dan *outlet* yang tersebar di berbagai daerah.



1 RPK adalah outlet penjualan pangan pokok milik masyarakat yang di bina oleh perum BULOG



2 RPK adalah usaha kecil dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship dan pemberdayaan ekonomi masyarakat



3 RPK adalah jaringan distribusi pangan BULOG termasuk untuk kegiatan stabilisasi harga dan pelayanan program-program pemerintah



4 RPK menyediakan produk yang murah dan sehat untuk mewujudkan akses pangan pokok kepada masyarakat



RPK adalah program kerja sama antara Perum BULOG dan masyarakat, di mana warga yang menjadi agen RPK akan mendapatkan suplai kebutuhan pangan berupa beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung. Program RPK merupakan salah satu wujud dari upaya Perum BULOG untuk menstabilkan harga pangan dan juga merupakan perwujudan fungsi Perum BULOG untuk menyediakan bahan pangan yang terjangkau.

Sampai dengan tahun 2017 telah dibuka 36.184 RPK. Pembukaan RPK ini untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang wajar. Hingga tahun 2017, RPK telah dibangun di 26 wilayah dan akan terus dibangun di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah-wilayah perbatasan, antara lain di Kaltara dan Papua.

		Individu Rumah Tangga	Kedai/Toko	Koperasi/Ormas/ Perusahaan
1	Memiliki lahan / tempat untuk outlet penjualan	✓	✓	✓
2	Mengisi Formulir pendaftaran / kesepakatan kerjasama	✓	✓	✓
3	Foto Copy KTP/ SIM dan KK	✓	✓	✓
4	Melakukan Pembelian awal komoditas	✓	✓	✓
5	Izini usaha mikro dan kecil (IUMK) dari kecamatan	✓	✓	✗
6	Fotocopy SIUP dan TDP	✗	✗	✓



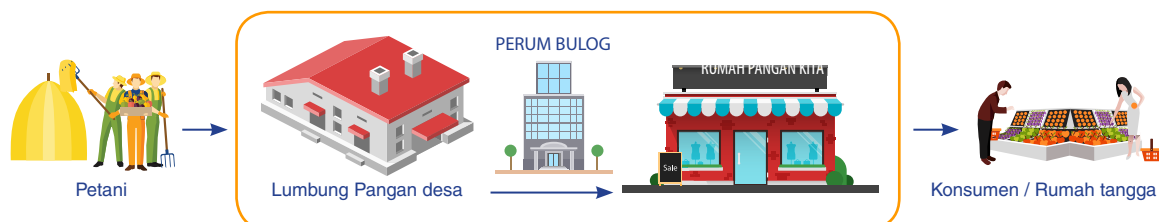
Pengembangan Bisnis RPK

Selain untuk tujuan komersil, RPK didirikan sebagai jaringan kegiatan stabilisasi pangan (beras, gula, minyak goreng, dan lain-lain) terutama saat paceklik atau suplai berkurang di masyarakat. Pada saat harga pangan mengalami fluktuasi tinggi, Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk

melakukan operasi pasar komoditas pangan tertentu. Melalui Jaringan Sahabat RPK yang tersebar di seluruh Indonesia, pendistribusian dan stabilisasi harga pangan akan lebih mudah, cepat, dan efektif bagi tercapainya stabilisasi harga sepanjang tahun.

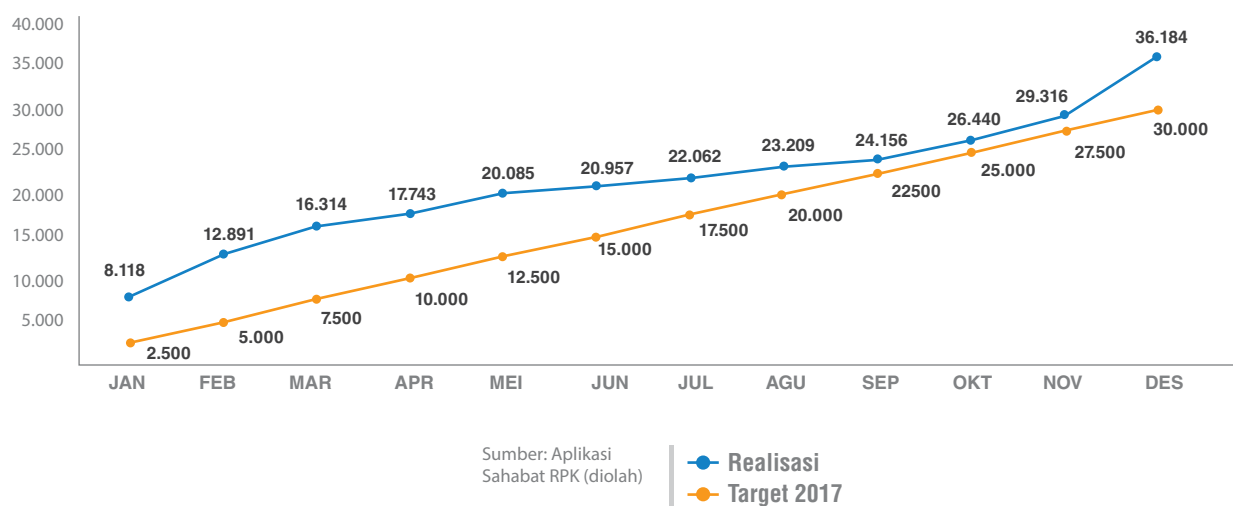


INKLUSI KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT



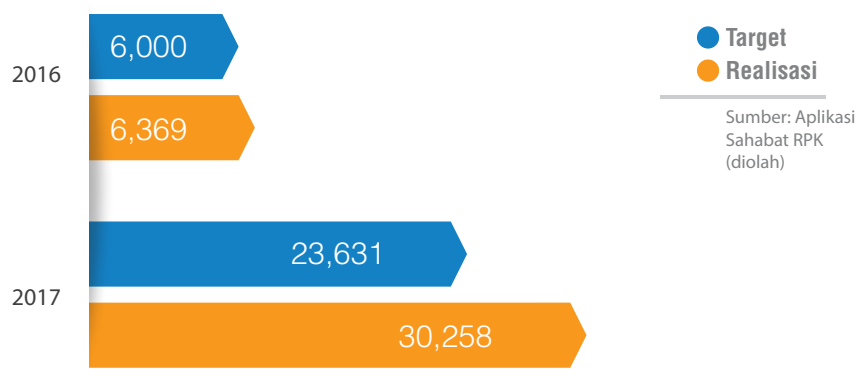
Pengembangan jaringan RPK secara akumulasi Tahun 2017 ditargetkan sejumlah 30.000 RPK. Realisasi pencapaian Sahabat RPK di Tahun 2017 sebanyak 36.184 atau sebesar 120,61% dari akumulasi target 30.000 RPK.

Grafik perkembangan RPK Akumulasi Tahun 2017



Penambahan Sahabat RPK Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 475,08% dibandingkan dengan penambahan Sahabat RPK Tahun 2016 sebesar 6.369 Sahabat RPK.

Penambahan Jaringan RPK Tahun 2016 & 2017



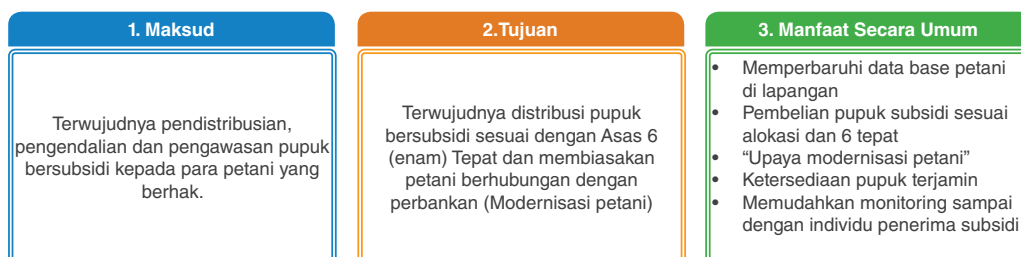


Perkembangan Kerjasama Kelembagaan

Selama tahun 2017 telah dilakukan beberapa kerjasama kelembagaan dalam pengembangan jaringan Sahabat RPK baik berupa MoU ataupun PKS dengan Lembaga Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan, Himpunan Bank Negara (HIMBARA) maupun organisasi lainnya. Pengembangan kerjasama kelembagaan mencapai 42.64% atau sebesar 15.429 Sahabat RPK.

KARTU TANI

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, salah satu peran BUMN dalam memperkuat ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, keterjangkauan dan kestabilan harga, serta kualitas beberapa komoditas utama, seperti beras, minyak goreng, dan gula. Upaya peningkatan ketahanan pangan tidak terlepas dari bagaimana BUMN meningkatkan kesejahteraan Petani.



Untuk maksud tersebut, BUMN juga menggagas diluncurkannya Kartu Tani yang mana dengan kartu tersebut para petani dapat kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan pembiayaan terkait dengan aktivitas pertanian dan untuk biaya hidup selama masa musim tanam. Kehadiran Kartu ini mampu mengintegrasikan sistem untuk kepentingan petani untuk mengetahui data sektor pertanian mulai dari tanam, pemeliharaan, pasca panen, dan pembiayaan.

Manfaat Kartu Tani



Melalui Kartu Tani ini, para petani nantinya akan banyak mendapat kemudahan jika sudah menggunakan Kartu Tani ini, seperti mendapatkan akses pembiayaan dengan perbankan di bawah BUMN, mendapat kemudahan kredit murah melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau. Selain itu, kartu ini juga dapat memfasilitasi kemudahan sertifikasi tanah melalui skema Prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kartu Tani tersebut akan berisi data petani baik lahan maupun masa tanam sehingga akan diketahui dengan mudah kapan para petani akan memanen. Kartu Tani tersebut merupakan bagian sinergi antara bank-bank BUMN (Himbara) dengan Perum BULOG, Perhutani, PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) atau PIHC.



INKLUSI KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

Manfaat Bagi Pemerintah



Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (*e-wallet*). Keunggulan dari Kartu Tani ini antara lain *single entry data*, proses validasi berjenjang secara *online*, transparan, multifungsi. Kartu Tani ini juga bisa digunakan sebagai database para petani sehingga petani dapat mengetahui kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian (saprotan) bersubsidi/non-subsidi, termasuk distribusi pupuk.





Pada tahap awal, tahun 2016, Kartu Tani diimplementasikan kepada para petani tebu, dan pada tahun 2017 telah dilakukan distribusi ke sejumlah 2.835.403 petani yang terdapat di 35 Kabupaten/ Kota dan 8.790.607 Petani yang terkomputerisasi. Implementasi Kartu Tani ini terus akan dilaksanakan sehingga seluruh petani di Indonesia pada akhirnya dapat memanfaatkan Kartu Tani untuk menopang aktivitas pertanian.

Pembagian wilayah tanggung jawab



Bank BRI Banten

- Jumlah petani terkomputerisasi (PIHC): 325.154 Petani
- Jumlah petani terverifikasi & validasi (Dinas Pertanian): 194.455 petani
- Jumlah kartu di cetak (BRI): 194.453 Kartu
- Jumlah Pengecer (PIHC): 563 Kios
- Jumlah EDC terpasang (BRI): 389 EDC



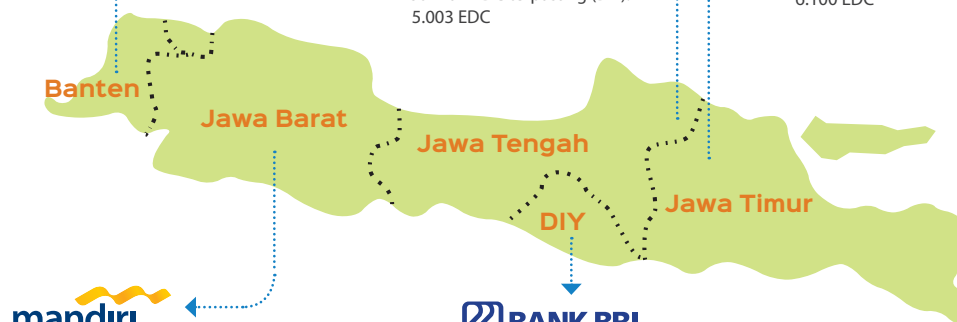
Bank BRI Jawa Tengah

- Jumlah petani terkomputerisasi (PIHC): 2.577.391 Petani
- Jumlah petani terverifikasi & validasi (Dinas Pertanian): 2.395.451 petani
- Jumlah kartu di cetak (BRI): 2.395.431 Kartu
- Jumlah Pengecer (PIHC): 5.850 Kios
- Jumlah EDC terpasang (BRI): 5.003 EDC



BNI Jawa Timur

- Jumlah petani terkomputerisasi (PIHC): 3.976.988 Petani
- Jumlah petani terverifikasi & validasi (Dinas Pertanian): 2.145.007 petani
- Jumlah kartu di cetak (BNI): 1.708.898 Kartu
- Jumlah Pengecer (PIHC): 6.885 Kios
- Jumlah EDC terpasang (BNI): 6.100 EDC



Mandiri Jawa Barat

- Jumlah petani terkomputerisasi (PIHC): 1.754.968 Petani
- Jumlah petani terverifikasi & validasi (Dinas Pertanian): 1.0235.340 petani
- Jumlah kartu di cetak (Bank Mandiri, BNI, BRI): 1.029.085 Kartu
- Jumlah Pengecer (PIHC): 563 Kios
- Jumlah EDC terpasang (Bank Mandiri, BNI, BRI): 1.433 EDC



Bank BRI Jawa Tengah

- Jumlah petani terkomputerisasi (PIHC): 156.106 Petani
- Jumlah petani terverifikasi & validasi (Dinas Pertanian): 284.090 petani
- Jumlah kartu di cetak (BRI): 284.090 Kartu
- Jumlah Pengecer (PIHC): 277 Kios
- Jumlah EDC terpasang (BRI): 195 EDC

Keterangan:
Khusus untuk Jawa Barat: PIC
Tasikmalaya: BRI
PIC GARUT: BNI

Program ke Depan

1. Proses verifikasi dan validasi
Dari 8,8 juta petani yang terkomputerisasi oleh PIHC baru 6,0 juta petani yang terverifikasi dan validasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data petani yang terkomputerisasikan oleh PIHC perlu dipastikan keberadaan petaninya dan dibuktikan melalui identitas KTP dan nama ibu kandung.
2. Penyesuaian Peraturan
Dalam masa transisi perubahan dari penebusan pupuk bersubsidi berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi Kartu Tani diperlukan adanya

penyesuaian semua peraturan yang terkait dengan pupuk bersubsidi (Permentan, Permendag, Permenkeu) agar pelaksanaan penagihan subsidi pupuk oleh produsen pupuk dapat diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3. Sosialisasi pemakaian kartu tani
Pada saat ini masih banyak petani yang belum menggunakan kartu tani karena kartu tani merupakan hal yang baru bagi petani dan petani tidak terbiasa menggunakan transaksi melalui perbankan. Untuk itu diperlukan sosialisasi pemakaian kartu tani yang intensif oleh Perbankan bersama-sama dengan Dinas Pertanian dan PIHC.



INKLUSI KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

HUTAN SOSIAL

Tujuan program Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan hutan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Masyarakat dapat mengelola perkebunan tanaman dalam area yang diajukan, yang hasil panen dari perkebunan tersebut dapat kemudian dijual oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Sampai dengan tahun 2017, sudah terdapat 22 pengajuan yang disetujui untuk dikelola, dengan total tanah sekitar 10ribu hektar dari 5.397 Kepala Keluarga.

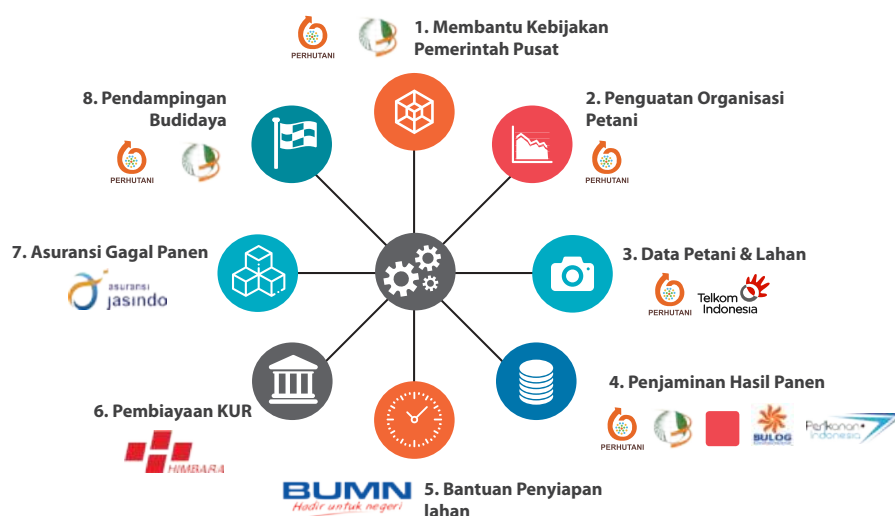
Di Indonesia terdapat ± 25.863 Desa yang berada di dalam kawasan hutan, di mana $\pm 70\%$ di antaranya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan. Sebanyak $\pm 10,2$ Juta penduduk belum sejahtera di kawasan hutan dan tanpa aspek *legal* mengelola sumber daya hutan. Atas dasar tersebut, Presiden

RI meminta agar hutan harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Maka dari itu, dicanangkanlah Program Perhutanan Sosial.

Sebelum Program Perhutanan Sosial, Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Konsep perhutanan sosial akan memberikan aspek *legal* masyarakat menanam di hutan rakyat.

Dalam Program Perhutanan Sosial ini, terdapat sinergi antar BUMN sebagai bentuk dari Komitmen BUMN hadir untuk Negeri. Keseluruhan kegiatan dan tata laksana Perhutanan Sosial ini mendapat dukungan penuh dari BUMN sesuai bidangnya yang bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam bisnis proses terintegrasi.

Gambar Kegiatan dan Tata Laksana Perhutanan Sosial



Manfaat Perhutanan Sosial bagi Masyarakat:

1. Mendapat kepastian mengenai lokasi lahan garapan dan jangka waktu hak garap;
2. Memperoleh akses sumber pendanaan KUR perbankan;
3. Mendapatkan kepastian pasar/serapan hasil produksi;
4. Mendapatkan pembinaan intensif dari Departemen terkait serta perbankan;
5. Berpeluang mendapatkan subsidi Saprotan;
6. Mendapatkan area pengelolaan lahan yang lebih ekonomis (2Ha per orang);
7. Pendapatan tambahan yang lebih baik dan pasti kepada penggarap.

Adapun realisasi Program Perhutanan sampai dengan tahun 2017 adalah sebagaimana yang terlampir pada tabel di bawah ini:



Tabel Realisasi Program Perhutanan sampai dengan Tahun 2017

Uraian	Target	SK IPHPS/ Kulin KK sudah terbit	SK Sudah Diserahkan Presiden	SK Belum Diserahkan	Proses Verifikasi
Jumlah Lokasi	66 Lokasi	36 Lokasi (54%) 12 Lokasi IPHPS 24 Lokasi Kulin KK	22 Lokasi (33%) 11 Lokasi IPHPS 11 Lokasi Kulin KK	14 Lokasi (21%) 1 Lokasi IPHPS 13 Lokasi Kulin KK	30 Lokasi (46%)
Luas	43.991,08 Ha	13.169,74Ha (30%)	10.095,19Ha (23%)	3.074,55 Ha (7%)	30.821,34 Ha (70%)
Penggarap	15.808KK	7.982 KK (50%)	5.388 KK (34%)	2.594 KK (16%)	7.826 KK (50%)

Sementara untuk tahun 2018, diharapkan Program Perhutanan Sosial ini dapat menjangkau lebih banyak petani/penggarap di berbagai lokasi dan dengan wilayah yang lebih luas. Dengan jangkauan yang lebih luas, masyarakat sekitar kawasan hutan diharapkan dapat mendapatkan manfaat ekonomi dan lebih sejahtera dari sebelumnya dengan status yang lebih baik. Pelibatan sinergi BUMN dalam program ini semakin menunjukan wujud nyata dari BUMN Hadir Untuk Negeri.

PADAT KARYA TUNAI

Sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian BUMN menyelenggarakan program Padat Karya Tunai (PKT). Program PKT merupakan program yang mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal desa.

Tujuan program PKT adalah membangun dan menyediakan sarana serta prasarana infrastruktur lingkungan yang menunjang tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi daerah tersebut dengan melibatkan masyarakat setempat.

Sampai saat ini, jumlah dana yang tersalurkan untuk keseluruhan program Padat Karya Tunai sebesar Rp3,37 miliar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 7.523 tenaga kerja.

Kegiatan PKT, dilakukan dengan cara/metode berupa:

1. BUMN membuat perencanaan yang mencakup tujuan, struktur organisasi proyek, waktu pelaksanaan, jumlah tenaga kerja yang dilibatkan, design pekerjaan, Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan waktu pembayaran upah kepada masyarakat.
2. BUMN melakukan koordinasi dengan Dinas atau perangkat daerah setempat.
3. BUMN memastikan bahwa lokasi PKT tidak menerima bantuan dana APBN/APBD.
4. BUMN harus memastikan penanganan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja

konstruksi, proses produksi dan lingkungan di sekitar tempat kerja

5. Kriteria pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam kelompok PKT apabila pekerjaan tersebut telah memperhitungkan rasio penggunaan tenaga kerja yang melibatkan minimal 300 masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan KTP. Pimpinan proyek memastikan bahwa masyarakat yang terlibat memang berasal dari warga setempat.
6. Sebelum PKT dimulai, BUMN melaksanakan hal sebagai berikut:
 - a. BUMN memberikan pendidikan/pelatihan singkat terkait skills untuk melakukan PKT.
 - b. BUMN menunjuk pimpinan proyek/mandor yang berasal dari masyarakat sekitar yang mempunyai pengalaman sebagai pimpinan proyek/mandor.
 - c. BUMN menunjuk pengawas yang berasal dari masyarakat dengan rasio 1 pengawas memantau 20 pekerja.
7. Upah untuk masyarakat menggunakan standar upah di wilayah tersebut.
8. Pembayaran upah kepada masyarakat dilakukan oleh BUMN yang mempunyai cabang di wilayah PKT. Apabila tidak ada BUMN di wilayah tersebut, maka pembayaran dilakukan oleh masyarakat setempat yang ditunjuk sebagai bendahara atau pengelola keuangan. Pembayaran dilakukan atas dasar laporan pelaksanaan pekerjaan dari pengawas. Pada saat pembayaran dibuat bukti tanda terima penerimaan upah dan dikumpulkan sampai dengan akhir pengerjaan.
9. BUMN menyediakan bahan baku dan material bangunan, sesuai dengan SOP yang berlaku di masing-masing BUMN.
10. Dalam hal pembangunan, BUMN diwajibkan untuk menggunakan tenaga masyarakat sekitar, tidak diperkenankan menyewa pihak ketiga (kontraktor/tenaga lainnya) dalam melakukan pembangunan.
11. Setelah pekerjaan selesai, pimpinan proyek membuat laporan yang mencakup kualitas, waktu pelaksanaan, dokumentasi (foto dan video) sebelum dan sesudah, penggunaan biaya termasuk bukti transaksi.

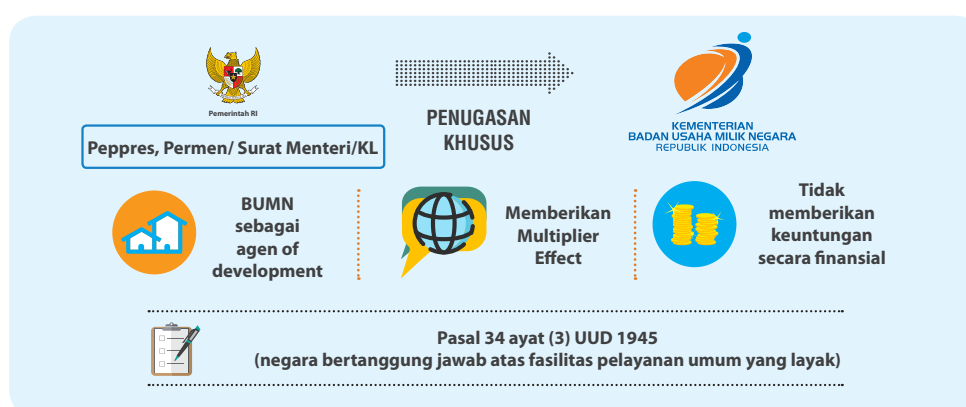


PELAKSANAAN FUNGSI PSO



PSO (*Public Service Obligation*) di Indonesia merupakan salah satu jenis subsidi yang terus meningkat setiap tahunnya. PSO di Indonesia dilatarbelakangi disparitas (perbedaan) harga pokok penjualan baik BUMN maupun swasta dengan harga yang ditetapkan Pemerintah agar pelayanan produk atau jasa terjamin dan terjangkau oleh publik.

Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap mempertahankan maksud dan tujuan kegiatan BUMN itu sendiri. Pemerintah harus berperan dalam kegiatan yang memberikan *multiplier effect* secara ekonomi bagi masyarakat meskipun tidak memberikan keuntungan secara finansial bagi BUMN. Meskipun PSO merupakan bagian dari subsidi tetapi ada perbedaan baik pengertian maupun mekanisme penyaluran dan kepada siapa PSO diberikan.



Dasar hukum PSO adalah Undang-Undang RI No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat 1. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tersebut, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap

memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak visibel, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.



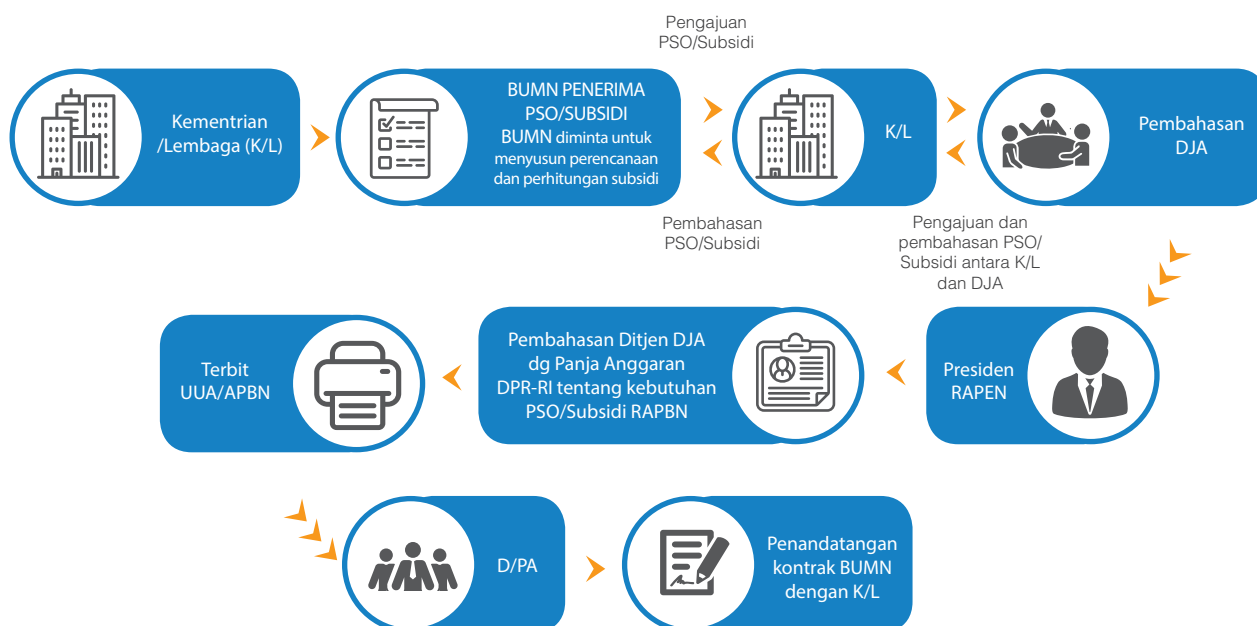


Berkaitan dengan tujuan mensejahterakan rakyat banyak, BUMN mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengingat BUMN merupakan perwujudan dari peran negara untuk mensejahterakan rakyat berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Penugasan PSO pada BUMN ini diharapkan dapat tetap memelihara kesehatan dan kesinambungan usaha BUMN pelaksana PSO.

Mekanisme penugasan dan pelaksanaan PSO pada BUMN telah terlaksana secara efektif, efisien, sehat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai aktivitas pelayanan umum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sumber anggaran penugasan PSO merupakan komponen biaya yang dimasukkan dalam APBN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Alur Penyusunan & Pencairan PSO/Subsidi

ALUR PENYUSUNAN ALOKASI PAGU DANA PSO/SUBSIDI



ALUR PENCAIRAN DANA PSO/SUBSIDI

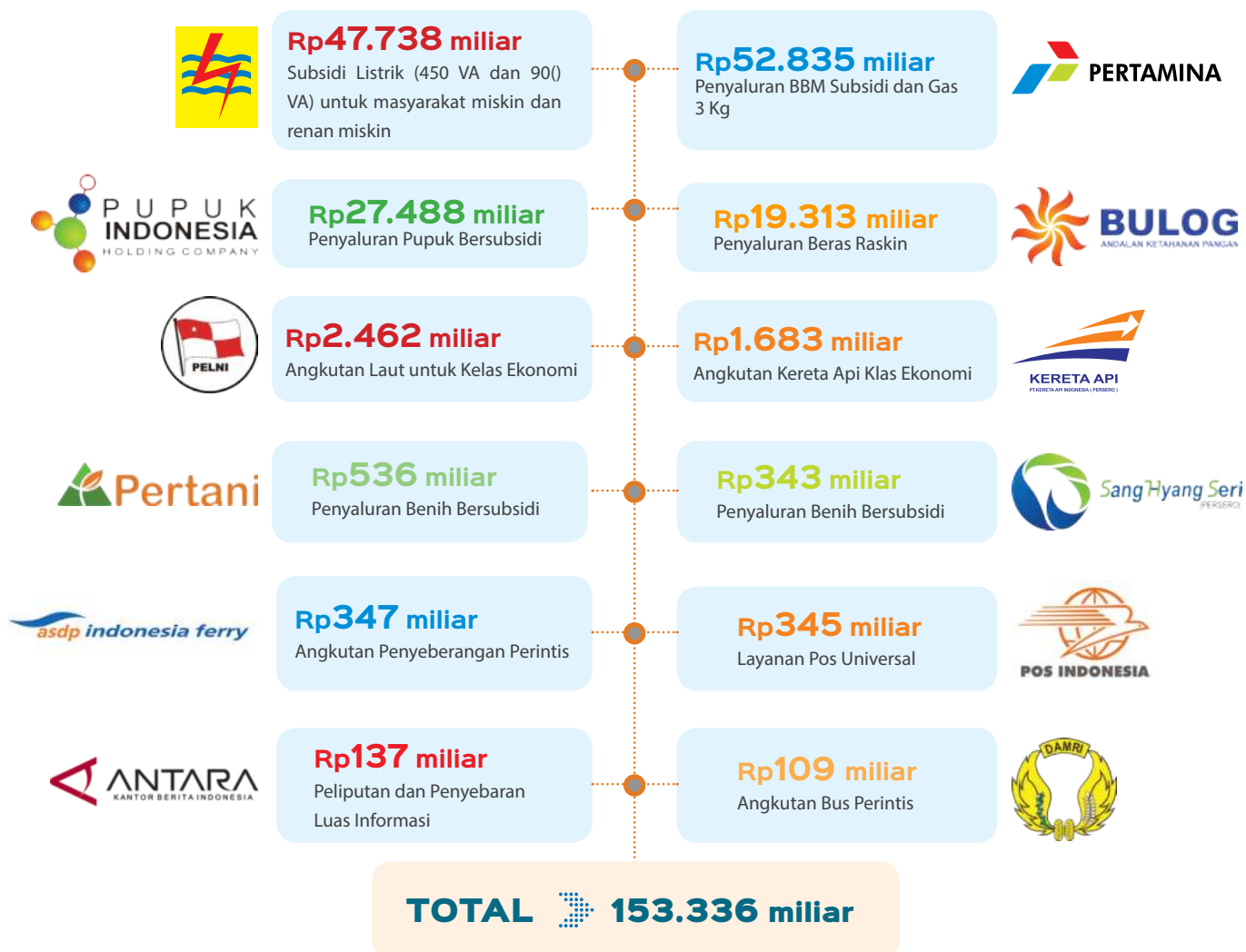




PELAKSANAAN FUNGSI PSO

Untuk tahun 2017, terdapat 12 BUMN yang melaksanakan program atau fungsi PSO, diantaranya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum BULOG, PT Pelni, PT KAI, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT ASDP, PT POS Indonesia, Perum LKBN Antara, dan Perum DAMRI. Total keseluruhan dana PSO pada tahun 2017 untuk 12 BUMN tersebut tercatat sebesar Rp153.336 miliar, yang digunakan oleh ke-12 BUMN tersebut untuk memberikan pelayanan produk atau jasa yang terjangkau bagi masyarakat.

AUDIT TAHUN 2017





BBM 1 HARGA



Sebagai bentuk dari keadilan sosial dalam pemerataan kesempatan memperoleh BBM, BUMN pun telah mewujudkan program “BBM Satu Harga” pada tahun 2016 melalui PT Pertamina (Persero), sehingga harga BBM di Papua yang awalnya sebesar Rp15.000 hingga Rp25.000 per liter-nya, kini harganya bisa menjadi sama dengan yang di Pulau Jawa. Hal ini merupakan sebuah capaian yang pertama kalinya terjadi sejak Indonesia merdeka.

Pertamina terus melanjutkan komitmennya untuk melaksanakan penugasan Pemerintah untuk mendistribusikan BBM Satu Harga di wilayah-wilayah 3T (terpencil, terluar dan tertinggal) dalam rangka pemerataan dan asas keadilan. Pelaksanaan tugas BBM Satu Harga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor: 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu harga Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.



BBM 1 HARGA

Jenis BBM yang diatur terdiri dari Jenis BBM tertentu (JBT) yaitu minyak solar (*gas oil*) 48 dan minyak tanah (*kerosene*), dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yaitu bensin (*Gasoline*) RON 88. Harga dasar dan harga jual eceran JBT dan JBKP ditetapkan oleh Menteri ESDM. Badan usaha penerima penugasan wajib menerapkan harga jual eceran yang ditetapkan Menteri ESDM. Penyaluran oleh badan usaha penerima penugasan melalui penyalur yang ditunjuk. Apabila belum terdapat penyalur di lokasi tertentu, maka badan usaha wajib menunjuk penyalur baru. Lokasi BBM Satu Harga ditentukan oleh Dirjen Migas. Biaya distribusi dari lokasi suplai ke lokasi penyalur tidak menjadi beban penyalur, melainkan beban Badan Usaha Penerima Penugasan.

Di satu sisi kebijakan ini memberi peluang bagi Pertamina untuk dapat berpartisipasi mendistribusikan BBM ke seluruh pelosok negeri dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, biaya distribusi BBM Satu Harga ke lokasi-lokasi dengan infrastruktur darat dan laut yang terbatas

atau bahkan belum tersedia, menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina karena jika *volume* BBM yang diangkut tidak optimal, maka beban biaya distribusi/ongkos angkut per liter BBM menjadi sangat tinggi.

Penugasan ini merupakan salah satu peran Pertamina sebagai BUMN untuk memastikan ketersediaan pasokan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia hingga ke pelosok negeri. Program BBM Satu harga di daerah 3T ini sebagai bagian dari kontribusi penting Pertamina yang telah diberi mandat untuk mendistribusikan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Untuk merealisasikannya, Pertamina menggunakan berbagai moda transportasi baik darat, laut maupun udara, *at any cost*, agar masyarakat di daerah 3T bisa mendapatkan BBM dengan harga sama dengan daerah lainnya. Pertamina meyakini, Program BBM Satu Harga akan memberikan dampak bermakna bagi peningkatan produktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T.

Program BBM Satu Harga dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

Bangun Lembaga Penyalur
Membangun Lembaga penyalur di wilayah yang belum terdapat penyalur
Peningkatan Storage Capacity
Meningkatkan kapasitas storage Lembaga penyalur di wilayah terpencil
Pembangunan Infrastruktur
Percepatan pembangunan infrastruktur darat dan laut/dermaga oleh Pemerintah

Pertamina menyadari bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati BBM dengan harga yang sama, terutama di daerah 3T. Oleh karena itu, di tahun 2017 Pertamina mengimplementasikan Program Kebijakan BBM Satu Harga dengan lebih agresif. Pada tanggal 27 Desember 2017, Pertamina telah berhasil menyalurkan BBM Satu Harga di 54 titik daerah 3T sebagaimana yang telah direncanakan pada awal tahun 2017. Dengan demikian, masyarakat di kawasan 3T kini dapat menikmati BBM dengan harga yang sama dengan masyarakat di perkotaan.



Realisasi program BBM Satu Harga pada tahun 2017 untuk 54 unit SPBU di daerah 3T tersebut, yaitu 11 titik di Sumatera, 3 titik di Jawa dan Bali, 3 titik di Nusa Tenggara, 11 titik di Kalimantan, 5 titik di Sulawesi, 21 titik di Maluku dan Papua. Program ini ditargetkan akan mencapai sebanyak 150 SPBU yang tersebar di 148 Kota/Kabupaten, pada tahun 2019.



Roadmap Indonesia Satu harga BBM

INDONESIA SATU HARGA 2017

Telah Dilaksanakan di **54 Titik** Sesuai Target Dari Pemerintah

Sinkronisasi Regulasi > Pendirian Lembaga Penyalur Wilayah 3T (150 titik)

2017

Di wilayah dengan infrastruktur
darat dan laut cukup baik
Target: 54 Titik

2018

Di wilayah dengan infrastruktur
darat dan laut terbatas
Target: 50 Titik

2019

Di wilayah dengan infrastruktur darat
dan laut cukup sulit. Belum ada.
Target: 46 Titik



Program satu harga ini juga akan dikembangkan untuk produk-produk yang lainnya, seperti semen, beras, gula dan minyak goreng melalui aktivitas sinergi BUMN dengan harapan bisa diwujudkan sebelum akhir tahun 2019.



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN



Kementerian BUMN dan BUMN sebagai bagian dari masyarakat bernegara, telah melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara berkesinambungan yang direalisasikan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program BUMN Hadir Untuk Negeri.

Dasar Hukum pelaksanaan program PKBL adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara di mana Pasal 2, huruf e salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat”. Atas dasar tersebut, terbit Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 jo PER-02/MBU/07/2017 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Sementara tujuan dari “Program BUMN hadir Untuk Negeri” adalah Untuk menanamkan rasa bangga sebagai bangsa yang memiliki keragaman kekayaan Nusantara serta sebagai wujud nyata peran BUMN di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan difasilitasi oleh seluruh BUMN yang memiliki wilayah kerja di 34 Provinsi seluruh Indonesia, juga menjadi bagian dalam “membangun pemahaman para pemangku kepentingan (stakeholders)” mengenai peran Kementerian BUMN dan BUMN sebagai Agen Pembangunan (*Agent of Development*) untuk turut serta “Membangun Kapasitas Nasional (*National Capacity Building*)”.

1. Penyaluran PKBL

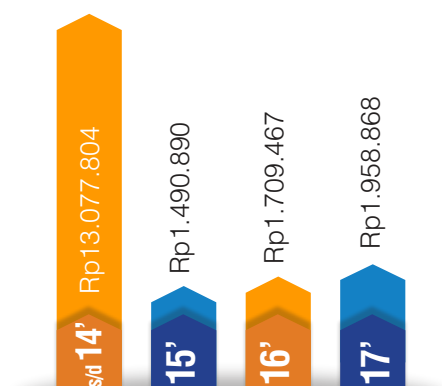
Program Kemitraan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dengan cara penyaluran pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Di tahun 2017, telah disalurkan dana Program Kemitraan sebesar Rp1,96 triliun kepada 45.303 mitra binaan yang disalurkan pada sektor sebagai berikut:

- Sektor perdagangan sebesar 33,20%
- Sektor pertanian sebesar 15,69%
- Sektor Industri sebesar 12,18%
- Sektor jasa sebesar 12,30%
- Sektor perkebunan sebesar 10,61%
- Sektor peternakan sebesar 8,38%
- Sektor lainnya sebesar 4,12%
- Sektor perikanan sebesar 3,51%
- Peningkatan kapasitas mitra binaan sebesar 0,03%.

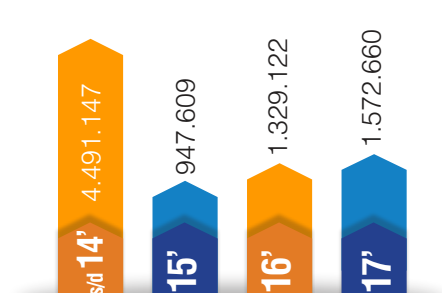
Program Bina Lingkungan (BL) merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN yang disalurkan dalam bentuk bantuan untuk korban bencana alam, peningkatan kesehatan, bantuan pendidikan/pelatihan, pembangunan sarana ibadah, pelestarian lingkungan/alam, pembangunan sarana/prasarana umum dan pengentasan kemiskinan. Di tahun 2017, telah disalurkan dana Bina Lingkungan sebesar Rp1,57 triliun yang terdiri dari:

- Korban bencana alam sebesar 1,79%
- Peningkatan kesehatan sebesar 6,11%
- Bantuan Pendidikan/pelatihan sebesar 24,71%
- Bantuan peningkatan kapasitas mitra binaan sebesar 0,41%
- Pembangunan sarana ibadah sebesar 17,05%
- Pelestarian lingkungan/alam sebesar 2,03%
- Pembangunan sarana/prasarana umum sebesar 23,46%
- Pengentasan kemiskinan sebesar 24,44%

Data penyaluran Program Kemitraan 2015-2017



Data Penyaluran Bina Lingkungan 2015-2017





2. Pelaksanaan BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2017

Salah satu bentuk komitmen dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tersebut adalah pelaksanaan BUMN Hadir Untuk Negeri yang telah dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN pada 2017 sebagai rangkaian peringatan HUT RI oleh BUMN di seluruh provinsi di Indonesia dengan program sebagai berikut:



a. Kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI

Kegiatan ini terdiri dari Upacara Peringatan HUT RI ke-72 tanggal 17 Agustus 2017 yang diselenggarakan serentak di 34 Provinsi, Jalan Sehat 5 kilometer dengan melibatkan 129.527 peserta jalan sehat di 34 Provinsi dan Pembersihan Lingkungan di Provinsi setempat.



b. Bedah Rumah Veteran (BRV)

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rasa penghargaan BUMN pada para veteran atas jasa-jasanya yang telah memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Di Tahun 2017, ditargetkan sebanyak 1.644 dengan realisasi 1.802 rumah.



c. BUMN Hadir di Kampus (BHDK)

Kegiatan ini dilaksanakan serentak pada tanggal 28 Oktober 2017 dalam bentuk Diskusi Ilmiah dan Kuliah Umum yang penyelenggaraannya bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) oleh 63 BUMN. Peserta BUMN Hadir di Kampus sebanyak 28.063 mahasiswa, termasuk pemberian beasiswa pendidikan kepada 1.168 mahasiswa.



d. Kegiatan Siswa Mengenal Nusantara (SMN)

Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa bangga dan cinta Tanah Air sejak dini kepada siswa SMA/SMK/SLB dengan cara pertukaran pelajar dari 1 provinsi ke provinsi lain. Keragaman kekayaan Nusantara dan potensi daerah diperkenalkan melalui interaksi langsung siswa dengan komponen pemerintahan dan masyarakat di provinsi yang dikunjungi 2017 berlangsung pada bulan Juli-Agustus 2017 di 34 provinsi. Jumlah total peserta SMN sebanyak 752 orang, 65 diantaranya merupakan siswa/i difabel.



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Realisasi pelaksanaan BUMN Hadir Untuk Negeri sebagai berikut :

BUMN hadir untuk Negeri dalam rangka HUT RI ke-72 dilaksanakan oleh 98 BUMN di 34 Provinsi dengan kegiatan dan realisasi capaian sebagai berikut:

No	Kegiatan	
1	Bedah Rumah Veteran	1.802 rumah
2	BUMN Hadir di Kampus	28.063 orang
3	Siswa Mengenal Nusantara	752 siswa
4	Upacara	di 34 kota/kabupaten di luar Ibukota provinsi
5	Jalan Sehat	129.527 orang
6	Pembersihan Lingkungan	34 Ibukota provinsi







TANTANGAN KE DEPAN



TANTANGAN KE DEPAN

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah mengamanatkan agar BUMN dapat berperan aktif dalam pengembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya serta mengejar keuntungan. Selain itu, BUMN juga ditugaskan untuk memberikan layanan publik, mengisi kegiatan-kegiatan usaha yang dibutuhkan masyarakat, serta membina ekonomi masyarakat kecil atau golongan lemah. Atas dasar UU tersebut, BUMN sebagai entitas usaha milik negara mengemban amanat ganda. Pertama, sebagai Agen Pencipta Nilai yang menyumbang pendapatan untuk negara. Kedua, sebagai Agen Pembangunan yang bertugas menjadi perpanjangan tangan negara untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. BUMN juga menjadi perintis untuk sektor strategis yang masih minim keterlibatan swasta karena risikonya sangat tinggi. Tugas tersebut membuat BUMN harus gesit melihat peluang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan informasi yang terjadi.

EKONOMI TAHUN 2018

Pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2018 oleh lembaga dunia diperkirakan akan bergerak pada tingkat yang sama dengan tahun sebelumnya dimana ekonomi negara-negara maju yang akan melambat pada tahun 2018. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dunia akan lebih terdorong oleh ekonomi negara-negara berkembang seperti India, Rusia dan Cina. Perbaikan ekonomi dari negara-negara berkembang diharapkan menjadi tujuan bagi komoditas ekspor Indonesia ke negara tersebut.

World Bank memproyeksikan harga komoditas selain minyak bumi seperti batubara, minyak kelapa sawit, nikel, timah dan bijih besi akan bergerak relatif stabil di tahun 2018 dibandingkan dengan harga di tahun 2017. Sementara harga minyak bumi diperkirakan akan lebih tinggi di tahun

2018 dibandingkan tahun 2017. Sebagai net importer minyak bumi dan dengan perkiraan harga minyak bumi yang menanjak, maka Indonesia berpotensi lebih banyak mengimpor komoditas migas. Tingginya harga minyak akan meningkatkan defisit neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, meningkatnya harga minyak bumi dapat memicu bertambahnya tekanan inflasi terutama apabila pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak yang bersubsidi dan tarif listrik (*administered price*). Kenaikan inflasi akan mengurangi kemampuan konsumsi (daya beli) masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2018, ekonomi Indonesia diperkirakan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2017, dengan target pertumbuhan PDB di APBN sebesar 5,4%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan disumbang oleh penguatan sektor riil dengan stabilnya pengeluaran rumah tangga dan peningkatan kinerja ekspor. Sejumlah faktor yang diperkirakan akan berkontribusi pada pertumbuhan PDB antara lain peningkatan harga komoditas, postur APBN dengan porsi pengeluaran untuk dana transfer ke daerah yang lebih besar, serta kondisi politik yang diharapkan cukup stabil dengan pelaksanaan Pilkada serentak serta persiapan Pemilu 2019.

TANTANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Di sisi lain, tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Terkait hal tersebut, Kementerian BUMN melihat terdapat 5 (lima) tantangan untuk mendorong pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Tantangan Pembangunan Berkelanjutan



Inequality Development

Pembangunan yang belum merata serta masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia



Ketahanan Energi dan Pangan

Tingginya ketergantungan terhadap impor energi dan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik



Infrastruktur dan Industri Dasar

Lemahnya daya saing infrastruktur dan manufaktur; Ketergantungan terhadap impor *material cost*



Akses Layanan Keuangan

Akses layanan keuangan masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lainnya



Sumber Daya Manusia

Jumlah tenaga kerja terdidik dan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah dibandingkan tenaga kerja regional



TANTANGAN KE DEPAN

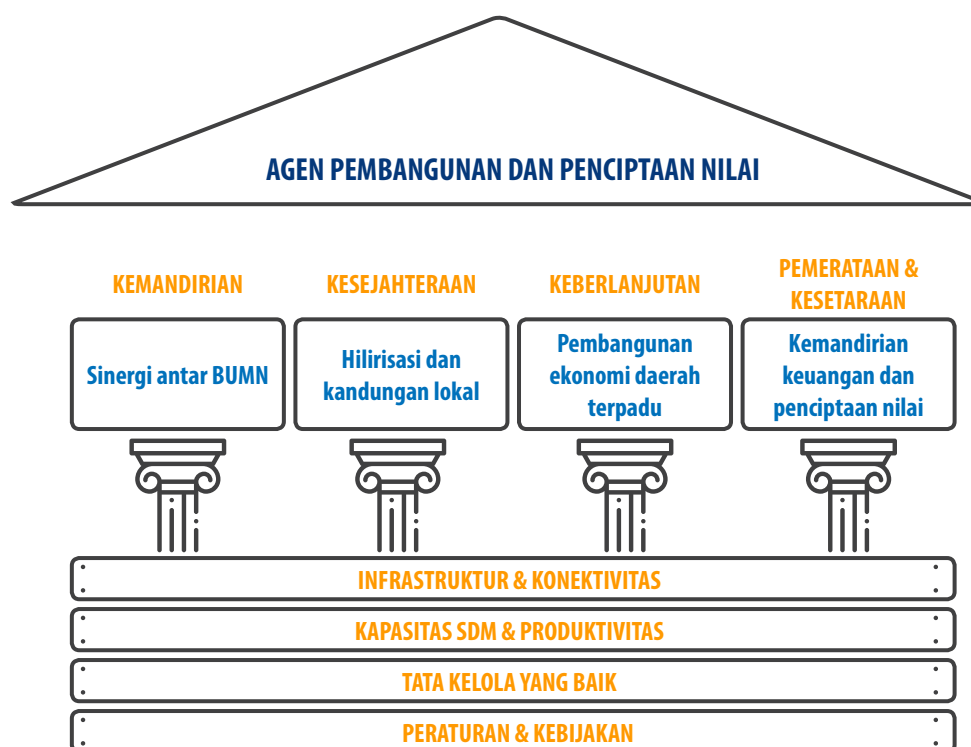
BUMN harus selalu hadir di tengah masyarakat, yang tertuang dalam bentuk pelayanan publik dan realisasi pelaksanaan program-program serta kegiatan prioritas nasional, baik berupa pembangunan secara *hard skill* maupun *soft skill*. Presiden Joko Widodo juga menekankan agar BUMN mampu menjaga keberlangsungan usaha (*sustainability*) hingga 100 tahun ke depan atau lebih sehingga kelak BUMN dapat menjadi kebanggaan dan dapat diwariskan kepada anak cucu bangsa. Kunci untuk mencapai keberlangsungan usaha adalah dengan mengedepankan integritas dan profesionalisme serta memegang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga kegiatan usaha yang dijalankan BUMN dapat menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan (*value of the firm*) yang pada ujungnya meningkatkan nilai investasi permanen Pemerintah.

STRATEGI KEMENTERIAN BUMN

Dalam situasi dan kondisi di mana Aparatur Sipil Negara yang dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya, tugas Kementerian BUMN dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, dengan Sistem Manajemen Kinerja yang akan terus disempurnakan, aparatur Kementerian BUMN akan berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Dalam rangka untuk menjawab tantangan ke depan, Kementerian BUMN telah menyusun strategi melalui *roadmap* yang dilandaskan pada visi BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai.

Framework Roadmap BUMN



Strategi BUMN guna menjawab tantangan ke depan terangkum dalam 4 "*strategic pillars*" yang di susun per sektor industri sesuai dengan fokus Pemerintah dengan melibatkan seluruh BUMN yang berkontribusi di dalamnya. Di mana dari 4 pilar strategi tersebut, Kementerian BUMN selaku pembina BUMN tengah menyiapkan langkah-langkah strategis guna menjawab tantangan ke depan.



Strategic Pillars



Sinergi BUMN

- Sejumlah BUMN yang termasuk dalam kelompok rantai nilai serupa bekerja bersama guna mengoptimalkan hasil dan mengurangi redundansi
- Kolaborasi atau konsolidasi atas fungsi-fungsi yang serupa (misalnya *corporate university*, rumah sakit/klinik) antar BUMN guna merealisasikan skala ekonomi, mengurangi redundansi dan inkonsistensi dan mendorong tercapainya *best practices*



Hilirisasi & Kandungan Lokal

- BUMN meningkatkan fokus untuk berperan serta dalam pengembangan produk-produk hilir (yang lebih menambah nilai - *value add*) yang berada di dalam rantai nilai yang sama
- BUMN meningkatkan peran serta dalam pengembangan produk "input/pendukung" (bahan aktif, suku cadang, mesin, dan lain-lain.) yang diperlukan oleh beragam BUMN secara domestik



Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu

Berbagai BUMN bekerja sama secara efektif untuk menggerakkan pengembangan ekonomi di kawasan terpilih melalui pelaksanaan proyek-proyek yang berpotensi menciptakan dampak "*spill over*" atau turut menyumbang PDB lokal (melalui penciptaan lapangan kerja, ketersediaan infrastruktur/konektivitas)



Kemandirian Keuangan & Penciptaan Nilai

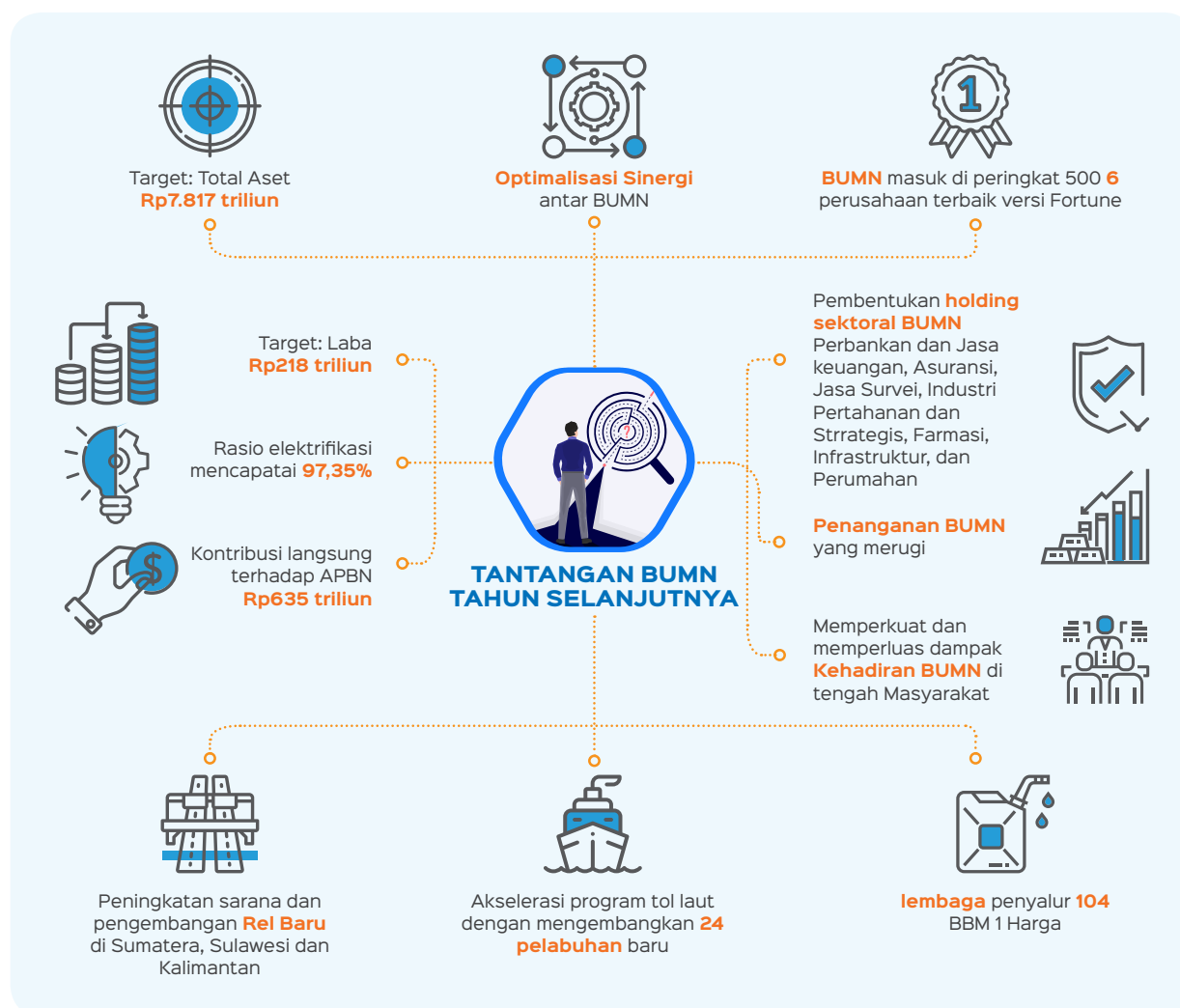
BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu menciptakan manfaat finansial, di luar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri

BUMN SEBAGAI PENCIPTA NILAI

Saat ini terdapat 115 BUMN dan 27 Eks BUMN yang tersebar dalam 13 sektor industri, yang artinya memberikan peluang sinergi BUMN sehingga dapat mendorong pembangunan terintegrasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis nasional di semua penjuru Tanah Air. Sebagai entitas ekonomi yang dimiliki oleh negara, BUMN memiliki tanggung jawab besar agar keberadaannya bisa bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.



TANTANGAN KE DEPAN



SINERGI WUJUDKAN PEMBANGUNGAN NEGERI BERKELANJUTAN

Laporan Tahunan 2017

■ Kantor Pusat :
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

■ Online ■
Website: www.iigf.co.id

Phone & Fax
Phone: 021-29935678
Fax: 021-29935740



www.bumn.go.id